

**PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN MONETER ISLAM**

(Studi Kebijakan Moneter Hizbut-Tahrir)



M. Hatta, SE

NIM: 05913115

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2009

PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF

KEBIJAKAN MONETER ISLAM

(Studi Kebijakan Moneter Hizbut-Tahrir)



Oleh:

M. Hatta, SE

NIM: 05913115

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2009



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 647/PS-MSI/Peng./XI/2009

TESIS berjudul : **PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN MONETER ISLAM (Studi Kebijakan Moneter
Hizbut-Tahrir)**

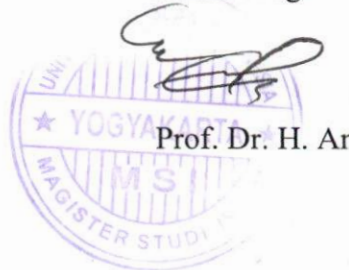
Ditulis oleh : M. Hatta

N. I. M. : 05913115

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Ekonomi Islam

Yogyakarta, 5 Nopember 2009
Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

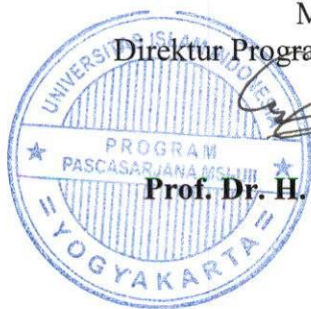
Nama : M. Hatta
Tempat/tgl.lahir : Tumbukan Banyu Nagara, 3 Maret 1983
N. I. M. : 05913115
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN
MONETER ISLAM (Studi Kebijakan Moneter Hizbut-Tahrir)**

Ketua : Drs. H. Asmuni, MA (.....)
Sekretaris : Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec (.....)
Penguji : Dr. H. Supardi, MM (.....)
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2009

Pukul : 08.00–09.00 WIB

Hasil / Nilai : **86,00 / A**



Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 800/PS-MSI/ND/X/2009

TESIS berjudul : **PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF
KEBIJAKAN MONETER ISLAM (Studi Kebijakan Moneter
Hizbut-Tahrir)**

Ditulis oleh : M. Hatta

NIM : 05913115

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 26 Oktober 2009

Ketua Program,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

PERSETUJUAN

Judul Tesis : PENGENDALIAN INFLASI DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN MONETER ISLAM
(Studi Konsep Moneter Hizbut Tahrir)

Ditulis Oleh : M. Hatta, S.E

NIM : 05913115

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Dengan ini telah disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis
Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam
Indonesia.



Yogyakarta, Oktober 2009

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec

MOTTO

لاعزة الا با لاسلام
ولا اسلام الا بتطبيق الشريعة
ولا تطبيق الشريعة كاملا الا بقيام دولة الخلافة الاسلامية

**“ Tiada Kemuliaan Tanpa Islam – Tiada Islam Tanpa Penerapan
Syariah – Dan Tiada Penerapan Syariah Secara Sempurna Tanpa
Tegaknya Dawlah Khilafah Islamiyah”**



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Umat Islam Yang Sedang Berjuang Demi
Diterapkannya Kembali Syariah Islam Secara
Kaffah Di Bawah Lindungan Daulah Khilafah

Islamiyah

&

Keharibaan Abah (Almr) dan Mama, Isteriku
Tercinta Serta Segenap Keluarga Besar

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987
tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	śā	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	-
ح	hā'	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z\	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

II. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dai vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	dammah	ditulis	u

Contoh: كَتَبَ – kataba يَذْهَبُ – yazhabu
سُئِلَ – su’ila زَكَرَ – zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـي	Fathah dan ya	ai	a
◌ِـو	Fathah dan wawu	au	i

Contoh: كَيْفَ – kaifa هَوْلٌ – haula

III. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harjat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـا◌َـي	fathah dan alif atau alif maksūrah	ā	a dengan garis di atas
◌ِـي	kasrah dan ya	ī	a dengan garis di atas
◌ُـو	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قَالَ – qāla قِيلَ – qīla
رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

IV. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta'Marbutah mati

Ta'Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة – Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: روضة الجنة – raudah al-jannah

V. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: ربنا – rabbanā

نعم – nu'imma

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

a. kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرجل – ar-rajulu

السيدة – as-sayyidatu

- b. kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: القلم – al-qalamu الجلال – al-jalālu
 البديع – al-badī’u

VII. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شئى - syai’un امرت - umirtu
 النوء - an-nau’u تأخذون - ta’khuzūna

VIII. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn, atau
Wa innallāha lahuwa lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا لكيل و الميزان - Fa ‘aufū al-kaila wa al-mīzāna, atau
Fa ‘aufūl-kaila wal-mīzāna

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji hanyalah milik Allah Swt semata. Dialah yang telah mengutus Rasulullah Saw dengan membawa Islam sebagai satu-satunya dien yang diridhai-Nya untuk Dia ungulkan di atas semua agama dan ideologi selainnya sekalipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Semoga rahmat dan salam tetap Dia limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai penutup para Nabi, keluarganya, sahabatnya, orang-orang yang mendakwahkan risalah-Nya, dimana mereka menjadikan aqidah Islam sebagai landasan berpikirnya, syaria Islam sebagai tolak ukur perbuatannya dan sekaligus menjadikannya sebagai sumber hukum dan siap berjihad di jalan-Nya hingga hari kiamat.

Alhamdulillah atas karunia dan rahmat Allah Swt jualah, akhirnya penelitian yang berjudul “Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam” dapat diselesaikan.

Penelitian ini pada awalnya adalah sebuah usulan ide dari kakak Taqin kepada penulis. Setelah penulis mencoba mengamati dan menganalisisnya, usulan ide tersebut memang sangat penting dan “menantang” penulis untuk mengkaji dan menelitinya. Terlebih lagi sejauh pengamatan penulis belum ada penelitian sebelumnya yang membahas persoalan inflasi secara mendalam dengan menggunakan perspektif Islam.

Sebagai seorang aktivis Islam, penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk turut serta memberikan sedikit kontribusi keilmuan guna kebangkitan umat Islam yang telah lama dinanti-nantikan.

Layaknya sebuah perjalanan hidup, penelitian ini tidaklah berhasil diselesaikan tanpa ada proses yang cukup panjang dan sumbangsih dari semua pihak. Penulis menghaturkan banyak terima kasih seraya memohon kepada Allah Swt agar semua pihak tersebut mendapatkan ganjaran pahala yang lebih baik, *jazakallah khairan katsira*.

Dalam hal ini, penulis sangat berterimakasih kepada keluarga besar, mama dan semua kakak di Kalimantan Selatan yang memberikan ijin, dorongan, dan berkenan menyiapkan biaya dari awal hingga akhir studi.

Ucapan terimakasih juga tidak lupa penulis haturkan kepada adinda tercinta, Waty Indriani, yang telah memberikan perhatiannya baik berupa dorongan maupun bantuan secara langsung. Begitu pula kiranya kepada mama dan bapak di Balikpapan yang telah ikut mendorong untuk menyelesaikan penelitian ini.

Kepada Bapak Rektor UII, Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, penulis berterimakasih banyak karena telah bersedia untuk menjadi pembimbing, memberi masukan yang membuat semakin termotivasi untuk menyelesaikan penelitian ini sebaik mungkin, dan pada akhirnya menyetujui penelitian ini untuk disidangkan. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Ketua Program MSI UII Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, Sekretaris Program

Bapak Drs. H. Asmuni Mth, MA, dan juga kepada semua staf dan karyawan, serta tak lupa pula Pak Satpam di MSI UII.

Ucapan terimakasih banyak juga penulis haturkan kepada kakak Taqin, atas ide dan masukan yang diberikan, serta kebersedian untuk berbagi pemikiran selama proses penelitian berlangsung.

Terakhir, sebagaimana pepatah mengatakan “Tak ada gading yang tak retak”, penulis berharap kepada semua yang telah membaca penelitian ini untuk sudi kiranya memberikan saran dan kritiknya guna perbaikan dikemudian hari.

Jazakallah Khairan Katsira



Yogyakarta, Oktober 2009

M. Hatta, S.E

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam.....	i
Halaman pengesahan.....	ii
Halaman Tim Penguji Ujian Tesis.....	iii
Halaman Nota Dinas.....	iv
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Pedoman Transliterasi.....	viii
Kata Pengantar.....	xii
Daftar Isi.....	xv
Daftar Tabel	xix
Daftar Gambar.....	xx
Daftar Lampiran.....	xxi
Arti Singkatan.....	xxii
Abstrak (Bahasa Indonesia).....	xxiii
Abstract (Bahasa Inggris).....	xxiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teori.....	14
F. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27

f. Syarat-syarat petugas pelaksana (pegawai) di dalam departemen Moneter.....	129
2. Kebijakan mata uang.....	129
3. Kebijakan sistem nilai tukar (<i>exchange rate system</i>).....	132
4. Kebijakan di sektor keuangan.....	133
B. Potensi terjadinya inflasi dalam sistem ekonomi Islam	
1. Penyelesaian inflasi yang disebabkan oleh perilaku manusia secara Langsung.....	143
2. Penyelesaian inflasi yang disebabkan oleh sistem.....	145
C. Metode implementasi kebijakan moneter Islam	
1. Ketaqwaan individu.....	149
2. Koreksi dan kontrol oleh individu maupun masyarakat.....	150
3. Penerapan syariah Islam secara totalitas oleh Negara.....	151
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	154
Daftar Pustaka.....	156
Riwayat Hidup.....	170
Lampiran.....	173

1. Definisi dan klasifikasi kebijakan moneter.....	66
2. Aspek-aspek kebijakan moneter.....	67
a. Instrumen moneter.....	67
b. Indikator (sasaran antara).....	69
c. Target moneter (sasaran akhir).....	69
3. Pendekatan dalam operasional kebijakan moneter.....	70
4. Hubungan kebijakan moneter dengan perekonomian.....	70
B. Dampak inflasi terhadap sektor riil	
1. Teori inflasi.....	74
2. Dampak inflasi terhadap sektor riil.....	78
C. Dilema Pengendalian Inflasi dalam Kebijakan Moneter Konvensional	
1. Otoritas moneter.....	85
2. Dilema kebijakan pengendalian inflasi.....	89
a. Kebijakan moneter ketat (<i>tight money policy</i>).....	89
b. Kebijakan moneter longgar (<i>loose money policy</i>).....	92
3. Kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia.....	96
D. Sumber Permasalahan Inflasi Pada Sistem Ekonomi Konvensional	
1. <i>Natural inflation</i>	105
2. <i>Unnatural Inflation</i>	106

BAB V PENGENDALIAN INFLASI dan KEBIJAKAN MONETER ISLAM

A. Kebijakan Moneter Islam

1. Otoritas moneter.....	117
a. Sinkronitas sektor moneter Islam dengan sektor riil.....	117
b. Bentuk otoritas moneter Islam.....	123
c. Hubungan departemen moneter dengan Khalifah.....	125
d. Tugas, Wewenang dan tanggung jawab otoritas moneter.	126
e. Strategi pengaturan departemen moneter.....	128

BAB II PEMIKIRAN MONETER dan PERSOALAN HARGA MENURUT PARA ULAMA, EKONOM MUSLIM, dan HIZBUT TAHRIR

A. Pemikiran Moneter dan Persoalan Harga Menurut Beberapa

Ulama

1. Abu Yusuf (731-798 M).....	30
2. Abu Ubaid (150-224 H).....	32
3. Al Ghazali (1058-1111 M).....	33
4. Ibn Taimiyah (1263-1328 M).....	36
5. Ibn Khaldun (1332-1406 M).....	39
6. Al Maqrizi (1364-1442 M).....	41

B. Pemikiran Moneter Menurut Ekonom Muslim Kontemporer dan Hizbut Tahrir

1. Umer Chapra (1933 - Sekarang).....	44
2. Masudul Alam Choudhury.....	47
3. Hizbut Tahrir (1950 - Sekarang).....	50

BAB III HIZBUT TAHRIR dan PEMIKIRANNYA

A. Profil Hizbut-Tahrir

1. Latar belakang pendirian Hizbut Tahrir.....	54
2. Pendiri dan pemimpin Hizbut Tahrir.....	55
3. Perkembangan Hizbut Tahrir saat ini.....	56
4. Buku-buku Hizbut Tahrir.....	57

B. Garis Besar Pemikiran Hizbut Tahrir

1. Problematika umat dalam pandangan Hizbut Tahrir.....	59
2. Solusi problematika umat.....	60
3. Metode Perjuangan Hizbut Tahrir.....	61
4. Kaidah-kaidah Pemikiran Hizbut Tahrir.....	62

BAB IV KEBIJAKAN MONETER KONVENSIONAL dan INFLASI

A. Gambaran kebijakan moneter konvensional

DAFTAR TABEL

Tabel 01	Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (Miliar – Rupiah).....	100
Tabel 02	Perkembangan Indikator Makroekonomi Tahun 1996 – 2000.....	103



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dilema Kebijakan Pengendalian Inflasi dan Akibat Buruk Fiat Money.....	7
Gambar 2	Skema Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi IHK.....	21
Gambar 3	Skema Hubungan antar Variabel Sebagai Kerangka Pikir Penelitian.....	23
Gambar 4	Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dengan Kerangka <i>Inflation Targeting</i>	72
Gambar 5	Skema Interaksi Antara Bank Sentral, Perbankan (Bank Umum) dan lembaga Keuangan Lain, dan Pelaku Ekonomi di Sektor Riil.....	73
Gambar 6	Skema Interaksi Antara Sebab dan Akibat Inflasi	82
Gambar 7	Skema Dilema Kebijakan Moneter Ketat (Interest Rate – Price Spiral).....	92
Gambar 8	Skema Dilema Kebijakan Moneter Longgar	96
Gambar 9	Transmisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah.....	102
Gambar 10	Sumber – sumber Inflasi.....	115
Gambar 11	Mekanisme Hubungan Antara Sektor riil dan Moneter dalam Sistem Ekonomi Islam.....	119
Gambar 12	Peranan Kebijakan Khalifah (Negara) Dalam Menciptakan Pelaku Usaha Demi Kelancaran Gerak Sektor Riil.....	121
Gambar 13	Tugas-tugas Departemen Moneter Serta Hukum Syara dan Masalah yang Hendak diraihnya.....	128
Gambar 14	Pengaturan Sektor Moneter Perspektif Hizbut Tahrir.....	142

GRAFIK

Grafik 01	Perkembangan Rata-rata Inflasi IHK 1975-2002.....	98
Grafik 02	Perkembangan Tingkat Suku Bunga Th 1996 – 2000.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Sumber Data Primer.....	173
Lampiran II	Sumber Data Sekunder.....	175
Lampiran III	Korelasi Kebijakan Moneter dengan Perekonomian.....	177
Lampiran IV	Instrumen Langsung dan Tidak Lansung Pengendalian Moneter.....	178
Lampiran V	Kronologi Terjadinya Krisis Tahun 1997 di Indonesia...	186
Lampiran VI	Skema Kronologi Krisis Asia dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia.....	188
Lampiran VII	Indeks Harga Konsumen Indonesia.....	190
Lampiran VIII	Inflasi Negara-negara Berkembang (1996 – 2000).....	191
Lampiran IX	Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Berkembang (1996 – 2000).....	192
Lampiran X	Perubahan Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (miliar rupiah).....	193
Lampiran XI	Produk Domestik Bruto Menurut Lapangan Usaha (Miliar – Rupiah).....	194
Lampiran XII	Skema Solusi Sistem Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi...	195
Lampiran XIII	Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi.....	196
Lampiran XIV	Fase Sejarah Keruntuhan Moneter Di Barat dan Eropa...	197
Lampiran XV	Struktur Khilafah.....	204
Lampiran XVI	Struktur Qadi Muhtasib.....	206
Lampiran XVII	Peta (Matrix) Pemikiran Moneter dan Persoalan Harga Menurut Para Ulama dan Ekonom Muslim.....	207

ARTI SINGKATAN

1. BI = Bank Indonesia
2. JUB = Jumlah uang Beredar
3. HT = Hizbut Tahrir
4. PT = Perseroan Terbatas
5. PDB = Produk Domestik Bruto
6. SEK = Sistem Ekonomi Kapitalisme atau Konvensional
7. SEI = Sistem Ekonomi Islam
8. SUN = Surat Utang Negara Dengan Mekanisme Syariah (Sukuk)
9. TMP = Tight Money Policy
10. LMP = Loose Money Policy



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN MONETER ISLAM

(Studi Kebijakan Moneter Hizbut Tahrir)

Oleh: M. Hatta

Tingkat inflasi yang mewarnai perekonomian Indonesia dewasa ini cenderung bersifat persisten dan bergerak tak menentu seiring dengan perubahan stabilitas perekonomian dunia. Merespon hal tersebut bank sentral tentunya juga harus mengambil kebijakan moneter yang sesuai dengan perubahan yang ada. Sayangnya bentuk respon yang diambil hanyalah sebatas teknis ekonomi semata, menaikkan dan menurunkan suku bunga atau pengetatan likuiditas. Hal ini sama sekali tidak menyentuh pada masalah utamanya. Akibatnya, solusi dengan berbagai pendekatannya yang diambil tidak bisa menyelesaikan persoalan inflasi sampai pada akarnya.

*Hal ini mendorong penulis untuk mempelajari dan mengangkat penelitian dengan judul *Pengendalian Inflasi Dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam (Studi Kebijakan Moneter Hizbut Tahrir)*. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan memahami bagaimana kebijakan moneter Islam perspektif Hizbut Tahrir dalam menyelesaikan masalah inflasi. Adapun pendekatan dan metode pengolahan serta penganalisisan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fundamental dan metode deskriptif.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengendalian inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter Islam memiliki keunggulan tersendiri serta memberi solusi yang komprehensif dibandingkan dengan kebijakan moneter konvensional yang cenderung parsial dan bahkan cenderung menimbulkan persoalan baru lainnya.

Namun, kebijakan moneter Islam ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa diikuti oleh pemberlakuan hukum-hukum Islam di bidang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan kebijakan yang harus diambil guna menyelesaikan persoalan inflasi yang ada.

Kata kunci: Islam, Hizbut Tahrir, Konvensional, Inflasi, Moneter

ABSTRACT

THE INFLATION CONTROL IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM MONETARY POLICY

(A Study on the Hizbut Tahrir Monetary Policy)

Oleh: M. Hatta

Inflation rate coloring the recent Indonesian economic condition has tended to be persistent and irregularly moved with global economic changes. Responding such a condition, the central bank, of course, should adopt monetary policy consistent with available changes. Unfortunately, the responses taken merely involve technically economic matters, increasing and reducing interest rate or liquidity tight policy. This absolutely has not touched its main problem. Consequently, solution with various approaches cannot solve the root of inflation problems.

This has leaded the writer to investigate and conduct a research entitled the Inflation Control in the Perspective of Islam Monetary Policy (A Study on the Hizbut Tahrir Monetary Policy). This research aims to investigate and understand how the perspective of Hizbut Tahrir Monetary Policy to solve inflation problem. Analysis approach and method adopted in the research involve fundamental and descriptive approach and method.

Results of the research showed that inflation control using Islamic monetary policy has particular excellence and has provided comprehensive solution compared to the conventional monetary policy has tended to be partial and even created other new problems.

However, Islamic monetary policy cannot be implemented separately without the enactment of Islam laws in other fields. Therefore, integrated policy system should be adopted to solve available inflation problem.

Key word: Islam, Hizbut Tahrir, Conventional , Inflation, Monetary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dua belas tahun sudah Asia Tenggara khususnya Indonesia¹ melewati sebuah peristiwa ekonomi yang telah membuka mata dan pikiran semua pihak betapa rapuhnya bangunan ekonomi yang dibangun. Setelah sebelumnya mendapat julukan sebagai *The East Asian Miracle* dan Macan Asia (*Asian Tiger*), tidak lama berselang terjadilah guncangan (*shock*) ekonomi yang berawal dari sisi moneter. Dari sisi nilai tukar (*exchange rate*), pada tanggal 18 januari 1998 rupiah mencapai puncak kejatuhannya dengan menembus angka Rp. 16.000 per 1 dolar AS.² Dari sisi inflasi, angka inflasi mencapai 77,60 % dan PDB -13,20 %.³

Hingga kini, terutama dalam waktu dua tahun belakangan, kondisi ekonomi Indonesia berada pada kondisi yang sangat berat. Di tahun 2007 misalnya, kondisi ekonomi Indonesia secara umum berada dalam tekanan krisis pada sektor properti (kredit macet *subprime mortgage*)⁴ yang terjadi di Amerika

¹ Indonesia sudah mengalami krisis ekonomi sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 1940an (ketika penjajahan jepang), tahun 1965 (disaat ambruknya pemerintahan Bung Karno), ketiga pada tahun 1997 yang lalu. Lihat Wawancara Prof. Sumitro Djojohadikusumo, dalam <http://www.tempo.co.id/har/ti/juni10-1.htm>. Lihat juga Sejarah BI; Moneter, <http://www.bi.go.id>

² Ismail Yusanto, Mencari Solusi Krisis Ekonomi. Dalam buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter, cet. I (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001), hal. 3

³ Staf Ahli Menneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan. Pengkajian dan Monitoring Pelaksanaan Penyehatan Perbankan, hal. 4

⁴ Subprime mortgage adalah sebuah fasilitas kredit rumah yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Oleh karenanya kredit ini mempunyai potensi gagal (default) bayar yang sangat tinggi. Lihat Kajian Stabilitas Keuangan No. 9, September 2007, hal. 16, <http://www.bi.go.id>

Serikat serta melambungnya harga minyak dunia yang mencapai US \$100 per barrel⁵ dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.⁶

Sebagaimana halnya di tahun 2007, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2008 dan 2009 masih tetap dalam tekanan krisis *subprime mortgage* yang berujung kepada krisis keuangan (Kapitalisme) global.

Sebagai dampaknya, sektor riil mengalami perlambatan dan bahkan ada kecendrungan untuk ikut tenggelam di telan krisis disebabkan jatuhnya harga dari sebagian besar komoditas primer dan ditambah sepiunya tingkat orderan dari pasar luar negeri. Ini terjadi terutama pada produsen komoditas primer seperti minyak kelapa sawit (CPO), tembaga, dan tekstil.⁷

Dari sisi moneter, telah terjadi pelemahan nilai rupiah di pasar mata uang yang menembus angka Rp. 12.000, per US\$ 1, di bulan Februari 2009⁸ dan terdapat potensi kredit macet tersembunyi yang diakibatkan melemahnya gerak dari sektor riil (yang ditandai oleh tingkat ekspor yang tergerus dan PHK).⁹

Guna merespon itu semua, pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal dalam APBN sebesar Rp. 71,3 triliun, yang sebagian besarnya (81%) berupa pengurangan terhadap potensi penerimaan pemerintah pada akhir tahun anggaran 2009.¹⁰

⁵ Analisis faktor penyebab naiknya harga minyak dunia bisa dilihat di <http://www.hizbut-tahrir.or.id>, Soal Jawab Kenaikan Harga Minyak Dunia.

⁶ Faktor lain yang membayangi kondisi makroekonomi Indonesia adalah tingginya arus capital inflow yang berjangka pendek (*hot money*). Lihat *Ibid.*, Kajian Stabilitas Keuangan No. 9, September 2007, hal. 3

⁷ Hendri Saparini, mengapa Krisis Global Berdampak Signifikan Bagi Indonesia?, dalam <http://www.suara-islam.com>

⁸ BI Akui Tetap Intervensi Pasar, dalam <http://www.inilah.com>

⁹ Rizal Ramli, Economic Outlook 2009: Tahun Mengkerut, dalam <http://www.teguhtimur.com>

¹⁰ Total Stimulus Fiskal 2009 Capai Rp.71,3 Triliun, dalam <http://www.detikfinance.com>

Adapun BI sebagai otoritas moneter telah menurunkan suku bunga BI rate sebanyak tiga kali mulai Desember 2008¹¹ sebagai strategi untuk tetap mempertahankan laju gerak sektor riil dan beberapa kali melakukan intervensi ke pasar uang guna menahan pelemahan nilai rupiah yang terdapat kecenderungan semakin terdepresiasi.¹² Apabila depresiasi rupiah ini menjadi kenyataan, potensi meningkatnya inflasi yang didorong oleh *cosh push inflation* dan atau *imported inflation* pasti akan terjadi.

Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa beserta otoritas moneter.¹³ Dari bentuk perhatian tersebut bahkan telah terlahir sebuah pandangan yang menganggap inflasi adalah suatu permasalahan yang akan terus terjadi.¹⁴

Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga tingkat inflasi. Setiap tahunnya otoritas moneter senantiasa menargetkan bahwa angka atau tingkat inflasi harus diturunkan menjadi satu digit atau inflasi moderat.¹⁵

Dengan paradigma berpikir seperti itu, otoritas moneter dalam upayanya menyelesaikan permasalahan inflasi cenderung “berkutat” pada bagaimana

¹¹ Tinjauan Kebijakan Moneter Februari 2009, dalam <http://www.bi.go.id>

¹² BI Akui Tetap Intervensi Pasar, dalam <http://www.inilah.com>

¹³ Bambang Kusumanto, Dapatkah Inflasi di Indonesia dijinakkan? Fiskal.depkeu.go.id. Kamis, 24 mei 2007

¹⁴ T. Gilarso, Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro, cet. IX (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 398.

¹⁵ Pada tahun 1998 triwulan pertama ketika inflasi sebesar 20% maka BI segera mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar 15%. Lihat Tony Prasetyantono, Efektivitas Rupiah Superketat, Majalah D&R, 04 April 1998.

menurunkan tingkat inflasi yang tinggi, bukan berpikir bagaimana agar inflasi tidak terjadi.¹⁶

Upaya otoritas moneter mengendalikan inflasi memang sangatlah beralasan. Terutama disebabkan dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari segi biaya, biaya yang harus ditanggung pemerintah dengan adanya inflasi sangatlah besar.¹⁷ Terjadinya inflasi dapat mendistorsi harga-harga relatif, tingkat pajak, suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan menurunkan moral.¹⁸ Maka dari itu, pengendalian inflasi merupakan sasaran utama kebijakan moneter.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, secara empirik pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari krisis tahun 1997 - 1998 yang berdampak terganggunya sektor riil. Krisis ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali.²⁰ Tingkat Inflasi ketika itu sebesar 77,60 % yang diikuti pertumbuhan ekonomi minus 13,20 %.²¹ Adapun terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. Tahun 1998,

¹⁶ Riawan Amin, Mengendalikan atau Menghapus Inflasi, 18 Mei 2007, <http://www.sebi.ac.id>

¹⁷ Besarnya biaya disinflasi (kebijakan untuk menurunkan tingkat inflasi) di Amerika pada periode 1980-1984 misalnya telah membebani negara sekitar \$ 215 milyar kerugian output (dalam harga 1990) per satuan persentase pengurangan inflasi. Lihat Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macro Economics* (Makro Ekonomi), cet. XI (Jakarta; Erlangga, 2005), hal. 336

¹⁸ *Ibid.*, hal. 320. Lihat juga Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Dictionary of Economics* (kamus lengkap ekonomi), alih bahasa oleh Tumpal Rumapea, Posman Haloho, cet. 9, (Jakarta: Erlangga, 2005), hal. 303.

¹⁹ Undang Undang No. 23 Th. 1999 Tentang Bank Indonesia mengamanatkan pencapaian kestabilan nilai rupiah, khususnya dalam bentuk inflasi, sebagai sasaran akhir kebijakan moneter Bank Indonesia. *Conference on Monetary Policy and Inflation Targeting in Emerging Economies*. <http://www.bi.go.id>

²⁰ Ismail Yusanto, Mencari Solusi Krisis Ekonomi, hal. 2

²¹ Staf Ahli Meneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan. Pengkajian dan Monitoring Pelaksanaan Penyehatan Perbankan, hal. 4

seluruh sektor dalam perekonomian (kecuali sektor listrik, gas, dan air bersih) mengalami kontraksi. Sektor konstruksi mengalami kontraksi terbesar yaitu 36,4 %. Disusul kemudian sektor keuangan sebesar 26,6 %.²²

Dari segi tingkat kurs, inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang.²³ Hal tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi.²⁴

Apabila kestabilan nilai mata uang sangat penting untuk dijaga serta mencerminkan tingkat inflasi yang terjadi. Maka timbul pertanyaan, bagaimana caranya menjaga kestabilan nilai mata uang kertas sekarang?

Sistem moneter dunia kini dikuasai *fiat money* yang sangat rentan dengan fluktuasi (*Volatile*²⁵), kecuali beberapa negara yang menggunakan uang dwilogam (dinar dan dirham).²⁶ Implikasi dari dominannya penggunaan *fiat money*, perjalanan perekonomian dunia seringkali di terpa krisis hebat.²⁷ Robert A

²² Deniey Adi Purwanto, Sudahkah Perekonomian Indonesia Keluar dari Krisis?

²³ Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi, 24 Mei 2007, <http://www.bi.go.id>

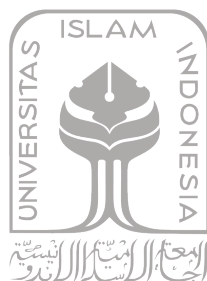
²⁴ Mulya E. Siregar, Manajemen Moneter Alternatif, dalam Buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter. Cet. I (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001), hal. 88

²⁵ Volatile sama dengan tidak stabil, rentan fluktuasi, atau kecenderungan berfluktuasi cepat dan ekstrem. Lihat John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Dictionary of Finance and Investment Terms* (kamus istilah keuangan dan investasi), cet.II (Jakarta: Elex Media Komputindo), hal. 646

²⁶ Negara tersebut adalah Kuwait, Yordania, Tunisia, Bahrain, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Lihat, Benny, "Pengaruh Penggunaan Mata Uang Berbasis Emas (Dinar Kuwait) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuwait Tahun 1994-2003", Skripsi: STIKER, Yogyakarta, hal. 11

²⁷ Roy Davies dan Glyn Davies, 1996, dalam buku *The History of Money From Ancient time of Present Day*. Menurut mereka, sepanjang abad 20 telah terjadi lebih 20 kali krisis besar yang melanda banyak negara, dalam <http://agustianto.niriah.com>. Adapun IMF sendiri mengatakan bahwa, selama 30 tahun terakhir telah terjadi 100 kali lebih krisis keuangan di berbagai negara, dalam Menyongsong Sistem Ekonomi Anti Krisis, cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), hal. 17

Mundell, peraih nobel ekonomi, mengatakan ketika masyarakat dunia menggunakan *fiat money*, maka konsekuensi logisnya, mereka telah memasuki tahapan ekonomi baru: *regime of permanent inflation* atau inflasi abadi.²⁸ Hal yang sama juga dikatakan oleh William Cobbet dalam tulisannya yang berjudul *Peper Againts Gold (1828)*. Ia mengatakan bahwa utang nasional dan inflasi adalah anak dari sistem uang kertas.²⁹

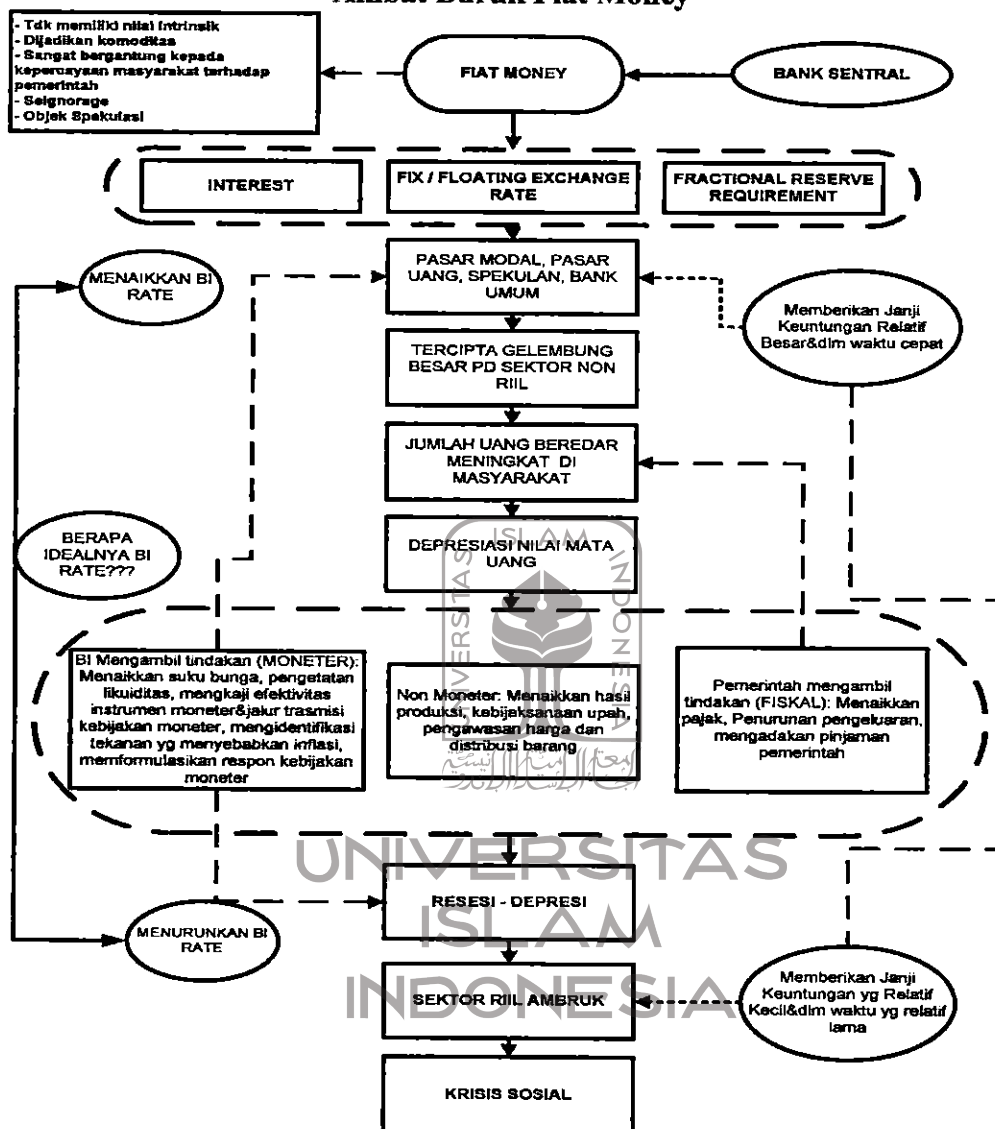


UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

²⁸ A. Riawan, Mengendalikan atau Menghilangkan Inflasi, <http://www.sebi.ac.id>

²⁹ Tarek El Diwany, The Problem with Interest (Sistem bunga dan Permasalahannya), cet. I (Jakarta: Akbar, 2003), hal. 53

Gambar 1. Dilema Kebijakan Pengendalian Inflasi dan Akibat Buruk Fiat Money



Sumber: Diolah sendiri dari beberapa sumber.³⁰

Pada gambar di atas terlihat bahwa, tindakan BI, Pemerintah, dan usaha Swasta dalam mengendalikan inflasi sejatinya hanyalah sebatas menyentuh permasalahan teknis atau gejala (*symptom*) semata.

³⁰ Ismail Yusanto, dkk, Dinar Emas Solusi Krisis Moneter, cet. I (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001). M. Lutfi Hamidi, Gold Dinar: Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan, cet. I (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2007). A. Riawan Amin, *Satanic Finance: True Conspiracies*, cet. I (Jakarta: Celestial Publishing, 2007).

Bahkan, perpaduan kebijakan³¹ yang diambil guna memberi respon yang lebih tepatpun ternyata malah menimbulkan krisis bertambah parah. Inilah sebuah dilema yang sampai saat ini belum terpecahkan sebagaimana secara jelas dikatakan oleh Samuelson dan Nordhaus. Bahkan mereka mengatakan kebijakan atau solusi yang ditawarkan oleh para ahli dalam memecahkan permasalahan inflasi dan pengangguran secara bersamaan justru menyebabkan efek sampingan yang lebih buruk dari penyakitnya itu sendiri.³² Ini terjadi dikarenakan “obat” yang diberikan hanya sebatas menghilangkan penyakit bagian permukaan saja, sementara penyakit bagian dalamnya masih belum disembuhkan.³³

Penyakit bagian dalam yang belum tersentuh oleh perpaduan kebijakan di atas adalah terkait dengan hakikat mata uang itu sendiri dan sistem yang melingkupinya (*fractional reserve requirement, floating exchange rate, interest*) serta penyalahgunaan dari fungsi dasar uang sebagai alat tukar yang bertambah

³¹ Di Indonesia, sinergi kebijakan dalam rangka antisipasi inflasi ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menyatakan pengendalian inflasi akan dilakukan dalam suatu forum yang dikoordinasi oleh Menko Perekonomian, yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Perdagangan, dan menteri-menteri terkait. Pembahasan yang lebih lanjut tentang sinergi kebijakan antara pemerintah dengan otoritas moneter dapat dibaca pada Iskandar Simorangkir, Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian dengan Pendekatan Game Theory. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, vol. 9, no. 3, Januari 2007.

³² Lihat Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economic Macro* (Makro Ekonomi), hal. 322. Dilema kebijakan moneter digambarkan oleh Kwik Kian Gie dengan pernyataan “Jangan sampai nilai tukar rupiah merosot walaupun sektor riilnya ambruk”, Lihat Kwik Kian Gie, Membengkaknya Sertifikat BI. *Bisnis Indonesia*, 4 maret 2007, dalam <http://www.UNISOSDEM.org>. Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat memberikan keterangan perihal beban besar yang ditanggung BI dalam setahun untuk membiayai bunga dari SBI (sebesar 20 triliun) sejatinya dapat meningkatkan sektor riil yang cukup signifikan, lihat Gung Panggodo S, Menanti Trobosan di Sektor Keuangan. *Bisnis Indonesia*, 5 Maret 2007, dalam <http://www.UNISOSDEM.org>. *Ibid.*, Ryan Kiryanto, Dana di SBI: Sebuah Dilema

³³ Pengendalian inflasi dalam perspektif al Qur'an, <http://www.dwicondro.blogspot.com>. Lihat juga Murray N. Rothbard, *What has Government Done to Our Money?* (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?), cet I (Jakarta; Granit, 2007), hal. xiv

menjadi tidak hanya sebatas sebagai alat tukar, melainkan juga menjadi sebuah barang (komoditas) yang turut diperdagangkan dengan imbalan bunga (*interest*).³⁴

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, kehadiran konsep kebijakan moneter alternatif (mata uang yang kuat dan stabil, serta kebijakan moneter yang tidak memunculkan dilema di sektor riil) yang mampu mengendalikan inflasi sudah sangat mendesak dibutuhkan dan segera diaplikasikan.

Dalam hal ini, perlu kiranya kita menyimak perkataan Syeikh Taqiyuddin an Nabhani (Pendiri sekaligus pemimpin pertama Hizbut Tahrir) yang mengetengahkan sejumlah *maslahat* (manfaat) yang akan diraih ketika diterapkannya mata uang dinar dan dirham secara internasional.³⁵ Maslahat itu diantaranya: Pertama, sistem standar emas akan mengakibatkan kebebasan pertukaran emas, mengimpor dan mengeksportnya. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas pertukaran mata uang tidak akan terjadi karena adanya tekanan luar negeri, sehingga bisa mempengaruhi harga-harga barang dan gaji para pekerja (*imported inflation*). Kedua, dengan diterapkannya sistem mata uang emas, juga berarti tetapnya kurs pertukaran mata uang antarnegara. Karena tetapnya kurs pertukaran mata uang tersebut, maka akan menyebabkan meningkatnya perdagangan internasional. Sebab para pelaku bisnis dalam perdagangan luar negeri tidak khawatir bersaing. Karena kurs uangnya tetap,³⁶ maka mereka tidak

³⁴ Lihat gambar 1. Ismail Yusanto, Mencari Solusi., hal. 3

³⁵ Perlu ditekankan disini bahwa, penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang bukanlah hanya karena adanya banyaknya manfaat yang akan didapatkan. Melainkan juga adalah hukum syara yang mengamanatkan (mewajibkan) penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang. Lihat Taqiyuddin an Nabhani, *An Nidlam Al Iqtishadi Fil Islam* (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam), cet. VII (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hal. 298-302

³⁶ Bukan dikarenakan penerapan fix exchange rate, melainkan disebabkan stabilnya mata uang yang digunakan

khawatir dalam mengembangkan bisnisnya (kelancaran aktivitas ekonomi baik dalam lingkup domestik maupun internasional).³⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Qadim Zallum (Pemimpin kedua Hizbut Tahrir) dalam bukunya *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Ia mengatakan bahwa, sistem moneter yang berbasis kepada emas dan perak merupakan satu-satunya sistem moneter yang mampu menyelesaikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional.³⁸

Untuk itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti kebijakan moneter alternatif yang mampu mengendalikan inflasi menurut Hizbut Tahrir. Kebijakan moneter Islam perspektif Hizbut Tahrir dapat dihimpun dan dianalisa dari pendapat atau pandangan Hizbut Tahrir tentang departemen kemaslahatan umum (departemen moneter) sebagai pelaksana teknis kebijakan moneter yang diambil oleh Khalifah, batasan otoritas yang dimiliki oleh Khalifah, dinar dan dirham sebagai mata uang, hukum uang kertas substitusi, hukum pertukaran mata uang, hukum sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*), hukum riba atau bunga (*interest*), hukum pasar modal dan saham, hukum lembaga keuangan atau perbankan, hukum memalsukan dan menimbun mata uang, serta hukum transaksi spekulatif.

³⁷ Taqiyuddin an Nabhani, *An Nidlam Al Iqtishadi*, hal. 304

³⁸ Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal Fi Ad Daulah Al Khilafah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah), cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 239.

Penjelasan inilah yang menjadi latar belakang penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam (Studi Kebijakan Moneter Hizbut Tahrir)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di depan, pokok masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan moneter dalam pandangan Hizbut Tahrir?
2. Bagaimana kebijakan moneter Hizbut Tahrir dalam mengendalikan inflasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dari penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan memahami kebijakan moneter Islam dalam perspektif Hizbut Tahrir untuk mengendalikan inflasi.

2. Kegunaan Penelitian

Capaian akhir dari tujuan di atas, secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya ekonomi Islam. Sedangkan secara pragmatis, penelitian dapat memiliki *practical necessity*, sehingga dapat berguna bagi kepentingan pembangunan masyarakat dan terlebih-lebih lagi kepada umat Islam.

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat di manfaatkan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam bidang Ekonomi Islam serta memberikan

sumbangan bagi perkembangan disiplin ilmu ekonomi Islam. Serta Sebagai wacana alternatif tentang Sistem Moneter Islam bagi kalangan akademisi dan praktisi (Perbankan, Pemerintah) dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Secara umum, sejauh pengamatan penulis penelitian-penelitian tentang konsep moneter Islam yang pernah dilakukan sebelumnya tidaklah sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Diantara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah:

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Mata Uang Berbasis Emas (Dinar Kuwait) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuwait Tahun 1994-2003”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauhmana pengaruh variabel penawaran uang, kurs tukar dolar AS terhadap dinar Kuwait dan ekspor minyak mentah Kuwait terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kuwait dan untuk mengetahui faktor manakah yang mempunyai pengaruh paling dominan diantara faktor-faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Kuwait. Hasil penelitian menunjukkan variabel penawaran uang (M1), kurs tukar dinar Kuwait terhadap dolar AS dan nilai ekspor minyak mentah Kuwait, masing-masing variabel mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kuwait.³⁹
2. Sebuah buku yang ditulis oleh M. Lutfi Hamidi berjudul “Gold Dinar” yang merupakan hasil dari penelitian tesis. Penelitian yang ada pada buku ini

³⁹ Benny, Pengaruh Penggunaan., Hal. 27

merupakan penelitian empiris tentang usaha penerapan sistem mata uang emas sebagai alat transaksi pembayaran dalam perdagangan internasional.⁴⁰

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem mata uang emas bagi negara yang menggunakannya dalam transaksi perdagangan internasional akan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi cakupan konsep moneter yang dimaksud. Cakupan konsep moneter dari dua penelitian di atas hanyalah menyangkut peran dan pengaruh implementasi dinar dan dirham terhadap perekonomian.

Sedangkan konsep moneter yang terdapat pada penelitian ini difokuskan kepada kebijakan moneter yang mencakup tentang dinar & dirham sebagai mata uang, hukum uang substitusi (*fiat money* yang dijamin oleh emas), hukum jual beli mata uang asing, hukum pertukaran mata uang, hukum sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*), hukum riba, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum pertukaran internasional, dimana selanjutnya hukum-hukum tersebut diperkirakan dapat mencegah terjadinya inflasi dalam perekonomian Islam.

Lebih dari itu, kebijakan moneter Islam yang menjadi obyek kajian dari penelitian yang penulis lakukan adalah kebijakan moneter Islam dalam pandangan Hizbut Tahrir. Inilah faktor utama yang membedakan penelitian penulis yang dibandingkan dengan penelitian-penelitian di atas.

⁴⁰ M. Lutfi Hamidi, *Gold Dinar (Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan)*, cet. I (Jakarta: Senayan Publishing, 2007), hal. xxi

⁴¹ *Ibid.*, hal. 133

E. Kerangka Teori

Untuk memudahkan analisa permasalahan pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter Islam, maka penulis terlebih dahulu akan membahas secara singkat berkaitan dengan dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kebijakan moneter dan inflasi.

1. Klasifikasi definisi kebijakan moneter dan inflasi

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan definisi kebijakan moneter dan inflasi masing-masing menjadi dua kelompok. Pengklasifikasian ini dikarenakan definisi dari kebijakan moneter dan inflasi yang disampaikan oleh para ahli ekonomi yang saling berbeda. Penyebab perbedaan itu dikarenakan sebagian ahli ekonomi mendefinisikan kebijakan moneter dan inflasi sebagaimana apa adanya dan sebagian lagi mendefinisikannya dengan memasukkan unsur penyebab dan solusi yang ditawarkan.

Berikut di bawah ini adalah pengklasifikasian dari definisi kebijakan moneter dan inflasi:

a. Kebijakan moneter

1) Kelompok pertama

Aulia Pohan mengatakan kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah suatu pengaturan di bidang moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴² Hampir senada dengan definisi yang diutarakan Pohan, dalam kamus istilah keuangan

⁴² Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, cet. I (Jakarta; Rajawali Pers, 2008), hal. 11

dan perbankan kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴³

2) Kelompok kedua

Menurut Iskandar kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman.⁴⁴ Definisi ini hampir senada dengan definisi yang diberikan oleh *Dictionary of Economics*, dimana dikatakan kebijakan moneter adalah suatu instrumen kebijakan ekonomi makro yang mengatur penawaran uang, kredit dan tingkat bunga dalam rangka mengendalikan tingkat pembelanjaan atau pengeluaran dalam perekonomian.⁴⁵

Downes dan Elliot Goodman dalam *Dictionary of Finance and Investment Terms* mengatakan bahwa, kebijakan moneter adalah keputusan-keputusan dari Federal reserve board (bank sentral Amerika) mengenai penawaran uang.⁴⁶

Adapun definisi kebijakan moneter yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagaimana definisi yang disampaikan oleh Pohan. Definisi ini lebih bersifat netral (tidak memihak kepada salah satu aliran ekonomi yang ada,

⁴³ Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan, cet. II (Bandung: Yrama Widya, 2006), hal. 186

⁴⁴ Iskandar Putong, Ekonomi Mikro dan Makro, cet. II (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 231

⁴⁵ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Dictionary of Economics*, hal. 416-417

⁴⁶ John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Dictionary of Finance and Investment Terms* hal. 327

sebagaimana definisi yang diutarakan Iskandar dan *Dictionary of Economics* yang lebih dominan kepada aliran moneteris).⁴⁷

b. Inflasi

1) Kelompok pertama

Inflasi dalam *Dictionary of Economics* didefinisikan dengan suatu peningkatan tingkat harga umum dalam suatu perekonomian yang berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu.⁴⁸ Samuelson dan Nordhaus dalam buku mereka *Macro Economics* mendefinisikan inflasi dengan cukup singkat yaitu kenaikan tingkat harga umum.⁴⁹ Adapun Bank Indonesia mendefinisikan inflasi dengan kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus.⁵⁰

Badan kebijakan fiskal Departemen Keuangan mendefinisikan inflasi dengan sebuah proses kenaikan harga-harga secara umum dan berkelanjutan sebagai akibat adanya ketidakseimbangan (*excess demand*) dalam perekonomian.⁵¹

2) Kelompok kedua

Definisi di atas mendapat kritikan cukup tajam dari mazhab ekonomi Austria. Ekonom dari mazhab Austria mengatakan bahwa definisi inflasi di

⁴⁷ Indikasi dari ketidaknetralan tersebut adalah disebutkannya kontrol penawaran uang, tingkat bunga, kebijakan ekspansi dan kontraksi moneter.

⁴⁸ *Dictionary of Economics*, hal. 303

⁴⁹ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macro Economics*, hal. 307

⁵⁰ <http://www.bi.go.id>

⁵¹ Glosarium Fiskal. <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

atas tidak menggambarkan fakta inflasi sesungguhnya, terlebih lagi adalah faktor pemicu inflasi itu sendiri.⁵²

Berikut ini adalah definisi inflasi menurut Ludwig von Mises (salah seorang ekonom mazhab Austria). Ia mengatakan Inflasi adalah “peningkatan jumlah uang dan uang kertas yang beredar serta kuantitas deposito bank yang dapat dicairkan.”⁵³

Aliminsyah dan Padji memberikan definisi inflasi sebagai berikut “suatu keadaan yang menunjukkan jumlah peredaran uang yang lebih banyak dari pada jumlah barang yang beredar, sehingga menimbulkan penurunan daya beli uang dan selanjutnya terjadi kenaikan harga yang menyolok”⁵⁴. Definisi ini hampir senada dengan yang disampaikan oleh Ludwig von Mises di atas.⁵⁵

Downes dan Elliot Goodman mengatakan, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi jika pembelanjaan bertambah dibandingkan dengan penawaran barang di pasar (dengan kata lain terlalu banyak uang yang memburu barang yang terlalu sedikit).⁵⁶

Terjadinya perbedaan dalam mendefinisikan inflasi sebagaimana tampak di atas, dikarenakan sebagian pakar ekonomi menjelaskan makna inflasi

⁵² Murray N. Rothbard, *What has..*, hal. Xiii-xiv Murray N. Rothbard. *What has Government Done to Our Money?* (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?), cet I (Jakarta; Granit, 2007), hal. Xiii-xiv

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Aliminsyah dan Padji, Kamus, hal. 370

⁵⁵ Murray N. Rothbard, *What has..*. Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet IX (Jakarta; Balai Pustaka, 1997), hal. 378.

⁵⁶ John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Dictionary.*, hal. 255-256.

berdasarkan sebab yang menimbulkan inflasi dan sebagian yang lain berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh inflasi.⁵⁷

Oleh karenanya menurut hemat penulis dalam mendefinisikan sebuah fakta (inflasi) mestilah memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

Pertama, harus kita pahami bahwa sebuah definisi adakalanya berasal dari sebuah konsep tentang nilai yang dalam perumusannya diharuskan merujuk kepada dalil-dalil syar'i dan adakalanya terkait dengan konsep yang murni berasal dari sebuah fakta.⁵⁸

Kedua, setelah diketahui jenis dari definisi fakta tersebut tergolong ke dalam jenis apa barulah kemudian dapat diberikan definisi secara tepat.

Dalam hal ini, definisi inflasi sepenuhnya didasarkan pada penelaahan yang cermat (dan tepat) terhadap fakta fenomena perkembangan harga barang dan jasa. Dengan kata lain, definisi inflasi adalah berbicara fakta apa adanya (*das sein*), bukan berbicara apa yang seharusnya (*das sollen*).⁵⁹

Ini sama halnya ketika kita mendefinisikan tentang akal. Akal atau berpikir adalah proses pemindahan fakta melalui indera ke dalam otak disertai dengan informasi sebelumnya yang digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Definisi

⁵⁷ Ahmad Hasan, *Al Auraq Al Naqdiyah Fi Al- Iqtishad Al Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) (Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 273-274

⁵⁸ Muhammad Shiddiq Al Jawi, *Seputar Konsep Syakhsyah*. <http://www.khilafah1924.org>

⁵⁹ *Ibid.*, lihat juga Adnan Khan, *The Global Credit Crunch and The Crisis of Capitalism (Kapitalisme di Ujung Tanduk: Tinjauan Atas Krisis Kredit Global Krisis Minyak, Krisis Pangan, dan Bagaimana Sistem Ekonomi Islam Mengatasinya)*, cet. I (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2008), hal. 82.

ini diperoleh dari fakta kegiatan berpikir manusia.⁶⁰ Metode telaah seperti inilah yang seharusnya juga diterapkan dalam mendefinisikan fakta tentang inflasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mendefinisikan inflasi adalah sebagai suatu fakta (kejadian) yang menunjukkan telah terjadi kenaikan relatif harga barang dan jasa baik dalam satu jenis maupun secara umum (dalam banyak jenis), dimana kenaikan itu dapat dinilai berdasarkan nilai sebuah mata uang ataupun benda yang lainnya.

Penjelasan dari definisi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai suatu fakta, maksudnya adalah inflasi merupakan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi.
- b) Kenaikan relatif, maksudnya adalah meskipun kenaikan dari harga barang dan jasa yang ada tidaklah sama atau dalam prosentase yang saling berbeda tetaplah dikatakan sebagai sebuah inflasi.
- c) Dalam satu satu jenis maupun secara umum, artinya dikatakan inflasi meskipun barang dan jasa yang mengalami kenaikan harganya hanya satu jenis.
- d) Kenaikan itu dapat dinilai berdasarkan nilai sebuah mata uang ataupun benda yang lainnya, maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwa kenaikan harga barang yang terjadi dapat diketahui dari nilai sebuah mata uang ataupun dengan benda lainnya. Tidak semata-mata hanya dapat diketahui dari mata uang. Lebih dari itu, bagian dari definisi ini bukan bermaksud menunjukkan

⁶⁰ Muhammad Shiddiq al Jawi, Seputar.,

bahwa penyebab terjadinya inflasi hanya karena nilai uang yang turun atau banyaknya uang yang beredar.

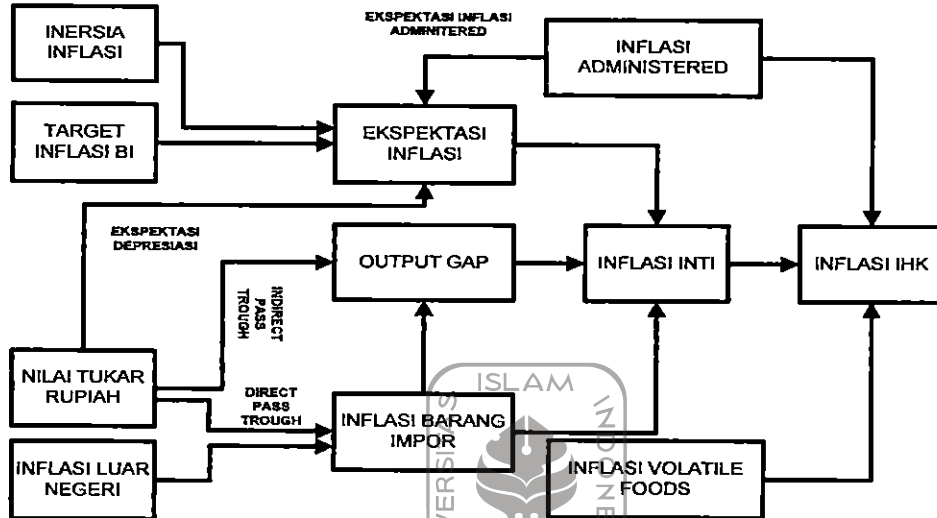
Perlu diketahui, dalam penelitian yang penulis lakukan ini tidak akan membahas inflasi secara teknis (sebagai contoh yang dimaksud teknis adalah barang-barang apa saja yang ketika harganya naik maka dikatakan terjadi inflasi dan waktu yang digunakan untuk penghitungan inflasi apakah satu bulan atau satu tahun). Dengan kata lain, penulis hanya membahas inflasi dari segi bagaimana kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi (kenaikan harga secara umum dan terus menerus).

2. Penyebab Inflasi

Secara umum, berdasarkan teori ekonomi konvensional penyebab inflasi terbagi ke dalam 3 macam, yakni: Pertama, tarikan permintaan (*demand-pull inflation*). Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Kedua, dorongan biaya (*cost-push inflation*). Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Ketiga, ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang

terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional.⁶¹

Gambar 2
Skema Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi IHK



Sumber: <http://www.bi.go.id>

Dalam rangka menjaga inflasi agar tetap dalam tingkat moderat baik pemerintah (kebijakan fiskal) maupun otoritas moneter (kebijakan moneter) mengambil sejumlah langkah sebagaimana yang telah kami tuliskan pada bagian latar belakang.⁶²

3. Potensi inflasi dalam sistem ekonomi Islam

Potensi terjadinya inflasi dalam perekonomian Islam dapat dilihat dari karakter (sebab-sebab terjadinya) inflasi itu sendiri. Sesuai dengan definisi inflasi yang penulis gunakan di atas, maka akan kita dapati bahwa dalam setiap

⁶¹ <http://www.bi.go.id>

⁶² Pada halaman 5 dan 6

perekonomian (apakah itu menggunakan sistem ekonomi Kapitalis ataupun Islam) akan senantiasa ditemui permasalahan inflasi.⁶³

Hanya saja, terdapat perbedaan yang cukup signifikan (baik secara kuantitatif maupun kualitatif) antara permasalahan inflasi yang ada di dalam perekonomian Islam dengan yang ada di dalam perekonomian Kapitalis.⁶⁴

Salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan dikarenakan di dalam perekonomian Islam menggunakan mata uang dwilogam (dinar dan dirham). Dimana dalam dinar dan dirham tersebut mempunyai sejumlah keunggulan dibandingkan dengan mata uang kertas yang digunakan pada saat ini. Salah satu keunggulan itu adalah adanya nilai intrinsik (nilai ini tidak terdapat pada *fiat money*) yang terkandung di dalamnya.

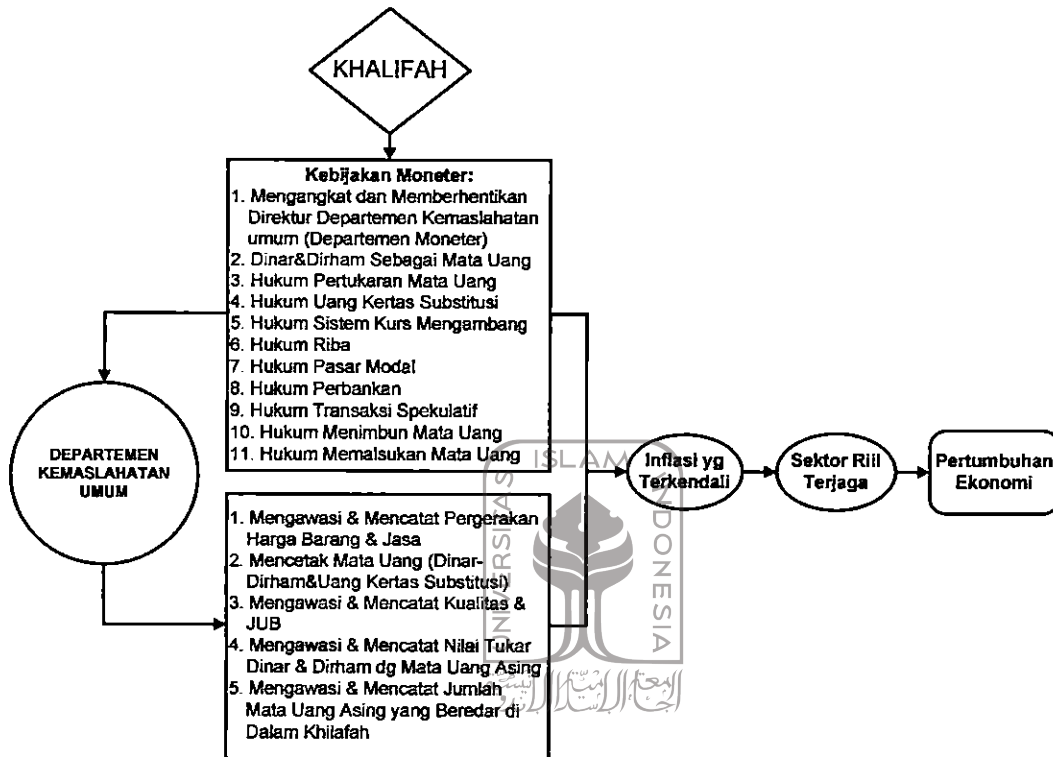
Oleh karena itu, inflasi yang disebabkan faktor lemahnya mata uang (depresiasi nilai) sebagaimana yang terjadi dalam perekonomian Kapitalis tidak akan terjadi dalam perekonomian Islam.⁶⁵

⁶³ Lihat pembahasan inflasi oleh al Maqrizi (1364-1442 M) dalam Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 424-430

⁶⁴ Adnan Khan, *The Global Credit Crunch and The Crisis of Capitalism*, hal. 44, dalam <http://www.khilafah.com>

⁶⁵ Efek dari depresiasi dan atau devaluasi nilai tukar mata uang akan mengakibatkan efek berantai, yaitu menurunnya nilai rupiah terhadap sejumlah barang yang sifatnya dibutuhkan dunia internasional (komoditi internasional; minyak misalnya), dan meningkatnya harga bahan baku bagi industri dalam negeri yang di dapatkan di luar negeri melalui mitra dagang sehingga mengakibatkan naiknya biaya produksi.

Gambar 3
Skema Hubungan antar Variabel Sebagai
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Diolah sendiri⁶⁶

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

Maman Kh dkk mengatakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian akan sangat bergantung kepada tujuan yang hendak dicapai.⁶⁷ Maka dari itu, untuk mencapai tujuan dari penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan fundamental radikal.⁶⁸ Tujuan dari pendekatan ini adalah

⁶⁶ Berdasarkan buku-buku yang menjadi sumber primer dari penelitian ini.

⁶⁷ Maman Kh, dkk. Metodologi Penelitian Agama, (Jakarta; Rajawalipers, 2006), hal. 154

⁶⁸ Istilah ini dipinjam dari M. Ismail Yusanto dan M. Karebet W, Manajemen Strategis Perspektif Syariah, cet. I (Jakarta; Khairul Bayan, 2003), hal. xviii

didapatkannya sebuah solusi yang tidak bersifat reformatif belaka, melainkan adalah solusi yang revolutif.⁶⁹

Pendekatan ini penulis susun dalam beberapa tahap, yaitu: Pertama, telaah dan analisis kritis (secara konseptual dan faktual) penyebab gagalnya kebijakan moneter Kapitalis dalam mengendalikan inflasi. Tahapan ini dimaksudkan untuk menemukan penyebab utama gagalnya kebijakan moneter Kapitalisme dalam mengendalikan inflasi.

Kedua, apabila penyebab utama dari kegagalan kebijakan moneter Kapitalisme sudah diketahui, maka tahap selanjutnya adalah memberikan gambaran secara konseptual kebijakan moneter Islam dalam mengendalikan inflasi.

Metode (metode pengumpulan data)⁷⁰ yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)⁷¹ dan dokumenter⁷² dengan membaca gagasan-gagasan ekonomi Islam Hizbut Tahrir yang terdapat dalam beberapa buku, jurnal, dan situs sebagai data utama atau primer.⁷³

Adapun data sekunder, penulis membaginya kedalam dua bagian. Pertama, data sekunder yang merupakan tulisan atau pendapat-pendapat anggota HT baik yang berupa buku, buletin, maupun artikel atau makalah yang ada di situs pribadi

⁶⁹ Diskursus tentang reformasi dan revolusi bisa dibaca dalam Muhammad Musthofa Ramadhan, *Reformasi vs Revolusi*, cet. (Ciputat; Wadi Press, 2005)

⁷⁰ Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dan metode pengumpulan data tergantung pada karakteristik data variabel. Lihat W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, cet. III (Jakarta; Gramedia, 2004), hal. 110 dan 115

⁷¹ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi*, hal. 92-94

⁷² Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Misalnya adalah data statistik yang diterbitkan secara berkala oleh Biro Pusat Statistik. W. Gulo, *Metodologi*, hal. 123

⁷³ Lihat lampiran I

anggota Hizbut Tahrir.⁷⁴ Kedua, berupa tulisan dan pendapat-pendapat ekonom muslim maupun konvensional, dalam bentuk buku-buku maupun artikel atau makalah yang ada di situs atau internet (kepuustakaan cyber).

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, data yang telah dikumpulkan perlu diolah dan dianalisis.⁷⁵ Dalam hal ini, metode pengolahan dan penganalisisan data yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah dimaksudkan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷⁶

Secara umum, metode deskriptif ini sama dengan apa yang diutarakan oleh an Nabhani dalam bukunya *at Tafkir*. Buku tersebut mengutarakan sebuah metode penelitian terhadap suatu objek material yang dapat diindera (misalnya pada fisika), dan dalam pengkajian pemikiran-pemikiran (misalnya pengkajian akidah dan sistem perundang-undangan), juga dalam upaya memahami pembicaraan (misalnya pengkajian sastra dan fikih). Beliau menamakan metode tersebut dengan metode rasional.⁷⁷

⁷⁴ Mengapa pendapat anggota HT sebagai data sekunder? Dalam hal ini HT membedakan pendapat yang dikeluarkan HT secara resmi melalui media-media publikasi yang ada dengan pendapat anggotanya yang lebih mencerminkan pendapat personal. Dengan demikian, apabila pendapat anggota HT penulis masukan ke dalam data primer maka akan bertentangan dengan tujuan dari penelitian tesis ini, yakni mengenai konsep moneter HT. Lihat lampiran II

⁷⁵ W. Gulo, *Metodologi.*, hal. 107

⁷⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. V (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2003), hal.54

⁷⁷ Taqiyuddin an Nabhani, *At Tafkir* (Hakikat Berpikir), cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal. 28

Selanjutnya, beliau mengutarakan definisi dari metode rasional itu sebagai berikut. Metode rasional adalah sebuah metode tertentu dalam pengkajian yang ditempuh untuk mengetahui realitas sesuatu yang dikaji, dengan jalan memindahkan penginderaan terhadap fakta melalui panca indera ke dalam otak, disertai dengan adanya sejumlah informasi (bukan opini) terdahulu yang akan digunakan untuk menafsirkan fakta tersebut. Selanjutnya, otak akan memberikan penilaian terhadap fakta tersebut.⁷⁸

Dalam konteks penelitian yang penulis lakukan, metode ini dimaksudkan untuk menganalisis gagasan ekonomi Islam yang terkandung dalam beberapa buku, Jurnal, situs, dan Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh anggota Hizbut Tahrir ke dalam kerangka kebijakan moneter Islam. Metode deskriptif ini penulis susun ke dalam beberapa tahap, yakni: tahap identifikasi dan klasifikasi, dan tahap fiksasi.

Tahap identifikasi⁷⁹ dan klasifikasi⁸⁰ adalah tahap dimana gagasan-gagasan ekonomi Islam yang ada pada sumber data primer diamati, dianalisa dan kemudian diperkirakan apakah termasuk ke dalam gagasan kebijakan moneter Islam perspektif Hizbut Tahrir atau tidak.

Tahap fiksasi.⁸¹ Maksud dari tahap ini adalah gagasan-gagasan ekonomi Islam yang telah melewati tahap identifikasi dan klasifikasi untuk selanjutnya

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 28-29.

⁷⁹ Makna Identifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas orang/benda, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus., hal 365

⁸⁰ Penyusunan bersistem di kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. *Ibid.*, hal. 507

⁸¹ Istilah tahap fiksasi ini dipinjam dari M. Ismail Yusanto dan M. Karebet W. Manajemen., hal. xviii

ditetapkan atau dibakukan ke dalam suatu unit kesatuan yang bernama kebijakan moneter Islam dalam perspektif Hizbut Tahrir.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dimulai dengan landasan metodologi yang tertuang dalam bab satu pendahuluan, yang diawali dengan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, pendekatan dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, dibahas beberapa pemikiran moneter para ulama dan ekonom muslim sehingga diketahui bahwa, ulama-ulama semenjak lama sudah membahas perihal moneter mendahului dari para ekonom-ekonom kontemporer. Lebih dari itu, dapat diketahui pula hal-hal apa saja yang berupa pemikiran baru yang merupakan hasil ijtihad dari Taqiyuddin an Nabhani dan ulama Hizbut Tahrir lainnya berkenaan dengan moneter.

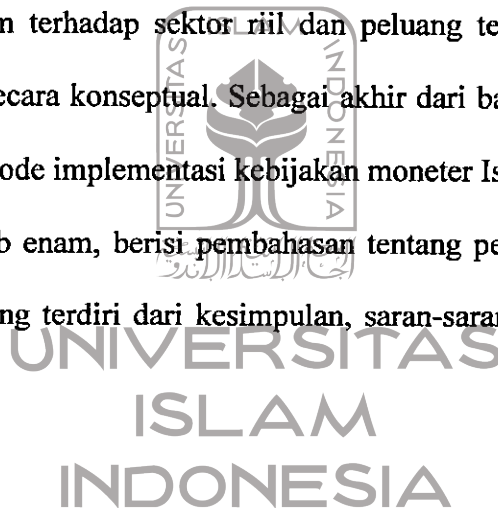
Pada bab tiga, dibahas tentang profil singkat Hizbut Tahrir dan pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir. Di dalamnya dijelaskan latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir, pendiri dan pemimpinnya, serta buku-buku yang di keluarkan oleh Hizbut Tahrir. Selanjutnya juga dijelaskan pandangan Hizbut Tahrir terhadap problematika umat, serta solusi dari problematika tersebut, dan juga kaidah-kaidah (kaidah syara) pemikiran Hizbut Tahrir.

Pada bab empat, dibahas secara singkat dan konseptual tentang teori kebijakan moneter konvensional beserta aspek-aspeknya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teori inflasi dan dampaknya terhadap sektor riil. Dilema

penyelesaian inflasi dalam kebijakan moneter konvensional dan kasus kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia. Bab ini diakhiri pembahasan tentang akar atau sumber dari permasalahan inflasi.

Pada bab lima, dibahas tentang pengendalian inflasi dalam perspektif kebijakan moneter Islam (studi kebijakan moneter Hizbut Tahrir). Pembahasan diawali tentang institusi yang bertanggungjawab mengendalikan moneter, kebijakan mata uang yang akan digunakan, kebijakan di sektor keuangan (hukum-hukum yang terkait dengan pertukaran mata uang), serta analisa pengaruh kebijakan moneter Islam terhadap sektor riil dan peluang terjadi inflasi dalam sistem ekonomi Islam secara konseptual. Sebagai akhir dari bab ini penulis tutup dengan pembahasan metode implementasi kebijakan moneter Islam.

Adapun pada bab enam, berisi pembahasan tentang penutup dari seluruh rangkaian penelitian, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan harapan dari penulis.



BAB II

PEMIKIRAN MONETER DAN PERSOALAN HARGA MENURUT PARA ULAMA, EKONOM MUSLIM, DAN HIZBUT TAHRIR¹

Persoalan ekonomi adalah sama tuanya dengan manusia itu sendiri.² Pernyataan tersebut mengindikasikan secara implisit bahwa, sesungguhnya pemikiran-pemikiran ekonomi yang ada saat ini merupakan hasil dari buah pikiran para pemikir di masa lampau.

Dalam konteks pemikiran ekonomi Islam, telah banyak pula kajian ekonomi Islam yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Walaupun memang apa yang dibahas oleh para ulama tentunya adalah sebatas pada permasalahan ekonomi yang terjadi pada waktu itu.³

Adapun kajian ekonomi yang pernah dibahas para ulama misalnya adalah mulai dari masalah keuangan dan kebijakan publik, inflasi, peranan pemerintah dalam ekonomi, hingga masalah perlindungan terhadap konsumen.

¹ Untuk lebih mudahnya pembahasan bab ini bisa lihat lampiran XVI: Peta (matrix) Pemikiran Moneter dan Persoalan Harga Para Ulama dan Ekonom Muslim.

² Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 11. Lihat juga Ahmad M. Saefuddin. Kata Pengantar dalam buku M. Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking* (Pemikiran Ekonomi Islam), cet. I (Jakarta: LIPPM, 1986), hal. xi.

³ Perlu diketahui, permasalahan utama dari ekonomi adalah bagaimana memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua umat manusia. Dengan kata lain, permasalahan utama ekonomi bukanlah pada perkembangan (misalkan adalah perkembangan jenis transaksi) yang sifatnya kurang penting. Sebagai contoh adalah SUN (surat utang Negara). SUN diterbitkan oleh pihak Negara dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran pemerintah dikarenakan pendapatan yang kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran.

Dalam Negara yang menganut sistem ekonomi Kapitalis, SUN hampir bisa dipastikan merupakan suatu keniscayaan keberadaannya. Hal ini dikarenakan tidak adanya (atau relatif kecil) kepemilikan Negara dan kepemilikan umum (karena prinsip kebebasan kepemilikan) yang dikelola Negara sehingga menyebabkan pemasukan bagi Negara yang relatif sangat kecil.

Berbeda halnya dalam Daulah Khilafah, kepemilikan diatur sedemikian rupa menjadi tiga jenis kepemilikan (individu, umum, dan Negara). Sehingga defisitnya pendapatan Negara relatif sangat kecil kemungkinannya. Oleh karena itu, tidak lagi diperlukan pembahasan perlu tidaknya SUN.

Sebagai gambaran awal tentang sistem dan kebijakan moneter dalam Islam, dibawah ini penulis paparkan sejumlah pemikiran moneter dan persoalan harga dari ulama, ekonom Muslim kontemporer, dan Hizbut Tahrir.⁴

A. Pemikiran Moneter dan Persoalan Harga Menurut Beberapa Ulama

1. Abu Yusuf (731-798 M)

Abu Yusuf bernama lengkap Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad in Husein al Anshori. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H dan wafat pada tahun 182 H.⁵ Beliau berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut Anshori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshar.⁶

Beliau telah menulis beberapa kitab yang diantaranya adalah kitab *Al Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila*, dan *Kitab al Kharaj*.⁷ Diantara kitab tersebut, kitab *al Kharaj* adalah kitab yang paling terkenal. Di dalam kitab *al Kharaj* terdapat sejumlah pemikiran ekonominya, misalnya adalah keuangan Negara, pajak tanah, pemerintahan dan musyawarah.⁸

⁴ Untuk lebih mudahnya memahami pembahasan ini lihat lampiran 16.

⁵ Hamidi ibn Abdurrahman al Junaidi, *Manahij al Bahiun fi al Iqtishad al Islami* (Kairo: Syirkah al 'Abikani li Atthaba'ah wa An Nasyr, 1407 H), hal. 129, dalam Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, cet. I (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005) hal. 69

⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 16, dalam Euis Amalia, Sejarah., *ibid.*

⁷ Hamidi ibn Abdurrahman al Junaidi, *Manahij*, hal. 132, dalam Euis Amalia, Sejarah, hal. 132.

⁸ *Ibid.*, hal. 69-70

Dalam konteks persoalan harga, Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Beliau mengamati peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga.⁹

Pada masa Abu Yusuf, persepsi umum yang berkembang perihal hubungan antara harga dan kuantitas hanya dilihat pada sisi kurva *demand* (ketika terjadi kelangkaan barang maka harga naik, dan sebaliknya). Hal ini dibantah oleh beliau dengan mengatakan bahwa, “kadang-kadang makanan melimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”¹⁰. Dengan kata lain, beliau mengatakan bahwa, harga tidak bergantung pada kekuatan permintaan saja, melainkan juga kekuatan penawaran.¹¹ Lebih dari itu Abu Yusuf juga mengindikasikan ada faktor lain yang turut mempengaruhi harga, tetapi hal ini tidak dijelaskan lebih rinci.¹²

Hal lain yang terkait dengan persoalan harga yang dibahas dan diamati oleh Abu Yusuf adalah tentang pengendalian harga. Beliau berpendapat pemerintah tidak boleh menetapkan harga.¹³

Dalam memecahkan masalah kenaikan harga, Abu Yusuf berpendapat bukanlah dengan menetapkan harga. Melainkan dengan cara menambah suplai barang di pasar dan disertai penghapusan praktik penimbunan, monopoli, dan

⁹ Adiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 249.

¹⁰ Sabahuddin Azmi, *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought* (New Delhi: Goodword Books, 2002), hal. 30, dalam Adiwarman A Karim, *Sejarah*, hal 251.

¹¹ *Ibid.*, hal. 249-251

¹² *Ibid.*, hal. 252

¹³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Recent works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), hal. 38.

praktik korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.¹⁴

2. Abu Ubaid (150-224 H)

Abu Ubaid dilahirkan di Kota Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan pada tahun 150 H dan wafat pada tahun 224 H. Beliau bernama lengkap Al Qasim ibn Sallam ibn Miskin ibn Zaid Al Harrawi Al Azadi Al Baghdadi.¹⁵

Beliau merupakan seorang cendekiawan Muslim terkemuka pada awal abad ketiga Hijriyah (abad kesembilan Masehi) yang menetapkan revitalisasi sistem perekonomian berdasarkan Al Qur'an dan Hadis melalui reformasi dasar-dasar kebijakan keuangan dan institusinya.¹⁶

Kitabnya yang sangat terkenal, *Al Amwal*, merupakan sebuah karya yang luas dalam membahas keuangan publik dalam Islam. Karya beliau ini sangat kaya dengan sejarah ekonomi pada paruh pertama abad ke dua H dari sejarah Islam dan juga merupakan sebuah ringkasan tradisi asli dari Nabi Muhammad Saw. dan *atsar* dari para Sahabat serta *tabi'in* dalam berbagai hal yang berkaitan dengan ekonomi.¹⁷

Selain membahas keuangan publik, Abu Ubaid juga membahas fungsi dari uang dan mata uang yang baik untuk digunakan dalam transaksi. Beliau mengakui dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange*

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Adiwarman A Karim, Sejarah., hal 264.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 266.

¹⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Islamic Economic Thought: Foundation, Evolution and Needed Direction*, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), hal. 16-17.

value) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Secara implisit beliau juga mengakui fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Lebih dari itu, dalam hal mata uang yang digunakan beliau menyarankan untuk menggunakan emas dan perak sebagai harga dari barang dan jasa.¹⁸

3. Al Ghazali (1058-1111 M)

Al Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1058 M). Beliau memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al Tusi Al Ghazali.¹⁹ Beliau juga mendapat julukan *Hujjatul Islam*.

Imam Al Ghazali memiliki banyak karya dan merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang produktif. Diperkirakan tidak kurang dari 300 lebih karya tulis yang beliau hasilkan yang meliputi berbagai disiplin ilmu dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa (bahasa Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, dan Latin). Kitab-kitab tersebut diantaranya adalah *Ihya Ulum al Din*, *al Munqidz min al Dhalal*, *Tahafut al Falasifah*, *Minhaj al Abidin*, *Qawa'id al Aqaid*, dan *al Mustashfa min 'ilm al Ushul*.²⁰

Pemikiran beliau dalam hal ekonomi yang kiranya cukup penting adalah tentang uang dan fungsinya. Beliau menganalogikan uang seperti halnya cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna (dalam istilah ekonomi klasik adalah uang tidak memberi kegunaan secara langsung atau *direct utility function*. Ia akan memberikan kegunaan apabila digunakan untuk membeli barang atau dengan istilah daya beli uang). Beliau juga berpendapat

¹⁸ Adiwarman A Karim, Sejarah., hal. 279-280.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 314.

²⁰ *Ibid.*, hal. 316.

bahwa, dalam transaksi barter sekalipun uang tetap dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang.²¹

Beliau mengatakan, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Selanjutnya beliau juga mengatakan perdagangan dinar dan dirham (uang) ibarat memenjarakan uang sehingga uang tidak dapat berfungsi dengan baik. Makin banyak uang yang diperdagangkan, makin sedikit yang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Bila semua uang yang ada dipergunakan untuk membeli uang, tidak ada lagi uang yang dapat berfungsi sebagai alat tukar.²² Lebih rinci beliau berpendapat bahwa, fungsi uang adalah mencakup tiga hal. pertama, sebagai standar nilai harga. Kedua, media transaksi pertukaran. Ketiga, sebagai media simpanan.²³

Berkenaan dengan jenis mata uang yang digunakan untuk bertransaksi, Al Ghazali berpendapat, selain dinar dan dirham juga dapat digunakan benda lain yang tidak mengandung emas dan perak asalkan dinyatakan oleh pemerintah sebagai alat bayar resmi.²⁴ Lebih lanjut, Al Ghazali melarang penimbunan uang, mengubahnya menjadi bentuk yang lain, dan memalsukannya.²⁵

²¹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 53.

²² Dari perkataan Al Ghazali ini dapat kita ketahui bahwa beliau menolak perdagangan uang sebagaimana yang telah mendominasi pada sistem ekonomi saat ini (Kapitalis). Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam*., hal. 53-54.

²³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 80. Lihat juga AbulHasan M. Sadeq, *Introduction: Islamic Economic Thought*, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), hal. 6.

²⁴ Al Ghazali, *Kitab Adab Al Kasb wa Al Ma'asy* (Adab Mencari Nafkah), cet. II (Bandung: Karisme, 2002), hal. 51. Lihat juga Adiwarman A Karim. *Ekonomi*., hal. 54.

²⁵ Adiwarman A Karim, *Sejarah*., hal 336-338.

Al Ghazali juga memberikan pendapat tentang otoritas moneter. Menurutnya pembuatan dan pengendalian nilai tukar adalah berada di bawah kewenangan pemerintah secara penuh. Beliau melarang apabila yang membuat dan mengendalikan nilai uang diserahkan kepada segolongan orang, meskipun mendapat persetujuan masyarakat, selama tidak mendapat ijin resmi dari pemerintah.²⁶

Adapun berkaitan dengan persoalan harga, Al Ghazali juga salah seorang yang berpendapat bahwa menimbun barang (barang apapun dan dalam waktu kapanpun) adalah terlarang. Karena akan menyebabkan kenaikan pada harga barang yang ditimbun.²⁷ Beliau memberikan pengecualian pada satu hal, yakni ketika persediaan barang makanan sedang melimpah atau berlebihan, dan kebutuhan masyarakat tidak seberapa (tidak melebihi penawaran), sehingga mereka tidak mau membelinya kecuali dengan harga yang sangat rendah, lalu si pedagang makanan menunggu kembalinya harga-harga secara wajar (tetapi bukan menunggu datangnya musim kering atau paceklik), maka yang demikian itu tidak dianggap sebagai tindakan menimbun yang menimbulkan mudharat (kerusakan).²⁸ Dalam teori ekonomi konvensional hal ini disebut juga dengan *equilibrium price* atau ekonom Muslim menyebutnya dengan *al Tsaman al Adil* (harga yang adil).²⁹

²⁶ Adiwarman A. Karim, Ekonomi, hal. 143, dalam Ahmad Dimiyati. Teori Keuangan Islam; Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al Ghazali, cet. I (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hal. 90.

²⁷ Al Ghazali, Kitab *Adab*, hal. 45-48.

²⁸ *Ibid.*, hal. 47.

²⁹ Adiwarman A Karim, Sejarah., hal 325.

Al Ghazali juga memiliki wawasan berkenaan dengan elastisitas permintaan. Beliau menyatakan bahwa, pengurangan margin keuntungan dengan mengurangi harga akan menyebabkan peningkatan penjualan, dan karenanya terjadi peningkatan laba.³⁰

4. Ibn Taimiyah (1263-1328 M)

Ibn Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M, bertepatan dengan 10 Rabiul Awwal 661 H. Nama lengkap beliau adalah Taqiyuddin Ahmad ibn Abdul Halim. Beliau berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Ayah, paman, dan kakeknya merupakan ulama besar Mazhab Hanbali dan penulis sejumlah buku.³¹

Sejumlah karya tulisan terlahir dari pikiran beliau. Dalam konteks ekonomi, pemikiran beliau tentang ekonomi banyak diambil dari karya tulis beliau yang berjudul, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al Islam, as Siyasa as Syar'iyah fi Ishlah ar Ra'i wa ar Ra'iyah* dan *al Hisbah fi al Islam*.³²

Sebagaimana halnya para pendahulunya, dalam persoalan harga Ibn Taimiyah juga memiliki pemikiran dan pendapat yang dibahasnya relatif lebih luas apabila dibandingkan dengan ulama lain.³³

Dalam bukunya *al Hisbah fi al Islam* misalnya, beliau membahas secara luas tentang stabilitas harga.³⁴ Pada pembahasan awal beliau membahas persoalan

³⁰ Adiwarman A Karim, Sejarah., hal 326. Lihat juga Al Ghazali, Kitab *Adab*., hal. 74.

³¹ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), hal. 119.

³² Adiwarman A Karim, Sejarah., hal. 353.

³³ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (UK: *The Islamic Foundation*, 1988), hal. 239.

harga secara umum yang kemudian pada bagian lainnya dilanjutkan perinciannya. Pembahasan awal yang beliau utarakan adalah perihal pembagian dua jenis harga, yakni harga yang zalim lagi haram dan harga yang adil lagi halal. Pada masing-masing jenis harga ini beliau juga memberikan kriteria-kriteria sehingga bisa dikategorikan masuk ke dalam jenis harga yang adil ataukah zalim.³⁵

Ibn Taimiyah juga mengisyaratkan perihal kebolehan penetapan harga untuk menghapus tindakan zalim dari sebagian orang yang telah memonopoli pembelian dan pengeceran barang. Sebagaimana halnya pembagian dua jenis harga, dalam hal penetapan harga (regulasi harga) Ibn Taimiyah juga membagi penetapan harga menjadi dua jenis, yakni penetapan harga yang dibolehkan dan yang terlarang.³⁶ Beliau mengatakan substansi dari penetapan harga adalah agar mereka tidak menjual atau membeli kecuali dengan harga yang sewajarnya.³⁷ Berkenaan dengan masalah harga ini, salah satu hal yang juga cukup banyak mendapat perhatian dari beliau adalah berkenaan dengan institusi hisbah. Sebagaimana yang tampak pada karangan beliau yang berjudul *al Hisbah fi al Islam au Wazhifah al hukumah al Islamiyyah*.³⁸

³⁴ Dalam sistem ekonomi sekarang stabilitas harga merupakan salah satu ukuran dalam melihat keberhasilan suatu negara dalam mengelola ekonomi makronya. Lihat Bramantyo Djohanputro, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, cet I (Jakarta: PPM, 2006), hal. 13.

³⁵ Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of The Hisba* (Tugas Negara Menurut Islam), cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 27-32.

³⁶ *Ibid.*, hal. 52-56.

³⁷ *Ibid.*, hal. 29-30.

³⁸ Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam*. Lihat juga M. Arskal Salim G.P, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, cet. I (Jakarta: LOGOS, 1999), hal. 112-117.

Adapun dalam konteks moneter, Ibn Taimiyah telah memahami secara jelas akan pentingnya kebijakan moneter untuk menstabilkan ekonomi.³⁹ Berkaitan dengan fungsi mata uang beliau mengatakan, uang mempunyai dua fungsi utama, yakni sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda.⁴⁰

Sebagaimana halnya Imam Al Ghazali yang menentang keras perdagangan uang, Ibn Taimiyah juga melarangnya. Beliau mengatakan perdagangan uang akan mengalihkan fungsi dari tujuan yang sebenarnya. Hanya saja kemudian, apabila perdagangan uang itu disertai dengan syarat-syarat tertentu maka diperbolehkan. Misalnya adalah syarat keharusan untuk dilakukan secara simultan dan tanpa penundaan.⁴¹

Lebih jauh, beliau juga melarang pencetakan mata uang yang berlebihan atau sangat banyak dan menentang terjadinya penurunan nilai mata uang. Hal ini mengindikasikan bahwa, Ibn Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah uang, total volume transaksi, dan tingkat harga. Dalam hal pencetakan mata uang oleh pemerintah beliau menyarankan agar pemerintah mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan untuk mencari keuntungan apa pun dari pencetakannya tersebut agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.⁴²

Beliau juga telah mengamati fenomena pada masa itu (Dinasti Mamluk) perihal kualitas dari uang yang beredar di masyarakat. Beliau mengatakan bahwa,

³⁹ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (UK: *The Islamic Foundation*, 1988), hal. 184.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 140.

⁴¹ *Ibid.*,

⁴² *Ibid.*, hal. 141.

uang yang memiliki kualitas buruk akan mengeluarkan uang yang berkualitas baik dari pasar. Dimana hal ini pada masa ekonomi klasik (1857) disebut dengan *Gresham's Law*.⁴³

5. Ibn Khaldun (1332-1406 M)

Ibn Khaldun dikenal sebagai peletak dasar ilmu sosiologi politik dan filsafat. Beliau dilahirkan di Tunisia pada 1 Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 mei 1332 M dengan nama lengkap Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Al Hasan ibn Jabir ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Khaldun.⁴⁴

Beliau berasal dari keluarga intelektual yang sedikit tertarik dengan persoalan politik. Beliau biasa berjumpa dengan tokoh intelektual dari Afrika Utara dan Spanyol yang sebagian besar adalah pengungsi dari kekhalifahan timur. Pendidikannya di lalui di Tunisia dan Fez (Maroko) dengan mempelajari berbagai ilmu: menghafal al Qur'an, mempelajari tata bahasa, hukum Islam (syariah), hadis, retorika, filologi, dan puisi. Selain itu, ia mempelajari sastra Arab, filsafat, matematika, dan astronomi.⁴⁵

Karya beliau, *Al Ibar* (Sejarah Dunia), adalah sebuah karya yang tidak adaandingannya (*unsurpassed*) sebagai sebuah sumber referensi untuk analisis sejarah pada masa beliau baik itu sarjana muslim maupun non muslim.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*, hal. 143-144.

⁴⁴ RA Gunadi dan M Shoelhi (Penyunting), *Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, cet. I (Jakarta: Republika, 2002), hal. 119-120. Lihat juga Charles Issawi, *Ibn Khaldun Analysis of Economic Issues*, dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed), *Readings in Islamic Economic Thought* (Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia, 1992), hal. 222.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Charles Issawi, *Ibn Khaldun*, hal. 222.

Dalam konteks moneter beliau mempunyai pemikiran tentang teori uang. Ibn Khaldun berpendapat, selain berfungsi sebagai medium pertukaran, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai sesuatu.⁴⁷ Beliau menyarankan digunakannya emas dan perak sebagai uang standar dikarenakan terjaganya emas dan perak dari ancaman fluktuasi. Adapun jenis mata uang yang lain rentan terhadap fluktuasi.⁴⁸ Dalam keadaan nilai uang yang tidak berubah, kenaikan harga atau penurunan harga semata-mata ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.⁴⁹ Beliau juga berpendapat bahwa, uang tidak perlu mengandung emas dan perak, tetapi emas dan perak menjadi standar nilai uang.⁵⁰ Pendapat beliau ini sejalan dengan apa yang pernah dijalankan oleh sistem moneter dunia pada tahun 1890-1914 M (*the gold bullion standard*).⁵¹

Dalam hal institusi yang memiliki otoritas untuk menerbitkan atau mencetak uang Ibn Khaldun berpendapat adalah sebuah kantor religius yang tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal.⁵²

Sebagaimana pendahulunya Imam Al Ghazali dan Ibn Taimiyah yang membahas persoalan harga yang terbentuk karena adanya interaksi permintaan dan penawaran. Ibn Khaldun juga membahas permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi harga.⁵³

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 226.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam.*, hal. 56.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Euis Amalia, *Sejarah.*, hal. 201-202.

⁵² Adiwarman A Karim, *Sejarah.*, hal 401.

⁵³ Charles Issawi, *Ibn Khaldun*, hal. 224.

Lebih dari itu, Ibn Khaldun juga membahas tentang unsur-unsur dari harga itu sendiri. Beliau mengatakan, harga adalah kumpulan dari beberapa unsur, yakni gaji, laba, dan pajak.⁵⁴

Adapun bedanya antara Ibn Taimiyah dan Ibn Khaldun dalam hal melihat fenomena harga di berbagai negara adalah Ibn Taimiyah lebih fokus pada kebijakan untuk menyikapi fenomena yang terjadi sedangkan Ibn Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi.⁵⁵

6. Al Maqrizi (1364-1442 M)

Al Maqrizi adalah seorang ahli sejarah dan biografer. Beliau adalah seorang *muhtashib*, yakni inspektur urusan pasar, yang belakangan menuliskan sebuah buku tentang timbangan dan ukuran.⁵⁶ Beliau juga menjadi seorang *Khatib* pada sebuah masjid dan sebagai pengajar agama. Namun kecenderungan beliau yang paling menonjol adalah di bidang sejarah.⁵⁷

Beliau adalah seorang ilmuwan yang mempunyai keahlian statistika. Beliau merupakan murid dari Ibn Khaldun.⁵⁸ Nama lengkap beliau adalah Taqiyuddin Abu Al Abbas Ahmad ibn Ali ibn Abdul Qadir Al Husaini. Lahir di desa Barjuwan, Kairo, pada tahun 766 H.⁵⁹

⁵⁴ Adiwarman A Karim, Sejarah., hal 403.

⁵⁵ Adiwarman A Karim, Ekonomi Islam., hal. 164.

⁵⁶ Tugas utama seorang *muhtashib* adalah sebagai petugas inspeksi umum, khususnya adalah dalam hal operasi pasar. Adapun fungsi ekonominya adalah: petugas yang menjaga penawaran dan perbekalan aneka kebutuhan, mengawasi industri (standarisasi produk), mengawasi ketersediaan jasa-jasa sosial (misal tenaga medis), dan mengawasi perdagangan. Lihat Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (UK: The Islamic Foundation, 1988), hal. 42 dan 189-190.

⁵⁷ Ahmad Barmawi, 118 Tokoh Muslim Genius Dunia, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hal. 383.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Adiwarman A Karim, Sejarah., hal 414.

Sebagaimana para pendahulunya, Al Maqrizi juga telah banyak menghasilkan karya tulis. Tercatat lebih dari seratus buah karya tulis telah beliau hasilkan, baik dalam bentuk buku kecil maupun besar.⁶⁰

Al Maqrizi adalah seorang murid ternama Ibn Khaldun yang melakukan studi khusus tentang uang dan kenaikan harga yang terjadi secara periodik pada bencana kelaparan dan musim kering.⁶¹ Beliau adalah cendekiawan muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan uang dan mngkorelasikannya dengan peristiwa inflasi.⁶²

Dalam bidang moneter, Al maqrizi menekankan untuk menjadikan emas dan perak sebagai mata uang. Serta membatasi pencetakan mata uang *fulus* yang hanya diperuntukkan bagi transaksi yang berskala kecil.⁶³ Selain itu, beliau juga menghubungkan antara penawaran uang (*money supply*) dengan tingkat inflasi (*inflation rate*), sebuah pemikiran yang baru ditemukan setelahnya dan dijelaskan oleh sebuah teori yang dikenal dengan nama teori kuantitas uang (*the quantity theory of money*) atau ekonomi moneter.⁶⁴

Penekanan Al Maqrizi untuk menjadikan emas dan perak sebagai mata uang berdasarkan kepada hasil pengamatannya terhadap sejarah penggunaan mata uang. Beliau mengatakan bahwa, mata uang yang dapat diterima sebagai standar

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 416-417.

⁶¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Recent works.*, hal. 50.

⁶² Adiwarman A Karim, *Sejarah.*, hal 420.

⁶³ Rafiq al Misri, *Al Islam wa'l Nuqud*, (Jeddah: *International Centre for Research in Islamic Economics*, 1981), hal. 63-80, dalam *Ibid.*,

⁶⁴ AbulHasan M. Sadeq, *Introduction.*, hal. 6.

nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanyalah yang terdiri dari emas dan perak.⁶⁵

Sebagaimana halnya Ibn Taimiyyah, Al Maqrizi juga membahas seputar implikasi dari keberadaan mata uang yang berkualitas buruk.⁶⁶ Lebih jauh, berkaitan dengan konsep daya beli uang Al Maqrizi berpendapat agar pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam hal pencetakan mata uang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya jumlah uang yang beredar melebihi aktivitas produksi yang ada sehingga menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan.⁶⁷

Pada masanya, Al Maqrizi berhasil mengamati penyebab dari kenaikan harga. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah (*natural*) dan faktor kesalahan manusia (*unnatural*).⁶⁸

Menurutnya, inflasi alamiah adalah inflasi yang tidak bisa dihindari oleh umat manusia. Ini berbeda dengan inflasi yang disebabkan kesalahan manusia. Selanjutnya lebih jauh dijelaskan Al Maqrizi, inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia bisa dalam berbentuk tindak korupsi, administrasi yang buruk, pungutan pajak yang berlebihan, meningkatnya jumlah mata uang fulus.⁶⁹

⁶⁵ Al Maqrizi, *Ighthas al Ummah bi Kasyf al Ghummah*, hal. 80, dalam Adiwarman A Karim, *Sejarah*, hal 422

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 423.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 424.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 425.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 425-429.

B. Pemikiran Moneter Menurut Ekonom Muslim Kontemporer dan Hizbut Tahrir

1. Umer Chapra (1933 – Sekarang)

M Umer Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Beliau adalah seorang ekonom Muslim yang sangat produktif. Ini terbukti dari banyaknya karya yang telah beliau hasilkan, serta banyaknya penghargaan yang telah beliau terima. Tercatat setidaknya 15 buku dan monograf (karangan ilmiah), 95 artikel, dan 15 buah resensi buku yang telah beliau hasilkan. Beberapa diantaranya telah diterjemahkan dalam banyak bahasa, diantaranya Indonesia, Malaysia, Spanyol, Turki, dan Perancis.⁷⁰

Karya-karya beliau yang erat kaitannya dengan moneter diantaranya, berupa buku: *Towards a Just Monetary System*, *Prohibition of Interest: Does it Make Sense?*, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, dan *Allocation of Bank Credit in Pakistan*. Berupa artikel: *Money and Banking in an Islamic Framework*, *Monetary Policy in an Islamic Economy*, *Comments on the Council of Islamic Ideology Report on Elimination of Interest*, *The Nature of Riba in Islam*, *A Matter of Interest: The Rationale of Islamic Anti-Interest Stance*, *Banks without Interest: Is it Conceivable?*, *The Abolition of Interest in Islam and the Realization of Socio-Economic Goals*, *Monetary Management in an Islamic Economy*, *Islamic Economic Studies*, *Alternative Visions of International Monetary Reform*.⁷¹

⁷⁰ Dr. M Umer Chapra: A Brief Biography, dalam <http://www.muchapra.com>

⁷¹ *Ibid.*,

Dalam bukunya Sistem Moneter Islam beliau mengawalinya dengan menyebutkan sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa ekonomi dunia kini berada dalam ketidakstabilan dan ketidakpastian yang terus terjadi (inflasi yang tinggi hingga resesi), meskipun berbagai upaya telah dilakukan (*recovery*).⁷²

Lebih lanjut beliau mengatakan, sesungguhnya berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengeluarkan ekonomi dunia dari krisis tidaklah menyentuh akar persoalan. Dengan kata lain hanya menyentuh gejala-gejala dari permasalahan yang ada. Akibatnya penyembuhan yang terjadi hanyalah bersifat sementara.⁷³

Pernyataan awal yang beliau utarakan dalam buku tersebut secara singkat dapat dikatakan adalah meninjau ulang landasan atau pijakan dari bangunan ekonomi yang ada saat ini.

Dalam konteks moneter, salah satu gagasan besar yang beliau utarakan adalah dihapuskannya bunga dari setiap aktivitas ekonomi. Sembari diikuti dengan reformasi pada bidang lainnya (moral, sosial, dan institusi keuangan maupun politik).⁷⁴

Adapun dalam hal kebijakan moneter beliau menjawab beberapa hal yang seringkali menjadi pertanyaan. Pertama, perihal dimana tidak adanya instrumen suku bunga sebagai mekanisme untuk menyamakan antara permintaan dan penawaran uang. Kedua, bagaimana kebijakan moneter dapat berperan efektif untuk mencapai sasaran dari perekonomian Islam? Ketiga, pembiayaan alternatif

⁷² Apa yang beliau katakan ini adalah sebuah analisis yang sangat tajam dan mendalam yang sangat menentukan arah dari semua usaha yang direncanakan dan dibangun. Lihat M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Sistem Moneter Islam), cet. I (Jakarta: Gema Insani Press. 2000), hal. xix.

⁷³ *Ibid.*, hal. xx.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. xxvii.

apa yang dapat dipakai oleh pemerintah untuk membiayai defisit anggaran sekaligus tidak bersifat inflasioner?⁷⁵

Menurut beliau, alternatif instrumen dan kebijakan yang dapat digunakan sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan di atas adalah bahwa, dalam Islam permintaan terhadap uang hanya diperkenankan dengan motif transaksi dan untuk berjaga-jaga. Adapun motif spekulasi dilarang keberadaannya berdasarkan hukum syara.⁷⁶

Dari sisi penawaran uang, beliau berpendapat bahwa, variabel yang dipakai dalam suatu kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam adalah cadangan uang (*stock of money*), bukan suku bunga. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ekspansi moneter tidak bersifat kurang mencukupi atau justru berlebihan, melainkan cukup untuk sepenuhnya mengeksplotasi kapasitas perekonomian agar dapat mensuplai barang-barang dan jasa. Walaupun hal ini nampak mengakui peranan penting dari pertumbuhan suplai uang untuk mengelola perekonomian secara baik, tetapi tidak sama sekali sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh kelompok monetaris yang membiarkan kekuatan-kekuatan pasar ekonomi berjalan dengan sendirinya hingga tercapai sasaran-sasaran ekonomi.⁷⁷

Lebih jauh beliau mengatakan, untuk menjamin pertumbuhan suplai uang yang mencukupi atau tidak berlebihan sangat penting untuk mengawasi jalannya

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 134.

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 136.

tiga sumber utama ekspansi moneter, yakni defisit fiskal, penciptaan kredit dari Bank komersial, dan surplus neraca pembayaran.⁷⁸

Adapun instrumen dan kebijakan moneter yang dapat dilakukan selain keharusan penghapusan bunga sebagaimana yang telah disinggung di atas, juga bisa digunakan instrumen target pertumbuhan dalam M dan M_0 , Saham publik terhadap deposito unjuk (uang giral), cadangan wajib resmi, pembatasan kredit, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai.⁷⁹

Beliau juga berpendapat perlunya melakukan reformasi fundamental terhadap sejumlah hal yakni, tabungan dan investasi, pembiayaan lewat penyertaan modal, mengurangi kekuasaan Bank, dan bursa (pasar modal) yang sehat.⁸⁰

Hanya saja, Umer Chapra tidak memberikan pendapatnya terkait dengan bentuk mata uang yang dijadikan sebagai standar moneter, apakah *fiat money* atau *commodity*. Padahal hal ini merupakan pembahasan yang tidak kalah pentingnya bagi sejumlah ekonomi Muslim lainnya.⁸¹

2. Masudul Alam Choudhury

Masudul Alam Choudhury adalah seorang profesor ekonomi dan sekaligus sebagai direktur pada pusat *centre of humanomics* di Universitas Cape Breton Sydney. Beliau adalah salah seorang kontributor di bidang ekonomi Islam sejak tahun 1974. Dalam konteks moneter, beliau telah banyak memberikan pendapat

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 137-140.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 141-151.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 43-60.

⁸¹ Misalnya adalah Prof. Umar Ibrahim Fadillo. Lihat David Barsamian dan Liem Siok Lan, *Menembus batas (Beyond Boundaries) Damai untuk Semesta*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 49.

melalui berbagai tulisan. Beberapa tulisan itu diantaranya: “*Islamic Money Against the Euro and Dollar*”, “*A Monetary System With 100-Per Cent Reserve Requirement and the Gold Standard: Theory, Fact and Policy*”, “*A Theory of Endogenous Money*”, “*Global Stock Market Turmoil: Lessons to Learn for the Future In Islamic Perspectives*”, “*Micro-Money and Real Economic Relationship in the 100 Per Cent Reserve Requirement Monetary System*”, “*the Nature Of Money and Monetary Policy for Islamic Economic Integration*”.⁸²

Choudhury melakukan analisis ekonomi moneternya berdasarkan teori *endogenous money*, ia berpendapat bahwa perekonomian akan berjalan stabil ketika ditunjang oleh sistem 100% reserve.⁸³

Teori *endogenous* dalam Islam secara sederhana dapat diartikan bahwa, keberadaan uang pada hakikatnya adalah representasi dari volume transaksi yang ada dalam sektor riil. Dengan kata lain, semakin tinggi kapasitas dan volume sektor riil, maka permintaan uang pun akan meningkat.⁸⁴ Hal ini sangat berbeda dengan teori yang diyakini oleh ekonomi konvensional, dimana permintaan dan penawaran uang di pengaruhi oleh suku bunga (*interest rate*) yang keberadaannya ditentukan di luar sistem (sektor moneter bertindak sebagai variabel bebas).⁸⁵

Adapun dalam Islam permintaan dan penawaran uang dipengaruhi oleh besaran *profit sharing* atau *expected rate of profit* (harapan keuntungan yang bisa didapatkan dari menginventasikan uang di sektor riil). Tinggi rendahnya *expected*

⁸² <http://www.capebretonu.ca/mchoudhu/ipe.html>

⁸³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro*, hal.98.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 191-192.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 205.

rate of profit ini merupakan representasi dari prospek pertumbuhan aktual ekonomi.⁸⁶

Teori *endogenous* bertujuan untuk menjaga konsistensi keseimbangan antara pertumbuhan sektor riil dengan sektor moneter sehingga nilai intrinsik uang dapat dijaga. Lebih jauh, dalam teori ini peranan dari bank sentral dalam mempengaruhi jumlah uang beredar secara penuh tidaklah dapat dilakukan. Melainkan hanya bergerak sebagai fasilitator dari sirkulasi volume uang yang beredar dengan tujuan agar jumlah uang beredar sesuai dengan *actual spending* (pembelanjaan yang sebenarnya) yang ada dan bukannya ekspektasi dari *spending demand*.⁸⁷ Dengan kata lain, peran dari masyarakat lebih besar dalam mempengaruhi *future money supply*.⁸⁸

Dari sisi permintaan, dalam teori *endogenous* permintaan uang dibatasi dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan investasi yang produktif.⁸⁹ Sebaliknya, permintaan uang untuk transaksi yang bersifat spekulatif akan dicegah dan dilarang.

Dengan demikian, paradigma teori *endogenous money* tentang sektor moneter dan riil memiliki hubungan yang saling mengikat atau tidak berdiri sendiri.

Adapun dalam hal proses perumusan kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter Coudhury berpendapat adalah melalui yang disebut dengan *syuratiq process*, yaitu suatu kebijakan yang diambil otoritas moneter berdasarkan

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 192.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 208.

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 209.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 210.

musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Pendapat yang disampaikan Coudhury ini bisa dikatakan mirip dengan koordinasi antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dalam teori ekonomi konvensional.⁹⁰

3. Hizbut Tahrir (1950 – Sekarang)

Hizbut Tahrir (HT) adalah sebuah partai politik Internasional. Sejak berdiri tahun 1953 – sekarang, Hizbut Tahrir telah eksis di banyak Negara dan mengalami perkembangan yang cukup pesat.⁹¹

Hizbut Tahrir memiliki tujuan untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan cara menegakkan Daulah Khilafah Rasyidah yang didalamnya diterapkan syariah secara total. Tujuan ini tentunya memiliki sejumlah konsekuensi yang harus dihadapi oleh Hizbut Tahrir. Diantaranya adalah menyiapkan dan menjelaskan kepada publik bagaimana gambaran dari Daulah Khilafah termasuk di dalamnya sistem tata aturan yang akan digunakan dan diterapkan. Dalam konteks penelitian ini adalah perihal sistem ekonomi yang akan digunakan.

Dalam pembahasan sistem ekonomi, Hizbut Tahrir juga memasukkan pembahasan berkenaan dengan sistem moneter. Pembahasan ini dapat kita temui di dalam beberapa buku yang telah ditulis oleh para pengurus dan anggota Hizbut Tahrir itu sendiri. Diantara buku itu adalah: “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif”, “Politik Ekonomi Islam”, “Sistem Keuangan di Negara Khilafah”, “Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam”, “Mencari Solusi Krisis Ekonomi”, “Seputar Dinar dan Dirham”.⁹²

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 227.

⁹¹ Penjelasan lebih lanjut tentang Hizbut Tahrir lihat bab III.

⁹² *Ibid.*, Selengkapnya lihat kembali data-data primer pada bab I halaman 23.

Pemikiran dan gagasan Hizbut Tahrir tentang moneter dimulai dari otoritas yang berwenang (Khalifah) mengambil kebijakan moneter dan departemen pelaksana (departemen kemaslahatan umum) dari kebijakan itu sendiri, bentuk mata uang, kurs pertukaran mata uang, hukum pertukaran antar mata uang, hukum transaksi spekulatif, hukum pendirian Bank, hukum menimbun mata uang, hukum pasar modal, hukum bunga, hingga hukum mata uang kertas substitusi.

Menurut HT, antara kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan moneter dan pejabat pelaksanaannya adalah berbeda. Kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan moneter adalah berada dalam wewenang Khalifah, sedangkan institusi dan petugas pelaksanaannya adalah sebuah departemen yang dijalankan oleh seorang direktur jenderal yang bertanggungjawab pada departemen tersebut.⁹³

Dalam hal bentuk mata uang Hizbut Tahrir berpendapat umat Islam diwajibkan oleh Allah Swt. menggunakan standar moneter berdasarkan emas dan perak. Hal ini bukan hanya dikarenakan keuntungan dari penggunaan standar emas dan perak, melainkan adalah sejumlah nash-nash syara yang menyatakannya.⁹⁴ Lebih dari itu, HT memandang penggunaan uang kertas (substitusi) untuk memudahkan transaksi yang ada adalah diperbolehkan selama tetap dijamin sepenuhnya dengan sejumlah emas dan perak.⁹⁵

⁹³ Perbedaan ini disebabkan karakter dari departemen kemaslahatan umum itu sendiri yang di dalamnya terdapat departemen yang mengurus moneter. Dimana salah satu karakter tersebut adalah melaksanakan berbagai kebijakan Negara Islam (yang diambil oleh Khalifah) dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat dan mengelola urusan Negara Islam. Lihat Hizbut Tahrir, *Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah* (Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi), cet. I (Jakarta: HTI Press, 2006), hal. 212-224. Lihat juga Jalal al-Anshari (Ed.), hal. 116-118.

⁹⁴ Taqiyuddin an Nabhani, *An Nidlam Al Iqtishadi*, hal. 297-302.

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 308.

Hizbut Tahrir juga mengemukakan pemikirannya tentang kurs mata uang dalam pandangan Islam. Menurut HT, dalam Islam kurs pertukaran mata uang adalah menggunakan kurs mengambang (*floating rate*). Hal ini mengikuti ketentuan hukum syara berkaitan pelarangan terhadap penetapan harga barang.⁹⁶

Adapun hukum pertukaran mata uang sendiri HT berpendapat hukumnya adalah boleh dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan hukum syara.⁹⁷ Lebih dari itu, transaksi spekulatif yang dominan dewasa ini menurut HT juga merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan syariah Islam.⁹⁸

Sebagaimana kebolehan dalam pertukaran mata uang, pendirian lembaga perbankan menurut HT juga diperbolehkan. Namun demikian, sebagaimana halnya bolehnya pertukaran mata uang, segala bentuk aktivitas perbankan juga tetap harus merujuk kepada hukum syara.⁹⁹ Dengan kata lain, semua akad yang terjadi diperbankan salah satunya harus terhindar dari riba. Dalam hal keharaman ini (riba), HT memiliki pendapat yang mengharamkan secara mutlak.¹⁰⁰

Salah satu pendapat HT yang juga cukup menarik adalah perihal keharaman dalam penimbunan mata uang emas dan perak. Dimana HT membedakan antara menimbun (*kanz*) mata uang dengan monopoli (*ihthikar*) harta benda (selain emas dan perak), meskipun kedua-duanya memiliki status hukum

⁹⁶ Abdurrahman al Maliki, *As Siyasatu Al Iqtishadiyah Al Mutsala* (Politik Ekonomi Islam), cet. I (Bangil: Al Izzah, 2001), hal. 130-132.

⁹⁷ Taqiuddin an Nabhani, *An Nidlam Al Iqtishadi*, hal. 288-292.

⁹⁸ Dwi Condro Triono, Mengatasi Krisis Keuangan Negara, hal. 48, dalam Al Wa'ie No. 63 Tahun VI, November 2005.

⁹⁹ Muhammad Husain Abdullah, *Dirasa fi Al Fikri Al Islami* (Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam), cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 217-218.

¹⁰⁰ Lihat M. Ahmad ad-Daur, Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank.

haram. Dengan kata lain, istilah penimbunan (*kantz*) itu hanya berlaku untuk mata uang (emas dan perak).¹⁰¹ Sejalan dengan keharaman menimbun mata uang, HT juga berpendapat bahwa tindakan memalsukan mata uang adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah Islam.¹⁰²

Fenomena moneter yang juga menjadi perhatian HT adalah berkenaan dengan pasar modal. HT berpendapat, sesungguhnya pasar modal berdiri di atas tiga hal, yaitu: sistem perseroan terbatas (PT), sistem perbankan ribawi, dan sistem uang kertas inkonvertibel. Dimana tiga hal ini dalam pandangan Islam tidak dibenarkan.¹⁰³

Adapun dalam hal persoalan harga yang mendapat perhatian HT adalah berkaitan dengan penetapan harga barang atau jasa. Dimana HT berpendapat penetapan harga adalah diharamkan secara mutlak, tanpa membedakan antara barang makanan pokok dengan yang bukan makanan pokok. Begitupula tidak membedakan lagi apakah dalam kondisi perang ataukah damai, paceklik atau panen raya, hukum pematokan harga ini tetap diharamkan. Bahkan, apabila ketetapan tersebut dikeluarkan oleh penguasa maka itu merupakan suatu kezaliman terhadap rakyatnya.¹⁰⁴

¹⁰¹ Abdul Qadim Zallum, *Al Amwal fi Ad Daulah Al Khilafah* (Sistem Keuangan di Negara Khilafah), cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hal. 223.

¹⁰² Hamd Fahmi Thabib, *al Khilafah ar Rasyidah*, hal. 152.

¹⁰³ Hizbut Tahrir, *Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal*, 1997, dalam CD Interaktif Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia.

¹⁰⁴ Taqiyuddin an Nabhani, *An Nidlam Al Iqtishadi*, hal. 212-214.

BAB III

HIZBUT TAHRIR DAN PEMIKIRANNYA

A. Profil Hizbut-Tahrir

a. Latar belakang pendirian Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1372 Hijriyah atau 1953 Masehi di kota al Quds (Baitul Maqdis), Palestina.¹ Dimasa itu, umat Islam berada dalam kondisi keterpurukan yang luar biasa.²

Sebagai sebuah partai politik, Hizbut Tahrir (HT) mengirimkan permohonan pendirian partai ke Departemen Dalam Negeri Yordania dan mempublikasikan pendirian HT di harian *Ash-Sharih* edisi 14 Maret 1953. Hanya saja kemudian permohonan pendirian HT ditolak oleh Departemen Dalam Negeri. Meskipun demikian, pengurus HT saat itu tetap beraktivitas dan mengabaikan larangan tersebut.³

Latar belakang didirikannya Hizbut Tahrir di karenakan dua hal: pertama, peristiwa kehancuran Daulah Khilafah pada 28 Rajab 1342 H, bertepatan dengan 3 Maret 1924 M di tangan seorang Yahudi, Freemasonry, Mustafa Kamal Attaturk, antek Inggris.⁴ Hal ini mengakibatkan tidak diterapkannya Islam secara praktis sebagai solusi kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga berlanjut

¹ Cd mengenal Hizbut Tahrir.

² Dari Masjid al Aqsha Menuju Khilafah; Sejarah Awal Perjuangan Hizbut Tahrir, cet. I (HTI Press, 2006), hal. 14-15

³ Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir; Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, dalam Al Wa'ie No. 55 Tahun V, hal. 35-36.

⁴ Siapa sebenarnya Kamal Attaturk?, lihat Dhabith Tarki Sabiq, *Ar Rajul ash Shanam: Kamal Attaturk* (Kamal Attaturk: Pengusung Sekulerisme dan Penghancur Khilafah Islamiyah), cet. I (Jakarta: Senayan Publishing, 2008).

kepada terpecah belahnya persatuan umat Islam seluruh dunia. Kedua, jatuhnya palestina ke tangan para penjajah akibat persekongkolan negara-negara kafir dengan kaki tangannya dari kalangan penguasa negara-negara Arab, serta berdirinya negara Israel di wilayah itu.⁵

Dua peristiwa tersebut akhirnya menggerakkan kesadaran beberapa individu kaum muslimin akan kebutuhan kebangkitan umat Islam. Untuk mencapai kebangkitan itu diperlukan sebuah perjuangan, tentunya adalah perjuangan yang terukur.⁶ Lebih dari itu, berdirinya hizbut Tahrir terutama adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah Swt. yang tertuang dalam Surah Ali Imran, ayat 110.

b. Pendiri dan pemimpin Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan di kota Al Quds (Jerusalem), di bawah seorang pendiri yang alim dan terhormat, seorang pemikir besar dan politikus, juga seorang Qodli pada mahkamah *Isti'naf* (Mahkamah Agung) di Al Quds, yaitu As Syaikh Taqiyuddin An Nabhani.⁷

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani lahir di Ijzim (masuk wilayah Haifa) dengan nama lengkap Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An Nabhani.⁸ Beliau adalah pendiri sekaligus pemimpin HT yang pertama. Beliau memimpin HT dimulai dari awal berdiri HT hingga tahun 1977, dimana pada tanggal 11 desember 1977 beliau wafat.

⁵ *Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir* (Starategi Dakwah Hizbut Tahrir), cet. II (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hal. 19-20.

⁶ *Ibid.*, hal. 21. Dari Masjid al Aqsha Menuju Khilafah., hal. 15

⁷ Ihsan Samarah, *At Ta'rif bi asy Syaikh Taqiyuddin an Nabhani* (Syaikh Taqiyuddin an Nabhani [Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya]), cet. II (Bogor: Al Azhar Press, 2003).

⁸ *Ibid.*, hal. 32

Sepeninggalnya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani, tangkup kepemimpinan selanjutnya berada di bawah kepemimpinan As Syaikh Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Beliau lahir di kota al Khalil, Palestina.⁹ Di bawah kepemimpinan beliau HT berhasil melakukan perluasan dakwah hingga mencapai kaum muslim di Asia Tengah dan Tenggara, bahkan Eropa.¹⁰ Pemimpin ke dua HT ini memegang kepemimpinan selama dua puluh lima tahun. Beliau wafat pada tanggal 29 April 2003 M.¹¹

Tampuk kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh As Syaikh Abdul Qadim Zallum dilanjutkan oleh 'Atha Abu Ar Rasytah. Nama lengkap beliau adalah 'Atha bin Khalil bin Ahmad bin Abdul Qadir Al Khathib Abu Ar Rasytah. Beliau lahir pada tahun 1943 M bertepatan pada tahun 1362 H. Beliau memimpin HT dimulai 13 April 2003 hingga sekarang.¹²

c. Perkembangan Hizbut Tahrir saat ini

Eksistensi HT saat ini berkembang lebih pesat dibandingkan pada masa sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya aktivitas yang dilaksanakan baik dengan skala domestik maupun internasional.¹³ Perkembangan ini disebabkan setidaknya dari dua hal, yakni faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang turut memberikan pengaruh terhadap perkembangan HT tentunya adalah semakin banyaknya anggota masyarakat yang menjadi bagian

⁹ Syaikh Abdul Qadim Zallum; Pengganti Terbaik Bagi Kepemimpinan Hizb Sebelumnya, dalam Al Wa'ie No. 76 Tahun VII, hal. 24.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 26.

¹¹ 'Atha Abu Ar Rasytah, dalam Al Wa'ie No. 77 Tahun VII, hal. 27.

¹² *Ibid.*, hal. 25-27.

¹³ Denny Kodrat, Dinamika Dakwah Hizbut Tahrir di Sejumlah Negara, Al Wa'ie No. 55 Tahun V, 2005, hal. 75-81. lihat juga Hassan Ko Nakata. Peran Hizbut Tahrir Membangun Peradaban Islam ke Depan, Al Wa'ie No. 85 Tahun VII, 2007, hal. 44-45.

dari HT (baik sebagai anggota maupun partisan), dimana mereka semua kemudian terlibat aktif berdakwah bersama HT baik langsung ataupun tidak langsung dengan menunjukkan sikap konsisten terhadap ide atau pemikiran yang selama ini diemban oleh HT.

Adapun faktor eksternal adalah semakin terkuaknya keburukan dan kegagalan dari ideologi Kapitalisme dalam mengatur kehidupan. Hal ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif selain dari ideologi Kapitalisme untuk mengatur tata kehidupan manusia. Daris inilah kemudian Islam hadir mencoba memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan kehidupan saat ini secara totalitas. Tawaran Islam sebagai solusi alternatif ini secara konsisten disampaikan dan digambarkan para anggota HT kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka mengenal Islam secara utuh dan menginginkan penerapannya.¹⁴

d. Buku-buku Hizbut Tahrir

Sebagai sebuah partai politik Islam Internasional yang bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dengan cara penerapan syariah Islam dalam naungan Daulah Khilafah, Hizbut Tahrir sangat berkepentingan untuk mengenalkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang diadopsi dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat Islam. Untuk itulah, Hizbut Tahrir sangat aktif menerbitkan buku-buku yang ditulis sendiri oleh para pengurus maupun anggotanya.

¹⁴ Lihat misalnya tulisan yang ditulis oleh anggota HT yang berjudul Solusi Syariah dalam Masalah Kriminalitas, file power point CD Database Interaktif Al Wa'ie.

Berikut ini penulis sebutkan beberapa buku yang ditulis dan sekaligus menjadi rujukan para anggota Hizbut Tahrir:¹⁵

- a. Peraturan hidup dalam Islam (*Nizhamul Islam*)
- b. Sistem pemerintahan dalam Islam (*Nizhamul Hukmi fil Islam*)
- c. Sistem ekonomi dalam Islam (*Nizhamul Iqtishadi fil Islam*)
- d. Sistem pergaulan dalam Islam (*Nizhamul Ijtima'iy fil Islam*)
- e. Pembentukan partai politik (*At Takattul Al Hizby*)
- f. Pokok-pokok pikiran Hizbut Tahrir (*Mafahim Hizbut Tahrir*)
- g. Negara Islam (*Daulatul Islamiyah*)
- h. Sistem Khilafah (*Al Khilafah*)
- i. Pokok-pokok pemikiran politik Hizbut Tahrir (*Mafahim Siyasah li Hizbit Tahrir*)
- j. Politik ekonomi yang agung (*Siyasatu al Iqtishadiyah al Mutsila*)
- k. Beberapa pandangan politik Hizbut Tahrir (*Nadharat siyasiyah li Hizbit Tahrir*)
- l. Sistem sanksi peradilan dalam Islam (*Nizhamul 'Uqubat fil Islam*)
- m. Hukum-hukum pembuktian (*Ahkamul Bayyinat*)
- n. Pengantar undang-undang dasar Negara Islam (*Muqaddimatu ad Dustur*)
- o. Hakikat berpikir (*at Tafkiir*)
- p. Kecepatan berpikir (*Sur'atu al Badihah*)
- q. Pemikiran Islam (*Fikru al Islamy*)

¹⁵ Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, cet. 1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2007), hal. 33-35.

B. Garis Besar Pemikiran Hizbut Tahrir

1. Problematika umat dalam pandangan Hizbut Tahrir

HT berpandangan bahwa, permasalahan (ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya) yang menghimpit umat Islam saat ini adalah akibat langsung dari diterapkannya Sekulerisme sebagai tata aturan kehidupan.¹⁶ Maka dari itu, HT berpendapat bahwa, perkara utama umat Islam adalah mengembalikan penerapan Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta menyebarkan risalah Islam keseluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.¹⁷

Sekulerisme, menurut Muhammad Qutb (Ancaman Sekularisme, 1986), Sekularisme diartikan sebagai *iqomatu al-hayati ala asasin ghayru mina al-dini* (membangun struktur kehidupan di atas landasan selain al-Islam).¹⁸

Bagi HT, penerapan Sekulerisme ditengah-tengah umat Islam adalah suatu bentuk kesalahan yang teramat fatal. Konsekwensi diterapkannya Sekulerisme adalah meniscayakan terbentuknya tata aturan atau undang-undang yang bersumber dari akal manusia semata. Padahal bagi seorang muslim undang-undang yang wajib untuk diikuti hanyalah yang datang dari Allah Swt. yaitu al Qur'an dan As Sunnah (serta yang ditunjukkan oleh keduanya).¹⁹

Dilihat dari segi politik, sekulerisme yang diterapkan di negeri-negeri Muslim sesungguhnya adalah suatu bentuk penjajahan di bidang pemikiran yang

¹⁶ Selamatkan Indonesia dengan Syariah, file power point CD Database Interaktif Al Wa'ie.

¹⁷ Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi, hal. 158.

¹⁸ Muhammad Ismail Yusanto. Dari UUD Sekuler Menuju UUD Islam, Disampaikan pada Seminar Amandemen UUD 45 Sesuai Syariah Islam, Majelis Mujahidin, Jogjakarta, 15 – 16 Januari 2002.

¹⁹ Lihat Al Qur'an surah An Nisa: 65, Al Hasyr: 07, Al Ahzab: 36. Lebih lengkapnya dapat dibaca pada Abdullah, *Who is The Legislator?* (Siapa yang Layak Sebagai Pembuat Hukum?), cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004).

sangat berbahaya yang dipaksakan oleh peradaban Eropa dan Barat.²⁰ Maka dari itu, baik dari sudut pandang keimanan (aqidah) maupun historis, Sekulerisme tidaklah sesuai atau sejalan dengan Islam.²¹

2. Solusi problematika umat

Apabila permasalahan utama dari umat Islam adalah diterapkannya Sekulerisme, maka solusi yang harus diambil adalah mengganti Sekulerisme dengan syariah Islam untuk dijadikan tata aturan yang mengatur seluruh kehidupan (sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, dan sebagainya).²²

Syariah Islam sebagai sebuah solusi problematika umat manusia tidak hanya bisa dipahami (dan bermanfaat bagi) oleh seorang muslim, melainkan juga bagi seorang non muslim. Ini dikarenakan karakter dari syariah Islam itu sendiri yang *rahmatan lil aalamin*.

Sebagai contoh, Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi yang sebenarnya adalah masalah distribusi harta kekayaan diantara umat manusia. Bukan masalah bagaimana meningkatkan produksi untuk memuaskan kebutuhan manusia yang tidak terbatas yang selama ini dipahami oleh sistem ekonomi Kapitalis. Anggapan Kapitalis bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas ditolak

²⁰ Perlu dipahami bahwa, hal ini bukan berarti anti terhadap orang Eropa dan Barat. Melainkan adalah anti terhadap segala pemikiran yang terlahir dari aqidah sekulerisme yang dianut dan diyakini oleh orang-orang Eropa dan Barat.

²¹ Baca lebih jauh tentang Sekulerisme dan sejarahnya dalam Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular Liberal*, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2005). Lihat juga M. Syukri Isma'il, *Kritik Terhadap Sekularisme: Pandangan Yusuf Qardhawi*, cet. I (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies, 2007).

²² *Selamatkan Indonesia*., CD Database.

oleh Islam. Islam beranggapan kebutuhan manusia adalah terbatas, hal ini berbeda dengan keinginan manusia yang memang tidak terbatas.²³

Secara empirik hal ini dapat dipahami dari berbagai data yang ada yang menunjukkan terjadinya ketimpangan distribusi²⁴ dan secara *i'tiqodi* (berdasarkan Iman) tidaklah mungkin Allah Swt. menciptakan manusia tanpa mencukupkan kebutuhan bagi yang diciptakannya. Tentu hal ini tidak boleh terjadi, karena kalau tidak maka menyebabkan Allah Swt. memiliki sifat *dhalim*, sedangkan ini adalah sifat yang tidak mungkin dilekatkan kepada Allah Swt.

Lebih dari itu, penerapan syariah Islam selain sebagai sebuah solusi bagi kehancuran tata kehidupan saat ini juga sebagai bentuk keimanan seorang muslim kepada Allah Swt. Inilah sesungguhnya alasan utama untuk menerapkan syariah Islam.²⁵

Untuk itu, HT dalam semua aktivitasnya senantiasa mengajak umat Islam untuk kembali kepada Islam secara totalitas (*kaffah*) dengan cara menerapkan syariah yang kaffah di bawah lindungan sebuah institusi Daulah Khilafah Rasyidah.²⁶

3. Metode Perjuangan Hizbut Tahrir

Untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, HT juga telah menetapkan metode pencapaian dari tujuan tersebut. HT berpendapat, usaha untuk melanjutkan kehidupan Islam harus berbentuk aktivitas kelompok dan tidak boleh

²³ Taqiuddin an Nabhani, *Nizhamul Iqtishadi*, hal. 6-9.

²⁴ Lihat misalnya *Does Globalization Help The Poor?* (Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan), cet. II (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2004). Lihat juga Kevin Danaher. *10 Reason Abolish IMF dan World Bank* (10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank Dunia), cet. I (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2005), hal. 1-12.

²⁵ Lihat Al Qur'an surah Al Maidah: 44,45,47.

²⁶ Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi, hal. 27-31.

berupa aktivitas perseorangan. Sebab, aktivitas perseorangan tidak akan dapat menghantarkan kepada tujuan tersebut.²⁷

Selain itu, aktivitas HT dibatasi pada dua hal, yaitu berupa aktivitas intelektual dan aktivitas politik. Aktivitas intelektual yang dimaksud adalah kajian atas fakta umat Islam (baik secara normatif, historis, maupun empiris), kajian yang mendalam tentang akidah Islam yang benar-benar jernih dan cemerlang (jauh dari ikhtilaf dan perdebatan kalam), serta kajian yang mendalam, jernih dan cemerlang tentang berbagai sistem yang mengatur kehidupan umat (sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum, hingga politik luar negeri). Lebih dari itu, HT juga telah merumuskan metodologi berpikirnya agar hasilnya benar-benar bisa dijamin sebagai pemikiran dan hukum Islam.²⁸

Adapun yang dimaksud aktivitas politik adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengimplementasikan berbagai gagasan ideal di atas. Dimana hal ini diawali dengan pembentukan tubuh HT itu sendiri, kemudian dilanjutkan interaksi HT dengan umat, dan diakhiri dengan *istilam al hukm* (penerimaan kekuasaan) yang diberikan oleh umat atau orang yang mempercayai HT.²⁹ Semua tahapan yang ditempuh diatas bagi HT tidaklah boleh dilakukan secara kekerasan.³⁰

4. Kaidah-kaidah Pemikiran Hizbut Tahrir

Dalam menggali, menggagas, serta menyampaikan pemikirannya ke publik, HT senantiasa berpegang teguh kepada sumber rujukan utama dari setiap

²⁷ *Ibid.*, hal. 160.

²⁸ Hafidz Abdurrahman, Bagaimana Hizbut Tahrir Menyatukan Umat?, dalam Al Wa'ie No. 84 Tahun VII, 2007, hal. 124-126.

²⁹ *Ibid.*, hal. 127.

³⁰ Karena hukum syara tidak membolehkannya, bukan karena khawatir disebut kelompok teroris.

pribadi Muslim yaitu Al Qur'an dan As Sunnah serta yang ditunjukkan oleh keduanya (ijma sahabat dan *qiyas syar'i*).

Lebih dari itu, HT juga telah menjadikan sejumlah kaidah syara sebagai basis pijakan pemikirannya.³¹ Untuk memudahkan memahami apa itu kaidah syara, berikut penulis tuliskan definisi dari kaidah syara. Kaidah syara (*Qawa'id asy Syar'iyah*) adalah hukum *syar'iyah* yang bersifat global yang *diistinbath* (digali) dari dalil syara yang terperinci.³²

Di bawah ini penulis cantumkan sejumlah kaidah syara yang diadopsi oleh HT.³³

- 
- a. [الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرع] = “Asal dari perbuatan (selalu) terikat dengan hukum syara”
 - b. [الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم] = “Asal hukum dari sesuatu (barang atau materi) adalah ibahah (boleh) selama belum ada dalil yang mengharamkannya”
 - c. [ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب] = “Tidak sempurna suatu kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi wajib pula (hukumnya)”
 - d. [الأصل إستصحاب] = “Segala sesuatu perbuatan ikut (turut terkait dengan) hukum asalnya”

³¹ *Al Qawa'id* bentuk jamak dari kata *qaid*. Secara etimologis *qaidah* bermakna dasar, alas, fondamen, lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap, cet. xxv (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 1138. Digunakan baik dalam arti konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qawa'id al bait* (fondasi rumah) dan *qawa'id al ilm* (kaidah-kaidah ilmu). Lihat Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, cet. I (Jakarta: Prenada Media Goup, 2006), hal. 2.

³² Fauzan al Banjari, *Understanding Qawa'id As Syar'iyah*, cet. I (Yogyakarta: Raudhoh Pustaka, 2006), hal. 08.

³³ Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, hal. 57-62.

- e. [أَنَّ الْخَيْرَ مَا أَرْضَ اللَّهُ وَ أَنَّ الشَّرَّ مَا أَسْخَطَهُ] = “Sesungguhnya kebaikan itu adalah sesuatu yang diridhai Allah, dan keburukan itu adalah sesuatu yang dimurkai Allah”
- f. [أَنَّ الْحَسَنَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَأَنَّ الْقَبِيحَ مَا قَبَّحَهُ] = “Sesungguhnya perbuatan terpuji itu adalah apa yang dipuji oleh Allah, dan perbuatan tercela itu adalah apa yang dicela oleh Allah”
- g. [أَنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْمَطْعُومَاتِ وَالْمَلْبُوسَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَالْأَخْلَاقَ لَا تُعْلَلُ وَيُلْتَزَمُ فِيهَا بِأَنَّهُ] = “Sesungguhnya hukum-hukum tentang ibadah, makanan, pakaian, minuman, dan akhlak tidak dapat direka-reka (dicari-cari ‘illat hukumnya), semua ketentuannya berdasarkan nash saja”
- h. [الْأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ الْإِدَارِيَّةِ الْإِبَاحَةُ] = “Hukum asal aktivitas administrasi/manajerial adalah boleh”³⁴
- i. = [تَصْرِفُ الْإِمَامُ الرِّعْيَةَ عَلَى مَنَوعٍ بِالصَّلَاحَةِ] = “Kebijakan Imam/Khalifah dalam mengatur rakyatnya berpatokan pada asas kemaslahatan”³⁵
- j. [الْوَصِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ] = “Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram adalah haram pula hukumnya”³⁶
- k. [إِنَّ الْمَصْنَعَ يَأْخُذُ حَكْمَ مَا يَنْتُجُ] = “Sesungguhnya (pemilikan) dalam industri tergantung pada barang yang dihasilkannya”³⁷
- l. [أَمْرُ الْأَمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ] = “Perintah Imam menghilangkan perselihan”³⁸
- m. [أَمْرُ السُّلْطَانِ نَافِذٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا] = “Perintah Sulthan (Khalifah) berlaku dzahir maupun bathin”³⁹

³⁴ Al Wa’ie No. 73 Tahun VII, September 2006, hal. 54

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Mengenal Hizbut Tahrir, hal. 129

³⁷ *Ibid.*, hal. 115

³⁸ *Ibid.*, hal. 91

- n. [للسلطان أن يحدث من الاقضية بقدر ما يحدث من مثكلات] = “Bagi seorang Sulthan dibolehkan mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi”⁴⁰
- o. [كل فراد من أفراد الشيء المباح إذا تحقق فيه ضرر يمنع ذلك الفرد فقد ويبقى الشيء مباحا] = “Sesuatu yang mubah, jika pada sebagian diantara satuan-satuannya itu ada (mengandung) bahaya, maka yang diharamkan bagian itu saja, sedang status hukum itu tetap mubah”⁴¹
- p. [الضرار يزال] = “Segala bentuk kemudharatan atau bahaya itu wajib dihilangkan”⁴²



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ Abdurrahman Al Maliki, *As Siyasatu Al Iqtishadiyatu*, hal. 229

⁴² Al Wa'ie No. 73, hal. 55

BAB IV

KEBIJAKAN MONETER KONVENSIONAL DAN INFLASI

Mengawali pembahasan sub bab ini, perlu kiranya penulis sebutkan kembali definisi kebijakan moneter yang digunakan pada penelitian ini guna memudahkan pembahasan, dibahas pula secara singkat dan konseptual aspek-aspek dari kebijakan moneter konvensional, serta korelasi antara kebijakan moneter dengan perekonomian.



A. Gambaran kebijakan moneter konvensional

1. Definisi dan klasifikasi kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah suatu rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, dan kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Saat ini, semenjak tahun 2005 bank sentral Indonesia memiliki tujuan tunggal (*single objective*) yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi.

¹ Aliminsyah dan Padji, Kamus Istilah Keuangan, hal. 186

Secara umum, kebijakan moneter dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan moneter ketat (*tight money policy*) dan kebijakan moneter longgar (*easy money policy*).²

Kebijakan moneter longgar diupayakan atas dasar untuk mempengaruhi atau mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri. Sebaliknya, kebijakan moneter ketat bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan membantu mengatasi masalah tekanan pada neraca pembayaran.³

Antara dua jenis kebijakan tersebut seringkali terjadi dilema, terutama bagi negara-negara yang menganut sistem perekonomian terbuka dan sistem devisa bebas, serta pada saat bersamaan mengalami tekanan yang berat pada neraca pembayaran.⁴

2. Aspek-aspek kebijakan moneter

Dalam kerangka kebijakan moneter konvensional dikenal tiga terminologi yang seringkali digunakan, yaitu: Instrumen moneter, indikator (sasaran antara), dan target moneter (sasaran akhir).⁵

a. Instrumen moneter

Guna mencapai sasaran akhir dari kebijakan yang diambil, bank sentral memiliki piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran tersebut. Instrumen ini ada yang bersifat langsung dan ada juga yang bersifat tidak langsung.⁶

² Aulia Pohan. Potret Kebijakan., hal. 58.

³ *Ibid.*, hal. 58-59.

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*, hal. 25.

⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management; Conventional and Syar'i System*, cet. I (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 191.

Instrumen yang bersifat langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang dapat secara langsung mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral. Adapun Instrumen yang bersifat tidak langsung adalah instrumen pengendalian moneter yang tidak secara langsung dapat mempengaruhi sasaran operasional yang diinginkan oleh bank sentral, untuk mengendalikan harga (suku bunga) dan kuantitas simpanan dan kredit yang ada pada sistem perbankan atau institusi keuangan selain bank.⁷

Disebut instrumen langsung karena terdapat hubungan korespondensi “*one to one*” antara instrumen dan sasaran operasional. Sementara itu, instrumen tidak langsung merupakan usaha untuk mengendalikan besaran moneter dengan cara mempengaruhi neraca bank sentral. Disebut instrumen tidak langsung karena bank sentral mencapai sasaran kebijakan dengan mempengaruhi kondisi pasar uang melalui salah satu fungsinya sebagai badan yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan uang dengan mempengaruhi kondisi yang mendasari permintaan dan penawaran uang. Selain itu, usaha untuk mengendalikan besaran moneter dilakukan dengan cara mempengaruhi neraca bank sentral sendiri, khususnya item di sisi pasivanya sendiri, yaitu *reserve money* yang pada gilirannya akan dapat mempengaruhi suku bunga secara luas dan kuantitas uang dan kredit di dalam keseluruhan sistem perbankan.⁸

Di antara instrumen yang bersifat langsung adalah penetapan suku bunga, pagu kredit (batas tertinggi kredit yang dipinjamkan), rasio likuiditas, kredit

⁷ *Ibid.*, hal. 192.

⁸ *Ibid.*,

langsung, kuota rediskonto, dan instrumen lain (pengguntingan uang, pembersihan uang, dan penetapan uang muka impor).⁹

Adapun yang tergolong ke dalam instrumen tidak langsung adalah cadangan wajib minimum (cadangan primer dan sekunder), operasi pasar terbuka (lelang surat berharga bank sentral di pasar primer, lelang surat berharga pemerintah di pasar primer, operasi pasar sekunder), fasilitas diskonto, fasilitas rediskonto, fasilitas simpanan bank sentral, imbauan, fasilitas overdraft, simpanan sektor pemerintah, lelang kredit, intervensi valuta asing, dan pengawasan pinjaman selektif, dan instrumen lain.¹⁰

b. Indikator (sasaran antara)

Indikator atau disebut juga sasaran antara yang secara umum digunakan dalam moneter konvensional adalah terdiri dari dua jenis, yaitu pengendalian uang beredar dan pengendalian suku bunga.

Sasaran antara berguna untuk memberikan petunjuk apakah perkembangan moneter tetap terarah pada usaha pencapaian sasaran akhir yang telah ditetapkan atau tidak.¹¹

c. Target moneter (sasaran akhir)

Sedangkan sasaran akhir¹² yang menjadi target kebijakan moneter biasanya mencakup empat hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan

⁹ *Ibid.*, hal. 193-194.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 196-200.

¹¹ Lihat Aulia Pohan, *Potret Kebijakan*, hal. 29.

¹² Sasaran akhir adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Ianya bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Lihat *Ibid.*, hal. 26.

pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran.¹³

3. Pendekatan dalam operasional kebijakan moneter

Dalam upayanya untuk mempengaruhi sektor riil perekonomian, dalam kebijakan moneter dikenal dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas (*monetary targeting*) dan pendekatan harga (*interest rate targeting*).¹⁴

Pendekatan kuantitas menggunakan uang beredar sebagai sasaran operasionalnya. Melalui pengendalian JUB, bank sentral berupaya mengubah kondisi pasar uang sedemikian rupa sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, harga yang stabil, dan keseimbangan neraca pembayaran.¹⁵

Sebaliknya, pendekatan harga menggunakan tingkat suku bunga sebagai sasaran operasionalnya. Harapan yang diinginkan dari pendekatan harga sama halnya dengan apa yang menjadi tujuan dalam pendekatan kuantitas, yaitu mengendalikan perekonomian yang searah dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Adapun proses pelaksanaan kebijakan moneter baik menggunakan pendekatan kuantitas ataupun harga adalah sama-sama diawali dari penetapan tujuan akhir. Dimana penetapan tujuan akhir tersebut menyesuaikan dengan kapasitas perekonomian (*output gap*).¹⁷

4. Hubungan kebijakan moneter dengan perekonomian

¹³ *Ibid.*, hal. 26-30.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 35-36.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, hal. 43.

Guna mempengaruhi kondisi perekonomian (ekonomi makro), pemerintah memiliki sejumlah kebijakan yang dapat diambil, yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan luar negeri.¹⁸ Dalam konteks penelitian ini yang akan dibahas adalah kebijakan pemerintah (bank sentral) di bidang moneter.

Dalam sistem ekonomi konvensional, kebijakan di sektor moneter memiliki peran yang sangat signifikan dan perkembangannya pun jauh lebih pesat dibandingkan perkembangan sektor riil baik pada tataran teori maupun praktiknya.¹⁹

Hubungan antara kebijakan moneter dengan kondisi perekonomian diistilahkan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Secara teoritis, mekanisme transmisi ini melewati empat jalur (*channel*) dalam upayanya untuk mempengaruhi kondisi perekonomian yang ada. Empat jalur tersebut yaitu: efek substitusi, efek suku bunga, efek kekayaan (harga aset), dan efek ekspektasi.²⁰ Dari ke empat jalur tersebut, Maski memberikan perincian tambahan dengan memasukkan lagi dua jalur lainnya yaitu jalur nilai tukar dan jalur kredit.²¹

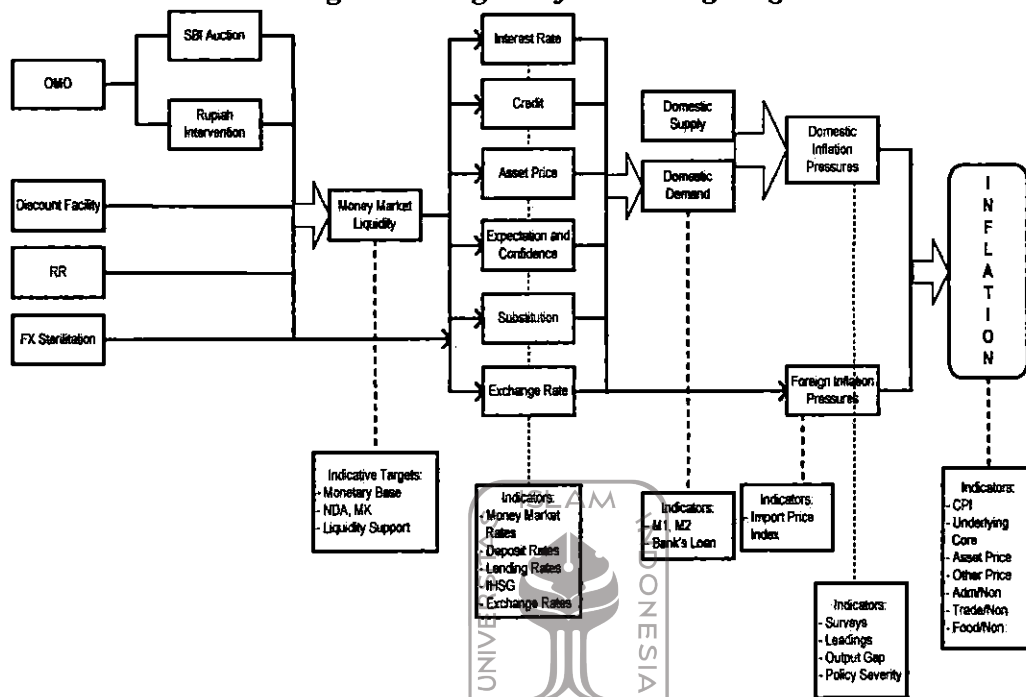
¹⁸ Iswardono, Uang dan Bank, cet. IV (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999), hal. 125.

¹⁹ Esta Lestari, Sistem moneter dalam Islam, dalam Teori Ekonomi dalam Islam, cet. I (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 101. Lihat juga Aulia Pohan, Potret Kebijakan., hal. 5.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Ghazali Maski, Transmisi Kebijakan Moneter; Kajian Teoritis dan Empiris, cet. I (Malang: BayuMedia, 2007), hal. 96-103.

Gambar 4
Skema Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter
dengan Kerangka *Inflation Targeting*



Sumber: Haryono *et al.*, 2000, dalam Ghozali Maski, 2007, dengan sedikit perubahan.²²

Dengan enam jalur (*channel*) tersebut, otoritas moneter mengharapkan terjadinya perubahan pada target akhir sesuai dengan yang direncanakan, yaitu tingkat atau laju inflasi yang rendah.

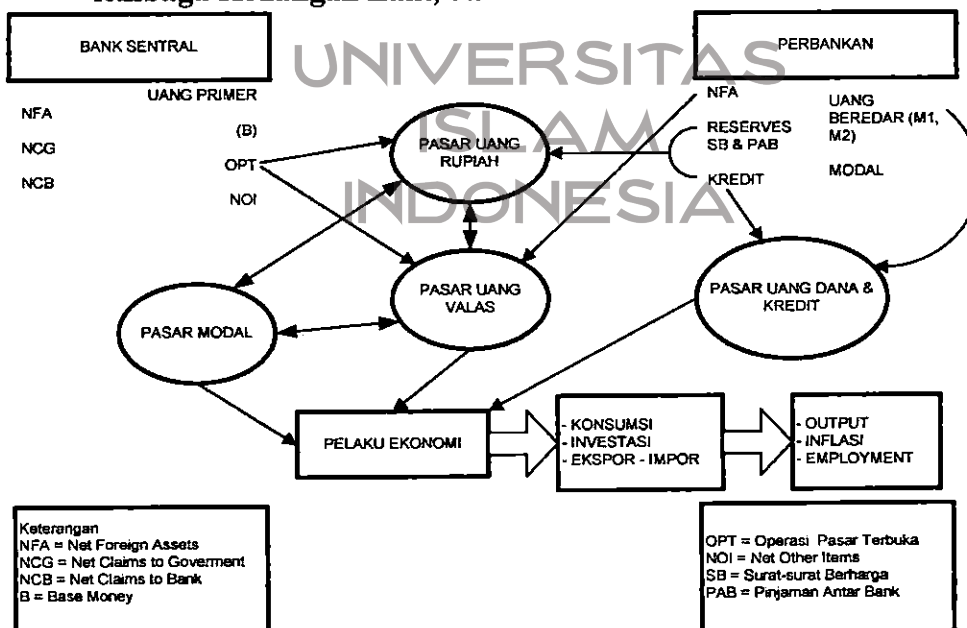
Secara empirik, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks, terutama karena transmisi banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: pertama, perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya. Kedua, lamanya tenggat waktu (*lag time*) sejak kebijakan moneter ditempuh sampai

²² Untuk lebih jelasnya perihal korelasi kebijakan moneter terhadap perekonomian lihat Lampiran 1; tabel 1.

sasaran inflasi tercapai. Ketiga, terjadinya perubahan pada saluran transmisi moneter sesuai perkembangan ekonomi dan keuangan suatu negara.²³

Lebih jauh, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan (bank umum) dan lembaga keuangan lain, dan pelaku ekonomi di sektor riil yang melalui dua tahap proses perputaran uang. Pertama, interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas transaksi keuangan. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil.²⁴

Gambar 5
Skema Interaksi Antara Bank Sentral, Perbankan (Bank Umum) dan lembaga Keuangan Lain, dan Pelaku Ekonomi di Sektor Riil



Sumber: Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management; Conventional and Syar'i System*, hal. 173

²³ Veithzal Rivai, dkk, *Bank*, hal. 171.

²⁴ *Ibid.*, hal. 172.

B. Dampak inflasi terhadap sektor riil

1. Teori inflasi

Secara historis, inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan disamping masalah pengangguran yang sudah sejak lama dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Sejarah menunjukkan bahwa salah satu negara yang ditandai dengan kenaikan harga secara cepat adalah Mesir di sekitar tahun 330 SM.²⁵ Menurut Samuelson persoalan inflasi adalah setua usia perekonomian pasar.²⁶

Inflasi merupakan sebuah fenomena ekonomi yang banyak mendapat perhatian, sekaligus ditakuti dan dianggap sebagai musuh nomor satu oleh banyak kalangan, mulai dari ekonom, pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat awam sekalipun. Tentunya hal ini disebabkan dampak dari inflasi yang sangat merugikan.²⁷

Betapa merugikannya inflasi itu sendiri dapat disimak dari sejumlah perkataan yang dilontarkan oleh ekonom dan pejabat pemerintahan. Ronald Reagan misalnya, sebagaimana dikutip oleh *The Economist* (22/5/2008) pernah menyebut inflasi dengan sebutan kejam, perampok, menakutkan, perampok bersenjata, mematikan, dan pembunuh bayaran.²⁸

Banyak upaya telah dilakukan untuk memerangi inflasi, namun tak kunjung ada tanda penyelesaian. Seolah-olah menggambarkan inflasi bagaikan “makhluk hidup” yang mempunyai mekanisme pertahanan sendiri dari serangan

²⁵ Iswardono, Uang, hal. 213.

²⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macro*, hal. 311.

²⁷ *Ibid.*, hal. 313.

²⁸ Hidayatullah Muttaqin, Guncangan Pasar Global dan Urgensitas Khilafah, dalam <http://www.jurnal-ekonomi.org>

makhluk hidup lainnya sehingga tidak bisa dimusnahkan. Namun ini tentunya mustahil karena inflasi sendiri hanyalah sebuah fenomena, bukan makhluk hidup.

Berbagai kajian dan teoripun telah banyak dihasilkan oleh para ekonom sebagai solusi dari persoalan inflasi. Dalam hal ini, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan mengenai inflasi, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Teori kuantitas atau persamaan pertukaran dari Irving Fisher $MV=PQ$. Teori ini sejatinya merupakan pandangan dari teori klasik.³⁰ Menurut persamaan ini sebab naiknya harga barang secara umum yang cenderung akan mengarah pada inflasi ada tiga: sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain begitu cepat (masyarakat terlalu konsumtif), terlalu banyaknya uang yang dicetak-edarkan ke masyarakat, dan turunnya jumlah produksi secara nasional.
- b. Teori Keynes yang menyatakan bahwa inflasi terjadi disebabkan masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain, inflasi terjadi karena pengeluaran agregat terlalu besar. Oleh karena itu, solusi yang harus diambil adalah dengan jalan mengurangi jumlah pengeluaran agregat itu sendiri (mengurangi pengeluaran pemerintah atau dengan meningkatkan pajak, dan kebijakan uang ketat).³¹
- c. Teori strukturalis atau teori inflasi jangka panjang. Teori ini menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya kekuatan suplai bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab struktural pertambahan barang-barang produksi ini terlalu lambat

²⁹ Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro.*, hal. 261.

³⁰ T. Gilarso, *Pengantar*, hal. 400.

³¹ Deliarnov, *Perkembangan*, hal. 201.

dibanding dengan pertumbuhan ekonominya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga barang lain, sehingga terjadi inflasi yang relatif berkepanjangan bila pembangunan sektor penghasil bahan pangan dan industri barang ekspor tidak dibenahi atau ditambah.

Adapun berkaitan dengan penyebab atau sumber inflasi,³² para ekonom telah berhasil menganalisisnya dan mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelompok. Hanya saja, berbeda halnya dengan hasil analisa ekonom terhadap penyebab dari inflasi yang cukup mendalam, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan inflasi (menurut penulis) tampak sangat dangkal. Meskipun dalam aspek kajian dan teori yang telah dihasilkan para ekonom untuk menjelaskan inflasi sudah cukup banyak.

Sebagai buktinya dapat dilihat dari konsep *fractional reserve requirement system* yang selama ini dijalankan oleh bank sentral.³³ *Fractional reserve requirement system* adalah suatu sistem perbankan di mana bank mempertahankan rasio aktiva cadangan sebagai penjamin bagi sebuah bank bahwa mereka mempunyai likuiditas yang cukup untuk menghadapi permintaan uang tunai dari nasabah yang bisa timbul secara mendadak atau mendesak.³⁴

³² Pembahasan lebih luas tentang penyebab dan sumber inflasi lihat sub bab sumber permasalahan inflasi pada sistem ekonomi konvensional pada bab ini.

³³ Dengan konsep ini bank sentral dapat mencegah semakin meningkatnya jumlah uang beredar, yaitu dengan cara menaikkan persentase rasio aktiva cadangan yang dimiliki oleh bank umum. Sehingga, dengan sendirinya menurut mereka akan mencegah terjadinya inflasi.

³⁴ Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Dictionary*, hal. 249. Lihat juga Aliminsyah dan Padji, Kamus, hal. 186.

Padahal konsep ini sudah banyak mendapat kritikan yang sangat tajam dari banyak ekonom muslim.³⁵ Dengan konsep ini pihak perbankan dapat mencetak atau turut menggandakan uang menjadi lebih besar yang kemudian mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat dan pada akhirnya mengakibatkan inflasi. Dapat berjalannya konsep ini karena didukung oleh konsep *interest*, *fiat money* dan lembaga keuangan itu sendiri (bank).³⁶

Pada satu sisi, para ekonom ekonomi konvensional berpendapat bahwa, salah satu penyebab dari inflasi adalah jumlah uang beredar (JUB) yang tinggi dibandingkan jumlah barang dan jasa yang ada di pasar. Namun di sisi lain, mengapa konsep *fractional reserve* ini masih saja diterapkan yang notabeneanya adalah salah satu inti dari permasalahan itu sendiri yang dapat menambah secara cepat JUB? Satu-satunya jawaban rasional mengapa konsep itu terus dijalankan adalah demi menjaga kepentingan pemilik bank. Dengan konsep *fractional reserve*, pemilik bank dapat meminjamkan dana yang dimilikinya kepada unit defisit³⁷ dengan imbalan sejumlah bunga yang telah ditetapkan. Keuntungan yang didapatkan pihak bank dengan membungakan uang ini sangatlah besar.

³⁵ Ekonom muslim yang mengkritik konsep *fractional reserve requirement system* adalah Masudul Alam Choudhury, *A Monetary System With 100-Per Cent Reserve Requirement And The Gold Standard: Theory, Fact And Policy*, dalam <http://www.capebretonu.ca/mchoudhu/ipe.html>. Umar Ibrahim Vadillo, *Berakhirnya Ekonomi: (The End of Economics) Mata Uang Emas dan Punahnya Perbankan*, dalam David Barsamian dan Liem Siok Lan, *Menembus batas (Beyond Boundaries) Damai untuk Semesta*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 59-61.

³⁶ Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar; Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*, cet. I (Depok: Pustaka Adina, 2005), hal. 23.

³⁷ Unit defisit dalam memegang uang tidak hanya didorong oleh motif transaksi dan berjaga-jaga, melainkan juga dengan motif spekulasi. Motif spekulasi inilah yang semakin menambah kekacauan sektor keuangan dunia dengan memanfaatkan perbedaan tingkat bunga yang ada di beberapa negara.

Hal inilah sebenarnya yang “dikutuk” oleh Sir Josiah Stamp (1941).³⁸ Ia mengatakan “Sistem perbankan modern menciptakan uang tanpa modal. Proses ini kemungkinan adalah ciptaan paling luar biasa yang pernah ditemukan. Perbankan dilahirkan dalam ketidaksetaraan dan dosa. Bankir memiliki dunia. Anda bisa mengambil apapun dari mereka, tetapi biarkan hak untuk menciptakan uang mereka, maka dengan sebatang pena mereka akan menciptakan cukup uang untuk membeli semuanya kembali...Ambillah kekuasaan besar ini dari tangan mereka, maka semua kekayaan besar seperti yang saya miliki akan lenyap, dan akan ada sebuah dunia yang lebih baik untuk hidup. Tetapi bila anda ingin terus menjadi budak dari bank dan membayar harga dari perbudakan, biarkanlah para bankir terus menciptakan uang dan mengontrol kredit”.³⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, apa yang dilakukan oleh para ekonom ekonomi konvensional selama ini hanyalah tampak seperti menjelaskan (eksplanasi) bagaimana fenomena inflasi itu terjadi dengan sangat bagus, tetapi tidak bisa menghapus atau menghilangkan.⁴⁰

2. Dampak inflasi terhadap sektor riil

Sama halnya dalam hal menjelaskan penyebab inflasi, ketika menganalisa dampak dari inflasi para ekonom ekonomi konvensional juga tampak memiliki pengamatan yang cukup mendalam.

³⁸ Seorang direktur *Bank of England* tahun 1928-1941.

³⁹ Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia; di Ambang Kehancuran Terbesar Ekonomi, (Pustaka Pohon Bodhi, 2007), hal. 87.

⁴⁰ Meminjam perkataan Jusmaliani dalam menggambarkan kegagalan ekonom ekonomi pembangunan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Jusmaliani, Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami, dalam Jusmaliali, dkk, Kebijakan Ekonomi dalam Islam, cet. I (Yogyakarta, 2005), hal. 4.

Menurut mereka dampak inflasi sangatlah merugikan bagi setiap kalangan, terutama adalah bagi masyarakat yang berpendapatan tetap seperti halnya para pensiunan, pegawai kecil, dan guru.⁴¹

Para ekonom ekonomi konvensional secara umum membagi inflasi berdasarkan tingkat besarnya keparahan (daya rusak) menjadi empat jenis yaitu, inflasi ringan (*creeping inflation*/dibawah 10%), inflasi sedang atau menengah (*galloping inflation*/antara 10 – 30%), inflasi tinggi atau berat (*high inflation*/30-100%), dan inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*/di atas 100%).⁴²

Lahib lanjut, para ekonom ekonomi konvensional percaya bahwa, efek atau dampak inflasi tergantung pada apakah inflasi tersebut diantisipasi atau tidak.⁴³

Makna dari inflasi terantisipasi (*anticipated inflation*) adalah ketika harga mengalami kenaikan secara relatif (misalkan 10%) setiap tahun, dan pada saat bersamaan juga terjadi kenaikan pada tingkat upah dan suku bunga riil sebesar 10%. Dengan demikian, perubahan harga yang terjadi hanyalah merupakan perubahan ukuran di mana masyarakat atau pemerintah telah menyesuaikan (mengantisipasi tingkat inflasi yang terjadi). Sebaliknya, inflasi yang tidak terantisipasi atau tidak terduga (*unanticipated inflation*) adalah inflasi di mana

⁴¹ Salim Fredericks, *Political and Cultural Invasion* (Invasi Politik dan Budaya), cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izah, 2004), hal. 154.

⁴² Bramantyo Djohanputro, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, cet. I (Jakarta: PPM, 2006), hal. 150-151.

⁴³ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macro*, hal. 316.

kenaikan harga barang yang terjadi tidak diikuti dengan kenaikan upah dan suku bunga riil.⁴⁴

Berdasarkan klasifikasi di atas (inflasi terduga dan tak terduga), inflasi yang sering terjadi secara faktual adalah inflasi yang tidak terduga. Hal ini dapat diketahui dari sejarah perjalanan ekonomi dunia.⁴⁵

Dampak inflasi itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu: dampak dari segi ekonomi dan dampak dari segi sosial. Berikut di bawah ini adalah dampak – dampak inflasi menurut para ekonom.

- a. Dari sudut ekonomi, inflasi mengakibatkan terjadinya redistribusi pendapatan dan distorsi harga, distorsi penggunaan uang, serta distorsi pajak.
- b. Dari sudut sosial, akibat lanjut dari redistribusi pendapatan adalah kecemburuan sosial yang semakin tinggi dan bahkan dapat memicu kerusuhan atau krisis sosial (penjarahan dan perampasan).

Pembahasan dampak inflasi di atas adalah pembahasan secara umum. Adapun dampak inflasi terhadap sektor riil secara khusus adalah akan menghambat atau mengganggu proses pertumbuhan di sektor riil. Hal ini dikarenakan, dengan terjadinya inflasi maka tingkat pembelian masyarakat (permintaan agregat) akan mengalami penurunan dan selanjutnya penurunan ini akan menyebabkan pihak produsen harus mengurangi tingkat produksi (*output*) yang berujung kepada pemutusan hubungan kerja dan bertambahnya pengangguran (*unemployment*).

⁴⁴ *Ibid.*, Lihat juga Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Dictionary of Economics*, hal. 18 dan 666.

⁴⁵ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Macro*, hal. 318 dan 340.

Selain itu, di saat terjadi inflasi yang tinggi maka suku bunga yang ditetapkan otoritas moneter juga meningkat. Oleh karena itu, sektor riil pada saat suku bunga tinggi mengalami kesulitan dana baik untuk meningkatkan produksi atau mengembangkan usahanya karena semakin tingginya dalam biaya modal.

Disisi lain, unit surplus lebih tertarik menyimpan dananya di bank dengan tingkat pengembalian (*rate of return*) yang lebih besar dan pasti dan pada saat yang sama, bank umum yang sudah memiliki banyak dana dari pihak unit surplus enggan untuk menyalurkan dananya ke sektor riil karena adanya permasalahan (aturan perburuhan, pajak, pungutan-pungutan, dsb) pada sektor riil dan lebih tertarik untuk menyimpan dananya di bank sentral. Akibatnya adalah tidak berfungsinya tugas intermediasi oleh bank umum dan terjadi penumpukan dana di bank sentral. Fakta inilah yang terjadi pada tahun 2007 dimana dana yang terkumpul di bank Indonesia (BI) berjumlah sebesar ratusan triliunan rupiah.⁴⁶

⁴⁶ Aulia Pohan, Potret Kebijakan., hal. ix-xii.

meningkatnya produksi maka dapat menciptakan lapangan kerja baru.⁴⁸ Benarkah anggapan demikian?

Anggapan di atas dapat kita telaah dari dua sisi, yaitu sisi konsumen dan produsen. Dilihat dari sisi konsumen, meskipun tingkat inflasi yang terjadi adalah ringan akan tetap memberatkan. Terutama bagi orang-orang yang miskin dan sekaligus tidak memiliki skill atau kemampuan yang lebih untuk bekerja.

Apa yang dikatakan bahwa, tingkat inflasi ringan dapat menstimulus penyerapan tenaga kerja sesungguhnya hanya berlaku bagi mereka yang memang memiliki kemampuan atau skill. Sementara bagi mereka yang sedari awalnya sudah dalam kemiskinan, dimana dengan kemiskinan tersebut menyebabkan mereka tidak mampu meraih atau menempa keahliannya, maka hal ini tidak berlaku. Dengan kata lain, inflasi ringan yang terjadi tetap akan sangat membebani bagi mereka yang tergolong miskin dan tidak memiliki keahlian.

Terlebih lagi ketika harga barang yang naik tersebut adalah harga barang kebutuhan pokok masyarakat, meskipun kenaikan harga yang terjadi adalah rendah tetap saja akan menambah beban masyarakat miskin.

Sebagai contoh, katakan saja misalnya seorang kepala keluarga (dengan tanggungan 1 anak dan 1 istri) dimana penghasilan perbulan yang dapat diraih Rp.1,5 juta per bulan. Dengan tingkat inflasi ringan sebesar 5%, maka ia harus menanggung beban inflasi sebesar Rp.75.000 per bulan. Tentu ini adalah jumlah yang cukup besar bagi kepala keluarga tersebut.⁴⁹ Dengan demikian, anggapan

⁴⁸ Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro*, hal. 262. Lihat juga T. Gilarso, *Pengantar*, hal. 403 dan Bramantyo Djohanputro, *Prinsip-prinsip*, hal. 20.

⁴⁹ Harga beras raja lele kemasan 5 Kg sekarang seharga Rp.37.500., (awal oktober 2008) dengan hilangnya uang Rp.75.000., berarti kehilangan beras 10 Kg.

bahwa, inflasi ringan dapat memberikan efek positif bagi perekonomian sesungguhnya tidaklah tepat. Karena hanya menguntungkan pihak tertentu saja.⁵⁰

Adapun dilihat dari sisi produsen, seolah-olah menganggap produsen dalam memproduksi hanyalah bermotifkan pada orientasi keuntungan (*profit oriented*) semata. Padahal, seorang produsen (khususnya bagi seorang muslim) tidaklah semata-mata menjalankan aktivitas produksinya berdasarkan motif dan orientasi keuntungan. Melainkan juga dapat bermotif rasa kemanusiaan (*insaniyyah*) dan atau *ruhiyah* (ketuhanan).⁵¹

Lebih dari itu, para ekonom sebenarnya juga berpendapat bahwa, kenaikan harga barang baik itu dalam kisaran besar maupun kecil tetap saja menimbulkan biaya. Biaya-biaya tersebut misalnya adalah *shoe leather cost*⁵², *menu cost* (misal, biaya perubahan katalog), *complaint and opportunity loss cost* (biaya komplain dan hilangnya kesempatan), biaya perubahan peraturan dan perundang-undangan, serta biaya ketidaknyamanan hidup.⁵³

C. Dilema Pengendalian Inflasi dalam Kebijakan Moneter Konvensional

Pada sub bab ini penulis awali dengan pembahasan eksistensi dari otoritas moneter yang secara empirik tidak jarang juga menjadi bagian persoalan dari

⁵⁰ Seharusnya, untuk meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas dari perekonomian bukanlah dengan cara membiarkan inflasi terjadi meskipun dalam tingkat yang relatif kecil. Melainkan adalah dengan cara mendorong dan membangun infrastruktur demi berjalannya aktivitas perekonomian secara baik dan lancar sehingga berdampak pada peningkatan transaksi yang terjadi.

⁵¹ Taqiyuddin an Nabhani, *An Nidlam Al Iqtishadi*, hal. 13-14.

⁵² Suatu Istilah yang menyatakan bahwa bila inflasi sesuai dengan harapan maka relative penetapan suku bunga bank akan lebih besar dari tingkat inflasi. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung untuk berkali-kali menarik uangnya di bank atau ATM. Biaya yang muncul adalah biaya transport dan biaya layanan ATM dan biaya terduga lainnya.

⁵³ Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro*, hal. 262.

pengendalian inflasi itu sendiri.⁵⁴ Kemudian dilanjutkan dengan kebijakan pengendalian inflasi secara umum dan secara khusus pengendalian inflasi di Indonesia.

1. Otoritas moneter

Diskursus tentang otoritas moneter dalam sistem ekonomi konvensional merupakan salah satu hal yang cukup banyak mendapatkan perhatian dari para ekonom. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh otoritas moneter tersebut yang merupakan salah satu penentu dari gerak roda perekonomian sebuah negara.

Dalam sistem ekonomi konvensional otoritas moneter sepenuhnya dipegang oleh bank sentral. Sementara itu kebijakan fiskal langsung dibawah kendali pemerintah (eksekutif).⁵⁵

Pandangan sistem ekonomi konvensional berkenaan dengan otoritas moneter sendiri berangkat dari keharusan pemisahan (*separation of powers*) antara otoritas moneter dengan fiskal.⁵⁶

Pendikotomian ini dimaksudkan untuk menghindari memusatnya kekuasaan yang besar kepada salah satu pihak yang dikhawatirkan akan semakin memperbesar kemungkinan untuk disalahgunakan (misalkan adanya intervensi kelompok kepentingan atau *interest group*).⁵⁷ Hal ini nampak mirip dengan

⁵⁴ Misalnya adalah dugaan kasus suap pejabat Bank Indonesia terhadap sejumlah anggota DPR untuk pengesahan UU BI, aliran dana BI kepada Kejaksaan Agung, serta dugaan kasus suap Deputi Senior Miranda Gultom kepada sejumlah anggota DPR.

⁵⁵ Lihat UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

⁵⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. *Macro*, hal. 229-230.

⁵⁷ Didik J. Rachbini, Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.142.

pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*trias politica*).⁵⁸ Lebih dari itu, pendikotomian juga dimaksudkan untuk menghilangkan *conflict of interest* antara dua otoritas yang berbeda.⁵⁹

Terlebih lagi adalah ketika inflasi (*inflation targeting* atau IT) menjadi sasaran utama dari kebijakan moneter oleh bank sentral, dimana hal tersebut mengharuskan independensi penuh bank sentral dalam mengambil keputusan moneter.⁶⁰

Hanya saja, secara empirik otoritas moneter tetaplah menghadapi beberapa kendala dengan status independensi yang dimilikinya dalam mencapai target utama yang dikehendaknya. Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi target utama (inflasi total IHK dalam *regim inflation targeting*) yang berada di luar kendali bank sentral, seperti kebijakan harga pemerintah (*administered goods*) dan ekspektasi masyarakat (*expectation of public*).⁶¹ Selain itu, status independensi yang dimiliki bank sentral sebenarnya hanyalah tertuju kepada tekanan politik yang datang dari pejabat eksekutif yang korup. Sementara tekanan politik dari komunitas finansial (yang memiliki pengaruh politik dan memiliki ikatan internasional yang kuat atau para pemodal) tetaplah akan terjadi.⁶²

⁵⁸ Dimana salah satu alasan mendasar penolakan terhadap memusatnya kekuasaan pada satu orang adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan seorang penguasa. Lihat kritik Islam terhadap konsep *trias politica* ini dalam M. Ahmad Mufti dan Sami Shalih al Wakil, *At Tasyri wa Sann al Qawanin fi ad Daulah al Islamiyah: Dirasah Tahliliyah* (Formalisasi Syariah dalam Kehidupan Bernegara: Suatu Studi Analisis), cet. I (Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu, 2002), hal. 46-55.

⁵⁹ *Ibid.*, Lihat juga Dias Satria. Keuangan Internasional; *Explaining The Financial Crisis*, cet. I (Malang: Bayumedia, 2008), hal. 82.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 77.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Hal ini juga didukung oleh hasil dari beberapa studi empiris berkenaan dengan korelasi independensi yang dimiliki dengan target atau hasil yang diraih oleh bank sentral itu sendiri. Hasil studi Eijffinger dan Haan (1996) menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara

Untuk itu, digagaslah suatu bentuk koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal dalam rangka pencapaian tujuan ekonomi bersama melalui sinkronisasi kebijakan-kebijakan dan pemberian informasi yang sempurna.⁶³

Dalam implementasinya, upaya kerjasama tersebut diwujudkan dengan membentuk sebuah tim antara otoritas moneter dan pemerintah yang akan berkoordinasi untuk menghasilkan kebijakan moneter yang terbaik.⁶⁴

Sesungguhnya perdebatan mengenai hubungan antara otoritas moneter dan fiskal terfokus pada masalah inflasi yang merupakan konsekuensi pembiayaan yang dilakukan bank sentral dalam menutup defisit fiskal pemerintah. Dengan kata lain, perdebatan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal pada dasarnya tidak terlepas dari perbedaan penekanan dalam pencapaian tujuan masing-masing kebijakan.⁶⁵

Maka dari itu, menurut hemat penulis, permasalahan yang seringkali muncul dalam hal hubungan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal adalah bermuara pada dua hal yang sebenarnya juga merupakan faktor fundamental dari kerapuhan sistem ekonomi konvensional, yaitu: minimnya sumber pendapatan pemerintah yang menyebabkan anggaran defisit (sehingga menginginkan bantuan dari BI atau bank sentral dengan jalan mencetak uang) dan kebijakan penerapan

independensi bank sentral dengan hasil kebijakan anti inflasi dalam kasus negara berkembang. Begitupula dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, stabilitas finansial, anggaran berimbang atau kecenderungan bank sentral menyuntikkan dana untuk menutup defisit fiskal ternyata tidak memiliki korelasi positif dengan status independensi bank sentral. Lihat Ha Joon Chang dan Ilene Grabel, *Reclaiming Development: An Alternativ Economic Policy Manual* (Membongkar Mitos Neolib; Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan), (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), hal. 184-186.

⁶³ *Ibid.*, di Indonesia, koordinasi antara pemerintah dan bank sentral diatur dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang tertuang dalam pasal 54 dan 55.

⁶⁴ Lihat kembali catatan kaki no. 32 pada bab I.

⁶⁵ Iskandar Simorangkir. Koordinasi Kebijakan., hal 6-7.

mata uang kertas yang menyebabkan sulitnya bank sentral untuk mengendalikan mata uang tersebut.⁶⁶

Terlebih lagi secara historis sejak awal berdirinya, bank sentral sendiri merupakan metamorfosa dari pedagang uang (*goldsmith*) yang mempunyai perilaku buruk dalam menjaga dana simpanan dari para nasabah.⁶⁷ Dengan kata lain, berdirinya bank sentral bukanlah dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan sistem keuangan yang ada, melainkan adalah demi mewujudkan kepentingan para bankir.⁶⁸

Secara lebih khusus lagi sebagai contoh adalah berdirinya bank sentral The Fed di AS pada awal abad 20. Bank sentral tidak diarahkan pada bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada ketika itu, yaitu terjadinya krisis kepercayaan dan krisis likuiditas. Peristiwa ini kemudian disebut dengan *The 1907 Banking Panic*.⁶⁹

Dari cuplikan sejarah di atas, muncullah pertanyaan; mengapa pihak bank tidak memiliki kecukupan likuiditas untuk melaksanakan kewajibannya kepada nasabah? Kemanakah larinya dana yang disimpan oleh pihak bank?

⁶⁶ Tentang mata uang kertas akan penulis jabarkan lebih lanjut pada sub bab sumber-sumber inflasi.

⁶⁷ Lucifer, Masa lalu uang dan masa depan dunia (Ttp: Pustaka Pohon Bodhi, 2007), hal. 41.

⁶⁸ Rothschild, Bank Inggris, dan The Federal Reserve (1-7), dalam <http://www.eramuslim.com>

⁶⁹ Lihat Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. *Macro*, hal. 228. Lihat juga Federal Reserve System. (2009). *Britannica Student Library. Encyclopædia Britannica 2009 Student and Home Edition*. Chicago: Encyclopædia Britannica dan Edward Flaherty. *The Federal Reserve Act of 1913 was crafted by Wall Street bankers and a few senators in a secret meeting*, dalam <http://odur.let.rug.nl/~usa/E/usbank/bankxx.htm> dan Seri Bubble dan Crash Bursa Saham 3: panic of 1907, dalam <http://parahita.wordpress.com>

Dengan melihat latar belakang sejarah awal berdirinya bank sentral dan dihubungkan dengan fungsi yang dijalankan oleh bank sentral itu sendiri selama ini, maka dapat terlihat jelas dan merupakan suatu keniscayaan apabila kebijakan moneter yang selama ini dijalankan oleh bank sentral tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada (JUB yang berlebih, inflasi).

Apa yang dilakukan bank sentral hanyalah sebatas mengatur agar permasalahan tersebut tidak menjadi lebih ganas dan tidak sering terjadi. Dengan kata lain, bank sentral tidak menghilangkan sumber masalah dari segala permasalahan yang ada. Sebagai bukti dari pendapat ini adalah tidak dihapuskannya konsep *fractional reserve requirement system* yang notabene adalah salah satu penyebab permasalahan inflasi.⁷⁰

2. Dilema kebijakan pengendalian inflasi

Sebagai mana yang telah penulis jabarkan pada awal pembahasan dalam sub bab kebijakan moneter perihal dua jenis kebijakan moneter (longgar dan ketat), dalam pembahasan kali ini akan penulis jabarkan berkaitan dengan dilema dari dua kebijakan tersebut di atas.

a. Kebijakan moneter ketat (*tight money policy*)

Kebijakan moneter ini sejatinya adalah ditujukan untuk mendorong penurunan dalam penawaran uang atau penurunan JUB (pengetatan likuiditas). Penurunan dalam penawaran uang selanjutnya mengakibatkan meningkatnya

⁷⁰ Lihat kembali pembahasan *fractional reserve requirement* pada hal. 72-74.

tingkat suku bunga. Kebijakan moneter ketat dilakukan terutama untuk menjaga kestabilan harga dan mengatasi masalah neraca pembayaran yang dihadapi.⁷¹

Kebijakan moneter ketat ini mengandung sejumlah dilema, diantaranya:

1) Mengganggu sektor riil dan terjadi *negative spread*

Sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan sasaran operasional yang digunakan, pada akhirnya mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga bank. Dimana kemudian mengakibatkan efek lanjutan terhadap sektor riil melalui dua sisi, yaitu sisi unit surplus (bank umum dan masyarakat) yang enggan menginvestasikannya ke sektor riil karena lebih manariknya keuntungan dari tingkat suku bunga tabungan dan suku bunga bank sentral. Terlebih lagi ditambah adanya permasalahan yang terdapat pada sektor riil itu sendiri yang semakin menurunkan daya tarik sektor riil.

Adapun dari sisi sektor riil adalah semakin bertambahnya beban sektor riil pada kewajiban-kewajiban (biaya modal) yang harus mereka tanggung (suku bunga pinjaman yang semakin membebani). Akibatnya perbaikan, pengembangan, dan investasi di sektor produksi kurang berkembang dan bahkan akan mengalami kemunduran.

2) Menyebabkan pencetakan uang oleh otoritas moneter

Dengan enggannya unit surplus untuk menyalurkan dananya ke sektor riil mengakibatkan membengkaknya beban bunga yang harus dibayar atau ditanggung oleh bank sentral.

⁷¹ Aulia Pohan, Potret Kebijakan., hal. 59.

Untuk itu, bank sentral memiliki dua sumber pendanaan, yaitu dengan mencetak uang baru (M1), dan menerbitkan surat hutang (M2). Konsekuensinya, dengan dua cara ini bank sentral justru akan menambah JUB.

Meskipun pada saat suku bunga naik dan mengakibatkan JUB (M1) mengalami penurunan (karena menumpuk di bank sentral), namun hal ini tidak dapat bertahan lama.

Pada saat yang sama uang yang baru dicetak dan diterbitkan (M1, M2) semakin menambah JUB yang notabenenya adalah uang yang dihasilkan tanpa terkait dengan sektor riil.

3) Penurunan nilai riil mata uang domestik

Pertambahan JUB (M1, M2) yang tanpa terkait dengan sektor riil secara langsung akan berdampak kepada penurunan nilai riil mata uang domestik dibandingkan dengan mata uang asing.

Akibatnya, daya beli masyarakat akan semakin terkikis karena penurunan nilai riil mata uang yang mereka pegang dan pada saat yang sama tidak terjadi peningkatan pendapatan.

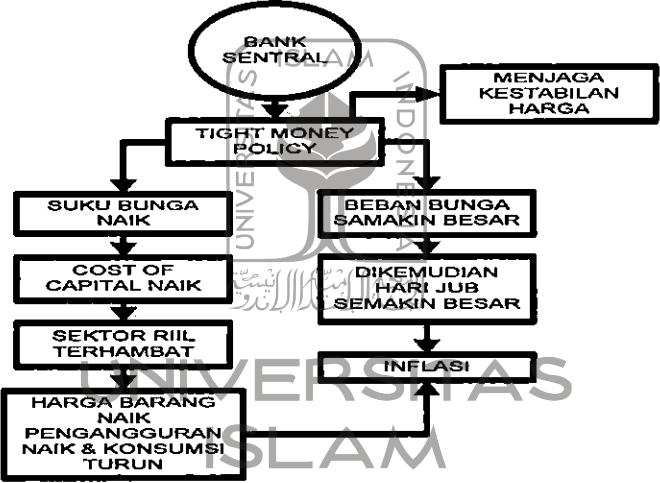
4) Ketimpangan dan perpindahan kekayaan riil masyarakat

Suku bunga yang ditetapkan bank sentral dalam rangka mengendalikan inflasi, mengakibatkan semakin terkonsentrasinya kekayaan (uang) di unit surplus (perorangan atau perusahaan). Kelompok ini semakin merasakan *return* yang pasti dari kekayaan yang dimiliki meskipun tanpa berusaha keras sebagaimana halnya orang-orang yang

tidak memiliki surplus dana yang harus berusaha keras untuk memiliki sejumlah kekayaan (uang).

Lebih dari itu, nilai riil kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya semakin mengalami penurunan akibat inflasi yang terjadi. Sedangkan bagi unit surplus akan mengalami hal yang sebaliknya, yaitu bertambahnya kekayaan.

Gambar 7
Skema Dilema Kebijakan Moneter Ketat
(Interest Rate – Price Spiral)



Sumber: Diolah dari pembahasan dilema kebijakan moneter ketat

b. Kebijakan moneter longgar (*loose money policy*)

Kebijakan moneter ini ditujukan untuk mendorong kenaikan dalam penawaran uang (pelonggaran likuiditas). Guna mendorong kenaikan tersebut bank sentral akan menurunkan suku bunga. Tujuan dari kebijakan ini diarahkan dalam beberapa hal, yaitu: meningkatkan jumlah kredit bank yang disalurkan ke sektor riil, menstimulus pertumbuhan konsumsi masyarakat, dan mencegah

terjadinya deflasi. Dengan kata lain, kebijakan moneter longgar ditempuh untuk mengatasi kelesuan perekonomian dalam negeri.⁷²

Sebagaimana halnya kebijakan moneter ketat, kebijakan moneter yang longgar juga mengandung sejumlah dilema, diantaranya:

- 1) Peningkatan JUB (M2) pada saat kebijakan moneter ketat dapat mendorong akselerasi pertumbuhan JUB (M1) ketika suku bunga diturunkan, akibatnya M1 menjadi bertambah besar dari yang sebelumnya.

Secara konseptual, pertumbuhan M1 bagi bank sentral diharapkan dan ditujukan untuk mencegah terjadinya deflasi. Hanya saja ini tidak mudah untuk dilakukan, karena pertumbuhan M1 yang terjadi tidak langsung terkait dengan sektor riil. Melainkan disebabkan membengkaknya beban bunga yang ditanggung oleh bank sentral ketika menjalankan kebijakan moneter ketat.

Hal ini mengindikasikan bahwa, terjadinya keterpisahan dan kesenjangan antara sektor moneter dan sektor riil yang diakibatkan sistem bunga. Akibatnya, nilai tukar kurs dan nilai riil mata uang dengan sangat mudah dapat berfluktuasi tajam.⁷³

⁷² *Ibid.*, hal. 58.

⁷³ Keterpisahan dan kesenjangan antara sektor riil dan sektor moneter salah satunya dapat terlihat dari yang dikeluarkan oleh BIS (Bank for International Settlements) yang menunjukkan bahwa transaksi di pasar valuta asing dunia dalam setiap harinya rata-rata sebesar 1,49 triliun dolar AS diperdagangkan di pasar dunia saat ini. Padahal, pada tahun 1977 perputaran uang setiap hari di pasar-pasar valuta asing hanya 18 miliar dolar AS.

Hal yang sama juga terjadi pada perdagangan sekuritas keuangan global. Sejak tahun 1980 volume perdagangan sekuritas keuangan meningkat secara luar biasa. Nilainya lebih besar daripada nilai tahunan output dunia. Lihat lebih lengkapnya tentang kondisi keuangan dunia pada Kavaljit Singh, *Taming Global Financial Flows, A Citizen's Guide* (Menjinakkan Arus Keuangan Global), cet. I (Jakarta: INFID, 2005).

Terlebih lagi ditengah perkembangan produk-produk derivatif keuangan global (akibat liberalisasi keuangan) yang semakin bervariasi dan bersifat spekulatif akan semakin memperparah keadaan tersebut di atas.⁷⁴

- 2) Selain itu, kebijakan moneter longgar juga berpotensi menyebabkan terjadinya *capital flight* yang diakibatkan suku bunga riil dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan negara lain.⁷⁵ Mengapa ketika suku bunga riil dalam negeri lebih rendah dibandingkan dengan negara lain mengakibatkan *capital flight*? Ada beberapa jawaban untuk menjelaskan terjadinya *capital flight*. Pertama, dilihat dari sisi teori moneter konvensional, terjadinya *capital flight* dikarenakan adanya keyakinan para ekonom konvensional (terutama yg beraliran neoliberal) yang mengatakan bahwa diperlukan deregulasi dan liberalisasi di sektor keuangan untuk meningkatkan perdagangan internasional, investasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi.⁷⁶

Hanya saja, apa yang diyakini oleh ekonom neoliberal ini tidaklah sesuai dengan kenyataan yang ada. Hasil kajian di lapangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, deregulasi dan liberalisasi di sektor keuangan menyebabkan semakin bebasnya gerak investor (yang hanya bermotif spekulasi) dalam menempatkan dananya dari satu ke tempat yang lain yang memberikan tingkat keuntungan besar.

⁷⁴ Total nilai nasional produk derivatif lebih dari 80 triliun dolar AS pada tahun 1997. *Ibid.*, hal. 24.

⁷⁵ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan.*, hal. 59.

⁷⁶ Ha Joon Chang dan Ilene Grabel, *Reclaiming*, hal. 151-154.

Dimana selanjutnya hal ini berdampak kepada semakin meningkatnya risiko sistematis, kerentanan dan ketidakstabilan keuangan, bahkan meningkatkan potensi krisis keuangan.⁷⁷

Dengan kata lain, deregulasi dan liberalisasi hanya menyebabkan masuknya dana (*capital inflow*) yang tidak terkait secara langsung dengan sektor riil, melainkan hanya ditanamkan pada produk-produk non riil (surat-surat berharga).

Kedua, dari sisi perilaku investor. Paradigma perilaku investor dewasa ini adalah berkecenderungan pada mengejar keuntungan setinggi-tingginya dan dalam waktu yang cepat dan dengan menggunakan berbagai cara. Paradigma yang dianut oleh kebanyakan investor ini relatif tidaklah sejalan dengan kondisi di sektor riil. Hal ini menyebabkan para investor tersebut enggan untuk langsung masuk atau menanamkan dananya di sektor riil. Disisi lain, Seiring dengan semakin maraknya deregulasi di sektor keuangan, paradigma yang dimiliki investor ini semakin mendapat tempat dan menjadi subur.

- 3) Ketika terjadi *capital flight* maka akan mengakibatkan tekanan pada neraca pembayaran.⁷⁸

Tekanan pada neraca pembayaran juga dapat terjadi apabila peningkatan JUB mengakibatkan kenaikan inflasi di dalam negeri

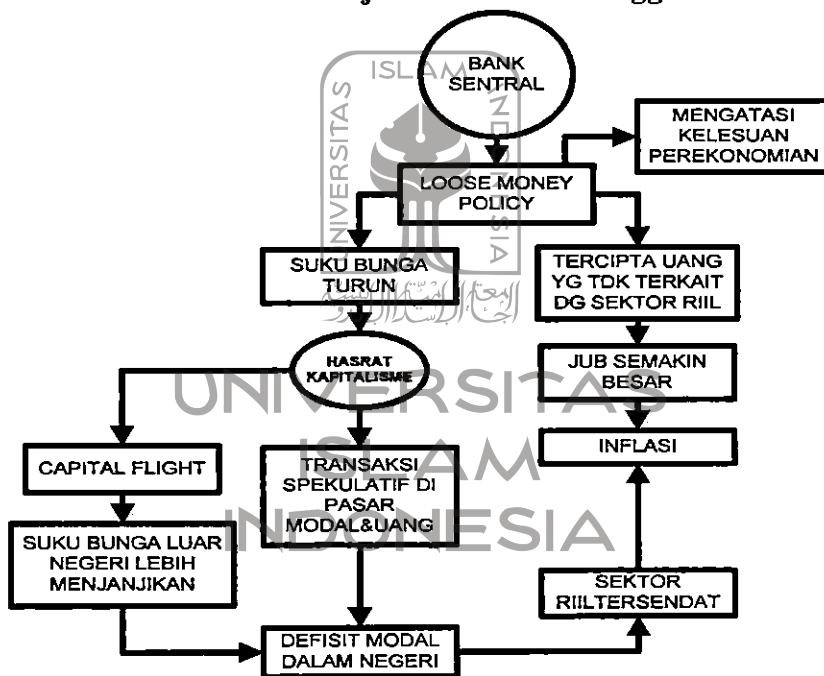
⁷⁷Lebih lengkapnya tentang dampak deregulasi dan liberalisasi di sektor keuangan lihat *Ibid.*, hal. 154-160. Lihat juga Kavaljit Singh, *Taming*, hal. 10-49.

⁷⁸Aulia Pohan, *Potret Kebijakan.*, hal. 59. Neraca pembayaran (*balance of payment*) adalah suatu ringkasan pencatatan dari semua transaksi yang menimbulkan pembayaran atau penerimaan dengan negara-negara lain dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Lihat Aliminsyah dan Padji, *Kamus.*, hal. 432.

sehingga menurunkan daya saing produksi dalam negeri terhadap barang impor dan daya saing barang ekspor di pasaran internasional.⁷⁹

- 4) Apabila neraca pembayaran mengalami tekanan yang disebabkan terjadinya *capital flight* maka akan mengakibatkan menurunnya tingkat devisa yang dimiliki sebagai akibat langsung dari meningkatnya permintaan valas dan guna mencegah keberlanjutan dari *capital flight*.

Gambar 8
Skema Dilema Kebijakan Moneter Longgar



Sumber: Diolah dari pembahasan dilema kebijakan moneter longgar

3. Kebijakan pengendalian inflasi di Indonesia

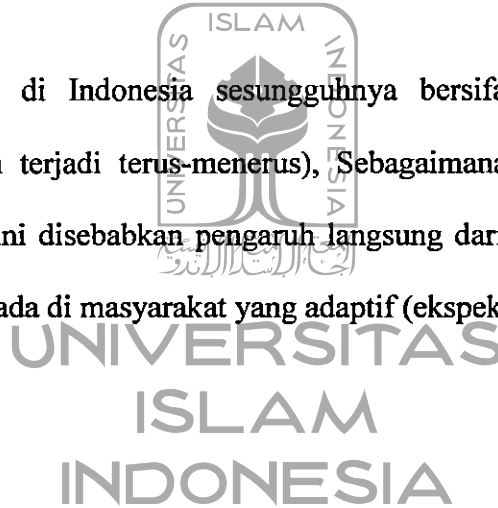
Pada sub bab ini penulis akan membahas efektifitas kebijakan moneter yang diambil ketika krisis di tahun 1997 hingga tahun 1999 yang mulai tampak penurunan dalam laju inflasi yang terjadi. Demi memudahkan analisa, pada

⁷⁹ Aulia Pohan, Potret Kebijakan., hal. 58-59.

penelitian ini juga ditampilkan data statistik sebelum dan sesudah krisis, yaitu data statistik 1996 hingga tahun 2000.

Secara historis, semenjak kemerdekaan hingga hari ini, Indonesia telah mengalami tingkat inflasi yang tergolong ke dalam inflasi tinggi atau berat (*high inflation*/30- 100%) sebanyak empat kali, yaitu inflasi di tahun 1961 (95%), 1967 (85,1%), 1974 (33,31%), 1998 (77,63%). Adapun inflasi yang tergolong sangat tinggi (*hyper inflation*/di atas 100%) terjadi sebanyak enam kali, yakni pada tahun 1962 (156%), 1963 (129%), 1964 (135%), 1965 (594%), 1966 (635%), 1967 (112,2%).⁸⁰

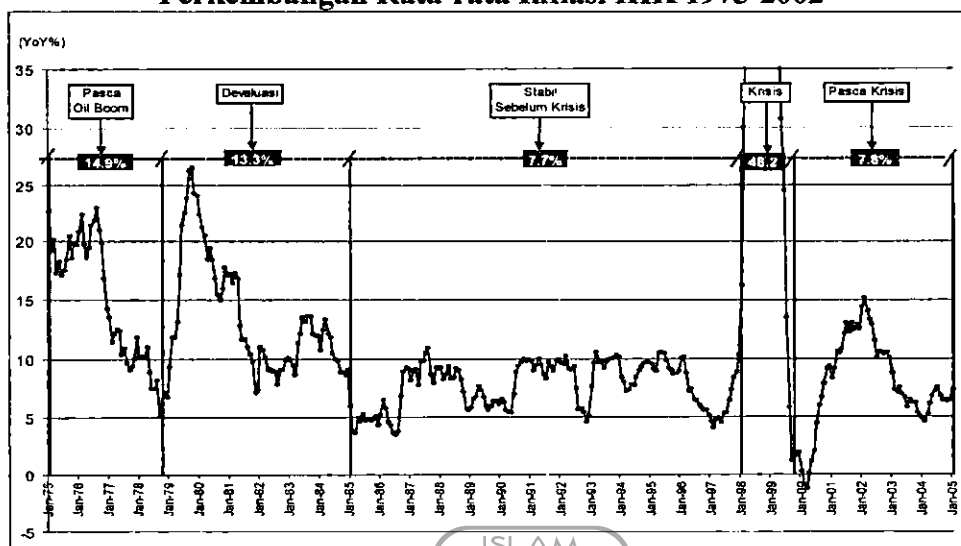
Perilaku inflasi di Indonesia sesungguhnya bersifat sangat persisten (berlangsung lama dan terjadi terus-menerus), Sebagaimana yang ditunjukkan grafik di bawah. Hal ini disebabkan pengaruh langsung dari pola pembentukan ekspektasi inflasi yang ada di masyarakat yang adaptif (ekspektasi adaptif).⁸¹



⁸⁰ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan*, hal. 108, 155, 183. Lihat juga Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, cet. I (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hal. x.

⁸¹ Akhis R. Hutabarat, *Determinan Inflasi Indonesia*, hal. 1, dalam *Occasional Paper* No. 06 di <http://www.bi.go.id>

Grafik 01
Perkembangan Rata-rata Inflasi IHK 1975-2002



Sumber: Sumber: Akhis R. Hutabarat, *Determinan Inflasi Indonesia*, 2005, dalam bi.go.id

Dalam konteks krisis di pertengahan tahun 1997, sebagaimana yang sudah banyak dipaparkan oleh para ekonom, bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah diawali dari terdepresiasi rupiah. Merespon hal tersebut, bank sentral ketika itu segera mengambil kebijakan dengan melakukan intervensi ke pasar *forward*.⁸² Namun, kebijakan yang diambil ternyata tidak memberikan efek positif kepada pasar.

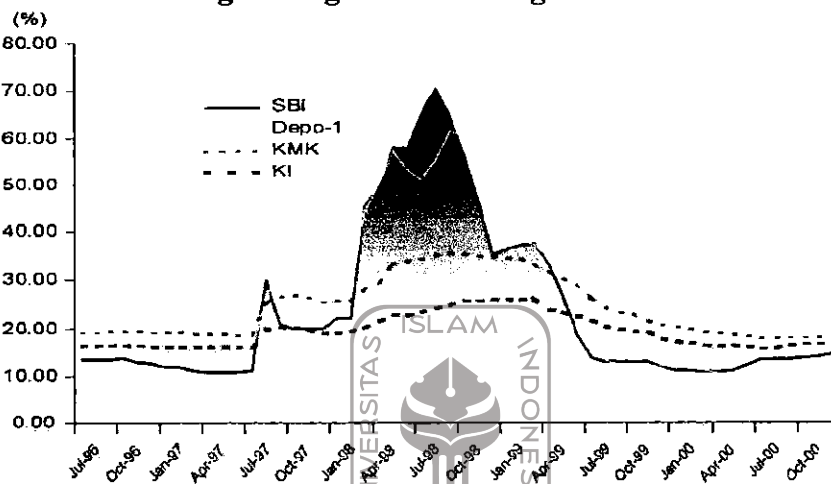
Dengan melihat hasil kebijakan yang kurang efektif, bank sentral kemudian mengambil upaya lain mulai dengan menaikkan suku bunga atau pengetatan likuiditas, melepas *band intervention* (batas intervensi), hingga *moral suasion* atau himbauan moral (seperti “Getar” atau gerakan cinta rupiah).⁸³

⁸² *Future market* atau *forward exchange market* (pasar berjangka atau pasar devisa berjangka) adalah suatu pasar tempat pembelian dan penjualan komoditi (karet, timah, dsb) dan mata uang asing untuk diserahkan pada waktu mendatang, sebagai lawan dari pasar tunai (*spot market*) yang melakukan penyampaian seketika. Christopher Pass dan Bryan Lowes, *Dictionary of Economics*, hal. 256.

⁸³ Lihat Lampiran 3 dan 4, “Kronologi Terjadinya Krisis Tahun 1997 – 1998 di Indonesia”. Gerakan cinta rupiah adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan nilai

Berbagai upaya dan cara yang telah dilakukan di atas tidak sedikitpun memberikan hasil positif, bahkan lebih cenderung menambah krisis semakin dalam. Terutama disebabkan kebijakan *tight money* yang diambil.⁸⁴

Grafik 02
Perkembangan Tingkat Suku Bunga Th 1996 – 2000



Sumber: Jуда Agung, dkk, Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis.⁸⁵

Hal ini ditandai dengan semakin sulitnya gerak dari sektor riil untuk bergerak dan berkembang. Terbukti hampir dari seluruh sektor riil mengalami penurunan atau kontraksi, terkecuali tiga sektor yang masih bisa bertahan yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih.

rupiah. Gerakan ini sebelumnya juga pernah dilakukan oleh Korea Selatan dan Thailand. Cara gerakan ini bekerja adalah dengan membangkitkan sentimen nasionalisme masyarakat. Lihat lebih lengkapnya Edy Suandi Hamid, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*, cet. II (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hal.

⁸⁴ Faisal Baasir, *Fenomena Inflasi dan Suku Bunga Tinggi*, dalam <http://www.sinarharapan.com>

⁸⁵ Jуда Agung, dkk, *Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis (Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan)*, 2001, dalam <http://www.bi.go.id>

Tabel 01
Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha*
(Miliar – Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	63.827,8	64.468,0	63.609,5	65.339,1	66.431,5
Pertambangan dan penggalian	37.739,4	38.538,2	37.474,0	36.571,8	37.423,2
Industri pengolahan	102.259,7	107.629,7	95.320,6	98.949,4	105.085,1
Listrik, gas dan air bersih	4.876,8	5.479,9	5.646,1	6.112,9	6.649,5
Bangunan	32.923,7	35.346,4	22.465,3	22.825,5	23.778,7
Perdagangan, hotel, dan restoran	69.475,0	73.523,8	60.130,7	60.195,1	63.621,2
Pengangkutan dan komunikasi	29.701,1	31.782,5	26.975,1	26.772,1	29.284,0
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	36.384,2	38.543,0	28.278,7	26.147,8	27.373,4
Jasa-jasa	36.610,2	37.934,5	36.475,0	37.184,0	38.009,6
Total PDB	413.797,9	433.245,9	376.374,9	379.557,7	397.663,3

* Atas dasar harga konstan 1993

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan, Bank Indonesia, diolah.⁸⁶

Dilihat dari sisi kredit yang disalurkan pihak perbankan kepada sektor riil juga didapati hal yang sama, yaitu mengindikasikan adanya penurunan aktivitas ekonomi yang berjalan.

Lebih jauh lagi, secara spesifik korelasi antara pengetatan likuiditas dengan nilai tukar rupiah di tahun 1998 tidaklah menunjukkan korelasi positif.⁸⁷ Begitu juga korelasi antara suku bunga di tahun 1998 dengan jumlah M2, M1, uang primer dan tingkat inflasi yang terjadi yang tampak secara nyata berkorelasi

⁸⁶ Dalam Deniey Adi Purwanto, Sudahkah Perekonomian Indonesia Keluar dari Krisis.

⁸⁷ Ini dikarenakan melemahnya nilai tukar rupiah bukan hanya disebabkan bertambahnya JUB, melainkan juga adalah kebutuhan dolar yang sangat besar untuk membayar utang dan impor sehari-hari yang harus dilakukan secara tunai setelah *letter of intent* (LC) ditolak. Lihat Tony Presetinatono, Efektivitas Rupiah Superketat, dalam Majalah D&R, 4 April 1998. Lihat juga Faisal Baasir, Fenomena.

negatif. Dengan kata lain, suku bunga yang lebih tinggi tidak menyebabkan JUB dan inflasi semakin menurun, melainkan terus mengalami kenaikan.⁸⁸

Adapun mulai terjadinya perbaikan pada beberapa indikator (inflasi, PDB, nilai tukar)⁸⁹ di tahun 1999 tidaklah diakibatkan dari kebijakan moneter (TMP) yang ditempuh. Perbaikan nilai tukar adalah disebabkan intervensi secara langsung BI di pasar uang⁹⁰ dan mulai kondusifnya ekonomi Asia secara umum.⁹¹ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Siregar (1999) yang menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal yang ditransmisikan ke dalam negeri melalui korporasi karena karakteristik korporasi Indonesia tidak dapat lepas dari kebutuhan valuta asing.⁹² Oleh karenanya dengan terjaganya nilai tukar memberikan efek positif pada laju inflasi yang turun.⁹³



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

⁸⁸ Lihat tabel 02: Perkembangan Indikator Makroekonomi

⁸⁹ Hanya saja, perbaikan pada beberapa indikator ini tidak diikuti oleh perbaikan dalam kucuran kredit yang diberikan. Tingkat kredit yang diberikan masih sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Lihat Lampiran 12 tentang Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi.

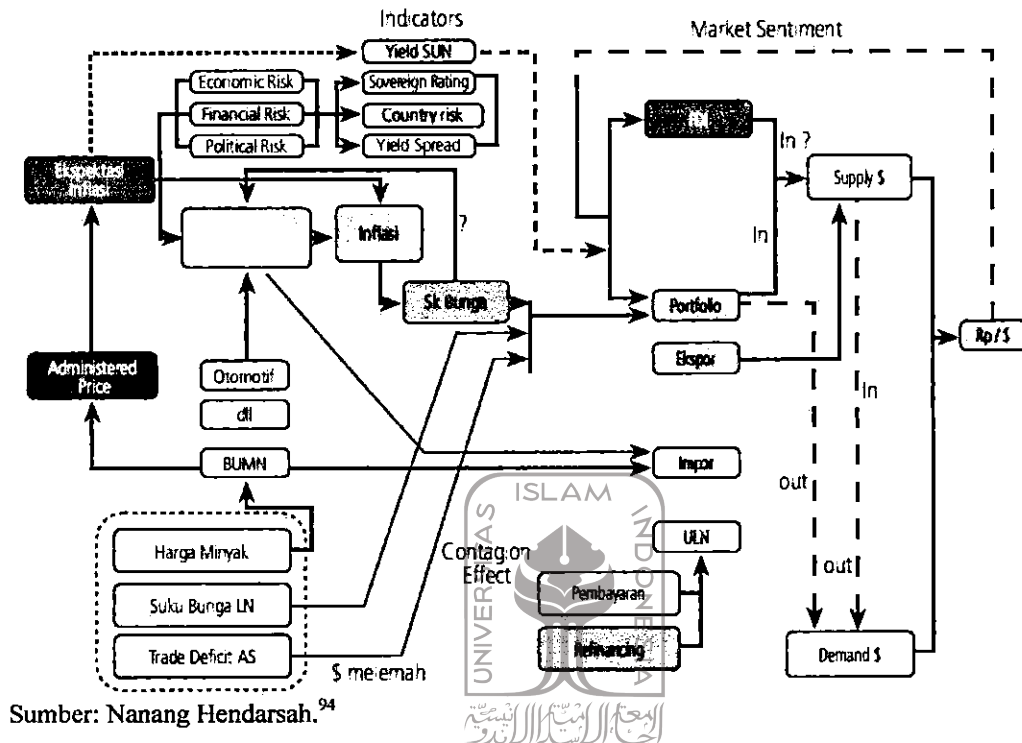
⁹⁰ Nilai tukar rupiah yang stabil antara Rp. 6.000 - Rp 9.000/dollar, dimungkinkan karena adanya intervensi BI, yakni dengan menukarkan dana pinjaman luar negeri yang diterima dalam dollar, yang volumenya mencapai 5 juta dollar AS per hari, dengan rupiah di pasar. Lihat Perbaikan Ekonomi Masih Semu, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9910/11/ekonomi/perb02.htm>

⁹¹ Sebagai bukti membaiknya perekonomian Asia dapat dilihat dari laju inflasi yang terjadi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 8,0 menjadi 2,4%. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Asia juga mengalami peningkatan, yaitu dari 4,1% menjadi 5,9%. Lihat Lampiran 7 tentang Inflasi Negara Berkembang dan lampiran 8 tentang Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang.

⁹² Dalam Iwan Setiawan, Diah Indira, dan Angsoka Yorintha Paundralingga, Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Korporasi dan Pergerakan Rupiah, Buletin ekonomi moneter dan perbankan (BEMP), Januari 2007. <http://www.bi.go.id>

⁹³ Misalnya adalah guncangan yang ada di pasar uang yang sudah lewat. Hal ini juga terjadi di Thailand dan Korea Selatan. Lihat M. Sadli, Landscape Ekonomi dan Politik dalam Krisis dan Transisi, cet. I (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), hal. 139

Gambar 9
Transmisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Nilai Tukar Rupiah



⁹⁴ Nanang Hendarsah, Tantangan Berat, Memelihara Stabilitas Rupiah, Majalah KITA, 2005. dalam Iwan Setiawan, Diah Indira, dan Angsoka Yorintha Paundralingga, Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Korporasi dan Pergerakan Rupiah, Buletin ekonomi moneter dan perbankan (BEMP), Januari 2007. <http://www/bi.go.id>

Tabel 02
Perkembangan Indikator Makroekonomi
Tahun 1996 – 2000

Indikator	Tahun				
	1996	1997	1998	1999	2000
PDB Riil (a.d thn dasar 1993)	7.82	4.70	-13.13	0.79	4.92
Inflasi	6.5	11.05	77.63	2.01	9.35
Moneter:					
M2 (Miliar Rp)	65.994	67.011	221.738	68.824	100.822
M1 (Miliar Rp)	11.412	14.254	22.854	23.436	37.552
Kartal	1.680	5.755	12.970	16.959	14.017
Giral	9.732	8.317	9.884	6.477	23.535
Quasi*	54.582	52.757	198.884	45.388	63.270
Suku Bunga:					
SBI (28 hari)**	13.98	22.00	68.76	37.84	42.42
PUAB (% per tahun)	13.96	26.98	64.08	23.79	10.46
Deposito (1 bulan)***	16.43	25.39	41.42	12.24	11.96
KMK****	19.04	25.40	34.75	26.43	18.46
Kredit Investasi****	16.36	18.94	26.23	21.59	16.56
Nilai Tukar (Rp/USD)	2,383	4,650	8,025	7,809	8,534

* Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk

** Diambil yg tertinggi dari 4 triwulan

*** Rata-rata tertimbang pada akhir periode, dalam Rupiah, pada Bank Umum

**** Rata-rata tertimbang, dalam Persentase, pada Bank Umum

Sumber: Laporan Tahunan 2000 Bank Indonesia

Begitu pula, membaiknya tingkat PDB pada tahun 1999 sebesar 0.79 bukanlah disebabkan berjalannya sektor riil secara baik,⁹⁵ melainkan hanyalah efek langsung dari tingkat konsumsi masyarakat ketika itu.⁹⁶

Dengan demikian, terjadinya korelasi negatif antara suku bunga dengan nilai tukar, JUB, dan inflasi di tahun 1998 setidaknya mengindikasikan dua hal. Pertama, antara sektor moneter dengan sektor riil mengalami keterpisahan. Dengan kata lain, sektor moneter telah berjalan sendiri (*independent*) tanpa didukung oleh kegiatan pertukaran barang dan jasa di sektor riil. Kedua,

⁹⁵ Lihat Lampiran 10, Produk Domestik Menurut Lapangan Usaha.

⁹⁶ M. Sadli, Landscape, hal. 165

penggunaan tingkat suku bunga sebagai instrumen pengendalian inflasi memiliki efektifitas yang sangat lemah. Terlebih lagi dampak lanjutan dari suku bunga itu sendiri terhadap sektor riil yang sangat memberatkan.

D. Sumber Permasalahan Inflasi Pada Sistem Ekonomi Konvensional

Analisa secara mendalam dan cermat terhadap sumber-sumber penyebab terjadinya inflasi menempati posisi teramat penting. Hal ini tidak lain dikarenakan solusi yang lahir akan mengikuti atau tergantung pada sumber penyebab inflasi itu sendiri.

Para ekonom konvensional selama ini sebenarnya telah menelaah secara komprehensif dan mendalam berkenaan dengan sumber penyebab inflasi. Hanya saja, solusi yang mereka hasilkan untuk menyelesaikan inflasi itu sendiri tampak tidak begitu mendalam (walaupun sudah begitu banyak teori yang dihasilkan) dibandingkan dengan hasil telaah terhadap sumber penyebab inflasi.⁹⁷

Berdasarkan sumber penyebabnya, inflasi secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu: *Natural Inflation* dan *Unnatural Inflation*.⁹⁸

⁹⁷ Lihat kembali pembahasan ini pada sub bab tentang teori inflasi.

⁹⁸ Klasifikasi inflasi ini berdasarkan kepada klasifikasi yang dibuat oleh Al Maqrizi. Lihat Adiwarman A Karim, *Ekonomi*, hal. 67. Penulis menggunakan pengklasifikasian ini dikarenakan dua alasan, yaitu: pertama, segala hal yang menimpa (yang menyebabkan kerusakan) manusia di muka bumi ini sejatinya adalah dikarenakan dua hal, yaitu karena memang merupakan ketetapan dari Allah Swt. atau karena hasil dari perbuatan manusia itu sendiri. Dalam konteks penyebab permasalahan inflasi, dapat dikembalikan kepada dua hal di atas. Lihat A. Said Aqil Humam Abdurrahman, *Bayan asy-Syamil an Mas'alah al-Qadha wa al-Qadar Radd ala Ra'y al-Mu'tazilah, Jabariyyah, wa Ahlu Sunnah* (Penjelasan Menyeluruh tentang Qadha dan Qadar), cet. I (Bogor: Al Azhar Press, 2004).

Kedua, sejalan dengan pernyataan Al Qur'an dalam surah Ar Rum ayat 41. Di dalam ayat tersebut Allah Swt. mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah dikarenakan tangan-tangan manusia. Muhammad Ali As Shabuni dalam *Shafwatu at Tafasirnya* mengatakan,

Khusus untuk *unnatural inflation*, penulis klasifikasikan lagi menjadi dua bagian, yakni: inflasi yang disebabkan perilaku manusia secara langsung dan inflasi yang disebabkan sistem ekonomi yang digunakan. Sehingga pendekatan atau metode dalam menyelesaikannya juga harus berbeda.

Apabila inflasi disebabkan secara langsung oleh perilaku manusia maka kebijakan penyelesaiannya juga harus diarahkan kepada perilaku manusia. Sebaliknya, apabila inflasi tersebut disebabkan oleh kerusakan sistem yang digunakan, maka perbaikan atau perubahan diarahkan kepada sistem tersebut.

Berikut di bawah ini dijelaskan klasifikasi inflasi tersebut yang didasarkan pada sumber-sumber penyebabnya.

1. *Natural inflation*

Inflasi ini terjadi karena sebab-sebab alamiah⁹⁹ dimana manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menghilangkannya.¹⁰⁰ Dengan kata lain, untuk menghadapi jenis inflasi ini manusia hanya bisa untuk meminimalisir dampak dari yang ditimbulkan. Adapun sebab inflasinya itu sendiri tidak dapat dicegah atau dihilangkan.

Dalam rangka meminimalisir dampak inflasi tersebut dapat dilakukan dengan beragam cara yang sesuai dengan penyebabnya itu sendiri. Misalkan

yang dimaksud dengan tangan-tangan manusia tersebut adalah perbuatan maksiyat yang dilakukan oleh manusia. Maksiyat adalah segala bentuk pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah Swt. Lihat VCD Selamatkan Indonesia dengan Syariah Menuju Indonesia Lebih Baik, HTI. Dalam konteks permasalahan inflasi, sesungguhnya permasalahan inflasi dewasa ini lebih dikarenakan perbuatan maksiyat (menerapkan sistem moneter konvensional) yang dilakukan oleh manusia. Lihat juga Ismail Yusanto, Mencari Solusi Krisis Ekonomi, hal. 17, dalam Dinar Emas Solusi Krisis Moneter, cet. I (Jakarta: PIRAC, INFID, SEM Institute, 2001).

⁹⁹ Gempa bumi, badai, letusan gunung berapi (musibah) yang mana mengakibatkan rusak atau hancurnya infrastruktur desa atau kota sehingga berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi.

¹⁰⁰ Adiwarman A Karim, Ekonomi Makro, hal. 138.

penyebab dari inflasi adalah disebabkan seringnya dilanda banjir di saat musim hujan sehingga mengakibatkan terhambat atau terputusnya jalur transportasi barang ke daerah yang dilanda banjir. Cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampaknya adalah dengan menerapkan manajemen persediaan barang di saat musim hujan. Tentunya masih banyak lagi cara yang dapat digunakan sesuai dengan faktor-faktor penyebab terjadinya.

2. *Unnatural Inflation*

Unnatural inflation disebabkan oleh suatu hal yang tidak bersifat alamiah (bukan karena sunnatullah atau hukum alam). Oleh karenanya, inflasi jenis ini dapat diselesaikan dan bahkan dihilangkan oleh manusia.

Inflasi jenis ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu inflasi yang disebabkan oleh perilaku manusia secara langsung dan inflasi yang disebabkan sistem ekonomi (yang terlahir berdasarkan akal manusia semata) yang digunakan.

Walaupun sebenarnya pengklasifikasian dua jenis inflasi tersebut di atas dapat saja disatukan menjadi Inflasi yang disebabkan kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri (baik itu kesalahan dalam perilakunya ataupun kesalahan mereka dalam memilih sistem yang digunakan).¹⁰¹ Namun, demi memudahkan dalam analisa dan memilih sektor mana yang harus diperbaiki atau dirubah (baik secara parsial ataupun totalitas) penulis mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian.

Sumber inflasi yang tergolong kedalam jenis inflasi yang disebabkan oleh perilaku manusia secara langsung adalah:

¹⁰¹ *Ibid.*, hal, 138. Hal ini tergolong ke dalam *fasad* (kerusakan) yang terjadi disebabkan perbuatan manusia yang menyimpang dari ketentuan Allah Swt. Lihat Ismail Yusanto, Mencari Solusi, hal. 17.

- a. Kesalahan persepsi manusia dalam memandang fungsi dasar (*basic function*) dari uang. Persepsi manusia yang dimaksud disini yaitu berkembangnya pemahaman bahwa uang juga dapat dijadikan obyek spekulasi demi meraih keuntungan (misalnya adalah teori dari ekonomi konvensional yang menyebutkan bahwa motif memegang uang adalah termasuk spekulasi).

Apabila ditelaah lebih dalam lagi, kesalahan persepsi atau pemahaman manusia ini disebabkan terjadinya kesalahan dalam metode berpikir yang digunakan.

Kesalahan persepsi atau pemahaman tersebut diakibatkan secara langsung dari metode berpikir yang pragmatis atau menjadikan fakta sebagai sumber hukum. Sehingga berdampak kepada pengesahan motif spekulasi dalam memegang uang.¹⁰²

- b. Gaya hidup materialisme yang dianut oleh kebanyakan masyarakat¹⁰³

Materialisme adalah paham atau pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu¹⁰⁴. Gaya hidup yang berdasarkan paham ini dengan sendirinya menyebabkan manusia tidak lagi memiliki “rambu-rambu” (batasan) dalam memenuhi

¹⁰² Dalam pandangan Islam, metode berpikir yang seharusnya digunakan adalah menjadikan fakta sebagai obyek hukum, bukan sebagai sumber hukum.

¹⁰³ Adnan Khan, *The Global*, hal. 55.

¹⁰⁴ Orang yang menganut paham ini disebut materialis. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, cet. IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 723. Gaya hidup ini merupakan turunan dari pandangan hidup Sekulerisme dan Kapitalisme. Oleh karenanya, apabila hendak menghilangkan sikap atau perilaku materialisme dan konsumerisme terlebih dahulu harus menghilangkan Sekulerisme dan Kapitalisme.

semua kebutuhan¹⁰⁵ dan keinginannya. Akhirnya, terjadilah tingkat konsumsi yang berlebihan (boros) dalam menggunakan dan memanfaatkan barang (sumber daya) yang ada. Sementara disaat bersamaan tingkat produksi yang dihasilkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terkendali tersebut. Akhirnya terjadilah kelebihan permintaan yang menyebabkan inflasi.

Lebih dari itu, gaya hidup seperti ini juga mengakibatkan kesalahan alokasi sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada tidak lagi secara khusus digunakan untuk memproduksi barang-barang yang memang sangat dibutuhkan saja, melainkan juga digunakan untuk memproduksi barang yang sejatinya tidak terlalu penting bagi manusia (misalnya adalah proyek penelitian planet yang menghabiskan banyak biaya). Sementara di sisi lain, masih banyak manusia yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka.¹⁰⁶

c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan (*seignorage*).¹⁰⁷

Dicetaknya uang oleh Negara sejatinya adalah untuk digunakan sebagai alat pertukaran. Hanya saja, di bawah Negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak adil maka wewenang tersebut menjadi lebih

¹⁰⁵ Baik itu kebutuhan Jasmani (makan) maupun nalurinya (ketertarikan dengan lawan jenis).

¹⁰⁶ Di Eropa dan Amerika Serikat, biaya yang dihabiskan untuk membeli makanan hewan piaraan (kucing dan anjing) sebesar \$ 17 milyar. Sementara itu, biaya untuk perbaikan pendidikan dasar untuk semua di Negara-negara berkembang hanya dianggarkan sebesar \$ 6 milyar se tahun. Lihat Amien Rais, Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia, cet. Ekstra (PPSK Press, 2008), hal. 21-22.

¹⁰⁷ Al Maqrizi, dalam Adiwarman A Karim, Ekonomi, hal. 149.

luas lagi motif pencetakannya. Misalnya, adalah dimaksudkan untuk mencari keuntungan dari pencetakan tersebut.

d. Akibat korupsi.¹⁰⁸

Korupsi dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat harga yang ditetapkan dikarenakan semakin membengkaknya biaya untuk menghasilkan sebuah produk akhir hingga tiba di tangan konsumen.¹⁰⁹

Lebih dari itu, korupsi secara umum dapat menghambat kelancaran dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan inflasi tidak cukup hanya diselesaikan dengan sistem moneter yang baik, melainkan juga harus didukung oleh penegak hukum dan aparat pemerintahan yang baik (*clean governance and good government*).

Adapun sumber inflasi yang tergolong kedalam jenis inflasi yang disebabkan oleh sistem adalah:

a. Diterapkannya sistem bunga dalam bidang *financial*.

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa, pemberlakuan bunga dalam aktivitas ekonomi merupakan salah satu penyebab krisis berkepanjangan di hampir seluruh Negara.

Namun, hampir tidak ada satupun dari Negara-negara yang mengalami krisis ekonomi tersebut menghentikan secara total pemberlakuan sistem bunga di dalam aktivitas perekonomiannya.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 143.

¹⁰⁹ Sebagai contoh, pungutan-pungutan ilegal yang dilakukan oleh aparat keamanan (polisi atau petugas bea cukai) terhadap mobil atau kapal yang mengangkut barang. Dalam setahun, pungutan liar (tidak resmi) yang terjadi di departemen bea dan cukai diperkirakan mencapai Rp. 7 triliun per tahun. Lihat "Sadarlal Aparat Bea Cukai" dalam <http://www.kpk.go.id>

Sebaliknya, yang dilakukan adalah terus dilaksanakannya liberalisasi seluruh sektor ekonomi secara masif.¹¹⁰

Dengan diterapkannya sistem bunga, menyebabkan harga barang dan jasa sangat dipengaruhi tingkat bunga yang berlaku yang pada akhirnya memberikan dampak *inflatoir*.¹¹¹ Dengan sistem ini pula, unit defisit atau debitur mengalami perlakuan yang sangat tidak adil karena harus senantiasa memberikan harga dari uang yang mereka pinjam secara tetap (*fix rate*) di dalam kondisi perekonomian yang tidak pasti (*uncertainty*) akan memberikan keuntungan bagi mereka.

Lebih dari itu, di pasar keuangan, akibat diterapkannya bunga uang (dana) yang dimiliki oleh unit surplus dapat menghasilkan uang tanpa terkait secara langsung dengan sektor riil. Sehingga berdampak kepada meningkatnya JUB dan menyebabkan semakin menurunnya nilai uang dibandingkan dengan nilai barang dan jasa.

Oleh karena itu, keberadaan sistem bunga merupakan salah satu faktor yang berpotensi besar menciptakan inflasi.

b. Berlakunya *fractional reserve requirement system*¹¹²

Sistem ini sangat terkait erat dengan keberadaan suku bunga sebagai faktor penggeraknya serta eksistensi dari *fiat money*. Dengan

¹¹⁰ Misalnya saja adalah Indonesia. Setelah mengalami krisis yang sangat parah di tahun 1997, Indonesia telah melakukan liberalisasi hampir seluruh sektor ekonominya tanpa terkecuali. Mulai dari kebijakan nilai tukar hingga privatisasi asset-aset Negara. Lihat pembahasan lengkapnya tentang privatisasi ini dalam Rahmat S. Labib, *Privatisasi dalam Pandangan Islam*, cet. 1 (Ciputat: Wadi Press, 2005).

¹¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, cet. XI (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 67

¹¹² Lihat kembali pembahasan *fractional reserve requirement* pada hal. 72-74.

dianutnya sistem *fractional reserve* di dalam tubuh perbankan, secara tidak langsung memberikan kesempatan atau peluang kepada Bank (umum) untuk mencetak uang yang pada gilirannya akan mengakibatkan membengkaknya jumlah uang beredar yang tidak sedikitpun berkaitan dengan perkembangan atau pertumbuhan di sektor riil.

c. Sistem nilai tukar mata uang

Penentuan sistem nilai tukar mata uang yang tepat bagi sebuah Negara juga sangat signifikan pengaruhnya terhadap inflasi. Hal ini dapat terjadi melalui tingkat nilai tukar mata uang domestik dibandingkan dengan nilai tukar mata uang Asing. Apabila nilai tukar mata uang domestik mengalami depresiasi maka akan menyebabkan naiknya harga-harga barang impor yang menjadi kebutuhan dalam negeri, terutama kebutuhan barang modal atau bahan baku bagi industri. Akhirnya, dengan naiknya barang modal dan bahan baku menyebabkan naiknya harga barang dalam negeri (*imported inflation*).

Oleh karenanya, produsen dalam negeri sangat berkepentingan dengan kepastian dari nilai tukar mata uang domestik. Hanya saja, harapan ini terhalang dari penentuan sistem nilai tukar mana yang baik. Sebagian ekonom berpendapat sistem nilai tukar mengambanglah yang baik dan sebagian lain berpandangan sebaliknya (sistem nilai tukar tetap atau berfluktuasi secara terbatas).¹¹³

¹¹³ Lihat pembahasan lebih jauh dalam bab V sub bab A tentang Kebijakan Sistem Nilai Tukar.

- d. Digunakannya bentuk mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik sebagai alat transaksi.

Selain sistem bunga, faktor lain yang mempunyai andil besar dalam menyebabkan inflasi adalah bentuk mata uang saat ini yang digunakan oleh kebanyakan Negara.

Saat ini, bentuk mata uang yang paling banyak diadopsi adalah *fiat money*. Salah satu kelemahan yang sangat fatal dari bentuk mata uang ini adalah berbedanya antara nilai intrinsik yang terkandung di dalamnya dengan nilai nominal yang tertera pada mata uang tersebut.¹¹⁴

Sesuai dengan arti dari *fiat money* (nilainya bersumber dari pemerintah atau undang-undang) itu sendiri, nilai dari mata uang ini tergantung kepada keberadaan pembuatnya. Apabila pembuatnya tidak lagi mendapat kepercayaan dari rakyat, maka secara otomatis mata uang tersebut juga akan mengalami hal yang sama.

Tidak terdapatnya nilai intrinsik di dalam mata uang tersebut mengakibatkan mudahnya pihak yang memiliki wewenang dalam mencetak uang untuk mencetak uang tanpa batas (*unlimited*). Satu-satunya batasan dari pemerintah untuk tidak mencetak uang adalah inflasi itu sendiri. Namun, batasan ini akan tidak berarti bagi sebuah Negara yang mata uangnya dijadikan sebagai mata uang standard (*hard money*) bagi sebagian besar Negara (misalnya US\$). Dengan dijadikannya Dolar Amerika sebagai mata uang dunia, Negara Amerika tidak akan merasa

¹¹⁴ Nilai intrinsiknya hanyalah sehelai kertas biasa. Lihat Abu Fuad, 37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam, cet. I (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal. 117

khawatir untuk mencetak uang yang berlebihan. Ini dikarenakan dampak inflasi yang ditimbulkan dari pencetakan uang yang berlebihan akan ditransfer ke Negara lain melalui transaksi (misalnya perdagangan) yang dilakukan oleh Amerika kepada Negara yang lain.¹¹⁵

Lebih dari itu, pemberlakuan bentuk mata uang ini juga meniscayakan penjajahan secara terselubung (*disguise imperialism*) oleh pihak (Negara) yang mata uangnya kuat (*hard currency*) disebabkan kekuasaan atau kekuatan mereka yang besar (dominan) di bidang politik dan ekonomi.¹¹⁶

Akibatnya, mata uang yang dimiliki oleh pihak (Negara) yang politik dan ekonominya lemah akan sangat lemah pula mata uangnya. Dimana pada akhirnya, apabila kedua pihak tersebut melakukan sebuah transaksi akan menyebabkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah mata uangnya (*soft currency*).¹¹⁷

Oleh karena itu, penghapusan mata uang *fiat money* adalah merupakan sebuah keniscayaan dan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak demi keadilan bagi setiap orang.

e. Pungutan pajak yang berlebihan.¹¹⁸

Sama halnya dengan korupsi dan penerapan administrasi yang buruk, tingkat pajak yang dikenakan terhadap sektor riil juga secara

¹¹⁵ M. Luthfi Hamidi, *Gold Dinar.*, hal. 36-38.

¹¹⁶ Lihat Umar Ibrahim Vadillo, dalam David Barsamain dan Liem Siok Lan, *Menembus Batas: Beyond Boundaries, Damai untuk Semesta*, cet. I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal.54-55

¹¹⁷ M. Luthfi Hamidi, *Gold Dinar.*, hal. 42.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 144.

signifikan dapat meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk. Dengan demikian, meningkatnya pajak yang dikenakan maka akan mengakibatkan harga barang juga mengalami kenaikan.

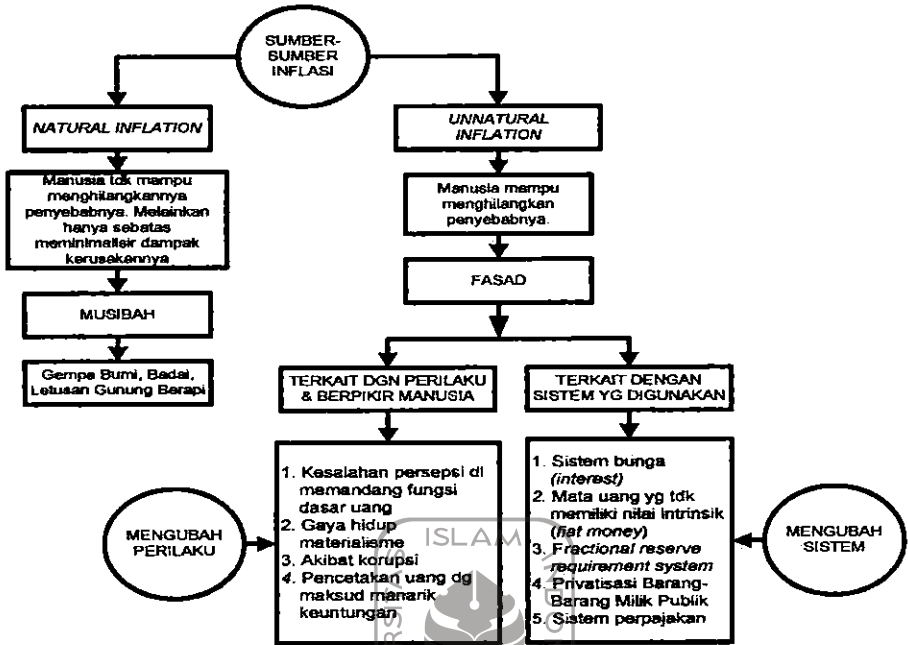
f. Privatisasi Barang-barang Publik.¹¹⁹

Privatisasi terhadap barang-barang yang sejatinya adalah milik publik sangat berpotensi menyebabkan tekanan inflasi. Hal ini dapat terjadi tidak lain adalah dikarenakan bergantinya pelaku pengelola terhadap barang tersebut, yakni dari pemerintah yang bermotifkan pelayanan dan berganti kepada swasta yang bermotifkan hanya mengejar keuntungan semata tanpa memperdulikan apakah akan memberatkan orang banyak atau tidak.¹²⁰ Hal ini akan semakin berpeluang besar terjadi ditengah-tengah budaya materialisme dan cara kerja yang menghalalkan segala cara.

¹¹⁹ Arim Nasim, Problem Inflasi: Produk Ekonomi Kapitalis, dalam <http://www.khilafah1924.org>

¹²⁰ Rahmat S. Labib, Privatisasi, hal. 127.

Gambar 10
Sumber – sumber Inflasi



Sumber: Diolah dari pembahasan sumber-sumber inflasi.

BAB V

PENGENDALIAN INFLASI DALAM PERSPEKTIF

KEBIJAKAN MONETER ISLAM

A. Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter yang dibahas dalam sub bab ini adalah dalam kerangka aktivitas ekonomi Daulah Khilafah. Hal ini dikarenakan Hizbut Tahrir (HT) dalam memberikan pandangannya terhadap sebuah permasalahan adalah berdasarkan pada naungan atau lindungan institusi Daulah Khilafah.¹ HT berpandangan penerapan konsep-konsep yang ada pada Islam secara kaffah dan totalitas (tidak bertahap)² tidak dapat dijalankan dalam institusi yang secara jelas adalah bertentangan dengan Islam.³ Ini juga sejalan dengan metode dakwah atau gerak HT yang bersifat revolusioner (*taghyir*).⁴

¹ Walaupun demikian, dalam jangka pendek ada beberapa pendapat HT yang tidak senantiasa harus terikat dengan keharusan adanya Daulah Khilafah. Misalnya adalah pendapat HT berkenaan dengan permasalahan privatisasi BUMN. Dalam hal ini HT berpendapat privatisasi BUMN adalah tidak boleh (haram). Lihat Hidayatullah Muttaqin, "Indonesia for Sale", dalam al Wa'ie No. 97 Tahun IX, September 2008, hal. 23-26.

² Lihat Syamsuddin Ramadhan al Nawiy, Perubahan Secara Bertahap (Menyoal Konsep Tadarruj), dalam al Wa'ie No. 45 Tahun IV, Mei 2004.

³ Dalam Demokrasi misalnya, Syariah Islam bukanlah merupakan suatu kewajiban (*obligation*) melainkan adalah sebuah pilihan (*option*) yang secara tidak sengaja diterapkan.

⁴ Makna revolusioner disini adalah bukan bermakna pengambilalihan secara paksa dengan jalan *people power* dan bersifat kekerasan (anarkis). Melainkan adalah bermakna, perubahan yang tidak hanya sekedar tambal-sulam semata (reformatif). Dengan kata lain adalah sebuah perubahan yang dimulai dari asas, dimana metode yang digunakan adalah dengan jalan *thalab an nushrah*. Apa itu *thalab an nushrah*? *Thalab an nushrah* adalah mencari pertolongan kepada siapa saja yang mempunyai kekuatan dan bisa menolong dakwah untuk menegakkan Daulah Khilafah, dimana sebelumnya orang yang mempunyai kekuatan tersebut telah mengimani sistem Islam dan membenarkannya. Lihat Hafidz Abdurrahman, Bagaimana 'People Power' Menurut Syariah Islam?, dalam al Wa'ie No. 96 Tahun VIII, Agustus 2008, hal. 33-35 dan Hafidz Abdurrahman, Mengapa 'People Power' Salah Menurut Syariah?, dalam al Wa'ie No. 97 Tahun IX, September 2008, hal. 48-50.

1. Otoritas moneter

a. Sinkronitas sektor moneter Islam dengan sektor riil

Sebelum membahas bagaimana bentuk dari otoritas moneter Islam, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran secara singkat sektor riil dan mekanisme hubungan yang terjadi antara pelaku ekonomi di dalam sistem ekonomi Islam (SEI).

Apabila gambaran tersebut sudah dipahami, baru kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang bentuk serta wewenang dari otoritas moneter Islam.

Hal ini dilakukan tidak lain disebabkan sangat eratnya kaitan antara aktivitas yang dilakukan di sektor moneter dengan sektor riil di dalam SEI. Oleh karena itu, di bawah ini akan dibahas terlebih dahulu bagaimana gambaran dari sektor riil dan mekanisme hubungan yang terjadi antara pelaku ekonomi di dalam SEI.

Sesungguhnya, pergerakan sektor riil dan mekanisme hubungan yang terjadi antara pelaku ekonomi di dalam SEI tidaklah sebagaimana gambaran yang ada pada aktivitas ekonomi dan mekanisme hubungan yang terjadi antara pelaku ekonomi di dalam sistem ekonomi Konvensional (SEK).

Dalam SEK, aktivitas ekonomi (sektor riil) yang berjalan relatif sulit untuk bergerak dan berkembang. Hal ini tidak lain adalah disebabkan penerapan sistem perbankan yang berbasis sistem bunga. Akibatnya, sektor moneter (dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, pasar modal dan

sebagainya)⁵ dapat berjalan sendiri tanpa terkait secara langsung dengan sektor riil atau lebih dominan.⁶ Dengan kata lain, unit surplus dalam menginvestasikan dan atau mengembangkan dana yang dimilikinya tanpa harus terikat dengan sektor riil (karena bersifat “substitusi” dan keterkaitannya pun lebih rumit).⁷

Sebaliknya dalam Islam, sistem ekonominya berbasis pada sektor riil, bukan moneter.⁸ Dalam Islam, sektor moneter tidak akan dibiarkan berjalan sendiri (*independent*) tanpa keterkaitan dengan sektor riil.⁹ Dengan kata lain, eksistensi dari sektor moneter hanyalah dijadikan sebagai pelengkap (menyediakan uang untuk modal usaha) demi berjalannya sektor riil.¹⁰

Dijadikannya sektor riil sebagai basis dalam SEI tidak lain adalah konsekuensi langsung dari prinsip-prinsip SEI yang melarang penerapan bunga dan segala transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif. Sebagai hasilnya, sektor riil yang dijalankan dalam Islam relatif memiliki kemudahan dalam bergerak dan berkembang. Ini terjadi sebagai efek langsung dari dilarangnya sistem bunga dan diwajibkannya semua transaksi yang terjadi harus berdasarkan kepada syariah Islam (misal *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*).

⁵ Ismail Yusanto, Mencari Solusi, hal. 12.

⁶ Esta Lestari, Sistem Moneter dalam Islam, dalam Masyhuri (Ed), Teori Ekonomi Dalam Islam, cet. I (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 131.

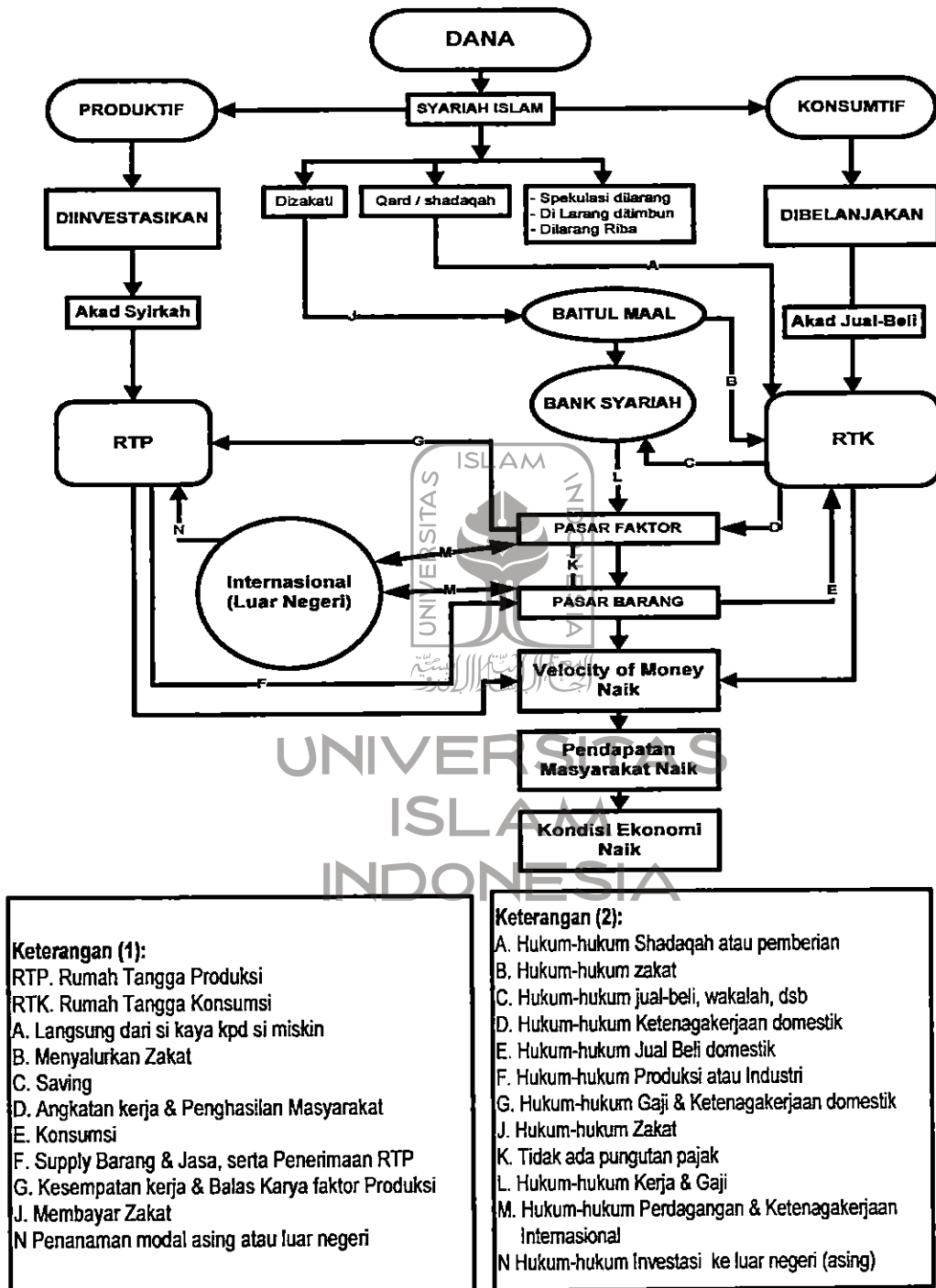
⁷ Lihat Gambar 5.

⁸ M. Shiddiq al Jawi, Di Balik Rapuhnya Kapitalisme, dalam . Lihat juga Abu Fuad, 37 Soal Jawab., hal. 113-125.

⁹ Dimana ada uang maka ada transaksi barang dan jasa. Ismail Yusanto, Mencari Solusi, *Ibid.*,

¹⁰ Ismail Yusanto, Mencari Solusi, *Ibid.*,

Gambar 11
Mekanisme Hubungan Antara Sektor riil dan Moneter dalam
Sistem Ekonomi Islam



Sumber: Diolah dari beberapa sumber¹¹

¹¹ T. Gilarso, Pengantar., Taqiyuddin An Nabhani, *An Nidlam Al Iqtishadi.*, Abdul Qadim Zallum, *al Amwal fi ad Daulah.*, M. Ismail Yusanto, Mencari Solusi.,

Untuk mendukung gerak dari sektor riil, Khalifah atau Negara juga dapat mengambil sejumlah kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan sektor riil.¹²

Arah dari kebijakan ini ditujukan kepada perilaku dari pelaku-pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol perilaku yang tidak sesuai dengan syariah (dalam konteks masalah ekonomi).¹³

Hal inilah yang tidak dimiliki oleh SEK. Ketiadaan tersebut merupakan konsekwensi logis dari landasan SEK, yaitu sekularisme yang melahirkannya.¹⁴

Akibatnya, kegiatan ekonomi yang berjalan tidak lagi berjalan berdasarkan norma-norma Agama (syariah Islam), digantikan oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri yang lebih cenderung menguntungkan pihak yang berkuasa dalam ekonomi maupun politik.¹⁵

Oleh karena itu, secara faktual banyak sekali contoh bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah adalah hasil dari “perselingkuhan” antara Kapitalis dan Politikus. Sebut saja misalnya adalah undang-undang

¹² Pandangan HT tentang sektor riil dapat dilihat dalam buku Abdurrahman al Maliki, *as Siyasatu al Iqtishadiyatu al Mutsila.*, Pandangan HT berawal dari pandangannya terhadap sektor-sektor ekonomi utama (sumber-sumber ekonomi primer), yaitu pertanian, industri, perdagangan, jasa. Terhadap empat sektor ekonomi tersebut HT memberikan sejumlah solusi. Lihat Abdurrahman al Maliki, *as Siyasatu al Iqtishadiyatu al Mutsila.*, hal. 41-44.

¹³ Jusmaliani, Pendahuluan: Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami, dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (Ed), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hal. 4-8. Lihat juga Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi yang Islami*, hal. 51-79, dalam *Ibid.*,

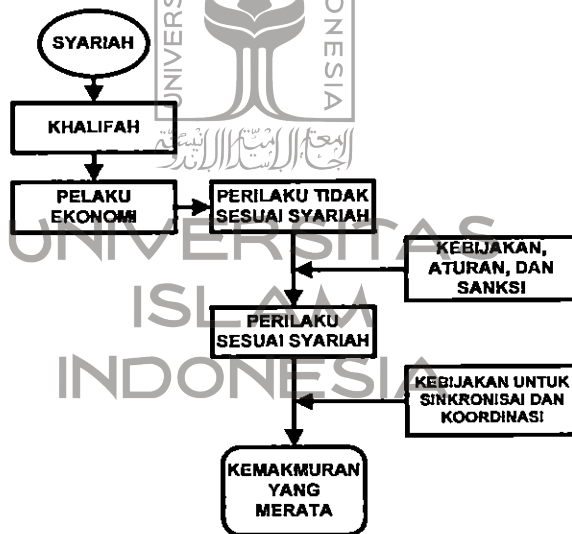
¹⁴ SEK sangat rentan dengan hal-hal yang bersifat manusia yang disebabkan oleh hawa nafsu serakah manusia. Lihat Sofyan S. Harahap, *Senjakala Sistem Kapitalisme*, dalam <http://www.republika.co.id>

¹⁵ Lebih lengkapnya tentang kelemahan Undang-undang buatan manusia lihat Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalih al Wakil, *At Tasyri' wa Sann al Qawanin.*,

Penanaman Modal yang banyak dikritik oleh berbagai kalangan dan RUU Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Dalam konteks permasalahan inflasi yang disebabkan perilaku para pelaku ekonomi, kebijakan moneter konvensional juga tidak bisa berdaya dalam menyelesaikannya. Oleh karena itulah kiranya salah satu alasan digunakannya himbauan moral (*moral suasion*) kepada para pelaku ekonomi dalam kebijakan moneter konvensional adalah dimaksudkan untuk mengisi ketiadaan solusi dalam menjaga perilaku para pelaku ekonomi.¹⁷

Gambar 13
Peranan Kebijakan Khalifah (Negara) Dalam Menciptakan Perilaku Para Pelaku Usaha Demi Kelancaran Gerak Sektor Riil



Sumber: Jusmaliani, Pendahuluan: Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami.

¹⁶ Lihat misalnya adalah pendapat Hizbut Tahrir dalam press releasenya ttg RUU PM, dalam <http://www.hizbut-tahrir.or.id> dan Mulyanto, Antara 'Mafia' dan RUU Sumber Daya Air, dalam <http://www.republica.co.id>

¹⁷ Lihat kembali pembahasan sumber-sumber inflasi pada bab. IV

Dalam rangka mendukung gerak dari sektor riil tersebut, HT dibawah ini juga memberikan pendapatnya berkenaan dengan kebijakan yang dapat diambil oleh Khalifah, diantaranya:¹⁸

- 1) Khalifah (Negara) mengatur jenis komoditi dan sektor industri apa saja yang boleh dan tidak boleh dibuat.
- 2) Negara memberikan jaminan agar mekanisme harga komoditas (output) dapat berjalan secara transparan dan tanpa ada manipulasi.
- 3) Negara harus membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. Negara harus mengawasi mekanisme penawaran dan permintaan untuk mencapai tingkat harga yang didasari keridhaan.
- 4) Negara harus dapat mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan, baik yang dilakukan oleh penjual atau pembeli.
- 5) Negara harus mencegah berbagai tindakan penimbunan produk.
- 6) Negara harus mencegah perselisihan yang terjadi akibat tindakan-tindakan spekulasi dalam perdagangan.
- 7) Negara wajib memberantas kerusakan moral birokrat dan pengusaha.
- 8) Negara wajib menerapkan kebijakan ketanagakerjaan yang Islami.
- 9) Negara wajib menerapkan sistem administrasi birokrasi yang sederhana, cepat, dan profesional.

¹⁸ Muhammad Riza Rosadi, Kapitalisme: Biang Krisis Pangan, dalam al Wa'ie No.94 Tahun VIII, Juni 2008. KH. M. Shiddiq al Jawi, Menciptakan Iklim Bisnis yang Sehat dan Kondusif, dalam al Wa'ie No.78 Tahun VII, Februari 2007.

b. Bentuk otoritas moneter Islam

Setelah dipahami bahwa sektor moneter dan sektor riil dalam SEI memiliki keterkaitan yang sangat erat, maka kemudian akan mudah dipahami bagaimana bentuk otoritas moneter dalam Islam. Apakah berbentuk sebagaimana layaknya bank sentral yang ada sekarang atau berbeda? Dan bagaimana wewenang dari otoritas moneter itu sendiri?

Secara eksplisit, HT belum memberikan pendapat berkenaan dengan gambaran dari bentuk otoritas moneter Islam. Hanya saja, secara implisit akan dapat ditemukan pendapat HT berkenaan dengan hal tersebut. Hal ini dapat diketahui dari pendapat HT yang disebut dengan “Lembaga Administrasi Negara (*Mashalih ad Dawlah*)”¹⁹

Lembaga atau struktur administratif ini adalah sebagai cara dan sarana yang dibentuk dalam rangka untuk menjalankan urusan negara dan mengatur atau memenuhi kepentingan rakyat.¹⁹ Serta dimaksudkan untuk meringankan tugas dan beban Khalifah (sebagai kewajibannya untuk *ri'ayah asy syu'un*), khususnya ketika kemaslahatan atau kepentingan masyarakat semakin bertambah luas dan bertambah banyak.²⁰ Oleh karena itu, lembaga-lembaga administratif yang ada langsung berada di bawah Khalifah.²¹

Di dalamnya terdapat departemen-departemen (*mashlahah*), jawatan-jawatan (*da'irah*), dan unit-unit (*idarah*). Departemen merupakan lembaga administratif tertinggi untuk satu kemaslahatan di antara berbagai

¹⁹ Hizbut-Tahrir, *Ajhizah ad Daulah*., hal. 221. Lihat juga Yahya Abdurrahman, *Mashalih ad Dawlah* (Lembaga Administrasi Negara), dalam al Wa'ie No. 62 Tahun VI, Oktober 2005, hal. 62.

²⁰ *Ibid.*, hal. 217.

²¹ Lihat lampiran XIV.

kemaslahatan negara seperti kewarganegaraan (kependudukan), transportasi, pencetakan mata uang, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketanagakerjaan, jalan, dan sebagainya.²²

Konsep ini (struktur administratif), diadopsi oleh HT atas dasar sejumlah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Sebagai misal adalah pengaturan dan penetapan oleh beliau dalam masalah lebar sebuah jalan. Beliau menetapkan bahwa, lebar jalan adalah selebar tujuh hasta.²³ Begitu pula beliau pernah mengangkat Abdullah bin Arqam menjadi pencatat jumlah penduduk (sensus) dan kabilah mereka, kemudian ditugasi untuk mengatur penggunaan air di Negara Islam.²⁴

Hal yang sama juga dilakukan oleh para Khalifah sesudah Rasulullah Saw wafat. Khalifah Umar bin al-Khattab ra menggunakan *diwan* untuk mendata nama-nama tentara Muslim dan sejumlah informasi penting lainnya. Cara pengelolaan *diwan* ini diadopsi dari orang-orang Persia yang telah menggunakannya terlebih dahulu dalam hal yang sama.²⁵

Taqiy al Muqrizi dalam *al Khuththatnya* menuturkan, Muawiyah mengangkat seseorang untuk tiap kabilah. Orang itu berkeliling tiap hari menanyakan adakah bayi yang baru dilahirkan dan orang yang meninggal, lalu ia mencatatnya dan kemudian dipindahkan dalam catatan di *diwan*.²⁶

Maka dari itu, sesuai dengan maksud dari pembentukan struktur administratif, dapatlah dipahami bahwa, HT bisa saja kemudian membentuk

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hal. 215.

²⁴ Jalal al-Anshari (Ed), *Introduction.*, hal. 117.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Yahya Abdurrahman, *Mashalih.*, hal. 61.

1. Otoritas moneter

a. Sinkronitas sektor moneter Islam dengan sektor riil

Sebelum membahas bagaimana bentuk dari otoritas moneter Islam, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran secara singkat sektor riil dan mekanisme hubungan yang terjadi antara pelaku ekonomi di dalam sistem ekonomi Islam (SEI).

Apabila gambaran tersebut sudah dipahami, baru kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang bentuk serta wewenang dari otoritas moneter Islam.

Hal ini dilakukan tidak lain disebabkan sangat eratnya kaitan antara aktivitas yang dilakukan di sektor moneter dengan sektor riil di dalam SEI. Oleh karena itu, di bawah ini akan dibahas terlebih dahulu bagaimana gambaran dari sektor riil dan mekanisme hubungan yang terjadi antara pelaku ekonomi di dalam SEI.

Sesungguhnya, pergerakan sektor riil dan mekanisme hubungan yang terjadi antara pelaku ekonomi di dalam SEI tidaklah sebagaimana gambaran yang ada pada aktivitas ekonomi dan mekanisme hubungan yang terjadi antara pelaku ekonomi di dalam sistem ekonomi Konvensional (SEK).

Dalam SEK, aktivitas ekonomi (sektor riil) yang berjalan relatif sulit untuk bergerak dan berkembang. Hal ini tidak lain adalah disebabkan penerapan sistem perbankan yang berbasis sistem bunga. Akibatnya, sektor moneter (dalam arti orang berusaha menarik keuntungan dari mengkomoditaskan uang dalam pasar uang, bank, pasar modal dan

sebagainya)⁵ dapat berjalan sendiri tanpa terkait secara langsung dengan sektor riil atau lebih dominan.⁶ Dengan kata lain, unit surplus dalam menginvestasikan dan atau mengembangkan dana yang dimilikinya tanpa harus terikat dengan sektor riil (karena bersifat “substitusi” dan keterkaitannya pun lebih rumit).⁷

Sebaliknya dalam Islam, sistem ekonominya berbasis pada sektor riil, bukan moneter.⁸ Dalam Islam, sektor moneter tidak akan dibiarkan berjalan sendiri (*independent*) tanpa keterkaitan dengan sektor riil.⁹ Dengan kata lain, eksistensi dari sektor moneter hanyalah dijadikan sebagai pelengkap (menyediakan uang untuk modal usaha) demi berjalannya sektor riil.¹⁰

Dijadikannya sektor riil sebagai basis dalam SEI tidak lain adalah konsekuensi langsung dari prinsip-prinsip SEI yang melarang penerapan bunga dan segala transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif. Sebagai hasilnya, sektor riil yang dijalankan dalam Islam relatif memiliki kemudahan dalam bergerak dan berkembang. Ini terjadi sebagai efek langsung dari dilarangnya sistem bunga dan diwajibkannya semua transaksi yang terjadi harus berdasarkan kepada syariah Islam (misal *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*).

⁵ Ismail Yusanto, Mencari Solusi, hal. 12.

⁶ Esta Lestari, Sistem Moneter dalam Islam, dalam Masyhuri (Ed), Teori Ekonomi Dalam Islam, cet. I (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 131.

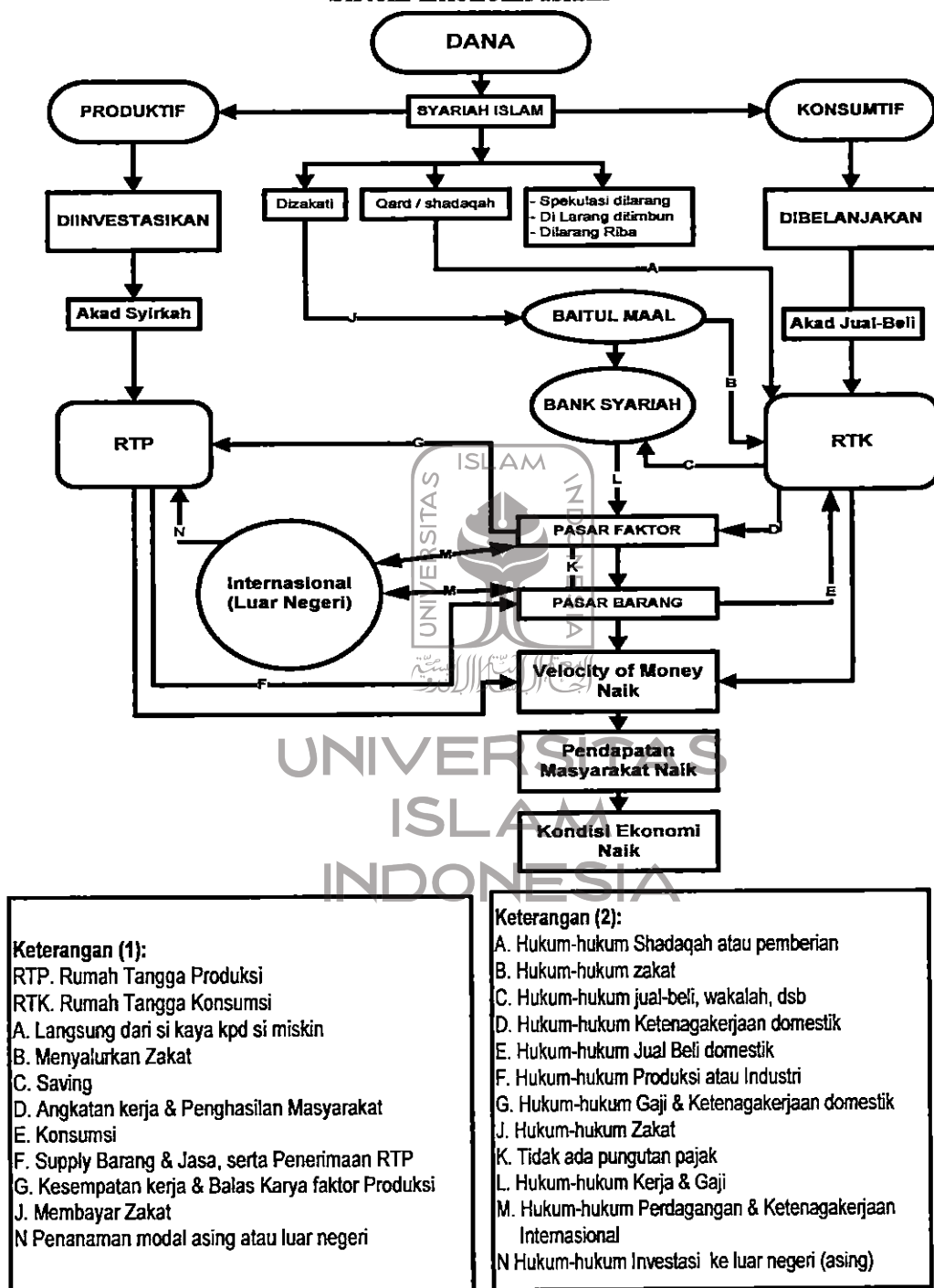
⁷ Lihat Gambar 5.

⁸ M. Shiddiq al Jawi, Di Balik Rapuhnya Kapitalisme, dalam . Lihat juga Abu Fuad, 37 Soal Jawab., hal. 113-125.

⁹ Dimana ada uang maka ada transaksi barang dan jasa. Ismail Yusanto, Mencari Solusi, *Ibid.*,

¹⁰ Ismail Yusanto, Mencari Solusi, *Ibid.*,

Gambar 11
Mekanisme Hubungan Antara Sektor riil dan Moneter dalam
Sistem Ekonomi Islam



Sumber: Diolah dari beberapa sumber¹¹

¹¹ T. Gilarso, Pengantar., Taqiyuddin An Nabhani, *An Nidlam Al Iqtishadi.*, Abdul Qadim Zallum, *al Amwal fi ad Daulah.*, M. Ismail Yusanto, Mencari Solusi.,

Untuk mendukung gerak dari sektor riil, Khalifah atau Negara juga dapat mengambil sejumlah kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi perkembangan sektor riil.¹²

Arah dari kebijakan ini ditujukan kepada perilaku dari pelaku-pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol perilaku yang tidak sesuai dengan syariah (dalam konteks masalah ekonomi).¹³

Hal inilah yang tidak dimiliki oleh SEK. Ketidadaan tersebut merupakan konsekuensi logis dari landasan SEK, yaitu sekularisme yang melahirkannya.¹⁴

Akibatnya, kegiatan ekonomi yang berjalan tidak lagi berjalan berdasarkan norma-norma Agama (syariah Islam), digantikan oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri yang lebih cenderung menguntungkan pihak yang berkuasa dalam ekonomi maupun politik.¹⁵

Oleh karena itu, secara faktual banyak sekali contoh bagaimana kebijakan yang dibuat pemerintah adalah hasil dari “perselingkuhan” antara Kapitalis dan Politikus. Sebut saja misalnya adalah undang-undang

¹² Pandangan HT tentang sektor riil dapat dilihat dalam buku Abdurrahman al Maliki, *as Siyasatu al Iqtishadiyah al Mutsala.*, Pandangan HT berawal dari pandangannya terhadap sektor-sektor ekonomi utama (sumber-sumber ekonomi primer), yaitu pertanian, industri, perdagangan, jasa. Terhadap empat sektor ekonomi tersebut HT memberikan sejumlah solusi. Lihat Abdurrahman al Maliki, *as Siyasatu al Iqtishadiyah al Mutsala.*, hal. 41-44.

¹³ Jusmaliani, Pendahuluan: Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami, dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (Ed), *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), hal. 4-8. Lihat juga Jusmaliani, *Kebijakan Ekonomi yang Islami*, hal. 51-79, dalam *Ibid.*,

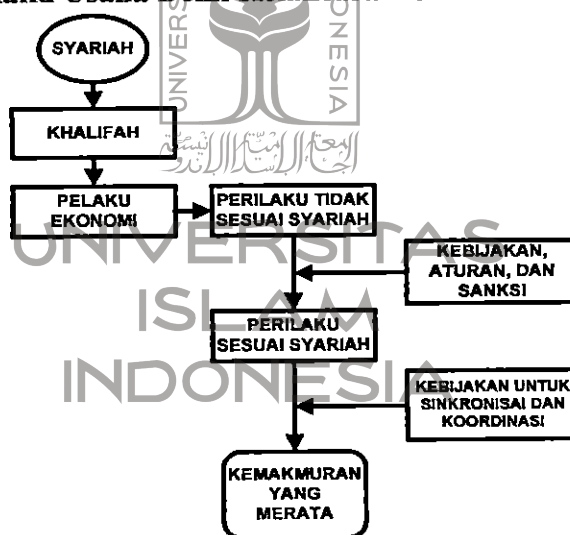
¹⁴ SEK sangat rentan dengan hal-hal yang bersifat manusia yang disebabkan oleh hawa nafsu serakah manusia. Lihat Sofyan S. Harahap, *Senjakala Sistem Kapitalisme*, dalam <http://www.republika.co.id>

¹⁵ Lebih lengkapnya tentang kelemahan Undang-undang buatan manusia lihat Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Shalih al Wakil, *At Tasyri' wa Sann al Qawanin.*,

Penanaman Modal yang banyak dikritik oleh berbagai kalangan dan RUU Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Dalam konteks permasalahan inflasi yang disebabkan perilaku para pelaku ekonomi, kebijakan moneter konvensional juga tidak bisa berdaya dalam menyelesaikannya. Oleh karena itulah kiranya salah satu alasan digunakannya himbauan moral (*moral suasion*) kepada para pelaku ekonomi dalam kebijakan moneter konvensional adalah dimaksudkan untuk mengisi ketiadaan solusi dalam menjaga perilaku para pelaku ekonomi.¹⁷

Gambar 13
Peranan Kebijakan Khalifah (Negara) Dalam Menciptakan Perilaku Para Pelaku Usaha Demi Kelancaran Gerak Sektor Riil



Sumber: Jusmaliani, Pendahuluan: Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami.

¹⁶ Lihat misalnya adalah pendapat Hizbut Tahrir dalam press releasenya ttg RUU PM, dalam <http://www.hizbut-tahrir.or.id> dan Mulyanto, Antara 'Mafia' dan RUU Sumber Daya Air, dalam <http://www.republica.co.id>

¹⁷ Lihat kembali pembahasan sumber-sumber inflasi pada bab. IV

Dalam rangka mendukung gerak dari sektor riil tersebut, HT dibawah ini juga memberikan pendapatnya berkenaan dengan kebijakan yang dapat diambil oleh Khalifah, diantaranya:¹⁸

- 1) Khalifah (Negara) mengatur jenis komoditi dan sektor industri apa saja yang boleh dan tidak boleh dibuat.
- 2) Negara memberikan jaminan agar mekanisme harga komoditas (output) dapat berjalan secara transparan dan tanpa ada manipulasi.
- 3) Negara harus membuat kebijakan yang dapat menjamin terciptanya harga yang wajar berdasarkan mekanisme pasar yang berlaku. Negara harus mengawasi mekanisme penawaran dan permintaan untuk mencapai tingkat harga yang didasari keridhaan.
- 4) Negara harus dapat mencegah terjadinya berbagai penipuan yang sering terjadi dalam perdagangan, baik yang dilakukan oleh penjual atau pembeli.
- 5) Negara harus mencegah berbagai tindakan penimbunan produk.
- 6) Negara harus mencegah perselisihan yang terjadi akibat tindakan-tindakan spekulasi dalam perdagangan.
- 7) Negara wajib memberantas kerusakan moral birokrat dan pengusaha.
- 8) Negara wajib menerapkan kebijakan ketanagakerjaan yang Islami.
- 9) Negara wajib menerapkan sistem administrasi birokrasi yang sederhana, cepat, dan profesional.

¹⁸ Muhammad Riza Rosadi, Kapitalisme: Biang Krisis Pangan, dalam al Wa'ie No.94 Tahun VIII, Juni 2008. KH. M. Shiddiq al Jawi, Menciptakan Iklim Bisnis yang Sehat dan Kondusif, dalam al Wa'ie No.78 Tahun VII, Februari 2007.

b. Bentuk otoritas moneter Islam

Setelah dipahami bahwa sektor moneter dan sektor riil dalam SEI memiliki keterkaitan yang sangat erat, maka kemudian akan mudah dipahami bagaimana bentuk otoritas moneter dalam Islam. Apakah berbentuk sebagaimana layaknya bank sentral yang ada sekarang atau berbeda? Dan bagaimana wewenang dari otoritas moneter itu sendiri?

Secara eksplisit, HT belum memberikan pendapat berkenaan dengan gambaran dari bentuk otoritas moneter Islam. Hanya saja, secara implisit akan dapat ditemukan pendapat HT berkenaan dengan hal tersebut. Hal ini dapat diketahui dari pendapat HT yang disebut dengan “Lembaga Administrasi Negara (*Mashalih ad Dawlah*)”¹⁹

Lembaga atau struktur administratif ini adalah sebagai cara dan sarana yang dibentuk dalam rangka untuk menjalankan urusan negara dan mengatur atau memenuhi kepentingan rakyat.¹⁹ Serta dimaksudkan untuk meringankan tugas dan beban Khalifah (sebagai kewajibannya untuk *ri'ayah asy syu'un*), khususnya ketika kemaslahatan atau kepentingan masyarakat semakin bertambah luas dan bertambah banyak.²⁰ Oleh karena itu, lembaga-lembaga administratif yang ada langsung berada di bawah Khalifah.²¹

Di dalamnya terdapat departemen-departemen (*mashlahah*), jawatan-jawatan (*da'irah*), dan unit-unit (*idarah*). Departemen merupakan lembaga administratif tertinggi untuk satu kemaslahatan di antara berbagai

¹⁹ Hizbut-Tahrir, *Ajhizah ad Daulah*., hal. 221. Lihat juga Yahya Abdurrahman, *Mashalih ad Dawlah* (Lembaga Administrasi Negara), dalam al Wa'ie No. 62 Tahun VI, Oktober 2005, hal. 62.

²⁰ *Ibid.*, hal. 217.

²¹ Lihat lampiran XIV.

kemaslahatan negara seperti kewarganegaraan (kependudukan), transportasi, pencetakan mata uang, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketanagakerjaan, jalan, dan sebagainya.²²

Konsep ini (struktur administratif), diadopsi oleh HT atas dasar sejumlah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Sebagai misal adalah pengaturan dan penetapan oleh beliau dalam masalah lebar sebuah jalan. Beliau menetapkan bahwa, lebar jalan adalah selebar tujuh hasta.²³ Begitu pula beliau pernah mengangkat Abdullah bin Arqam menjadi pencatat jumlah penduduk (sensus) dan kabilah mereka, kemudian ditugasi untuk mengatur penggunaan air di Negara Islam.²⁴

Hal yang sama juga dilakukan oleh para Khalifah sesudah Rasulullah Saw wafat. Khalifah Umar bin al-Khattab ra menggunakan *diwan* untuk mendata nama-nama tentara Muslim dan sejumlah informasi penting lainnya. Cara pengelolaan *diwan* ini diadopsi dari orang-orang Persia yang telah menggunakannya terlebih dahulu dalam hal yang sama.²⁵

Taqiy al Muqrizi dalam *al Khuththatnya* menuturkan, Muawiyah mengangkat seseorang untuk tiap kabilah. Orang itu berkeliling tiap hari menanyakan adakah bayi yang baru dilahirkan dan orang yang meninggal, lalu ia mencatatnya dan kemudian dipindahkan dalam catatan di *diwan*.²⁶

Maka dari itu, sesuai dengan maksud dari pembentukan struktur administratif, dapatlah dipahami bahwa, HT bisa saja kemudian membentuk

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hal. 215.

²⁴ Jalal al-Anshari (Ed), *Introduction.*, hal. 117.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Yahya Abdurrahman, *Mashalih.*, hal. 61.

sebuah departemen yang secara khusus menangani berbagai masalah moneter dan inflasi demi menjaga dan meraih kemaslahatan dan kepentingan masyarakat dan Negara. Dalam hal ini, penulis mengusulkan nama dari departemen tersebut adalah departemen moneter.²⁷

Dengan demikian, bentuk dari otoritas moneter dalam Islam sangatlah berbeda dengan bentuk otoritas moneter konvensional yang berbentuk bank sentral.

Selain dikarenakan dalil (*af'al* Nabi dan juga para Khalifah setelah beliau) yang menyebabkan perbedaan ini juga dikarenakan bentuk dari aktivitas ekonomi (sektor riil) yang terjadi dalam tubuh Daulah Khilafah yang tidak menggunakan cara atau mekanisme sebagaimana yang ada pada SEK. Sehingga kemudian meniscayakan berbedanya bentuk dari otoritas moneter yang digunakan.

c. Hubungan departemen moneter dengan Khalifah

Pada bab IV, sudah dibahas perihal hubungan antara otoritas moneter konvensional (bank sentral) dengan eksekutif (pemerintah). Dimana antara kedua otoritas tersebut terjadi pendikotomian. Namun, Bagaimana hubungan departemen moneter Islam dengan Khalifah?

Hubungan yang terjalin antara departemen moneter dengan Khalifah adalah dapat dikembalikan kepada status dari struktur atau lembaga administrasi itu sendiri (departemen moneter) yakni, bertindak sebagai pelaksana dari segala kebijakan yang diambil Khalifah.

²⁷ Nama departemen ini akan penulis gunakan untuk penulisan selanjutnya.

Maka dari itu, hubungan antara departemen moneter dengan Khalifah tidaklah sama dengan hubungan seorang pemerintah (Presiden) dengan bank sentral yang mengharuskan adanya independensi bank sentral dari pihak manapun.

Meskipun demikian, sebagaimana halnya hubungan seorang pemerintah (Presiden) dengan bank sentral dalam SEK yang terdapat koordinasi, dalam SEI bisa saja kemudian juga ada koordinasi (meminta pendapat dalam rangka mengambil sebuah keputusan atau kebijakan) antara Khalifah dengan dirjen departemen moneter agar menghasilkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan bidang moneter.²⁸

d. Tugas, Wewenang dan tanggung jawab otoritas moneter

Departemen moneter berada di bawah seorang pemimpin, yakni direktur jenderal. Dirjen secara penuh bertanggungjawab terhadap departemen yang dipimpinnya. Dirjen juga bertanggungjawab kepada Khalifah, Wali (Gubernur), dan Amil (Bupati) dari sisi pertanggungjawaban terhadap keterikatannya dengan hukum-hukum syariah dan peraturan-peraturan secara umum.²⁹

Adapun wewenang yang dimiliki atau diberikan kepada Dirjen adalah mencakup atau dibatasi dengan aktivitas yang bersifat teknis semata (bukan pemerintahan). Dengan kata lain, semua wewenang yang dimiliki oleh dirjen harus dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya departemen

²⁸ Maksud dari meminta pendapat disini adalah Khalifah atau kepala Negara meminta pendapat kepada orang yang ahli dibidangnya (misalnya adalah permasalahan moneter) untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, lihat Abdul Qadim Zallum, *Ad Dimukratyah Nizham al Kufr* (Demokrasi Sistem Kufur), cet. III (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), hal. 75-77.

²⁹ Hizbut-Tahrir, *Ajhizah ad Daulah.*, hal. 212-221.

tersebut. Dalam hal ini adalah mengurus, menjaga, dan mewujudkan kepentingan (kemaslahatan) masyarakat. Serta membantu tugas-tugas Khalifah dalam rangka melaksanakan syariah Islam.³⁰

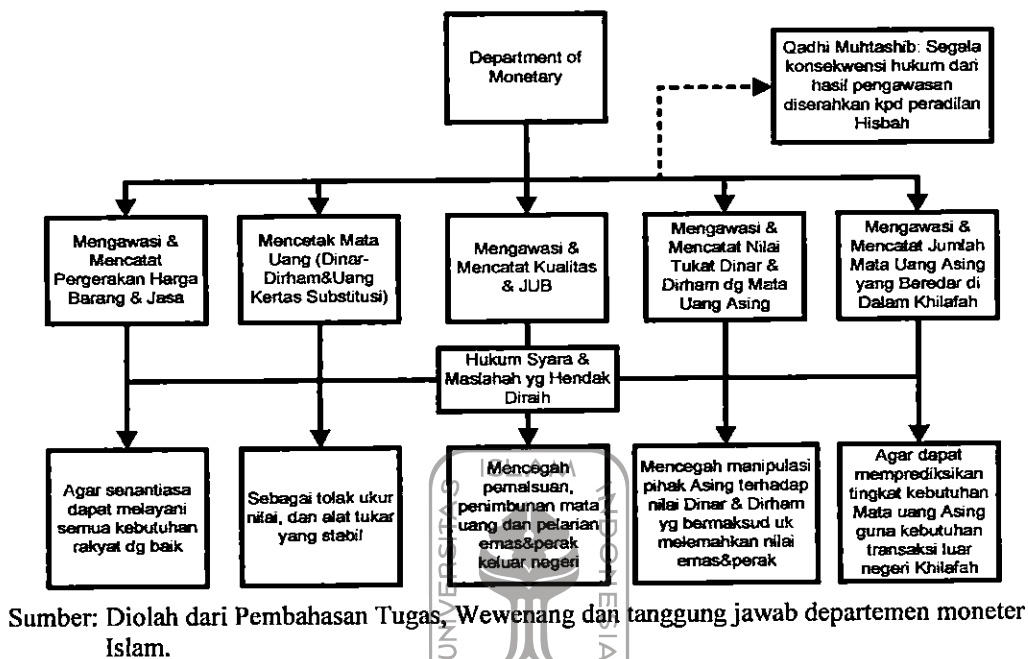
Dalam konteks moneter, tugas dirjen (departemen) moneter (menurut penulis) setidaknya ada lima hal yang harus dilakukan, yaitu: pertama, mengawasi dan mencatat jumlah maupun kualitas uang beredar (dinar dan dirham) yang ada di masyarakat, dan mengawasi serta mencatat tingkat harga barang dan jasa yang ada. Kedua, mencetak mata uang baik dalam bentuk dinar dan dirham maupun uang kertas substitusi. Ketiga, mengawasi dan mencatat kualitas dari JUB yang ada pada masyarakat. Keempat, mengawasi dan mencatat nilai tukar dinar dan dirham dengan mata uang Asing. Kelima, mengawasi dan mencatat jumlah mata uang Asing yang beredar di dalam Negeri (Khilafah).³¹

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³⁰ *Ibid.*, hal. 218.

³¹ Lihat kembali kerangka pikir penelitian.

Gambar 12
Tugas-tugas Departemen Moneter Serta Hukum Syara dan
Masalah yang Hendak diraihnya



Adapun segala bentuk konsekwensi hukum dari hasil tugas-tugas yang dilaksanakan departemen moneter adalah dilimpahkan kepada peradilan hisbah, dimana yang mengambil keputusan hukumnya (menjatuhkan hukum) disebut dengan *qadhi muhtasib*.³²

*Qadhi muhtasib*lah nantinya yang menjatuhkan hukuman apabila terdapat seorang, dan atau sekelompok orang yang melanggar dari ketetapan-ketetapan syariah (misalnya dalam konteks moneter adalah menimbun uang).³³

e. Strategi pengaturan departemen moneter

³² Qadhi muhtasib adalah qadhi yang memeriksa dalam seluruh perkara yang termasuk hak umum. Di dalam perkara ini tidak terdapat penuntut. Hanya saja, perkara tersebut tidak boleh merupakan bagian dari *hudud* dan *jinayat*. Lihat ³² Hizbut-Tahrir, *Ajhizah ad Daulah*, hal. 196-198.

³³ Lihat Lampiran 15, Struktur Qadi Muhtasib.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya, dirjen moneter mengacu kepada sejumlah strategi umum yang telah ditetapkan Islam, yakni: kesederhanaan aturan yang digunakan, pelayanan yang diberikan cepat dan mudah, serta memiliki profesionalitas dalam bidang yang dikerjakannya.³⁴

f. Syarat-syarat petugas pelaksana (pegawai) di dalam departemen moneter.

Setiap orang yang tercatat sebagai warga Negara Islam boleh menjadi pegawai di setiap departemen yang ada. Baik itu laki-laki atau perempuan, Muslim maupun non-Muslim. Apakah itu sebagai dirjen atau pegawai.

Ketentuan ini berdasarkan kepada hukum-hukum kepegawaian atau perburuhan (*ijarah*). Sebab, sesuai dengan hukum *ijarah*, direktur-direktur dan para pegawai merupakan *ajir* (pekerja atau pegawai). Karena itu, negara boleh mempekerjakan pegawai secara mutlak, baik Muslim maupun non-Muslim.³⁵

2. Kebijakan mata uang

Pembahasan tentang bentuk mata uang ideal yang harus digunakan adalah pembahasan yang cukup banyak dibahas dan diperhatikan oleh Hizbut Tahrir (HT). Salah satunya adalah tampak dari pendapat-pendapat HT tentang strategi mengembalikan dan menerapkan standar emas dan perak ketika Negara Khilafah tegak kembali.³⁶

HT berpendapat bahwa, pada dasarnya Islam tidak menetapkan hanya satu macam alat tukar pada saat menetapkan hukum-hukum jual beli dan perburuhan.

³⁴ *Ibid.*, hal. 221-222.

³⁵ *Ibid.*, hal. 222-224.

³⁶ Lihat misalnya di dalam buku Hizbut Tahrir Indonesia, Khilafah Rasyidah: yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-tantangannya.

Islam memberikan keleluasaan kepada manusia untuk melakukan pertukaran barang, manfaat dan jasa dengan apa saja sehingga tercapai keridhaan di dalamnya, tanpa mengkhususkan satu macam alat tukar sebagai dasarnya.³⁷

Oleh karena itu, Islam membolehkan seseorang membeli unta dengan bayaran bekerja di tempat pemilik unta selama tiga bulan, pembelian pedang dengan kurma, dan sebagainya. Dengan kata lain, Islam telah memberikan keleluasaan untuk melakukan pertukaran secara langsung dengan apa saja yang manusia inginkan, dengan disertai sikap saling ridha di antara mereka, baik dengan imbalan barang, jasa, ataupun uang.³⁸

Oleh karenanya, pertukaran antara barang dengan uang atau antara uang dengan barang adalah dibolehkan secara mutlak. Begitu pula antara pertukaran barang dengan jasa (kecuali yang diharamkan oleh nash tertentu) atau uang dibolehkan secara mutlak.³⁹

Akan tetapi, menurut HT, Islam membedakan antara masalah pertukaran dengan masalah mata uang yang akan dicetak oleh Khilafah (negara). Dalam pertukaran, Islam memang tidak menetapkan asas tertentu selama ada saling ridho dalam prosesnya. Namun dalam masalah mata uang bagi negara (Khilafah), Islam telah menetapkan standar tertentu sebagai asas pertukaran, yaitu emas dan perak.⁴⁰

Lebih dari itu, begitu intensnya HT dalam menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang adalah terkait dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwa penggunaan dinar dan dirham adalah diwajibkan hukum syara. Dengan

³⁷ Abdul Qadim Zallum, *al Amwal*., hal. 218.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Sigit Purnawan Jati, *Seputar Dinar dan Dirham*, dalam *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*, cet. I (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, INFID, 2001), hal. 128.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 130. Lihat juga Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Iqtishadi*, hal. 301.

kata lain, yang dilihat dari oleh HT dalam penggunaan dinar dan dirham bukanlah semata-mata dari keuntungan yang akan dicapai, melainkan juga adalah amanat hukum syara yang ada padanya.⁴¹

Selain dinar dan dirham, HT juga berpendapat bahwa penggunaan uang kertas yang dijamin penuh dengan emas dan perak juga dibolehkan, demi memberikan kemudahan transaksi-transaksi yang berjumlah kecil.⁴²

Sejumlah pihak juga sudah mengakui akan keunggulan dari emas dan menyetujui diberlakukannya kembali emas sebagai standar mata uang dunia di bandingkan dengan jenis mata uang lainnya.⁴³ Meskipun demikian, beberapa pihak juga ada yang “agak keberatan” diterapkannya emas sebagai mata uang dunia.⁴⁴

Rencana pemberlakuan kembali dinar dan dirham (emas dan perak) khususnya bagi negara Islam (khilafah) sebagai mata uang sejatinya akan menghadapi sejumlah kendala. Dalam hal ini, Taqiyuddin An Nabhani dan Abdul Qadim Zallum (pemimpin pertama dan kedua HT) dalam buku mereka *Nizham al Iqtishadi Fi al Islam* dan *al Amwal fi ad Daulah Khilafah* sudah memberikan sejumlah langkah atau cara untuk menghilangkan hambatan (*barrier*) tersebut.⁴⁵

Dalam konteks Daulah Khilafah, An Nabhani dan Zallum menganalisa akan ada sejumlah hambatan dalam pemberlakuan mata uang dinar dan dirham.

⁴¹ Taqiyuddin an Nabhani, *Nizham al Iqtishadi*, hal. 300.

⁴² *Ibid.*, hal. 308.

⁴³ Gary Nort (*Solid Gold Reasons to Own Gold* dan *Gold Is a Political Metal*), John Embry (*15 Reasons to Own Gold*), Alan Greenspan (*Gold and Economic Freedom*), Murray N Rothbard (*What Has Government Done to Our Money?*), Umar Ibrahim Vadillo (Berakhirnya Ekonomi: Mata Uang Emas dan Punahnya Perbankan), Taqiyuddin an Nabhani (*Nizham al Iqtishadi fi al Islam*).

⁴⁴ Mulya E. Siregar, *Manajemen.*, hal. 104.

⁴⁵ Abdul Qadim Zallum, *al Amwal.*, hal. 239-247.

Hambatan tersebut adalah berupa adanya penimbunan yang sangat besar, adanya hambatan-hambatan perbatasan Negara, terkonsentrasinya cadangan-cadangan yang sangat besar di Negara-negara besar saat ini dan di Negara yang kemampuan produksinya sangat tinggi, keharusan mempunyai kemampuan bersaing di dalam perdagangan internasional, memiliki keunggulan SDM di kalangan para pakar, teknisi dan insinyurnya.⁴⁶ Dalam rangka untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, HT memberikan sejumlah strategi atau cara untuk menyelesaikannya (dalam kerangka Khilafah).⁴⁷

3. Kebijakan sistem nilai tukar (*exchange rate system*)

Pemilihan sistem nilai tukar merupakan persoalan penting dalam perekonomian saat ini (khususnya adalah bagi negara yang mempunyai karakteristik ekonomi terbuka) karena tingkat integrasi internasional yang berkembang. Oleh karenanya, apapun sistem nilai tukar yang dipilih akan sangat mempengaruhi bagi para pelaku usaha domestik.⁴⁸

Dalam memilih sistem nilai tukar mana yang terbaik bagi perekonomian, para ekonom masing-masing berbeda pendapat. Masing-masing pihak memiliki alasan dalam mendukung pemilihan sistem nilai tukar yang dimaksud.⁴⁹

Menurut Rothbard, di bawah sistem mata uang *fiat money* sekarang ini sistem keuangan dunia akan senantiasa dihadapkan pada problem pada pemilihan sistem nilai tukar, apakah menggunakan kebijakan nilai tukar tetap ataukah

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 242.

⁴⁷ Lihat Hizbut Tahrir, *Khilafah Rasyidah*, hal. 151-156.

⁴⁸ Josep G Nellis dan David Parker, *The Essence of The Economy*, cet. I (Yogyakarta: ANDI, 2000), hal. 216.

⁴⁹ Perdebatan tentang system nilai tukar mana yang baik bisa dilihat di Ha Joon Chang dan Ilene Grabel, *Reclaiming Development*, hal. 166-182. Dias Satria, *Keuangan Internasional*, hal. 61-68. Lihat juga Josep G Nellis dan David Parker, *The Essence*, hal. 226-229.

mengambang? Dimana menurutnya masing-masing dari pilihan tersebut menjanjikan persoalan tanpa solusi.⁵⁰

Dalam konteks ini, Rothbard berhasil memahami bahwa permasalahan utama berkaitan dengan pemilihan sistem nilai tukar mana yang baik digunakan adalah tidak bersumber dari sistem nilai tukar itu sendiri. Melainkan adalah bersumber pada bentuk mata uang yang digunakan. Dengan kata lain, sebelum menentukan sistem nilai tukar mana yang akan digunakan hendaknya terlebih dahulu dibahas terlebih dahulu permasalahan dari penerapan *fiat money*. Dalam hal ini, Rothbard mengusulkan adalah digunakannya mata uang (standar moneter) emas dengan sistem nilai tukar mengambang.

Sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Rothbard, HT berpendapat sistem nilai tukar yang dibenarkan oleh Islam adalah sistem mengambang dengan syarat berdasar kepada standar moneter emas dan pertukaran antara mata uang yang berbeda tersebut dilaksanakan secara langsung dan tunai.⁵¹

HT mendasarkan pendapatnya ini sebagaimana halnya pendapat mereka tentang tidak bolehnya pemerintah menetapkan harga tertentu terhadap barang dan jasa secara mutlak.

4. Kebijakan di sektor keuangan

Kebijakan mata uang dan sistem nilai tukar di atas harus disertai dan diikuti dengan penerapan sejumlah kebijakan disektor keuangan (berupa larangan-larangan dari syariah Islam) lainnya. Apabila tidak, meskipun hanya satu yang

⁵⁰ Murray N. Rothbard, *What Has..*, hal. 102.

⁵¹ Abdurrahman al Maliki, *as Siyasatu al Iqtishadiyat*., hal. 133-137. Taqiuddin an Nabhani, *Nizham al Iqtishadi*, hal. 321-322.

tidak dijalankan, maka akan meniscayakan terjadinya kegagalan dari kebijakan moneter tersebut dalam mengendalikan inflasi.

Kebijakan di sektor keuangan ini penulis klasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kebijakan di sektor keuangan yang bersumber pada kewajiban atau anjuran syariah Islam dan kebijakan di sektor keuangan yang bersumber pada larangan syariah Islam.

Berikut di bawah ini penjelasan masing-masing dari kebijakan disektor keuangan tersebut:

- a) Kebijakan di sektor keuangan yang bersifat berupa kewajiban atau anjuran dari syariah Islam

- 1) Kewajiban membayar zakat

Kewajiban zakat di dalam Islam merupakan perkara *ma'lûmun min ad-dîn bi ad-dharûrah* (perkara yang telah diketahui urgensinya). Menurut syariat, zakat adalah hak yang telah ditentukan, yang diwajibkan atas harta dan individu tertentu.⁵²

Para ulama telah mengklasifikasikan zakat sebagai bagian dari ibadah *mahdhah* (murni). Ibadah adalah bentuk penyucian hamba kepada Zat Yang berhak disembah, juga bentuk hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya.⁵³

Oleh karenanya, HT berpendapat persoalan zakat adalah persoalan yang sepenuhnya harus dikembalikan kepada Allah (*tawqifiyyah*), yang

⁵² Hafidz Abdurrahman, Mem-'Produktif'-kan Zakat, Bolehkah?, dalam al Wa'ie No. 50, 2004.

⁵³ *Ibid.*,

berarti harus merujuk pada dalil syariat, atau harus *manshus* (dinyatakan di dalam nas).⁵⁴

Instrumen ini meniadakan potensi penimbunan mata uang yang menyebabkan kesulitan sektor riil untuk bergerak atau berkembang serta dapat menstimulus tingkat investasi.

2) Pungutan pajak (*dlaribah*)

HT berpendapat pungutan pajak dalam Islam adalah diperbolehkan, hanya saja bersifat temporer atau pada kondisi tertentu saja. Dalam hal ini adalah ketika di baitul mal tidak ada uang atau harta untuk membiayai kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada baitul mal. Dengan kata lain, kewajiban yang dibebankan kepada baitul mal apakah pada saat itu ada atau tidak ada harta di dalamnya tetaplah harus dipenuhi kewajiban tersebut.⁵⁵

Sedangkan dari sisi jumlahnya, pajak dalam Islam dipungut berdasarkan kebutuhan dan kemampuan memenuhi pembelanjaan rutin atas hal-hal (kondisi) yang telah ditentukan. Hal-hal atau kondisi diwajibkannya pajak apabila pada baitul mal tidak ada harta diantaranya adalah pembiayaan jihad dan segala hal yang harus dipenuhi yang terkait dengan jihad (pengadaan peralatan militer), pembiayaan para fuqara, orang-orang miskin dan ibnu sabil, pembiayaan yang harus dikeluarkan

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Abdul Qadim Zallum, *al Amwal.*, hal. 138-148.

untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat dimana keberadaannya sangat dibutuhkan dan jika tidak dibiayai maka bahaya akan menimpa umat.⁵⁶

Pungutan itupun hanya diwajibkan kepada mereka yang memang secara ekonomi mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan pelengkap dengan cara yang *ma'ruf*.⁵⁷

Dengan karakteristik seperti di atas, pajak dalam SEI Islam tidaklah sebagaimana halnya dengan konsep pajak dalam SEK.⁵⁸ Sebagai hasilnya, pembengkakan biaya produksi (yang sangat berpotensi menyebabkan inflasi) sebagai akibat dari kewajiban pajak dalam proses produksi barang tidak akan terjadi.

- c) Selain itu, Islam juga memiliki sejumlah instrumen hukum yang bersifat anjuran, seperti waqaf, infaq dan shadaqah yang apabila dilaksanakan oleh masyarakat akan menciptakan perputaran atau arus uang semakin cepat dan pada akhirnya memberikan efek positif kepada sektor riil.
- b) Kebijakan di sektor keuangan lainnya yang bersifat larangan dari syariah Islam
- 1) Dilarangnya riba atau sistem bunga

Bagi kaum Muslimin, keharaman riba sudah bukan merupakan rahasia lagi. Hanya saja kemudian, dewasa ini, seiring dengan berjalannya waktu dan kemunduran yang masih menyelimuti tubuh umat Islam pemahaman tersebut mengalami sejumlah distorsi. Padahal keharaman

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Lihat pembahasan tentang perbedaan antara pajak dalam Islam dengan pajak dalam Kapitalisme di M. Hatta, Konsep Pajak Dalam Islam, Makalah Kuliah MSI UIL.

riba adalah mutlak adanya, tidak ada batasan (apakah itu sedikit atau banyak, digunakan pada sektor produktif atau konsumtif).⁵⁹

Saat ini keharaman riba sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang harus di jauhi dan ditinggalkan. Oleh karenanya, seringkali dapat ditemukan perilaku seorang yang beragama Islam yang sangat menjaga dan menjauhi akan makanan yang haram tetapi disisi lain orang tersebut ketika berbisnis terlibat dengan transaksi-transaksi yang diharamkan.

Padahal, para ekonom, baik Muslim maupun non Muslim bahkan filsuf sekalipun (seperti Plato dan Aristoteles) percaya dan yakin sistem bungalah yang menyebabkan terhambatnya perekonomian dunia dan senantiasa mengakibatkan krisis yang berulang.

Dalam konteks ini, HT juga memandang bahwa, pengharaman riba secara tegas sudah disebutkan oleh nash-nash syara. Tidak ada pengecualian, apakah dalam bentuk produktif atau hanya sedikit.⁶⁰

Dalam konteks sektor riil, pelarangan terhadap sistem bunga menyebabkan uang tidak akan bisa bergerak tanpa terkait secara langsung dengan sektor riil. Dengan kata lain, instrumen hukum ini dapat meniadakan penggelembungan semu sektor moneter.

Oleh karenanya, fenomena yang terjadi di dalam SEK yaitu tidak adanya dana untuk mengembangkan dan menggerakkan sektor riil kecil kemungkinan akan terjadi di dalam SEI.

⁵⁹ Abu Fuad, Riba Halal., hal. 34. Lihat juga, Ahmad Junaidi Ath Thayyiby dan Syamsuddin Ramadhan an Nawiy, *25 Masalah Seputar Kita yang Sering Terlupakan*, Cet. I (Ciputat: WADI Press, 2005), hal. 19.

⁶⁰ Lihat Redaksi, Riba, dalam al Wa'ie No. 53 Tahun V, 2005, hal. 47-50.

Dengan demikian, ketika sektor riil mendapatkan kemudahan dalam pergerakannya maka tidak akan terjadi kelangkaan barang yang bisa menyebabkan inflasi.

2) Dilarangnya penimbunan mata uang (dinar dan dirham) atau *kanz al mal*

Sebagaimana halnya pendapat mayoritas para ulama, HT juga berpendapat dalam hal penimbunan mata uang adalah diharamkan meskipun dikeluarkan darinya kewajiban zakat.⁶¹

Hanya saja, HT memberikan batasan kapan seseorang disebut menimbun dan kapan seseorang disebut menabung. Islam sesungguhnya membolehkan seseorang menabung uang untuk membiayai suatu keperluan (membangun rumah, membeli kendaraan, menikah, dan sebagainya) yang ia rencanakan. Sebaliknya, akan dikatakan menimbun apabila orang tersebut dalam menyimpan uangnya semata-mata hanya mengumpulkan tanpa ada rencana tertentu.⁶²

Diterapkannya instrumen ini meniadakan kelangkaan mata uang. Dengan kata lain, instrumen ini dapat menjamin kelancaran perkembangan sektor riil secara berkelanjutan.

3) Dilarangnya Perseroan Terbatas (PT)

Hal lain yang tidak lepas dari sorotan HT adalah perihal eksistensi dari Perseroan Terbatas. HT memandang, keberadaan Perseroan Terbatas tidak lain adalah salah satu penyebab timbulnya transaksi spekulatif,

⁶¹ Lihat Redaksi, *Kanz al Mal* (Menimbun Harta), dalam al Wa'ie No. 81 Tahun VII, 2007, hal. 58-60.

⁶² *Ibid.*,

dimana darinyalah terlahir sebuah surat berharga yang kemudian disebut saham.⁶³

Oleh karenanya, HT memandang status dari Perseroan Terbatas adalah diharamkan. Keharaman tersebut juga didasarkan kepada tidak terpenuhinya syarat-syarat pembentukan syirkah sebagaimana yang terdapat dan telah diatur oleh Islam. Salah satu syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah tidak terdapatnya ijab dan qabul.⁶⁴

Dengan instrumen ini yang disertai dengan kewajiban untuk membentuk sebuah usaha berdasarkan hukum-hukum syirkah pada akhirnya meniadakan lembaga yang selama ini menerbitkan saham yang diperdagangkan secara spekulatif.

4) Dilarangnya pasar modal dan saham

Dengan dilarangnya perseroan terbatas (PT), maka menjadi keniscayaan segala yang berkaitan dengannya yaitu saham yang diterbitkan dan diperjual belikan di pasar modal adalah menjadi haram pula. Menurut HT, pasar modal dan perdagangan saham yang dilakukan di dalamnya adalah haram. Meskipun saham yang diterbitkan adalah saham dimana perusahaan yang menerbitkannya hanya memproduksi pada barang-barang yang tidak melanggar syariah Islam.⁶⁵

Pandangan HT ini, berbeda secara diametral dengan pandangan ekonom Muslim *mainstream* pada umumnya. Dimana mereka membolehkan Perseroan Terbatas serta memperdagangkan saham di pasar

⁶³ Hizbut Tahrir, Sebab-sebab Keguncangan Pasar Modal.

⁶⁴ *Ibid.*, Lihat juga Shiddiq al Jawi, Jual Beli Saham., hal. 27-30.

⁶⁵ Shiddiq al Jawi, *Ibid.*,

modal dengan syarat Perseroan Terbatas tersebut beraktivitas dan memproduksi berdasarkan syariah Islam.⁶⁶

Menurut HT, pasar modal sendiri pada hakikatnya adalah sebuah pintu masuk bagi barat agar dapat mengintervensi dan bahkan menyetir arah dari kebijakan ekonomi negara-negara yang menjadi objek jajahannya.⁶⁷ Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, yaitu: besarnya kapital (dana) yang dimiliki oleh negara-negara barat sehingga dengan itu mereka mendominasi bahkan menguasai secara mayoritas sebuah pasar modal dan sistem yang dijalankan di pasar modal itu sendiri sebenarnya adalah hasil sebuah rancangan negara-negara barat sehingga mereka lebih mengetahui bagaimana bentuk “permainan” yang harus dijalankan.⁶⁸

Dengan demikian, instrumen ini secara langsung meniadakan tempat dan alat (saham) yang mendukung terjadinya transaksi spekulatif.

5) Dilarangnya transaksi spekulatif

Eksistensi pasar modal memungkinkan para pemegang saham dalam jumlah besar untuk menjual saham mereka kepada perusahaan yang mereka kontrol, tanpa perlu minta izin atau memberitahu siapapun, sehingga mereka (pemegang saham) dapat berlepas diri dari tanggung jawab apa pun mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan yang mereka kuasai dan kendalikan. Begitu pula tatkala mereka berkeinginan untuk

⁶⁶ Lihat misalnya buku Husein Syahatah dan Athiyah Fayyah, *Adhubat Sar'iyah Littamal fii Syuq ar Rouq Maaliyyah* (Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal), cet. I (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004).

⁶⁷ Hizbut Tahrir, *Sebab-sebab Keguncangan Pasar Modal*.

⁶⁸ Di Indonesia misalnya, hasil pengamatan dari para ekonom terlihat bahwa pergerakan dana yang masuk ke dalam BEI sebesar kurang lebih 60% adalah dari Asing. Para ekonom sudah seringkali memperingatkan kepada pemerintah akan bahaya yang ditimbulkannya.

membeli saham lebih banyak lagi, maka merekapun tidak perlu minta izin kepada siapapun.⁶⁹

Lebih dari itu, motivasi yang menggerakkan mereka untuk membeli atau menjual saham tiada lain adalah mendapatkan laba yang besar atau keuntungan dengan cepat disertai dengan menghalalkan segala cara.⁷⁰

Dari sinilah kemudian dapat terlahir sebuah transaksi yang bersifat spekulatif.⁷¹ Dikatakan bersifat spekulatif salah satunya adalah dikarenakan transaksi yang berlangsung tidak menyertakan barang komoditi atau jasa secara riil, melainkan hanyalah berupa kertas-kertas yang dianggap memiliki nilai tertentu.

Sesungguhnya transaksi yang terjadi di pasar modal serupa dengan perjudian.⁷² Dimana segala transaksinya adalah bermuara kepada *zero sum game*. Keuntungan yang diraih oleh satu pihak sejatinya adalah dari kerugian dari pihak lain. Bahkan transaksi yang dilakukan seringkali diikuti dengan penipuan.⁷³

⁶⁹ Hizbut Tahrir, *Sebab-sebab Keguncangan Pasar Modal*.

⁷⁰ *Ibid.*,

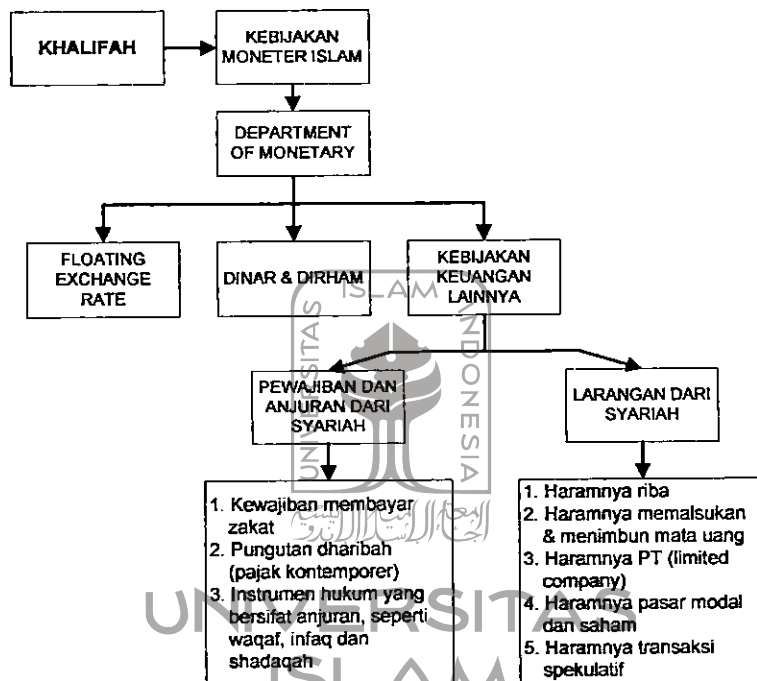
⁷¹ Betapa sangat spekulatifnya, Simon Cawkwell yang dijuluki "King of the short sellers", ia bias mengambil untung hingga US\$ 500 ribu atau sekitar Rp. 4,8 miliar hanya dalam 1 jam pada krisis pasar modal di AS bulan ini oktober 2008. Lihat Betapa Spekulatifnya Dunia Bursa, Raup Rp. 4,8 Miliar Sejam Selama Krisis, dalam . Di pihak lain, misalnya wanita terkaya di Cina, Yang Huiyan (26), kehilangan dua pertiga dari total kekayaan akibat anjloknya indeks- indeks saham dunia dan China. Lihat Simon Saragih, Wanita Terkaya China Pun Rugi, dalam <http://www.jurnal-ekonomi.org>

⁷² Hizbut Tahrir, *Sebab-sebab Keguncangan Pasar Modal*.

⁷³ Hidayatullah Muttaqin, *Krisis Berulang-Ulang: Ada Apa Dengan Pasar Global?*, dalam <http://www.jurnal-ekonomi.org>

Penerapan instrumen ini semakin melengkapi instrumen-instrumen sebelumnya dalam menghambat laju dari sektor moneter yang tidak terkait dengan sektor riil.

Gambar 13
Pengaturan Sektor Moneter Perspektif Hizbut Tahrir



Sumber: Diolah dari pembahasan kebijakan bentuk mata uang, sistem nilai tukar dan kebijakan keuangan lainnya.

B. Potensi terjadinya inflasi dalam sistem ekonomi Islam

Sebagaimana yang penulis sebutkan di bab pertama, inflasi dapat terjadi di dalam sistem ekonomi manapun mengingat banyaknya penyebab yang memungkinkan inflasi terjadi. Hanya saja, akan terdapat perbedaan (secara kuantitas maupun kualitas) di antara masing-masing sistem ekonomi berkenaan dengan faktor penyebabnya.

Di bawah ini, penulis membahas penyelesaian inflasi berdasarkan kepada kerangka pemikiran-pemikiran ekonomi HT. Dimana pembahasannya akan disesuaikan dengan sumber-sumber inflasi yang telah dibahas diakhir bab IV.

1. Penyelesaian inflasi yang disebabkan oleh perilaku manusia secara langsung.

Secara umum, penyelesaian inflasi yang disebabkan oleh perilaku manusia (pelaku ekonomi itu sendiri) di dalam SEI akan diarahkan kepada bagaimana kebijakan Khalifah (Negara) untuk menjaga para pelaku ekonomi dari perbuatan yang menyimpang dari syariah Islam.

- a. Kesalahan persepsi manusia dalam memandang fungsi dasar (*basic function*) dari uang.

Dalam SEI, fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Dengan kata lain, perlakuan terhadap uang layaknya komoditas sebagaimana yang terdapat dalam SEK tidak diperbolehkan.

Hanya saja ini masih belum menjamin potensi terjadinya inflasi. Untuk itu, bentuk mata uang tersebut juga harus diganti dari bentuk *fiat money* menjadi emas dan perak.

Dua hal di atas (tidak boleh dijadikan komoditas dan dalam bentuk emas dan perak) masih harus didukung lagi oleh sejumlah peraturan yang turut membantu penjagaan terhadap nilainya, misalnya peraturan larangan menimbun mata uang.

- b. Gaya hidup materialisme yang dianut oleh kebanyakan masyarakat

Untuk menyelesaikan permasalahan inflasi yang bersumber dari gaya hidup materialisme, Islam sudah memiliki seperangkat aturan. Syariah Islam misalnya, mewajibkan umatnya untuk tidak bersikap boros dan kikir. Oleh karena itu, apabila dalam SEK dikenal sebuah teori yang mengatakan “semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin besar permintaannya” kecil kemungkinan atau tidak akan terjadi.

Sehingga kemudian, permintaan akan barang dan jasa tetap akan senantiasa terpenuhi. Sebaliknya, uang yang tadinya diperuntukkan untuk konsumsi oleh Islam dianjurkan digunakan dalam aktivitas yang bersifat sosial atau di investasikan kedalam sektor produktif.

c. Akibat korupsi dan sistem administrasi yang buruk

Untuk mengatur aparatur Negara, Islam juga sudah memiliki seperangkat hukum yang dapat meminimalisir dan menjaga tindakan korupsi dari aparatur Negara. Syariah Islam misalnya, mengatur agar para pejabat Negara tidak boleh melakukan kegiatan bisnis selama menjabat dan sebagai ganjarannya mereka (para pejabat Negara) akan diberikan santunan yang layak untuk kehidupan mereka.

Sistem administrasinya pun juga harus dibuat sederhana mungkin dan cepat pelayanannya serta harus ditangani atau dikerjakan oleh orang yang profesional di bidangnya.

Dengan demikian, dampak korupsi dan sistem administrasi yang buruk kepada sektor riil dan akhirnya menghambat perkembangannya dapat dihilangkan.

keharusan adanya tiga asas dalam penerapan syariah Islam. Tidak berjalannya salah satu dari tiga asas yang ada akan menyebabkan tidak berjalannya pula kebijakan moneter yang diambil.

1. Ketaqwaan individu

Taqwa adalah sikap seseorang untuk menjaga diri dari azab neraka ketika melakukan atau meninggalkan perbuatan. Sikap taqwa merupakan buah dari keimanan seseorang yang memahami makna pemikiran rukun iman, khususnya kesadaran akan konsekuensi surga-neraka.⁸⁰

Dengan ketaqwaan ini mendorong seseorang untuk terikat kepada hukum syara dalam setiap aktivitasnya. Dari aspek lain, ketaqwaan ini akan menjadikan seseorang, ketika melakukan penyimpangan terhadap hukum syara akan segera bertaubat.⁸¹

Adapun korelasinya antara pengendalian inflasi dengan ketaqwaan individu adalah apabila ketaqwaan individu-individu yang hidup dalam Daulah Khilafah dalam kondisi bagus maka akan menyebabkan sumber-sumber inflasi yang terkait langsung dengan perilaku pelaku ekonomi tidak terjadi. Sebaliknya, apabila tingkat ketaqwaan tersebut tidak bagus maka akan memunculkan sumber-sumber inflasi dimana pada akhirnya akan menghambat dari kebijakan moneter yang diterapkan.

Sebagai contoh, larangan syariah dalam menimbun mata uang bisa saja tidak dipatuhi oleh individu (dikarenakan rendahnya ketaatan terhadap syariah Islam) yang tinggal di dalam Daulah Khilafah. Dimana akhirnya akan

⁸⁰ Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, cet. II (Bogor: Al Azhar Press, 2007), hal. 224.

⁸¹ *Ibid.*

menyebabkan Negara (Daulah Khilafah) kesulitan untuk memberlakukan penggunaan dinar dan dirham dalam seluruh aktivitas perdagangan yang ada. Oleh karena itu, disinilah letak urgensi dari ketaqwaan seorang individu dalam mendukung kelancaran dari kebijakan moneter yang diambil.

2. Koreksi dan kontrol oleh individu maupun masyarakat

Arah dari koreksi dan kontrol yang dilakukan individu dan masyarakat ini adalah diarahkan kepada individu ataupun Negara yang diduga akan atau telah melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap syariah Islam.

Koreksi dan kontrol ini dilakukan karena manusia (individu dan pemimpin Negara) bukanlah malaikat yang tidak bisa terjerembab kedalam perbuatan maksiyat. Oleh karenanya, koreksi dan kontrol terhadap manusia, baik secara pribadi maupun kolektif terhadap orang lain adalah suatu kebutuhan dan sekaligus kewajiban.⁸²

Dikatakan sebuah kewajiban karena Allah Swt. dalam surah *Al Ashr*, ayat 1-3 menjelaskan dengan sumpah (*wa al-ashr*), *ta'kid- inna* (benar-benar), dan *ta'kid- la fi* (sungguh dalam). Dengan demikian, sesungguhnya secara umum manusia mengalami kerugian yang luar biasa, kecuali orang yang beriman, beraamak soleh dan saling mengontrol antara satu dengan yang lain dalam melakukan kebaikan dan dengan penuh kesabaran, secara terus-menerus, tanpa ada rasa putus asa atau bosan, sehingga masing-masing di antara mereka selamat dari kesalahan.⁸³

⁸² *Ibid.*, hal. 225.

⁸³ *Ibid.*,

Relevansi antara kebijakan moneter Islam dengan kebutuhan dan kewajiban akan koreksi dan kontrol oleh individu kepada individu yang lain adalah dapat dicontohkan sebagai berikut: ketika Negara (Khalifah) lalai dalam menindak pelaku pemalsu emas, maka masyarakat baik secara individu maupun kolektif dapat melakukan fungsi koreksi dan kontrol kepada Khalifah untuk mengambil kebijakan. Sehingga kemudian tidak menyebabkan penurunan nilai emas.

3. Penerapan syariah Islam secara totalitas oleh Negara

Jika ada individu atau masyarakat yang bertaqwa dan kontrol individu atau masyarakat, tetapi tidak ada Negara yang menerapkan hukum-hukum yang terkait dengan pengaturan di bidang moneter, tentunya adalah suatu hal yang mustahil hukum-hukum tersebut bisa diterapkan.⁸⁴

Begitu juga ketika ada Negara yang menerapkan hukum tersebut, tetapi tidak ada kontrol masyarakat dan individu, serta masyarakat yang bertaqwa, maka sedikit demi sedikit penerapan hukum yang dilaksanakan oleh Negara tersebut akan terjadi penyimpangan.⁸⁵

Lebih dari itu, hukum-hukum yang diterapkan oleh Negara tidak bisa hanya terkait dengan aspek moneter. Hal ini dikarenakan hukum dalam aspek moneter masih membutuhkan hukum-hukum lain (sosial, politik, dan sebagainya) yang saling berkaitan dan mendukung.

Contoh dari hukum-hukum lain tersebut misalnya adalah berkaitan dengan hukum yang mengatur agar masyarakat atau individu yang ada tidak berperilaku

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 226.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 227.

permisifistik (serba boleh). Ketika perilaku ini dibiarkan, dalam konteks moneter, maka meniscayakan terjadinya penimbunan atau pemalsuan oleh individu-individu tertentu yang ada di dalam masyarakat demi meraih keuntungan yang banyak.

Oleh karenanya, diperlukan penerapan syariah Islam secara totalitas oleh Negara untuk menjamin berjalannya kebijakan moneter yang hendak diambil. Termasuk dalam hal ini adalah bentuk dari Negara tersebut juga harus merupakan representasi dari pelaksanaan syariah Islam itu sendiri.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab I hingga bab V, dapat diambil sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya inflasi secara persisten sesungguhnya adalah berasal dari permasalahan yang lebih dalam, daripada sekedar persoalan jumlah uang beredar yang terlalu banyak atau tingkat suku bunga bank sentral yang terlalu rendah.
2. Untuk itu, dalam upaya penyelesaiannya, harus ada kejujuran dari ekonom konvensional untuk melihat lebih dalam lagi berkenaan dengan penyebab atau sumber datangnya inflasi itu sendiri. Dengan kata lain, ekonom konvensional selamanya tidak akan pernah dapat menyelesaikan inflasi apabila yang dilakukan hanya sebatas perbaikan atau perubahan dari sisi teknis ekonomi (misalnya adalah perlu tidaknya independensi bank sentral, target inflasi yang harus dipublikasikan) semata yang sejatinya sudah gagal.
3. Oleh karenanya, pada tahap ini diperlukan sebuah kebijakan moneter alternatif agar dapat menyelesaikan inflasi secara tuntas sampai ke akarnya. Dalam konteks ini, kebijakan moneter tersebut adalah kebijakan moneter Islam.
4. Pengaturan atau kebijakan moneter Islam terdiri dari tiga hal, yaitu: penerapan sistem nilai tukar mengambang, bentuk mata uang yang berupa emas dan

perak (dinar dan dirham), dan terakhir berupa hukum-hukum yang bersifat kewajiban atau anjuran serta larangan dari syariah Islam.

5. Dalam pengaplikasiannya kebijakan moneter Islam harus diikuti dengan penerapan hukum-hukum (syariah Islam) lainnya, misalnya adalah kebijakan Negara dalam menjaga dan memperbaiki perilaku (akhlak) masyarakat. Hal ini sejalan dengan karakter dari syariah Islam itu sendiri yang tidak dapat diterapkan secara parsial.
6. Penerapan sistem ekonomi Islam, dalam konteks ini adalah kebijakan moneter Islam, merupakan wujud dari kesadaran kita akan kewajiban yang diwahyukan Allah Swt untuk menerapkannya, bukan semata-mata dikarenakan motivasi mengejar *mashlahah* yang dijanjikannya.



B. Saran-saran

Adapun saran dan harapan yang penulis bisa sampaikan disini yaitu:

1. Penelitian yang penulis lakukan ini sesungguhnya masih mengandung beberapa kekurangan. Terutama berkaitan dengan data-data yang disajikan untuk mendukung sejumlah pendapat penulis. Oleh karenanya, penulis berharap kepada peneliti selanjutnya (yang berkeinginan meneliti pada judul yang sama) untuk memperdalam dan mengembangkan penyajian data.
2. Pada penelitian ini, penulis mengambil sebuah kasus pengendalian inflasi perspektif kebijakan moneter konvensional di Indonesia. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan kasus yang disajikan.

3. Terakhir, penulis berharap kepada semua pihak (ekonom, pemerintah, masyarakat luas) untuk secara sadar dan sungguh-sungguh meninjau ulang tatanan ekonomi yang dilaksanakan saat ini. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk keluar dari krisis yang terus berulang terjadi sebagai akibat diterapkannya sistem ekonomi Kapitalisme.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah. 2004. *Who is The Legislator? (Siapa yang Layak Sebagai Pembuat Hukum?)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Abdullah, Muhammad Husain. 2002. *Dirasat Fi Al Fikri Al Islami (Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Abdurrahman, Hafidz, 2004. Mem-'Produktif'-kan Zakat, Bolehkah?. Dalam *Al Wa'ie* V (50): 27-29. Jakarta.

-----, 2007. Bagaimana Hizbut Tahrir Menyatukan Umat?. Dalam *Al Wa'ie* VII (84): 122-128. Jakarta.

-----, 2008. Bagaimana 'People Power' Menurut Syariah Islam?. Dalam *Al Wa'ie* VIII (96): 33-35. Jakarta.

-----, 2008. Mengapa 'People Power' Salah Menurut Syariah?. Dalam *Al Wa'ie* IX (97): 48-50. Jakarta.

-----, 2007. *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*. Bogor: Al Azhar Press.

Abdurrahman, A. Said Aqil Humam. 2004. *Bayan asy-Syamil an Mas'alah al-Qadha wa al-Qadar Radd ala Ra'y al-Mu'tazilah, Jabariyyah, wa Ahlu Sunnah (Penjelasan Menyeluruh tentang Qadha dan Qadar)*. Bogor: Al Azhar Press.

Abdurrahman, Y. Kehidupan Ekonomi Di Bawah Khilafah Islamiyah (Bagian 1). 2003. Dalam *Al Wa'ie* IV (37): 19-23. Jakarta.

-----, 2005. Riba. Dalam *Al Wa'ie* V (53): 47-50. Jakarta.

-----, 2005. Mashalih ad Dawlah (Lembaga Administrasi Negara). Dalam *Al Wa'ie* VI (62): 60-62. Jakarta.

-----, Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir; Syaikh Taqiuddin An Nabhani. Dalam *Al Wa'ie* V (55): 31-38. Jakarta.

- , 2007. *Kanz al Mal (Menimbun Harta)*. Dalam *Al Wa'ie* VII (81): 58-60. Jakarta.
- Ad-Daur, M. Ahmad. 2003. *Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank*. Bogor: Al Azhar Press.
- Agung, Juda, dkk. 2001. Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis (Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan). Dalam <http://www.bi.go.id>
- Al Nawiy, Syamsuddin Ramadhan. 2004. Perubahan Secara Bertahap (Menyoal Konsep Tadarruj). Dalam *Al Wa'ie* IV (45): 24-27. Jakarta.
- Aliminsyah dan Padji. 2006. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. Bandung: Yrama Widya.
- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Amin, A. Riawan. Mengendalikan atau Menghapus Inflasi. 18 Mei 2007. Dalam <http://www.sebi.ac.id>
- Anshari, Jalal. 2004. *Introduction to The System of Islam (Mengenal Sistem Islam: Dari A sampai Z)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- An Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *An Nidlam Al Iqtishadi Fil Islam (Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti.
- , 2003. *At Tafkir (Hakikat Berpikir)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- , 2003. *Nizham al Islam (Peraturan Hidup dalam Islam)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- An-Nabhan, M. Faruq. 2000. *Al Iqtishad al Islami (Sistem Ekonomi Islam; Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis)*. Alih bahasa H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahaudin Noersalim. Yogyakarta: UII Press.

'Atha Abu Ar Rasythah Amir Hizbut Tahrir Saat Ini. 2007. Dalam *Al Wa'ie VII* (77): 25-27. Jakarta.

Azmi, Sabahuddin. 2002. *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*, New Delhi: Goodword Books. Dalam Adiwarman A Karim. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Baasir, Faisal. Fenomena Inflasi dan Suku Bunga Tinggi. Dalam <http://www.sinarharapan.com>

Banjari, Fauzan. 2006. *Understanding Qawa'id As Syar'iyah*. Yogyakarta: Raudhoh Pustaka.

Barmawi, Ahmad. 2006. *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*. Jakarta: Restu Agung.

Benny. "Pengaruh Penggunaan Mata Uang Berbasis Emas (Dinar Kuwait) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuwait Tahun 1994-2003". *Skripsi*. STIKER Yogyakarta.

Betapa Spekulatifnya Dunia Bursa Raup Rp. 4,8 Miliar Sejam Selama Krisis. Dalam <http://www.hizbut-tahrir.or.id>

Bank Indonesia. 2007. Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi. Dalam <http://www.bi.go.id>.

-----, Pernyataan Gubernur Bank Indonesia : Bi Rate Tetap 8,0%, No.10/ 8 /Pshm/Humas. Dalam <http://www.bi.go.id>

-----, Sejarah BI: Moneter. Dalam <http://www.bi.go.id>

-----, Conference on Monetary Policy and Inflation Targeting in Emerging Economies. Dalam <http://www.bi.go.id>.

Chapra, M. Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam (Towards A Just Monetary System)*. Alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press.

----- A Brief Biography. Dalam <http://www.muchapra.com>

Coudhury, Masudul Alam. Dalam <http://www.capebretonu.ca/mchoudhu/ipe.html>

- . A Monetary System With 100-Per Cent Reserve Requirement And The Gold Standard: Theory, Fact And Policy. Dalam <http://www.capebretonu.ca/mchoudhu/ipe.html>.
- Condro, Dwi. Pengendalian Inflasi dalam Perspektif al Qur'an. Dalam <http://www.dwicondro.blogspot.com>
- Danaher, Kevin. 2005. *10 Reason Abolish IMF dan World Bank (10 Alasan Bubarkan IMF dan Bank Dunia)*. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Dahlan, Abdul Aziz (Ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Dalam Euis Amalia. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruus.
- Daniel, Wahyu. Seacen: Krisis Finansial AS Diyakini Tak Mampir ke Asia. Dalam <http://www.detik.com>
- Deliarnov. 2007. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dimiyati, Ahmad. 2008. *Teori Keuangan Islam; Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al Ghazali*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Djazuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Goup.
- Djojohadikusumo, Sumitro. Jika Lima Tahun Lalu Pak Harto Mundur. Dalam <http://www.tempo.co.id/har/ti/juni10-1.htm>
- Djohanputro, Bramantyo. 2006. *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PPM.
- Downes, John dan Jordan Elliot Goodman. 1996. *Dictionary of Finance and Investment Terms (kamus istilah keuangan dan investasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Does Globalization Help The Poor? (Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan)*. 2004. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

Dunkz. Seri Bubble dan Crash Bursa Saham 3: panic of 1907. Dalam <http://parahita.wordpress.com>

El Diwany, Tarek. 2003. *The Problem with Interest (Sistem bunga dan Permasalahannya)*. Jakarta: Akbar.

Fredericks, Salim. 2004. *Political and Cultural Invasion (Invasi Politik dan Budaya)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Fuad, Abu. 2003. *37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

-----, 2003. *36 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

----- (Ed). 2006. *Riba Halal, Riba Haram*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Ghazali (Ed). 1992. *Readings in Islamic Economic Thought*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.

Ghazali. 2002. *Kitab Adab Al Kasb wa Al Ma'asy (Adab Mencari Nafkah)*. Bandung: Karisma.

Gilarso, T. 2002. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro, Yogyakarta: Kanisius. Glosarium Fiskal. Dalam <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Gunadi, RA dan M Shoelhi (Penyunting). 2002. *Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*. Jakarta: Republika.

Gulo, W. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia.

H, Berument dan Guany A. *Inflation Dynamics and Its Sources In The Ottoman Empire: 1586-1913*. Dalam Adnan Khan. *The Global Credit Crunch and The Crisis of Capitalism (Kapitalisme di Ujung Tanduk: Tinjauan atas Krisis Kredit Global, Krisis minyak, Krisis Pangan, dan bagaimana Sistem Ekonomi Islam Mengatasinya)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Ha Joon Chang dan Ilene Grabel. 2008. *Reclaiming Development: An Alternativ Economic Policy Manual (Membongkar Mitos Neolib; Upaya Merebut*

- Kemali Makna Pembangunan*). Yogyakarta: INSISTPress184-186.
- Hamidi, M. Lutfi. 2007. *Gold Dinar (Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan)*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Hamid, Edy Suandi dan M.B. Hendrie Anto. 2000. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Hamid, Edy Suandi. 2000. *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Harwood, Jamal. 2007. Kehancuran Pasar Uang. Dalam *Al Wa'ie VIII* (87): 27-30. Jakarta.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Al Auraq Al Naqdiyah Fi Al- Iqtishad Al Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha) (Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hatta, M. Konsep Pajak Dalam Islam. *Makalah Kuliah MSI UII Yogyakarta*.
- Hizbut Tahrir. 1997. Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal. Dalam *CD Interaktif Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia*.
- , 2000. *Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir (Starategi Dakwah Hizbut Tahrir)*. Depok: Pustaka Thariqul Izzah.
- , 2007. *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- , 2008. Selayang Pandang Perekonomian Indonesia: Dari Hegemoni Kapitalisme Global ke Penerapan Sistem Ekonomi Islam. *Makalah RPTH*. Hizbut Tahrir DIY.
- , 2008. Soal Jawab Kenaikan Harga Minyak Dunia. Dalam <http://www.hizbut-tahrir.or.id>
- , VCD Mengenal Hizbut Tahrir.

- , VCD *Selamatkan Indonesia dengan Syariah Menuju Indonesia Lebih Baik*. Hizbut Tahrir Indonesia.
- , 2006. *Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah (Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi)*. Jakarta: HTI Press.
- , 2007. *Hizbut Tahrir dan Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir (Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- , Your Money Will Be Safe in The Caliphate. Dalam <http://www.financial-crisis.eu/home/tag/khilafah-system>
- , 2006. *Dari Masjid al Aqsha Menuju Khilafah; Sejarah Awal Perjuangan Hizbut Tahrir*. HTI Press.
- , CD Database Interaktif Al Wa'ie.
- Hutabarat, Akhis R. *Determinan Inflasi Indonesia*, dalam Occasional Paper No. 06. Dalam <http://www.bi.go.id>
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekular Liberal*. Jakarta: Gema Insani.
- Isma'il, M. Syukri. 2007. *Kritik Terhadap Sekularisme: Pandangan Yusuf Qardhawi*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies.
- Issawi, Charles. *Ibn Khaldun Analysis of Economic Issues*. Dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed). *Readings in Islamic Economic Thought*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. UK: The Islamic Foundation.
- , 1992. *Economic Concepts of Ibn Taimiyyah*. Dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed). *Readings in Islamic Economic Thought*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.
- Ibn Taimiyah. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam (Public Duties In Islam, The Institution of The Hisba)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Iswardono. 1999. *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Jati, Sigit Purnawan. 2001. *Seputar Dinar dan Dirham. Dalam Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: PIRAC, SEM Institute, INFID.

Jawi, Muhammad Shiddiq. Seputar Konsep Syakhsyah. Dalam <http://www.khilafah1924.org>

-----, 2007. Jual Beli Saham Dalam Pandangan Islam. Dalam *Al Wa'ie* VIII (86): 27-30. Jakarta.

-----, Di Balik Rapuhnya Kapitalisme. Dalam <http://www.khilafah1924.org>.

-----, 2007. Menciptakan Iklim Bisnis yang Sehat dan Kondusif. Dalam *Al Wa'ie* VII (78): 30-33. Jakarta.

Junaidi, Ahmad Ath Thayyiby dan Syamsuddin Ramadhan an Nawiy. 2005. 25 Masalah Seputar Kita yang Sering Terlupakan. Ciputat: WADI Press.

Junaidi, Hamidi ibn Abdurrahman. 1407 H. *Manahij al Bahuin fi al Iqtishad al Islami*, Kairo: Syirkah al 'Abikani li Atthaba'ah wa An Nasyr. Dalam Euis Amalia. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.

Jurnal-ekonomi. Akibat Spekulasi Harga Minyak Capai Rekor Baru US \$ 135. Dalam <http://www.jurnal-ekonomi.org>

Jusmaliani. 2005. Menuju Kebijakan dan Perilaku Ekonomi yang Islami. Dalam Jusmaliani, dkk. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga. 2007. Jakarta: Balai Pustaka.

Karim, Adiwarman A. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

----- 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.

----- 2007. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

Khan, Adnan. 2008. *The Global Credit Crunch and The Crisis of Capitalism (Kapitalisme di Ujung Tanduk: Tinjauan atas Krisis Kredit Global, Krisis minyak, Krisis Pangan, dan bagaimana Sistem Ekonomi Islam Mengatasinya)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Khilafah-Magazine (Ed). 2006. "Menggugat Keberadaan Uang Kertas". Dalam *Khilafah Magazine I* (9): 4-7. Bogor.

Kodrat, Denny. 2005. Dinamika Dakwah Hizbut Tahrir di Sejumlah Negara. Dalam *Al Wa'ie V* (55): 75-81. Jakarta.

KPK. Sadarlah Aparat Bea Cukai. Dalam <http://www.kpk.go.id>

Kurtubi. Gejolak harga minyak dan APBN 2008. Dalam <http://www.UNISOSDEM.org>

Kusumanto, Bambang. Dapatkah Inflasi di Indonesia dijinakkan?. 12 Desember 2005. Dalam <http://www.fiskal.depkeu.go.id>

Kwik Kian Gie. Membengkaknya Sertifikat BI. Bisnis Indonesia. 4 maret 2007. Dalam <http://www.UNISOSDEM.org>

Labib, Rahmat S. 2005. *Privatisasi dalam Pandangan Islam*. Ciputat: Wadi Press.

Lestari, Esta . 2005. Sistem moneter dalam Islam. Dalam *Teori Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Maliki, Abdurrahman. 2001. *As Siyasatu Al Iqtishadiyatu Al Mutsila (Politik Ekonomi Islam)*. Bangil: Al Izzah.

Manullang, M. 1993. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maman Kh, dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Maski, Ghozali. 2007. *Transmisi Kebijakan Moneter; Kajian Teoritis dan Empiris*. Malang: Bayu Media.
- Lucifer. 2007. *Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia; di Ambang Kehancuran Terbesar Ekonomi*. Pustaka Pohon Bodhi.
- Misri, Rafiq. 1981. *Al Islam wa'l Nuqud*. Dalam Karim, Adiwarman A. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mufti, M. Ahmad dan Sami Shalih al Wakil. 2002. *At Tasyri wa Sann al Qawanin fi ad Daulah al Islamiyah: Dirasah Tahliliyah (Formalisasi Syariah dalam Kehidupan Bernegara: Suatu Studi Analisis)*. Yogyakarta: Media Pustaka Ilmu.
- Mulyanto. Antara 'Mafia' dan RUU Sumber Daya Air. Dalam <http://www.republica.co.id>
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muttaqin, Hidayatullah. Guncangan Pasar Global dan Urgensitas Khilafah. Dalam <http://www.jurnal-ekonomi.org>
- , 2008. "Indonesia for Sale". Dalam *Al Wa'ie IX* (97): 23-26. Jakarta.
- , Krisis Berulang-Ulang: Ada Apa Dengan Pasar Global. Dalam <http://www.jurnal-ekonomi.org>
- Nakata, Hassan Ko. 2007. Peran Hizbut Tahrir Membangun Peradaban Islam ke Depan. Dalam *Al Wa'ie VII* (85): 41-45. Jakarta.
- Newell, Abdul Kareem. 2007. *Accountability in the Khilafah (Akuntabilitas Negara Khilafah)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Nellis, Josep G dan David Parker. 2000. *The Essence of The Economy*. Yogyakarta: ANDI.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Panggodo S, Gung. Menanti Trobosan di Sektor Keuangan Bisnis Indonesia. 5 Maret 2007. Dalam <http://www.UNISOSDEM.org>
- Perbaiki Ekonomi Masih Semu. Dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9910/11/ekonomi/perb02.htm>
- Prasetyantono, A Tony. Menuju Jurang Kebangkrutan. Dalam <http://www.jurnal-ekonomi.org>
- , 1998. Efektivitas Rupiah Superketat. Dalam *majalah D&R*. 04 April.
- Pass, Christopher dan Bryan Lowes. 1994. *Dictionary of Economics (Kamus Lengkap Ekonomi)*. Alih bahasa oleh Tumpal Rumapea dan Posman Haloho. Penerbit Erlangga.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purwanto, Deniey Adi. *Sudahkah Perekonomian Indonesia Keluar dari Krisis?*
- Rachbini, Didik J. 2003. *Analisis Kritis Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rais, Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press.
- Ramadhan, Muhammad Musthofa. 2005. *Reformasi vs Revolusi*. Ciputat: Wadi Press.
- Ridyasmara. Rothschild, Bank Inggris, dan The Federal Reserve (1-7). Dalam <http://www.eramuslim.com>
- Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management; Conventional and Syar'i System*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rothbard, Murray N. 2007. *What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?)*. Jakarta: Granit.

- Rosadi, Muhammad Riza. 2008. Kapitalisme: Biang Krisis Pangan. Dalam *Al Wa'ie* VIII (94): 14-18. Jakarta.
- Sabiq, Dhabith Tarki. 2008. *Ar Rajul ash Shanam: Kamal Attaturk (Kamal Attaturk: Pengusung Sekulerisme dan Penghancur Khilafah Islamiyah)*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Sadli, M. 2001. *Landscape Ekonomi dan Politik dalam Krisis dan Transisi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sadeq, AbulHasan M. 1992. *Introduction: Islamic Economic Thought*. Dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed). *Readings in Islamic Economic Thought*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.
- Saeftuddin, Ahmad M. 1986. Dalam M. Nejatullah Siddiqi. *Muslim Economic Thinking* (Pemikiran Ekonomi Islam). Jakarta: LIPPM.
- Saidi, Zaim. 2005. *Kembali ke Dinar; Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*. Depok: Pustaka Adina.
- Salim G.P, M. Arskal. 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: LOGOS.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2005. *Macro Economics (Makro Ekonomi)*. Jakarta: Erlangga.
- Samarah, Ihsan. 2003. *At Ta'rif bi asy Syaikh Taqiyuddin an Nabhani (Syaikh Taqiyuddin an Nabhani; Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya)*. Bogor: Al Azhar Press.
- Setiawan, Iwan, dkk. 2007. Pembayaran Pinjaman Luar Negeri Korporasi dan Pergerakan Rupiah. Buletin ekonomi moneter dan perbankan (BEMP). Januari 2007. Dalam <http://www.bi.go.id>
- Simorangkir, Iskandar. Januari 2007. *Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia: Suatu Kajian dengan Pendekatan Game Theory*. Dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* IX (3).
- Siregar, Mulya E. 2001. *Manajemen Moneter Alternatif*, dalam *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: PIRAC, SEM Institute, INFID.

- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1992. *Islamic Economic Thought: Foundation, Evolution and Needed Directio.*, Dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed). *Readings in Islamic Economic Thought*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.
- , 1992. *Recent works on History of Economic Thought in Islam: A Survey*. Dalam AbulHasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (Ed). *Readings in Islamic Economic Thought*. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.
- Simon Saragih. Wanita Terkaya China Pun Rugi. Dalam <http://www.jurnal-ekonomi.org>
- Singh, Kavaljit. 2005. *Taming Global Financial Flows, A Citizen's Guide (Menjinakkan Arus Keuangan Global)*. Jakarta: INFID.
- Staf Ahli Menneg PPN Bidang Ekonomi Perusahaan. *Pengkajian dan Monitoring Pelaksanaan Penyehatan Perbankan*.
- Syaikh Abdul Qadim Zallum, Pengganti Terbaik Bagi Kepemimpinan Hizb Sebelumnya. 2006. Dalam *Al Wa'ie VII (76)*: 24-27. Jakarta.
- Syahatah, Husein dan Athiyah Fayyah. 2004. *Adhubat Sar'iyah Littamal fii Syuq ar Rouq Maaliyyah (Bursa Efek: Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal)*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Thabib, Hamd Fahmi. 2008. *Al Khilafah ar Rasyidah al maw'udah wa at Tahadiyat (Khilafah Rasyidah: yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-tantangannya)*. Jakarta: HTI Press.
- Vadillo, Umar Ibrahim. 2008. *Berakhirnya Ekonomi: (The End of Economics) Mata Uang Emas dan Punahnya Perbankan*. Dalam David Barsamian dan Liem Siok Lan. *Menembus batas (Beyond Boundaries) Damai untuk Semesta*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yulianto. 2008. Krisis di Ladang Minyak. Dalam *Al Wa'ie VIII (92)*: 9-14. Jakarta.
- Yusanto, M. Ismail. 2001. *Mencari Solusi Krisis Ekonomi. Dalam Dinar Emas Solusi Krisis Moneter*. Jakarta: PIRAC, SEM Institute, INFID.

-----, 2002. Dari UUD Sekuler Menuju UUD Islam. *Seminar Amandemen UUD 45 Sesuai Syariah Islam*. Majelis Mujahidin, Jogjakarta.

Yusanto, M. Ismail dan M. Karebet W. 2003. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah*. Jakarta: Khairul Bayan.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *al Amwal fi ad Daulah al Khilafah (Sistem Keuangan di Negara Khilafah)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

-----, 2003. *Ad Dimukratiyah Nizham al Kufr (Demokrasi Sistem Kufur)*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran I

Tabel Data Primer, Diantaranya:

Dalam Bentuk Buku

No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Tahun
1	<i>al Amwal fi ad Daulah al Khilafah</i>	Abdul Qadim Zallum	Pustaka Thariqul Izzah	2002
2	<i>Nizham al Iqtishadi fi al Islam</i>	Taqiyuddin an Nabhani	Risalah Gusti	2002
3	<i>as Siyasatu al Iqtishadiyah al Mutsala</i>	Abdurrahman al Maliki	Al Izzah	2001
4	<i>The Global Credit Crunch and The Crisis of Capitalism</i> (Kapitalisme di Ujung Tanduk: Tinjauan Atas Krisis Kredit Global, Krisis Minyak, Krisis Pangan, dan Bagaimana Sistem Ekonomi Islam Mengatasinya)	Adnan Khan	Pustaka Thariqul Izzah	2008
5	<i>al Khilafah ar Rasyidah al maw'udah wa at Tahadiyat</i> (Khilafah Rasyidah: yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-tantangannya)	Hamd Fahmi Thabib	HTI Press	2008
6	<i>Accountability in the Khilafah</i> (Akuntabilitas Negara Khilafah)	Abdul Kareem Newell	Pustaka Thariqul Izzah	2007
7	<i>Ajizah ad Dawlah al Khilafah</i> (Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi)	Hizbut Tahrir	HTI Press	2006
8	Hizbut Tahrir dan <i>Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir</i> (Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir)	Hizbut Tahrir	Pustaka Thariqul Izzah	2007
9	<i>Nizham al Islam</i> (Peraturan Hidup dalam Islam)	Taqiyuddin an Nabhani	Pustaka Thariqul Izzah	2003
10	Sebab-sebab Kegoncangan Pasar Modal Menurut Hukum Islam	Hizbut Tahrir	Versi digital, Pustaka Thariqul Izzah	1998
11	Menyongsong sistem ekonomi anti krisis	Hizbut Tahrir	Pustaka Thariqul Izzah	2009
12	Piagam Umat Islam		Tidak Dipublikasikan	
13	<i>At Tafkir</i> (Hakikat Berpikir)	Taqiyuddin an Nabhani	Pustaka Thariqul Izzah	2003

Dalam Bentuk Makalah dan Majalah

No	Judul	Pengarang	Tahun
Makalah:			
1	Selayang Pandang Perekonomian Indonesia: Dari Hegemoni Kapitalisme Global ke Penerapan Sistem Ekonomi Islam.	Makalah RPTH, Hizbut Tahrir DIY	2008
Majalah:			
1	Mengubur Ekonomi Non-Riil (Mengembalikan Ekonomi Islam)	Abu Fuad, dalam al Wa'ie No. 25 Tahun II	September 2002
2	Memahami Krisis Ekonomi I (Melalui Pendekatan Moneter)	Dalam al Wa'ie No. 25 Tahun II	September 2006
3	Memahami Krisis Ekonomi II (Melalui Pendekatan Moneter)	Dalam al Wa'ie No. 26 Tahun III	Oktober 2006
4	Kehancuran Pasar Uang	Jamal Harwood, dalam al Wa'ie No. 87 Tahun VIII	November 2007
5	Kehidupan Ekonomi Di Bawah Khilafah Islamiyah	Dalam al Wa'ie No. 37 Tahun IV	September 2003
6	Kehidupan Ekonomi Di Bawah Khilafah Islamiyah	Dalam al Wa'ie No. 38 Tahun IV	Oktober 2003
7	Jual Beli Saham Dalam Pandangan Islam	KH M. Shiddiq al Jawi, dalam al Wa'ie No. 86 Tahun VIII	Oktober 2007

Dalam Bentuk Compact Disc

No	Judul
1	Mengenal Hizbut Tahrir
2	Selamatkan Indonesia dengan Syariah Menuju Indonesia Lebih Baik
3	CD Interaktif Mengenal Hizbut Tahrir Indonesia
4	CD Database Interaktif Al Wa'ie

Dalam Bentuk Situs

No	Nama Situs	Ket.
1	http://www.hizbut-tahrir.or.id	Indonesia
2	http://www.hizb.org.uk	Inggris
3	http://www.financial-crisis.eu	Inggris
4	http://www.khilafah.com	Inggris

Lampiran II

Tabel Data Sekunder, Diantaranya:

Dalam Bentuk Buku

No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Tahun
1	<i>Dirasat Fi Al Fikri Al Islami</i> (Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam)	Muhammad Husain Abdullah	Pustaka Thariqul Izzah	2007
2	<i>Mafahim Islamiyah: Menajamkan Pemahaman Islam</i>	Muhammad Husain Abdullah	Pustaka Thariqul Izzah	2002
3	Bantahan Atas Kebohongan-kebohongan Seputar Hukum Riba dan Bunga Bank	M. Ahmad ad-Daur	Al Azhar Press	2003
4	37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam	Abu Fuad	Pustaka Thariqul Izzah	2003
5	36 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam	Abu Fuad	Pustaka Thariqul Izzah	2003
6	Riba Halal, Riba Haram	Abu Fuad (Ed),	Pustaka Thariqul Izzah	2006
7	<i>Introduction to The System of Islam</i> (Menenal Sistem Islam: Dari A sampai Z)	Jalal al-Anshari (Ed)	Pustaka Thariqul Izzah	2004
8	Pengantar ekonomi Islam	M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus	Al Azhar Press	2009
9	Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis	Yusus as Sabatin	Al Azhar Press	2009
10	Manajemen Strategis Perspektif Syariah	M. Ismail Yusanto dan M. Karebet W	Khairul Bayan	2003
11	Reformasi vs Revolusi	M. Musthofa Ramadhan	Wadi Press	2005

Dalam Bentuk Majalah

No	Judul	Pengarang	Tahun
1	"Menggugat Keberadaan Uang Kertas"	Editor, Khilafah Magazine No. 9/Tahun I, Juni: 4-7. Bogor.	2006

Dalam Bentuk Tesis

No	Judul	Pengarang	Tahun
1	"Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonomi Islam Tagyuddin an-Nabhani"	Dwi Condro Triono	Tesis, Yogyakarta: Magister Studi Islam (MSI) UII, 1999
2	"Politik Ekonomi Kebijakan Fiskal Islam Perspektif Hizbut Tahrir"	Hidayatullah Muttaqien	Tesis, Yogyakarta: Magister Studi Islam (MSI) UII, 2008

Dalam Bentuk Buletin

No	Judul	Tahun
1	Buletin Ekonomi Bulanan B Dinar	Edisi I, Januari 2004
2	Buletin Ekonomi Bulanan B Dinar	Edisi II, Februari 2004
3	Buletin Ekonomi Bulanan B Dinar	Edisi III, Maret 2004
4	Buletin Ekonomi Bulanan B Dinar	Edisi IV, April 2004

Dalam Bentuk Situs

No	Nama Situs	Ket.
1	http://www.jurnal-ekonomi.org	Indonesia
2	http://www.syabab.com	Indonesia
3	http://www.mediaumat.com	Indonesia
4	http://www.khilafah1924.org	Indonesia
5	http://www.dwicondro.blogspot.com	Indonesia

Lampiran III

Korelasi Kebijakan Moneter dengan Perekonomian

No	Jalur	Efek yg Timbul	Akibat
1	Efek Substitusi (<i>substitution effect</i>)	Kelebihan uang akan dibelanjakan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan terhadap barang dan jasa meningkat • Produksi meningkat
2	Efek Suku Bunga (<i>interest rates effect</i>)	Kelebihan uang dibelikan <i>financial assets</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan terhadap <i>financial assets</i> meningkat • Suku bunga turun
3	Efek Kekayaan (<i>wealth effect</i>)	Karena inflasi, masyarakat yang memiliki aset riil merasa lebih kaya	<ul style="list-style-type: none"> • Merasa lebih kaya masyarakat akan meningkatkan konsumsi barang dan jasa • Produksi meningkat
4	Efek ekspektasi (<i>expectation effect</i>)	Masyarakat melakukan antisipasi terhadap inflasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengusaha meningkatkan harga • Pekerja meminta kenaikan upah
5	Efek Nilai Tukar (<i>exchange rate effect</i>)	Perbedaan suku bunga nominal domestik dan luar negeri akan menentukan nilai tukar nominal. Dengan asumsi <i>sticky price</i> nilai tukar nominal akan menentukan nilai tukar riilnya	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai tukar riil selanjutnya akan mempengaruhi harga barang dan jasa, baik di dalam maupun luar negeri • Perubahan harga-harga relatif di dalam dan luar negeri tersebut akan menentukan tingkat permintaan, baik di dalam maupun luar negeri, yg akhirnya memberikan pengaruh terhadap tingkat inflasi
6	Efek Kredit (<i>Credit effect</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sisi aset; Perubahan kebijakan mendorong perubahan harga aset, nilai jaminan yg memback up suatu pinjamanpun akan terpengaruh dan akhirnya merubah akses borrower pada bank • Sisi liabilitas bank; kebijakan kontraktif bank sentral mengakibatkan cadangan yg ada di bank mengalami penurunan. Dana yg dpt dipinjamkan pun mengalami penurunan • Sisi neraca perusahaan; kebijakan moneter ekspansif mengakibatkan suku bunga di pasar turun yg selanjutnya mendorong harga saham meningkat. Sejalan dengan peningkatan tersebut, nilai bersih perusahaan tersebut (<i>networth</i>) akan meningkat yg selanjutnya mengurangi tindakan adverse selection dan moral hazard oleh perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas investasi meningkat, output meningkat dan hal yg sama terjadi pula pada permintaan agregat • Penurunan investasi dan selanjutnya mendorong penurunan output dan juga permintaan agregat • Mendorong peningkatan pemberian kredit oleh bank, selanjutnya meningkatkan investasi dan pada gilirannya meningkatkan output dan permintaan agregat

Sumber: Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management; Conventional and Syar'i System*

Lampiran IV

Instrumen Langsung Pengendalian Moneter

No	Instrumen	Cara Kerja	Keuntungan	Kerugian
1	Penetapan suku bunga (<i>interest rate control</i>)	Bank sentral dengan wewenangnya menetapkan tingkat suku bunga baik untuk pinjaman maupun simpanan di dalam sistem perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - Efektif untuk mengendalikan suku bunga kredit, terutama di masa krisis (sementara) - Biasanya dicadangkan pada saat pemerintah tidak dapat mencapai sasaran suku bunga melalui pasar atau ketika suku bunga jangka panjang merupakan tujuan kebijakan - Mengandung pengaruh-pengaruh "non competitive pricing" ketika pembukaan bank terbatas - Membatasi masalah-masalah "adverse selection", terutama ketika informasi peminjam langka atau pengawasan bank lemah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kompetisi di pasar-pasar keuangan - Alokasi sumber-sumber keuangan tidak berdasarkan mekanisme pasar - Pagu suku bungan mudah dihindari dengan mengubah simpanan bank menjadi aset yang menghasilkan bunga pasar (seperti valuta asing) atau menjadi barang - Mendorong disintermediasi atau intermediasi non bank - Murah untuk meminjam kredit sehingga mendorong penggunaan kapital yang berlebihan
2	Pagu kredit (<i>credit ceilings</i>)	Bank sentral menetapkan jumlah maksimum kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - Efektif untuk mengendalikan kuantitas kredit perbankan, terutama di masa krisis (sementara) - Dapat meminimalkan kehilangan kendali moneter selama masa transisi ke instrumen tidak langsung ketika mekanisme transmisi tidak tentu 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat alokasi sumber daya perbankan - Dapat menyebabkan disintermediasi dan hilangnya keefektifan - Sulit diterapkan jika terdapat banyak bank dan "capital inflows"
3	Rasio likuiditas (<i>statutory liquidity ratio</i>)	Bank sentral mewajibkan bank-bank untuk setiap saat memelihara surat-surat berharga tertentu atau mata uang tertentu dengan persentase tertentu (biasanya	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya "captive demand" untuk aset yang masuk kualifikasi (biasanya utang pemerintah), rasio likuiditas dapat mengurangi biaya peminjaman untuk penerbit instrument ini. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu kompetisi dengan menerapkan batasan-batasan pada manajemen asset bank - Mengganggu tingkat harga sekuritas dan menghambat perdagangan di pasar sekunder - Dapat menyebabkan

		utang pemerintah), di luar CWM		disintermediasi dan menurunkan disiplin fiskal pemerintah, yang pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya keefektifan sebagai alat untuk mengendalikan uang.
4	Kredit langsung (<i>directed credits</i>)	Bank sentral menyalurkan kredit secara langsung (atau melalui agen pemerintah) kepada sektor, program, proyek, dan/ atau kegiatan tertentu yang sedang diprioritaskan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian langsung terhadap agregat kredit bank sentral ke perbankan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada kemungkinan misalokasi sumber daya - Dapat digunakan untuk menyalurkan kredit langsung ke BUMN sehingga mengurangi pengaruh langsung anggaran pemerintah.
5	Kuota rediskonto (<i>bank by bank rediscount quota</i>)	Bank sentral menetapkan jumlah kuota surat-surat berharga sektor tertentu di rediskontokan dengan suku bunga di bawah harga pasar.	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan batas bawah suku bunga antar bank sehingga memperbaiki transmisi perubahan suku bunga. - Digunakan untuk rediskonto surat berharga sektor tertentu dan menyalurkan likuiditas ke bank tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga diskonto di bawah pasar dapat menghambat perkembangan PUAB jika penggunaannya tidak dibatasi.
6	Pengguntingan uang	Bank sentral dan/atau pemerintah menetapkan bahwa nilai pecahan mata uang tertentu (misalnya tinggal 50%) sedangkan sisanya diganti dengan surat berharga pemerintah jangka panjang. Caranya, uang kertas digunting menjadi dua bagian. Satu bagian sebagai alat pembayaran,	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan sumber dana pemerintah dalam keadaan tidak terdapat sumber lain. - Pilihan mudah bagi pemerintah yang baru dan belum kredibel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat merasa dirugikan karena "dipaksa" menukarkan sebagian uangnya dengan surat berharga pemerintah. - Kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan semula. - Pemerintah harus merencanakan dengan baik pada saat surat berharga jatuh waktu.

		bagian lain ditukar dengan surat berharga pemerintah.		
7	Pembersihan uang (<i>monetary purge</i>)	Bank sentral dan/atau pemerintah menetapkan bahwa nilai uang diturunkan dengan persentase tertentu tanpa ada penggantian untuk jumlah yang diturunkan tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan sumber dana pemerintah dalam keadaan tidak terdapat sumber lain. - Pilihan mudah bagi pemerintah yang baru dan belum kredibel. - Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat berharga pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat dirugikan dengan penurunan nilai uangnya. - Kredibilitas pemerintah akan dipertanyakan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan semula.
8	Penetapan uang muka impor	Dengan ketetapan ini para importer diwajibkan untuk membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang yang mereka perlukan dari luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> - Uang beredar yang dari sisi impor dapat dikontrol. - Sebagai alat kontrol devisa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberatkan importer yang bermodal minim. - Dapat menyuburkan pasar gelap valuta asing.

Instrumen Tidak Langsung Pengendalian Moneter

No	Instrumen	Cara Kerja	Keuntungan	Kerugian
1	Cadangan primer (<i>primary reserve</i>)/cadangan wajib minimum (<i>reserve requirements</i>) BI: giro wajib minimum (GWM).	Bank sentral mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid tertentu (seperti kas) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya daripada bank sentral	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan memperkirakan kebutuhan (<i>predictability</i>) cadangan. - Peningkatan cadangan primer bermanfaat untuk sentralisasi eksekusi likuiditas atau untuk mengakomodasi perubahan struktural dalam permintaan akan cadangan - Meningkatkan keefektifan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Cadangan primer tinggi merupakan pajak pada intermediasi perbankan. Hal ini dapat dinetralkan dengan pemberian kompensasi dengan suku bunga pasar. - Pajak ini dapat melebarkan "<i>spreads</i>" antara suku bunga kredit dan suku bunga deposito, yang

			<p>moneter</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Averaging” memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada bank dalam manajemen portofolionya. 	<p>akan mengarah pada disintermediasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak cocok jika digunakan untuk manajemen likuiditas jangka pendek karena seringnya perubahan cadangan primer manajemen portofolio bank.
2	Cadangan sekunder (<i>secondary reserve</i>)	Bank sentral mewajibkan bank-bank, di luar cadangan primer (tetapi masih dalam kerangka CWM), untuk memelihara alat-alat likuid tertentu dengan rincian/persentase tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan keleluasaan bank sentral dalam menentukan alat likuid yang harus dipelihara. - Dapat dipakai untuk mempersyaratkan surat berharga tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang memberikan ruang fleksibilitas bagi bank. - Mengganggu kompetisi perbankan dalam penerapan pembatasan ini. - Mengganggu harga pasar sekuritas yang lain di pasar sekunder.
3	Fasilitas diskonto (<i>standing facilities</i>)	Bank sentral memberikan fasilitas pinjaman (dan/atau simpanan) dan menetapkan tingkat diskonto surat berharga bank sentral (SBBS) atau pinjamannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Berguna sebagai mekanisme katup pengaman. - Berguna sebagai sinyal kebijakan bank sentral. - Fasilitas untuk bank lemah yang sulit mendapatkan kebutuhan dana di PUAB. - Memberikan informasi patokan suku bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak begitu cocok untuk pentargetan “base money” secara tepat, karena akses ke pintu ini atas inisiatif bank. - Kriteria surat berharga yang dapat digunakan dan akses ke pintu ini sering digunakan sebagai kebijakan kredit selektif.
4	Fasilitas rediskonto (<i>rediscount window</i>)	Bank sentral memberikan fasilitas pinjaman (dan/atau simpanan) dan menetapkan tingkat diskonto surat berharga bank sentral (SBBS) atau pinjamannya	<ul style="list-style-type: none"> - Berguna sebagai mekanisme katup pengaman. - Berguna sebagai sinyal kebijakan bank sentral. - Fasilitas untuk bank-bank lemah yang sulit mendapatkan kebutuhan dana di PUAB 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak begitu cocok untuk pentargetan base money secara tepat karena akses ke pintu ini atas inisiatif bank. - Kriteria surat berharga yang dapat digunakan dan akses ke pintu

			<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi patokan suku bunga. 	ini sering digunakan sebagai kebijakan kredit selektif.
5	Lelang SB bank sentral sebagai instrument OPT	Bank sentral melakukan lelang untuk menjual/membeli SB bank sentral kepada perbankan dan/atau peserta lain di pasar primer.	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen yang fleksibel untuk manajemen likuiditas jangka pendek karena bank sentral yang menerbitkan dan berbagai format lelang/tender dapat digunakan untuk mengarahkan suku bunga. - Bermanfaat khususnya pada saat bank sentral tidak punya cukup SB pemerintah untuk melaksanakan OPT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank sentral dapat menanggung kerugian apabila terjadi penerbitan/penjualan yang cukup besar. - Jika SB bank sentral digunakan bersama dengan SB pemerintah (T-Bills) permasalahan akan muncul jika tidak ada koordinasi yang kuat antar penerbit SB.
6	Lelang SB pemerintah sebagai instrument OPT	Pemerintah melakukan lelang untuk menjual SB pemerintah kepada peserta pasar di pasar primer. Selanjutnya bank sentral dapat melakukan jual-beli SB pemerintah ini dalam OPTnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen sama dengan SB bank sentral jika koordinasi dengan departemen keuangan karena penerbitan SB pemerintah dapat melebihi kebutuhan fiskal. - Mendorong disiplin fiskal bagi pemerintah jika pembiayaan langsung dari bank sentral dihentikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan manajemen uang dapat berbentrok dengan manajemen moneter jika departemen keuangan memanipulasi lelang untuk menjaga biaya dana di bawah pasar. - Ketika manajemen moneter bergantung pada penerbitan perdana, lelang sering dapat menghambat perkembangan pasar sekunder.
7	Operasi pasar sekunder (<i>secondary market operations</i>)	Bank sentral melakukan jual-beli surat-surat berharga secara outright atau repo (<i>repurchase agreement</i>) dalam rangka OPT	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilaksanakan secara terus-menerus sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi. - Transparan. - Meningkatkan 	Memerlukan pasar sekunder yang matang dan bank sentral harus memiliki dangan asset yang dapat dipasarkan

			<p>perkembangan pasar sekunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Respons yang segera dari pasar uang. 	<p>(<i>marketable assets</i>) yang cukup.</p>
8	Fasilitas simpanan bank sentral (dapat digunakan sebagai instrumen OPT)/deposits facilities	Bank sentral memberikan fasilitas berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat pendek yang digunakan oleh bank-bank apabila mereka mengalami kelebihan likuiditas pada akhir hari namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya itu di tempat lain.	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu pencapaian sasaran operasional. - Fleksibel dalam jumlah maupun suku bunga - Suku bunga sebagai acuan pasar uang - Dapat untuk keperluan kontraksi dan ekspansi. - Membantu bank yang kelebihan likuiditas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila dilakukan terus-menerus menyebabkan ketergantungan dan manajemen keuangan kurang berkembang.
9	Operasi valuta asing (dapat digunakan sebagai instrument OPT) atau <i>foreign exchange operation</i>	Bank sentral melakukan jual-beli valas di pasar valas untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan nilai tukar.	<ul style="list-style-type: none"> - Jika pasar valas berkembang sedangkan pasar SB pemerintah tidak aktif, swap dapat menggantikan operasi <i>repo</i> SB pemerintah. - Penjualan dan pembelian valas secara spot ("<i>outright</i>") dapat bermanfaat ketika pasar valas lebih berkembang daripada pasar uangnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank sentral dapat mengalami kerugian jika operasi valas digunakan dengan maksud untuk menjaga nilai tukar yang tidak "<i>sustainable</i>".
10	Fasilitas overdraft (<i>overdraft window</i>)	Bank sentral memberikan fasilitas pinjaman (dengan atau tanpa jaminan) yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat pendek (kalah kliring).	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan fasilitas pinjaman jangka pendek yang suku bunganya lebih tinggi dari sumber lain. - Dapat menjadi bagian kunci pengaturan pembayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lihat dulu rediskonto di atas - Kerugian suku bunga yang sudah diumumkan sebelumnya sedangkan akses ke pintu ini atas inisiatif bank.
11	Simpanan sektor pemerintah (<i>public sector deposits</i>)	Bank sentral memindahkan/relokasi simpanan pemerintah pemerintah yang ada di bank sentral dan /atau di bank-bank pelaksana/umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Karena besarnya arus dana keluar/masuk sistem perbankan dari pemerintah, relokasi simpanan pemerintah antar bank sentral dan bank pelaksana dapat menjadi kunci instrumen penting 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang transparan - Berlawanan dengan usaha pengembangan pasar sekunder untuk sekuritas pemerintah.

			untuk meredam pengaruh arus tersebut pada likuiditas jangka pendek.	
12	Lelang kredit (<i>credit auction</i>)	Bank sentral melakukan kredit pada perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - Menawarkan alat untuk mengetahui harga/suku bunga kredit bank sentral. - Dapat digunakan ketika pasar masih belum berkembang dan referensi suku bunga antar bank belum ada. - Menetapkan patokan suku bunga. - Mengalokasikan kredit sesuai dengan ketentuan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank sentral menghadapi resiko kredit yang sulit dinilai. - Mungkin tidak cocok untuk manajemen harian jika "settlement" melebihi target harian. - Rawan terhadap masalah "<i>adverse selection</i>".
13	Imbauan moral (<i>moral suasion</i>)	Bank sentral mengimbau bank-bank untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti menurunkan suku bunga pinjaman/simpanannya.	<ul style="list-style-type: none"> - Fleksibel penggunaannya - Tidak mengikat. - Efektif kalau BS kredibel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengikat sehingga hasilnya tidak pasti. - Tidak boleh digunakan terus-menerus. - Kalau BS tidak kredibel, kurang efektif.
14	Penjualan SB Wadiah Bank sentral sebagai instrument OPT	Bank sentral membuka window (seperti fasilitas simpanan bank sentral namun menggunakan sistem mudharabah) khusus untuk penempatan bank-bank syariah.	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumen yang dapat dijadikan sebagai komplemen SB bank sentral di sektor perbankan syariah. - Bermanfaat khususnya pada saat bank sentral tidak punya cukup SB pemerintah untuk melaksanakan OPT. - Memiliki keuntungan seperti fasilitas simpanan bank sentral. - Memberikan kesempatan yang sama bagi bank syariah untuk ikut berpartisipasi di pasar uang sesuai dengan sistem syariah - Menambah pilihan instrumen bagi bank 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank sentral hanya dapat mengendalikan kuantitas dan tidak dapat mengendalikan suku bunga karena ketentuan syariahnya - Memiliki kekurangan seperti fasilitas simpanan bank sentral. - Akan tidak terlalu efektif kalau volume penjualan kecil.

			sentral - Akan efektif apabila volume penjualan sudah cukup banyak.	
--	--	--	--	--

Sumber: Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management; Conventional and Syar'i System*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran V

Kronologi Terjadinya Krisis Tahun 1997 di Indonesia

Waktu	Peristiwa	Faktor Penyebab
Juni – Juli 1997	Terjadinya capital outflow yang masif dari kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia	Kolapnya ekonomi Thailand yang menyebabkan kerentanan ekonomi kawasan, berubahnya persepsi dari investor internasional, hilangnya kepercayaan terhadap prospek ASEAN sebagai macan Asia
21 Juli 1997	Rupiah melemah menjadi Rp.2.650/US\$, sementara batas bawah intervensi BI adalah 2.681/US\$	Terkena imbas depresiasi bath Thailand
21 – 24 Juli	Rupiah terus bergejolak, BI mengintervensi ke pasar forward, sehingga rupiah sedikit menguat menjadi 2.545/US\$	–
29 Juli	Pengetatan likuiditas, suku bunga SBI naik 6% menjadi 14%, SBPU untuk sementara dihapus	–
Agustus – September 1997	<ul style="list-style-type: none"> Semakin turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Semakin meningkatnya suku bunga Semakin terjadi kenaikan di pasar finansial 	<ul style="list-style-type: none"> Serangan spekulator pasar uang terhadap rupiah Kenaikan suku bunga SBI Kebijakan moneter yang sangat ketat tanpa ada usaha uk memperbaiki ekspektasi pasar
14 Agustus	Rupiah tetap melemah, sehingga BI melepas <i>band intervention</i> . Sejak ini rupiah benar-benar ditentukan oleh mekanisme pasar.	–
19 Agustus	Masyarakat semakin panik. Pengetatan likuiditas. BI menaikkan suku bunga ABI jk waktu 1 dan 3 bln masing-masing menjadi 30% dan 28%. Nilai tukar rupiah pada posisi Rp.2880/US\$ di pasar antar bank	–
26 Agustus	Bunga transaksi pinjaman overnite antar bank meningkat tajam, mencapai 100%	–
29 Agustus	Rupiah menembus Rp.3.000/US\$ atau terdepresiasi lebih dari 27% sejak januari 1997	–
2 September 1997	Rupiah Menembus Rp.3.060/US\$ Sebagai Dampak Dari Pernyataan Pelonggaran Likuiditas, Dan Depresiasi Ringgit Malaysia Dan Dollar Singapura	–
Oktober – November 1997	<ul style="list-style-type: none"> terjadinya penarikan dana oleh masyarakat secara masif baik dari bank yang sehat maupun yang sakit hilangnya keyakinan bahwa pemerintah Soeharto saat itu akan mampu menangani krisis 	Likuidasi bank berdasarkan nasehat IMF
Desember 1997 – Januari	<ul style="list-style-type: none"> Moneter: Rupiah Turun Lebih Lanjut 	Terjadi kenaikan permintaan yang besar terhadap dolar

1998	<ul style="list-style-type: none"> - Capital Outflow Yang Masif Tetap Terjadi Termasuk Terjadinya Usaha Penyelundupan Rupiah Ke Luar Negeri - Inflasi Mulai Meninggi - Sektor Perbankan Mulai Kolaps Menyusul L/C Yang Dikeluarkan Perbankan Nasional Ditolak Oleh Kalangan Internasional <p>Sektor Riil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi Kepanikan Investor Domestic Khususnya Para Pengusaha Cina - Berbondong-Bondong Masyarakat Memborong Bahan Pangan (<i>Food Rush</i>) <p>Sosial Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilangnya Kepercayaan Terhadap rezim Soeharto - Situasi politik menjadi tidak menentu 	<ul style="list-style-type: none"> - untuk pembayaran hutang - Suplai uang tidak bisa dikontrol - Publik kehilangan kepercayaan terhadap perbankan domestik - Bank luar negeri tidak memiliki trust terhadap bank domestic - Terjadinya peningkatan kerusuhan anti Cina disekeliling kota di Jawa - Publik menduga akan terjadi kesulitan untuk mendapatkan pangan - Kegagalan pemerintah mengatasi masalah-masalah ekonomi yang muncul
Januari – Mei 1998	<p>rupiah semakin melemah, bahkan mencapai rp.16.000/us\$ pada saat terjadi tragedi Mei. Banyak pengamat memprediksi dollar AS mencapai Rp.20.000. Pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie ternyata semakin memperkuat nilai rupiah, meskipun tetap terjadi fluktuasi dalam jangka pendek.</p>	–
Juni – Desember 1998	<p>Moneter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suku bunga naik secara ekstrem - Inflasi tinggi berlanjut - Perbankan kolaps <p>Sektor Riil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi kontraksi ekonomi seperti: Indeks harga saham (<i>stock market index</i>) Jatuh, sektor riil secara mendasar telah kolaps <p>Sosial – Politik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara menyeluruh terjadinya ketidakpastian yang besar terhadap ekonomi, sosial dan politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan moneter yang sangat ketat untuk mengontrol suplai uang - Tidak ada resolusi terhadap restrukturisasi perbankan - Kerusuhan yang berlanjut pada sejumlah tempat di Indonesia - Pemerintah Habibie dipandang tidak memiliki kredibilitas dan legitimasi untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi - Fenomena masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri berlanjut

Sumber: Edy Suandi Hamid dan M.B Hendrie Andianto,¹ *Timeline of The Panic*,² dan Jardine A Husman, dengan perubahan.³

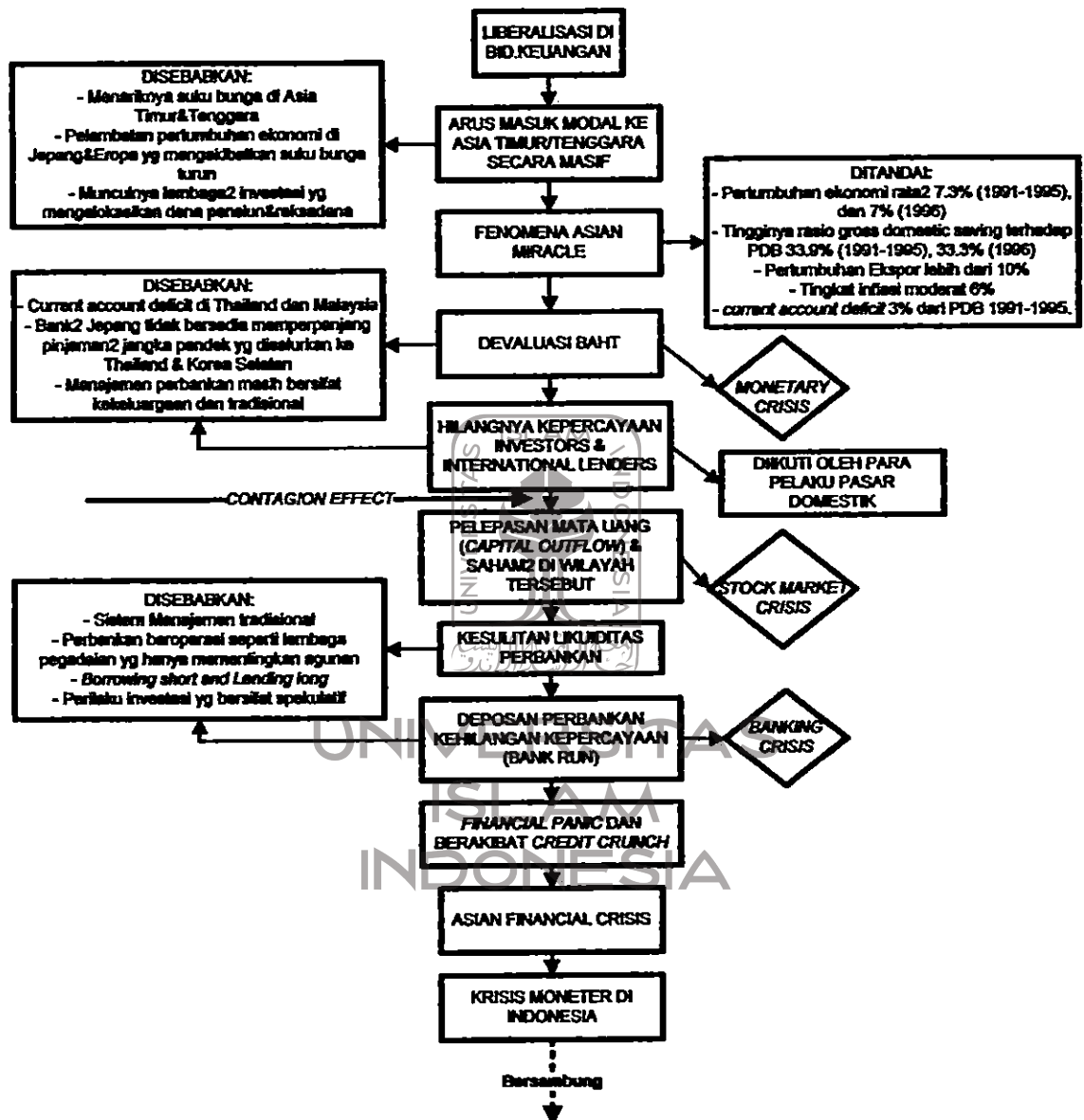
¹ Edy Suandi Hamid dan M.B Hendrie Anto, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milineum III*, cet. I (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. .

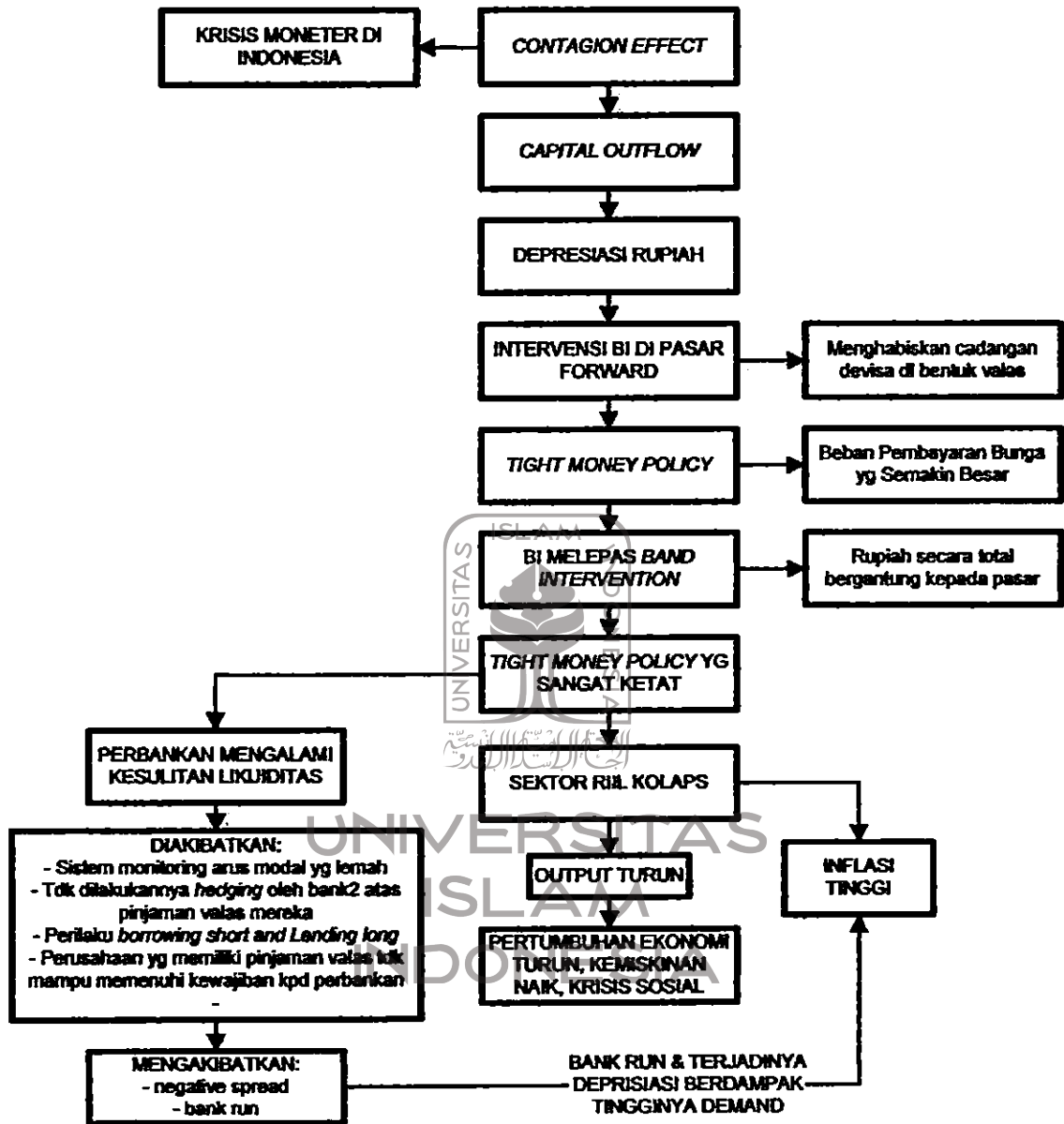
² *Timeline of The Panic*, dalam <http://www.frontline.com>

³ Jardine A Husman, *Dampak Fluktuasi Nilai Tukar Terhadap Output dan Harga: Perbandingan Dua Rezim Nilai Tukar*, hal. 309, dalam <http://www.bi.go.id>. *Timeline of The Panic*, dalam <http://www.frontline.com>

Lampiran VI

Skema Kronologi Krisis Asia dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia





Sumber: Disarikan dari Buku Dinar Emas Solusi Krisis Moneter

Lampiran VII

Indeks Harga Konsumen Indonesia

Abdi periode ¹⁾	Index Makanan	Makanan Jauh, Minyak, Bekat dan Tumbuhan	Pemakaian	Standar	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	Kemampuan dan Komersial	Kelembagaan	Pembelian Index Umum
1994 ²⁾	156,97	-	178,57	147,53	161,69	-	-	163,17	9,24
1995	179,14	-	188,93	157,42	173,33	-	-	177,83	8,64
1996	189,99	-	198,00	166,76	190,72	-	-	189,62	6,47
1997	227,88	-	210,36	179,96	206,72	-	-	211,62	11,05
1998									77,63
Januari-Maret	166,71	142,23	128,61	161,39	155,88	134,74	119,74	142,15	27,11
April-Juni ³⁾	196,39	167,92	139,17	195,29	171,97	140,84	150,38	163,89	15,29
Juli-September	261,00	207,21	155,92	225,22	204,49	162,17	163,18	196,23	19,73
Oktober-Desember	263,22	211,58	159,03	219,71	212,54	161,84	163,70	198,64	1,23
1999									2,01
Januari	281,09	213,80	160,62	232,11	214,07	161,40	164,95	204,54	2,97
Februari	287,60	216,87	162,06	234,23	214,12	161,89	164,29	207,12	1,26
Maret	281,65	216,34	162,92	234,71	215,80	162,05	169,16	206,75	-0,18
April	275,09	215,52	164,04	233,58	216,57	162,04	169,07	205,34	-0,68
Mei	271,38	215,20	164,91	231,18	217,60	162,59	170,06	204,76	-0,28
Juni	268,25	215,16	165,34	228,32	218,22	163,06	170,23	204,07	-0,34
Juli	258,96	214,87	166,06	224,69	219,48	163,87	169,94	201,93	-1,05
Agustus	248,54	215,33	165,87	226,56	220,98	166,48	169,68	200,05	-0,93
September	239,06	216,26	166,12	229,63	220,00	169,52	169,94	198,68	-0,68
Oktober ⁴⁾	237,24	216,13	166,45	232,23	220,06	170,17	171,31	198,79	0,06
November	240,00	216,51	165,93	228,38	219,97	170,42	171,56	199,00	0,25
Desember	249,54	219,20	166,77	233,21	220,37	170,44	172,20	202,45	1,73
2000									
Januari	256,85	220,00	167,56	237,47	220,87	170,43	173,68	205,12	3,26
Februari	256,00	220,17	168,34	239,79	221,85	170,23	173,45	205,27	0,07
Maret	250,16	219,97	169,05	240,09	222,43	171,83	174,01	204,34	-0,45
April	246,16	225,28	171,03	240,50	224,87	173,50	176,83	205,48	0,56
Mei	246,08	225,07	174,18	242,55	225,76	174,91	181,19	207,21	0,84
Juni	246,47	227,25	174,87	244,54	226,50	175,41	182,54	208,24	0,50
Juli	251,39	229,45	176,06	248,54	229,42	178,51	183,37	210,91	1,28
Agustus	246,68	231,43	176,71	247,01	230,43	195,70	184,69	211,99	0,51
September	240,76	232,73	177,93	247,12	236,19	198,02	186,66	211,87	-0,06
Oktober	241,37	237,42	180,60	248,68	238,16	199,24	191,19	214,33	1,16
November	246,97	241,62	182,93	249,95	240,47	199,50	191,78	217,15	1,32
Desember	259,59	243,49	183,61	256,96	241,46	200,28	194,00	222,10	1,94

Catatan :

1) Angka tahunan/triwulanan adalah angka akhir periode yang bersangkutan

2) Berdasarkan April 1988 - Maret 1989 = 100 dengan 4 kelompok: kolom (2) adalah kelompok Makanan; kolom (6) adalah kelompok Aneka Barang & Jasa

3) Berdasarkan Januari 1996 - Desember 1996 = 100, IHK dihitung di 44 kota dan dibagi menjadi 7 kelompok

4) Sejak Oktober 1999, IHK dihitung di 43 kota (minus kota Dili)

Sumber : Badan Pusat Statistik, dalam laporan tahunan 2000 Bank Indonesia.

Lampiran VIII

**Inflasi Negara-negara Berkembang
(1996 – 2000)**

Negara	1996r	1997r	1998r	1999r	2000 *
Negara Berkembang	14,6	9,2	10,3	6,6	6,2
Afrika	25,9	11,1	8,7	11,8	12,7
Timur Tengah dan Eropa	24,2	23,1	23,6	20,4	17,4
Amerika Latin	22,4	13,2	10,6	9,3	8,9
Asia	8,2	4,8	8,0	2,4	2,4
NIEs Asia	4,3	3,4	4,4	0,3	2,2
RRC	8,4	2,8	-0,8	-1,5	1,5
Indonesia	6,5	11,1	77,6	2,01	9,4
Singapura	1,4	2,0	-0,3	0,2	2,0 ¹⁾
Malaysia	3,5	2,7	6,3	3,0	1,4
Thailand	5,9	5,6	8,1	0,5	1,3
Filipina	8,4	6,0	9,7	8,5	6,6
Vietnam	5,8	3,2	7,7	7,6	-

Sumber : – IMF, World Economic Outlook, October 2000, Bank Indonesia, BPS, The Economist, dalam Laporan Tahunan 2000 Bank Indonesia



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran IX

Pertumbuhan Ekonomi Negara-negara Berkembang
(1996 – 2000)

Negara	1996/1	1997/1	1998/1	1999/1	2000/1
Negara Berkembang	6,5	5,7	3,5	3,8	5,6
Afrika	5,7	2,8	3,1	2,2	3,4
Timur Tengah dan Eropa	4,5	5,1	3,1	0,8	4,7
Amerika Latin	3,5	5,4	2,2	0,3	4,3
Asia	8,3	6,5	4,1	5,9	6,7
NIES Asia	6,2	5,8	-2,3	7,8	7,9
GRC	9,5	8,8	7,8	6,5	8,0
Indonesia	7,8	4,7	-13,2	0,2	4,5
Singapura	7,5	9,0	0,3	4,5	9,9
Malaysia	8,6	7,7	-6,7	2,4	5,9
Thailand	5,5	-1,3	-9,2	4,0	4,3
Filipina	5,8	5,2	-0,5	2,2	3,9
Vietnam	9,3	8,2	3,5	3,5	-

Sumber : – IMF, World Economic Outlook, October 2000 dan Bank Indonesia, dalam Laporan Tahunan 2000 Bank Indonesia



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran X

**Perubahan Uang Beredar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya
(miliar rupiah)**

Bincian	1996	1997	1998r	1999r	2000	2000			
						I	II	III	IV
Uang Beredar :									
M2	65.994	67.011	221.738	68.824	100.822	10.246	27.884	2.120	60.572
M1	11.412	14.264	22.854	23.436	37.552	30	9.169	1.599	26.754
Kartal	1.680	5.755	12.970	16.959	14.017	-7.156	4.634	1.013	15.526
Giral	9.732	8.317	9.884	6.477	23.535	7.186	4.535	586	11.228
Kual ¹⁾	54.582	52.757	198.884	45.388	63.270	10.216	18.715	521	33.818
Faktor-faktor yang mempengaruhi :									
Aktiva luar negeri bersih	18.015	17.344	73.692	-12.580	81.636	8.846	43.961	-4.247	33.076
Tagihan kepada pemerintah bersih	-2.757	-16.486	17.513	625.287	123.060	61.903	38.509	23.893	-1.245
Tagihan bersih pada BPPN	0	0	29.693	-29.693	0	0	0	0	0
Tagihan kepada sektor swasta	56.394	137.062	99.421	-299.689	42.347	1.591	14.973	89	25.694
Tagihan kepada lembaga/ perusahaan pemerintah	4.626	5.031	6.389	-8.139	-4.506	-3.192	3.541	-257	-4.598
Tagihan kepada perusahaan swasta dan perorangan	51.768	132.031	93.032	-291.550	46.852	4.784	11.431	346	30.291
Aktiva lainnya bersih	-5.668	-70.909	31.112	-44.194	-146.221	-62.094	-69.559	-17.615	3.047

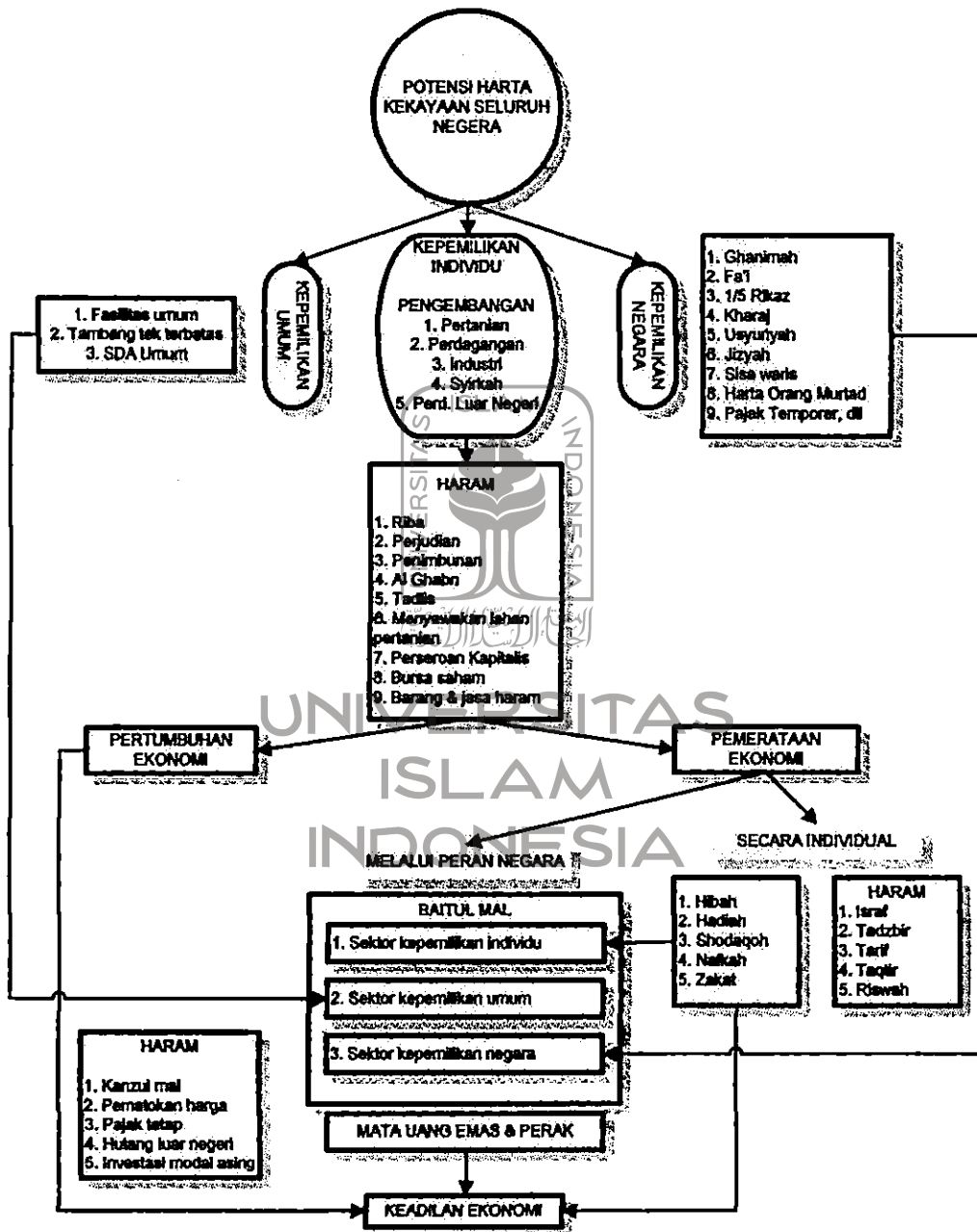
1) Tersdi atas deposito berjangka dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk

1) Terdiri atas deposito berjangka dan tabungan dalam rupiah maupun valuta asing serta giro valuta asing milik penduduk

Sumber : Laporan tahunan 2000 Bank Indonesia.

Lampiran XII

**Skema Solusi Sistem Ekonomi Islam dalam Mewujudkan
Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi**



Sumber: Dwi Condro Triono, Konsep Pertumbuhan dan Pemerataan dalam Sistem Ekonom Islam Taqiyuddin An Nabhani (Dengan Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalisme), Tesis MSI UII, 1999.

Lampiran XIII

**Kredit Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing
Menurut Jenis Penggunaan dan Sektor Ekonomi¹⁾**

Kategori	1996	1997	1998	1999	2000			
					Mar.	Juni.	Sep.	Des.
Kredit modal kerja	222.478	277.399	348.942	167.442	168.712	180.993	18.4381	203.724
Pantoran	5.893	11.373	22.058	12.162	13.129	11.014	9.231	8.476
Perkembangan	1.288	3.995	3.880	2.368	2.649	3.101	3.158	3.798
Perindustrian	54.602	76.585	121.867	61.278	60.445	68.913	72.577	80.572
Perdagangan	58.695	64.335	72.065	36.181	33.861	38.943	34.131	36.318
Jasa-jasa	69.494	87.806	91.039	28.502	27.499	28.145	24.195	26.725
Lain-lain	32.506	39.304	35.053	26.951	28.129	30.777	41.109	47.620
Kredit investasi	78.443	100.735	141.444	57.491	57.823	59.242	64.613	68.278
Pantoran	11.737	14.629	17.250	11.615	11.548	12.318	11.626	10.810
Perkembangan	405	1.321	2.029	1.329	2.321	2.415	3.132	2.888
Perindustrian	24.248	35.094	49.801	22.981	22.186	21.113	22.318	25.210
Perdagangan	11.891	17.928	24.299	7.107	7.417	7.765	7.284	7.788
Jasa-jasa	22.162	31.763	48.085	14.659	14.051	15.631	20.253	17.591
Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	292.921	378.134	487.426	228.133	223.235	240.135	248.994	269.888
Pantoran	17.630	26.002	39.308	23.777	24.677	23.332	20.837	19.503
Perkembangan	1.693	5.316	5.909	3.697	4.970	5.516	6.290	6.680
Perindustrian	78.850	111.679	171.668	84.259	82.631	90.026	94.895	106.782
Perdagangan	70.586	82.264	96.364	43.288	41.278	46.708	41.815	44.099
Jasa-jasa	91.656	113.569	139.124	43.161	41.550	43.776	44.448	44.316
Lain-lain	32.506	39.304	35.053	26.951	28.129	30.777	41.109	47.620

1) Tidak termasuk pinjaman antarbank, pinjaman kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk, serta nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek

Sumber: Laporan Tahunan 2000 Bank Indonesia

Lampiran XIV

FASE SEJARAH KERUNTUHAN MONETER DI BARAT DAN EROPA

Fase	Fenomena yang Terjadi
I. Baku Emas Klasik (1815-1914)	<ul style="list-style-type: none"> - Fase ini disebut juga dengan zaman keemasan - Setiap mata uang Nasional (Dolar, Poundsterling, Franc, dsb) hanyalah sekadar nama bagi satuan ukuran berat emas (Misal: Dolar didefinisikan sebagai ukuran emas seberat 1/20 ons, poundsterling kurang dari ¼ ons, dst). - Artinya, nilai tukar antara berbagai mata uang nasional bersifat tetap, bukan karena mata uang-mata uang tersebut dikontrol secara arbitrer oleh pemerintah, melainkan dalam cara yang sama di mana satu pon berat didefinisikan sama dengan enam belas ons. - Abad ke-19 menyaksikan manfaat-manfaat adanya satu jenis uang di seluruh dunia. Satu jenis uang telah memfasilitasi kebebasan usaha, investasi, dan perjalanan di seluruh wilayah niaga dan moneter, yang diikuti dg tumbuhnya spesialisasi serta pembagian kerja secara internasional. - Terjadi perlambatan dari kecepatan mekanisme pasar bebas yang diakibatkan tindakan intervensi pemerintah sebelum abad ke-19. Hal ini menimbulkan terjadinya siklus bisnis berupa inflasi dan resesi dalam kerangka baku emas ini. - Tindakan intervensi tersebut berbentuk monopoli pemerintah terhadap percetakan koin, pemberlakuan undang-undang alat tukar yang sah, penciptaan uang kertas, dan pengembangan perbankan yang inflasif yang dipicu pemerintah. - Meskipun tindakan-tindakan tersebut memperlambat proses penyesuaian di pasar, penyesuaiannya masih terkendali. - Jadi, meski baku emas klasik di abad ke-19 tidak sempurna dan memungkinkan terjadinya Boom dan bust secara minor (), sistem ini memberi kita sebuah tatanan moneter yang jauh lebih baik daripada yang pernah dikenal dunia. Sebuah tatanan yang benar-benar berfungsi untuk mengendalikan siklus bisnis, dan yang memungkinkan pembangunan perdagangan, pertukaran dan investasi internasional.
II. Perang Dunia I dan Sesudahnya	<ul style="list-style-type: none"> - Terjadi Perang Dunia I - Untuk Membiayai Perang Tersebut, Negara-Negara Yang Terlibat Perang Melakukan Penurunan Pasokan Uang Kertas Dan Uang Bank Masing-Masing. - Tindakan Tersebut Menyebabkan Terjadinya Inflasi Yang Sangat Parah Sehingga Mustahil Bagi Pemerintah Untuk Memenuhi Janjinya Untuk Bisa Menukarkan Mata Uang Yang Ada Ke Dalam Bentuk Emas. - Akibatnya, Negara-Negara Tersebut Memutuskan Untuk Keluar Dari Baku Emas Dengan Jalan Kebangkrutan Mereka Tidak Lama Setelah Perang Berkecamuk. - Semua Negara tersebut limbung, kecuali Amerika Serikat yang paling belakangan memasuki perang dan tidak banyak menurunkan pasokan dolarnya sehingga aman dari ancaman penarikan emas. - Kecuali AS, dunia mengalami apa yang sekarang oleh beberapa ekonom disebut sebagai nirwana bagi nilai tukar yang bebas berfluktuasi, devaluasi kompetitif, blok-blok mata uang yang berseteru satu sama lain, kontrol terhadap pertukaran uang, penetapan tarif dan kuota, serta keruntuhan perdagangan dan investasi internasional. - Mata uang Poundsterling, Franc, Mark, dan lainnya mengalami penurunan nilai terhadap emas dan dolar; akibatnya kekacauan moneter meluas ke

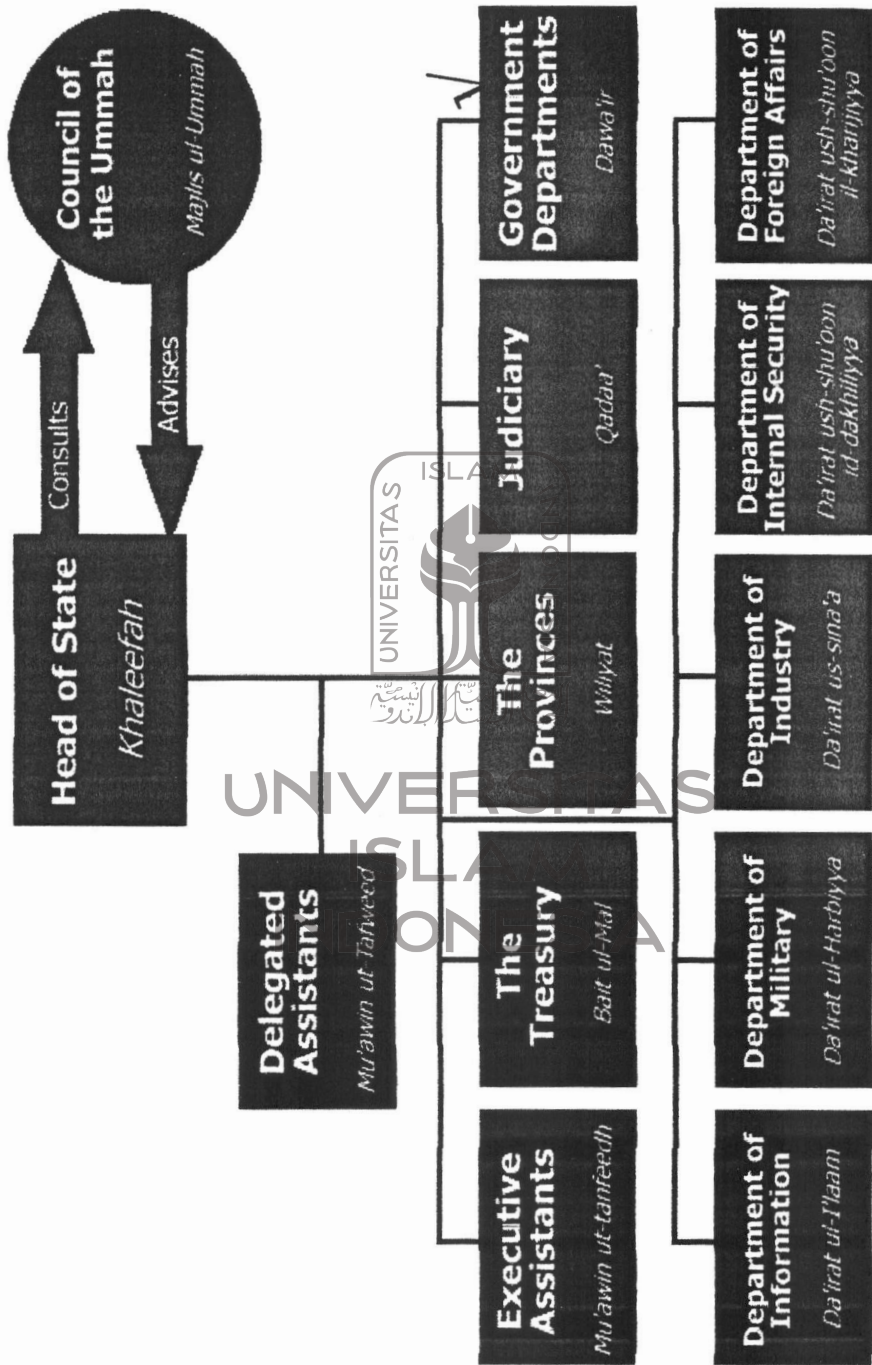
	<p>seluruh dunia.</p> <p>Umumny disari bahwa Fase II ini merupakan ambang malapetaka internasional, dan politisi serta ekonom mencari-cari cara untuk merestorasi stabilitas dan kebebasan seperti dulu, saat baku emas klasik diterapkan.</p>
<p>III. Baku Tukar Emas – Inggris dan AS (1926-1931)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ada upaya untuk kembali ke jaman keemasan (baku emas klasik). - Inggris mengambil langkah nekad dengan keputusannya untuk kembali pada emas dalam nilai perbandingan lama, \$4.86 yang mana seharusnya ditetapkan \$3.50 karena dampak inflasi (terdepresiasi). Hal ini dilakukan dengan alasan untuk menjaga prestis sebagai pusat keuangan dunia. - Kombinasi antara inflasi dan keputusan untuk menggunakan nilai tukar lama, membuat ekspor Inggris mengalami depresi di sepanjang tahun 1920-an, akibatnya pengangguran meningkat pesat dalam periode tersebut, sementara hampir seluruh dunia mengalami boom perekonomian. - Dolar dan poundsterling menjadi dua “mata uang kunci”.
<p>IV. Fluktuasi Mata Uang Fiat (1931-1945)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dunia pada saat ini kembali mengalami kekacauan moneter akibat perang dunia I. bedanya, kini harapan untuk merestorasi (mengembalikan) ke baku emas klasik tampaknya semakin kecil. Tataanan ekonomi internasional telah mengalami disintegrasi menjadi kekacauan nilai tukar yang bebas mengambang, devaluasi yang berkompetisi, pengendalian pertukaran mata uang, dan kendala perdagangan; perang ekonomi dan moneter internasional terjadi antara mata uang-mata uang dan blok-blok mata uang. - Perdagangan dan investasi internasional dapat dikatakan telah macet total; perdagangan yang dilakukan melalui kesepakatan barter antarpemerintah saling berkompetisi dan berkonflik satu sama lain. - Semua fakta di ataslah yang menjadi penyebab utama Perang Dunia II, sebagaimana yang dikatakan Sekretaris Negara Cordell Hull.
<p>V. Bretton Woods dan Baku Tukar Emas Baru - Amerika Serikat (1945-1968)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Diadakannya sebuah konferensi moneter Internasional di Bretton Woods, New Hampshire, pertengahan tahun 1944 dan diratifikasi oleh Kongres pada bulan Juli 1945. - Sistem ini hanya merupakan pengulangan inflasif dari baku tukar emas tahun 1920-an. - Pada hakikatnya, sistem baru ini serupa dengan baku tukar emas tahun 1920-an. Bedanya, dalam sistem baru ini dolar AS menjadi satu-satunya mata uang kunci dan secara paksa menggantikan poundsterling Inggris sebagai mata uang kunci. - Perbedaan lainnya adalah apabila di tahun 1920-an penduduk dan pihak swasta AS tidak diperkenankan sama sekali untuk menarik dolar dalam bentuk emas. Dalam sistem baru ini, dolar dapat ditarik dalam bentuk emas hanya oleh pemerintah-pemerintah Asing dan bank-bank sentral mereka. - Dalam sistem baru ini, Dolar AS diletakkan di atas Emas. Sementara mata uang domestik Negara-negara lain secara terpaksa meletakkan Dolar di atas mata uang nasional mereka. Berkuasanya dolar ini dapat terjadi dikarenakan stok emas yang dimiliki oleh AS yang begitu besar, yakni sebesar US\$ 25 Miliar. - Pada masa ini, AS dengan kekuasaan yang dimilikinya menjalankan kebijakan inflasif (<i>mencetak Dolar</i>) besar-besaran sebagai <i>dana pinjaman</i> kepada Negara-negara lain. Sampai pada suatu saat jumlah dolar (yang tidak diinginkan) yang beredar di Eropa mencapai angka US\$ 80 Milyar, inilah yang dikenal dengan sebutan <i>Eurodollars</i>. - Dengan semakin melimpahnya dolar yang beredar, Negara-negara lain menyadari akan bahaya yang akan ditimbulkannya dengan ditindaklanjuti mengambil kebijakan menukarkan dolar yang mereka miliki dengan emas yang ada pada AS. Hal ini menyebabkan stok emas yang ada di AS anjlok menjadi US\$ 9 Milyar.

	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menghentikan penarikan ini, pemerintah AS secara politis menekan pemerintahan Eropa dan negara-negara lain. - Sebagai akibat dari itu semua, sistem ini semakin cepat mengalami keruntuhan pada tahun 1968.
VI. Runtuhnya Bretton Woods (1968-1971)	<ul style="list-style-type: none"> - Akibat penumpukan dolar di luar negeri sementara emas mengalir keluar, AS mengalami kesulitan mempertahankan harga emasnya pada rasion \$35 per ons di pasar-pasar bebas emas di London dan Zurich. - Seiring dengan kenaikan inflasi, depresiasi dolar, dan defisit neraca pembayaran (<i>balance of payment</i>) AS, orang-orang Eropa dan individu-individu swasta mulai meningkatkan penjualan dolar mereka ke dalam emas. - Untuk menjaga emas tetap senilai \$35 per ons, pemerintah AS terpaksa membocorkan stok emasnya untuk ikut menopang harga \$35 di London dan Zurich. - Krisis kepercayaan terhadap dolar di pasar emas memaksa AS melakukan perubahan fundamental terhadap sistem moneterinya di bulan maret 1968. Gagasannya adalah menyetop gangguan yang berasal dari pasar bebas emas terhadap aturan-aturan Bretton Woods. Maka lahirlah kemudian yang disebut "pasar emas berlapis dua (campuran)". Tujuannya adalah untuk merontokkan harga emas. Emas harus diinsulasi (dihambat atau ditahan) secara ketat dari pengaruh tindakan moneter riil oleh bank-bank sentral dan pemerintahan dunia. - Seiring dengan hal itu, AS mendesak peluncuran (penerbitan) cadangan uang kertas dunia dalam jenis baru, yaitu <i>Special Drawing Rights (SDRs)</i>, yang diharapkan (AS) sepenuhnya dapat menggantikan dolar dan berfungsi sebagai mata uang kertas baru dunia yang akan dikeluarkan di masa depan oleh Bank Cadangan Dunia. Apabila hal ini terjadi, AS akan dapat melakukan inflasi tanpa kendali untuk selamanya, dalam kolaborasi dengan pemerintah-pemerintah lain di dunia (yang hanya akan dibatasi oleh inflasi global besar-besaran dan keruntuhan mata uang kertas dunia tersebut). - Para ekonom meyakini dengan kebijakan yang diambil oleh AS akan mengakibatkan harga emas anjlok. - Namun, jauh api dari panggung, yang terjadi justru adalah sebaliknya. Harga emas semakin melambung tinggi. Harga emas di pasar bebas tidak pernah lebih rendah dari \$35 dan secara mantap terus berada di kisaran \$35, dan di awal tahun 1973 merangkak naik menjadi \$125 per ons. - Strategi amerika ini (untuk melemahkan harga emas) hanya mampu bertahan beberapa tahun. Disisi lain, defisit dan inflasi AS terus terjadi. Eurodollars terakumulasi cepat (semakin menggelembung), emas pun mengalir keluar dari AS, dan harga emas di pasar bebas menunjukkan betapa telah terjadi akselerasi kehilangan kepercayaan dunia terhadap dolar.
VII. Akhir Bretton Woods: Fluktuasi Mata Uang Fiat (Agustus-Desember 1971)	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggal 15 Agustus 1971, tepat ketika Presiden Nixon memaksakan kebijakan pembekuan harga upah (dalam upaya sia-sia untuk mengendalikan inflasi), Nixon juga membawa sistem Bretton Woods pascaperang kepada kehancuran. - Hal itu terjadi karena Bank-bank sentral di Eropa mengancam akan menarik semua stok dolar mereka dalam bentuk emas, dan direspon Nixon dengan memutuskan keluar dari baku emas secara total. - Dengan demikian, untuk pertamakalinya dalam sejarah Amerika, dolar benar-benar menjadi uang fiat (tanpa dukungan emas). - Akhirnya, "bergentayanganlah hantu yang menakutkan" blok-blok mata uang, devaluasi yang berkompetisi, perang ekonomi, dan lumpuhnya perdagangan dan investasi internasional, termasuk depresi seluruh dunia yang menyusul kemudian.
VIII. Perjanjian Smithsonian	<ul style="list-style-type: none"> - Pada fase ini, AS kembali membuat sebuah siasat liciknya. Melalui Presidennya, Nixon, AS membawa dunia ke dalam perjanjian Smithsonian

(Desember 1971- Februari 1973)	<p>pada tanggal 18 Desember, 1971. Ini adalah sebuah upaya AS mengembalikan tatanan moneter Internasional tanpa kaitan dengan emas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Namun, perjanjian yang dibanggakan oleh Nixon yang disebutnya sebagai kesepatan moneter terbesar dalam sejarah dunia ini pada kenyataannya lebih lemas dan lebih buruk daripada baku tukar emas di tahun 1920-an ataupun sistem Bretton Woods. - AS menyadari bahwa, nilai resmi dolar sudah terlalu <i>overvalue</i>. Hingga akhirnya AS mendevaluasikan nilai dolarnya menjadi \$38 per ons emas. Hal ini sangat kontradiktif dengan apa yang selama ini mereka teriakkan bahwa, AS akan tetap menjadi nilai dolarnya dalam kisaran \$35 selamanya. - Pasokan <i>Eurodollars</i> semakin menggelembung, inflasi yang berkelanjutan, serta penghapusan dukungan emas, membuat harga emas di pasar bebas meningkat pesat hingga \$215 per ons emas. - Pada bulan Februari – Maret 1973, nilai dolar semakin jatuh disebabkan dinilai terlalu tingginya dolar sementara uang keras negara-negara Eropa dan Jepang terlalu rendah. - Setahun lebih kemudian, sistem nilai tukar tetap Smithsonian (tanpa dukungan emas pun) hancur berkeping-keping dihempas batu realitas ekonomi.
IX. Fluktuasi Mata Uang Fiat (Maret 1973- hingga sekarang)	<ul style="list-style-type: none"> - Semenjak AS benar-benar keluar dari emas di bulan Agustus 1971 dan menerapkan sistem fiat berfluktuasi ala Friedman pada bulan Maret 1973, AS dan dunia telah mengalami inflasi berkelanjutan yang paling intens di masa damai di sepanjang sejarah dunia. - Muncul keinginan untuk kembali pada sistem uang internasional dengan nilai tukar tetap. Sayangnya, keinginan ini telah melupakan baku emas klasik. - Di masa depan, prediksi terhadap dolar dan sistem moneter internasional sangat buram. Hingga dan kecuali jika kita kembali kepada baku emas klasik pada harga emas yang realistis, nasib sistem keuangan internasional akan terombang-ambing antara nilai tukar tetap atau nilai tukar fluktuatif (mengambang), yang masing-masing menjanjikan persoalan tanpa solusi, yang sama-sama berfungsi secara buruk, dan akhirnya akan mengalami disintegrasi. - Bahan bakar (yang dapat menyulut) bagi disintegrasi ini adalah inflasi yang berkelanjutan, akibat pasokan dolar dan juga harga-harga di AS yang tidak memperlihatkan tanda-tanda penurunan. - Prognosis (ramalan) ini hanya dapat diubah dengan mengubah sistem moneter AS dan dunia secara drastis: yaitu dengan kembali kepada uang komoditas (emas).

Sumber: Murray N. Rothbard, *What Has Government Done to Our Money?* (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?), hal. 82-102 dan dengan sedikit atau beberapa perubahan.

STRUKTUR KHILAFAH

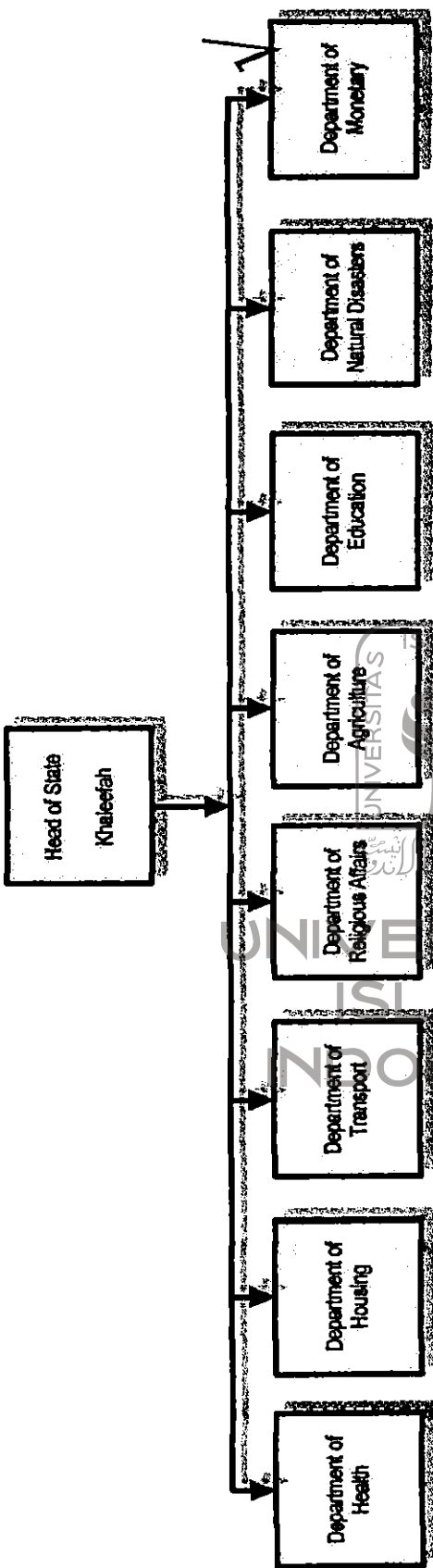


Source: *Ajhzat dowlat ul-Khilafah* (2006), *Hizb ut-Tahrir*

Sumber: <http://www.khilafah.com>

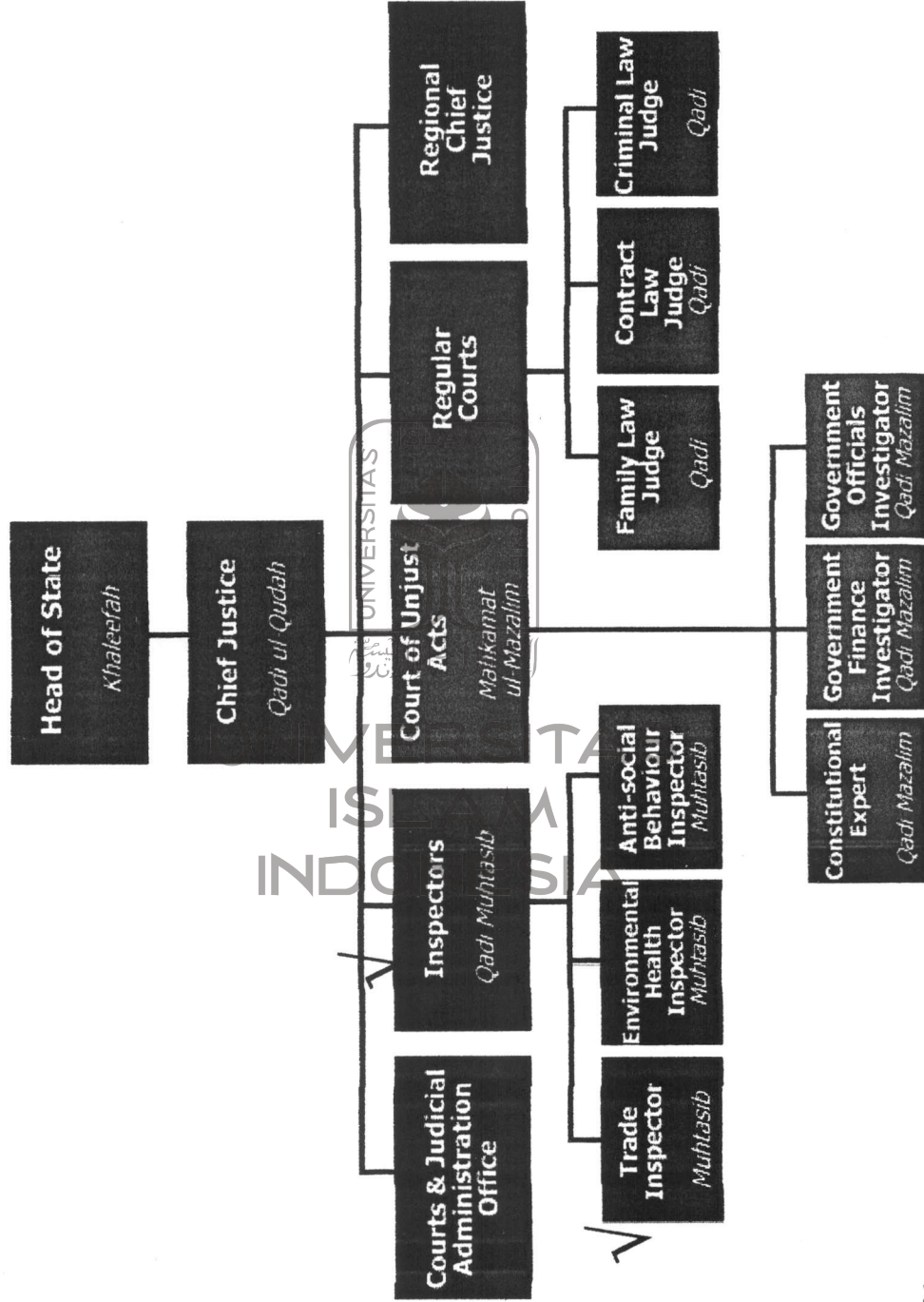
Catatan: Tanda ✓ menunjukkan struktur yang terkait dengan penjelasan penelitian ini.

GOVERNMENT DEPARTMENTS



Sumber: <http://www.khulafah.com>, dengan tambahan *Department of Monetary*.
Catatan: Tanda ✓ menunjukkan struktur yang terkait dengan penjelasan penelitian ini.

STRUKTUR QADI MUHTASIB



Sumber: <http://www.khilafah.com>

Catatan: Tanda ✓ menunjukkan struktur yang terkait dengan penjelasan penelitian ini.

**PETA PEMIKIRAN MONETER DAN PERSOALAN HARGA MENURUT
PARA ULAMA DAN EKONOM MUSLIM***

Nama Pemikir										
	Perihal	Abu Yusuf (731-798 M)	Abu Ubaid (150-224 H)	Al Ghazali (1058-1111 M)	Ibn Taimiyah (1263-1328 M)	Ibn Khaldun (1332-1406 M)	Al Maqrizi (1364-1442 M)	Umar Chapra (Kontemporer)	Masudul Alam Choudury (Kontemporer)	Hizbut Tahrir** (1950-Sekarang)
<i>Baitul Mal</i>		--	--	--	--	Mencetak mata uang				
<i>Jenis Mata Uang</i>		--	--	Dinar&Dirham, dan membolehkan fulus dengan syarat mendapat pengesahan dari Negara.	Dinar&Dirham, dan membolehkan fulus dan fulus	Menyarankan penggunaan emas&perak	Menyarankan penggunaan emas&perak. Namun tetap membolehkan penggunaan fulus sebagai alat tukar terhadap barang-barang yg tdk signifikan dan uk biaya kebutuhan Rt sehari-hari	Tdk mengharuskan emas&perak. Namun ia tetap melarang bunga	The gold-backed 100-percent reserve requirement monetary system	Emas dan Perak, dan membolehkan fiat money dengan syarat tetap dijamin oleh pemerintah dg emas&perak
<i>Fungsi Uang</i>			Standar nilai pertukaran, me	Uang adalah ibarat cermin,	Pengukur nilai&media	media penyimpanan				

			dia pertukaran,pe nyimpan nilai	standar ukuran harga dan unit hitungan, media penyimpan nilai	pertukaran nilai					
<i>Menimb un Uang</i>				Mengharamka n menimbun uang dan mengubah bentuknya					Haram	
<i>Kurs Mata Uang</i>									Bebas mengambang (dg aturan larangan spekulasi, bunga, penerapan dinar&dirham)	
<i>Pencetak an mata uang</i>					Melarang pemerintah mencetak uang (selain emas&perak)disertai keinginan uk mendapatka			Melarang pemerintah mencetak uang (selain emas&perak)d isertai keinginan uk mendapatkan		

								menyingkirkan uang yang baik)				
<i>Inflasi</i>	Harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi juga bergantung pd kekuatan penawaran						Harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran	Penyebab utama inflasi adalah uang terlampau banyak, Inflasi natural dan human error			Inflasi (fenomena kenaikan harga barang) adalah konsep fakta oleh karena itu sifatnya universal	
<i>Penetapan Harga oleh pemerintah</i>	Tdk membolehkan					Tidak membolehkan, n, terkecuali pada kondisi darurat					Tidak membolehkan	

*Sumber: Adiwarman A Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ; Ekonomi Makro Islami; Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer; Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer; Ahmad Hasan, Mata Uang Islami.

**Taqiyuddin an Nabhani, Abdul Qadim Zallum, Abdurrahman al Maliki, Muhammad Husain Abdullah

RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap	: M. Hatta, S.E
Nama Panggilan	: Hatta
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat / Tgl Lahir	: Tumbukan Banyu Negara, Banjarmasin, 3 Maret 1983
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Menikah (1 Istri)
Alamat	: Jl. Sengaji Hilir No. 87, RT. 08, Muara Teweh, Barito Utara, Kal-Teng Jl. Kaliurang KM. 13 Perum. Taman Harapan I, No. B6, Banjarsari Sleman, Yogyakarta
Telepon (Rumah)	: (0519) 22355 (0517) 51010
Telepon (HP)	: 081 227 050 119
Email	: m.hatta@jurnal-ekonomi.org



II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Muhammadiyah Muara Teweh : 1989 – 1995
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Muara Teweh : 1995 – 1998
3. SMK-Negeri 1 Muara Teweh : 1998 – 2001
4. Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Malang : 2001 – 2005
5. Program Pascasarjana Magister Studi Islam,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta : 2005 – 2009

III. PENDIDIKAN NON FORMAL

Kursus Teknisi Komputer & LAN di “NEC” Computer & Language Course, Malang, Jawa Timur.

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekjen Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang
2. Ketua Umum Lembaga Semi Otonom (LSO) Forum Pengkajian Ekonomi Syari’ah dan Dakwah Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang
3. Ketua SC Penerimaan Mahasiswa Baru (PEMABA), Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang

4. Mantan Anggota HMI di Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Malang
5. Anggota Forum Intelektual Muda Muslim (FIMM) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
6. Anggota Hizbut Tahrir Indonesia

V. TRAINING

1. Pelatihan Pasar Modal Stock Exchange Game di Surabaya Stock Exchange (Tanggal 5 – 7 Januari 2004)
2. Study Excursie Ke PT. HM. SAMPOERNA Tbk. SURABAYA dan PT. KUTAI TIMBER INDONESIA PROBOLINGGO (20 Desember 2004)
3. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Dakwah (LKMD) Se Jawa Timur di Universitas Negeri Malang (Tanggal 18 – 20 Juli 2003)
4. Training Standarisasi Pembinaan Manajerial Nasional di Universitas Muhammadiyah Gresik (Tanggal 20 – 22 Pebruari 2004)



Hormat Saya,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

M. Hatta, S.E